



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk meningkatkan performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, menjadi suatu kebutuhan bagi Pemimpin Daerah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

<b>A.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
-----------	--------------------------

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh *stakeholder*. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warningsystem* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk pengambilan keputusan stratejik agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat.

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat



dirumuskan, dan untuk indikator outcome merupakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Indikator kinerja *input* yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator *output* yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti orang, buku, desa, Kecamatan, kelompok, buah. Seperti juga pada indikator *output*, indikator kinerja *outcome* yang digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian, terdapat satu kesamaan dalam merumuskan indikator kinerja *outcome* maupun *output* ini, yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan urusannya.

<b>B</b>	<b>ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA</b>
----------	---

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standar Pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 85 %	Sangat berhasil
2	70 % s.d kurang dari 85 %	Berhasil
3	55 % s.d kurang dari 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui



alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki ruang lingkup yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan, maka segala pencapaian sasaran-sasaran RPJMD tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan urusan pilihan tersebut.

Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>1.</b>	<b>CAPAIAN INDIKATOR MAKRO</b>
-----------	--------------------------------

Pencapaian kinerja makro selama tahun 2014 merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo. Pencapaian kinerja menyeluruh ini menunjukkan, bahwa kinerja yang dicapai merupakan hasil kontribusi dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo sebagai hasil dari pelaksanaan seluruh program dan kegiatan selama tahun 2014, sehingga sulit untuk didistribusikan kepada satu atau beberapa program tertentu saja.

Indikator kinerja makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan menyeluruh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan adalah :

### **1.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat dari indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB disajikan dalam dua bentuk yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB masih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa, sehingga tidak terlalu akurat untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu digunakan PDRB ADHK yang telah menghilangkan inflasi sehingga bisa diperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi riil. Rincian dan perkembangan PDRB tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 dan Tabel 3.1.2 sebagai berikut:



**Tabel 3.1.1**  
**PDRB TAHUN 2014 KABUPATEN SIDOARJO**

NO	SEKTOR	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian	2.242.895,73	928.616,64
2	Pertambangan dan Penggalian	120.154,96	50.343,61
3	Industri Pengolahan	38.609.410,71	13.903.864,35
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.165.894,44	453.105,03
5	Konstruksi	874.181,12	321.975,09
6	Perdagangan	25.211.497,86	9.834.832,49
7	Angkutan dan Komunikasi	10.499.782,64	4.551.013,88
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.248.547,49	476.335,13
9	Jasa – Jasa	4.229.401,54	1.547.519,33
	TOTAL	<b>84.201.766,49</b>	<b>32.067.605,55</b>

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Tabel 3.1.2**  
**PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN SIDOARJO**  
**TAHUN 2011 s.d 2014**

Tahun	Indeks Perkembangan (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
2011	345,49%	161,28%
2012	394,21%	172,41%
2013	452,04%	184,69%
2014	664,26%	197,78%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

\*) Angka Sementara

Berdasarkan Tabel 3.1.1. diatas dapat diketahui bahwa PDRB tahun 2014 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Pada sektor industri pengolahan, keunggulan potensi sektor ini banyak ditopang oleh besarnya keberadaan Industri Rumah Tangga (IRT) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan membenahi infrastruktur.



Diharapkan dengan adanya pembenahan jalan-jalan alternatif dapat melancarkan transportasi yang akhirnya dapat menaikkan daya tarik Sidoarjo di mata investor.

## 1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Peningkatan kualitas hidup ini merupakan hasil akhir yang diharapkan dari perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Indeks ini merupakan standar yang ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development Programme) dalam mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) jenis indeks yang mengukur tingkat kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.

IPM Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 tercapai sebesar 78,14. Berdasarkan capaian tersebut Kabupaten Sidoarjo status pembangunan manusianya termasuk kategori menengah atas.

Untuk menilai perkembangan IPM ini akan disajikan perkembangan masing-masing indeks yang terkait. Pengukuran IPM ini dilakukan secara komprehensif.

Untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan yang telah dinikmati oleh masyarakat menggunakan Indeks kesehatan. Indeks ini diukur berdasarkan capaian usia harapan hidup masyarakat.

Usia harapan hidup masyarakat merupakan ukuran untuk menilai umur maksimal rata-rata masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan tolok ukur ini diasumsikan, bahwa semakin tinggi usia harapan hidup suatu wilayah, semakin baik pula pemenuhan pelayanan kesehatannya.

Usia harapan hidup masyarakat Sidoarjo tahun 2014 sebesar 70,99 tahun. Hal ini menunjukkan, bahwa program pelayanan kesehatan telah berjalan dengan baik, karena capaian indikator tersebut telah tercapai 99,97 % dari target RPJMD sampai dengan 71,01 tahun dan mendekati target **Nasional** sampai dengan 72,00 tahun serta pada masa yang akan datang masih



diperlukan kerja keras dari seluruh aparat khususnya dalam bidang kesehatan dan dapat diupayakan adanya kenaikan usia harapan hidup mengingat masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh UNDP yaitu 85 tahun.

Untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan dilakukan dengan mengukur indeks pendidikan. Indeks ini diukur melalui dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk.

Angka melek huruf dihitung berdasarkan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis. Pada tahun 2014, angka melek huruf di Kabupaten Sidoarjo tercapai sebesar 97,91% atau masih terdapat 2,09 % yang masih perlu dilakukan pengentasan dari buta huruf, capaian tersebut telah melebihi dari target RPJMD untuk pengurangan angka buta huruf pada usia 15 tahun keatas sampai dengan 10,09 % dan capaian angka tersebut juga melebihi dari target **Nasional** sebesar 4,18 %. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu berupaya untuk meningkatkan angka melek huruf dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait.

Rata-Rata lama sekolah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 adalah 10,23 tahun. Hal ini juga akan selalu diupayakan agar tidak terjadi Angka Putus Sekolah (APS) yang tinggi.

Peningkatan indeks pendidikan ini mengindikasikan telah berjalannya program pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dengan baik. Program tersebut diutamakan pada upaya untuk memberikan pelayanan secara luas kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan baik melalui sekolah maupun luar sekolah.

Sedangkan untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat, dilakukan dengan mengukur kemampuan daya beli (paritas daya beli) masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Paritas daya beli masyarakat, dihitung dari Angka kemampuan daya beli masyarakat. Nilai paritas daya beli masyarakat Kabupaten Sidoarjo tiap tahunnya selalu meningkat dimana pada tahun 2014 sebesar 742.890,00. Peningkatan ini menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat ditinjau dari kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan hidupnya mengalami



peningkatan dan capaian tersebut telah sesuai dengan target RPJMD sebesar 742.890,00, sehingga capaiannya 100% .

Dengan adanya perhitungan IPM yang setiap tahunnya selalu meningkat, maka mengindikasikan, bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di bidang kesejahteraan masyarakat telah berjalan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.

<b>2.</b>	<b>CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER MISI DAN SASARAN</b>
-----------	---

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sidoarjoberdasarkan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

<b>MISI 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global</b>
---

Untuk mencapai misi **meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global** ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran.

Hasil penilaian pencapaian sasaran misi ini pada tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Tujuan – Sasaran	Tingkat keberhasilan
Tujuan 1 : <i>Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM masyarakat Sidoarjo</i>		
Sasaran :		
1.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil sejahtera	Sangat Berhasil
5.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Sangat Berhasil
6.	Meningkatnya Minat Baca bagi Masyarakat utamanya bagi para pelajar	Sangat Berhasil
7.	Meningkatnya pelayanan Ketrasmigrasian	Kurang



Pencapaian ke 7 (tujuh) sasaran tersebut dilaksanakan melalui 7 (tujuh) urusan yaitu urusan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, perpustakaan dan urusan ketransmigrasian oleh satuan kerja Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, serta Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Uraian hasil pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. ***Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

#### **1.1.1 Rasio anak yang mengikuti pendidikan TK/RA**

Rasio anak yang mengikuti pendidikan TK/RA merupakan perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA dibagi jumlah anak usia 4 s.d 6 tahun. Pada tahun 2014, rasio tersebut mencapai 75,79%. Rasio ini diperoleh dari jumlah anak dalam jenjang TK/RA sebanyak 65.489 anak dibanding jumlah anak usia 4 s.d 6 tahun sebanyak 104.665 anak. Pada tahun 2013 dengan jumlah anak dalam jenjang TK/RA sebanyak 66.224 anak dari jumlah anak usia 4 s.d 6 tahun seluruhnya sebanyak 90.148 anak dengan prosentase 73,46%.

Tingginya rasio anak yang mengikuti pendidikan TK/RA dikarenakan:

- Orang tua/wali murid semakin menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini
- Akseibilitas satuan pendidikan untuk TK/RA terjangkau oleh masyarakat

#### **1.1.2 Persentase Angka Partisipasi Sekolah**

Angka partisipasi sekolah diukur dengan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), sebagai berikut:

##### **a. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

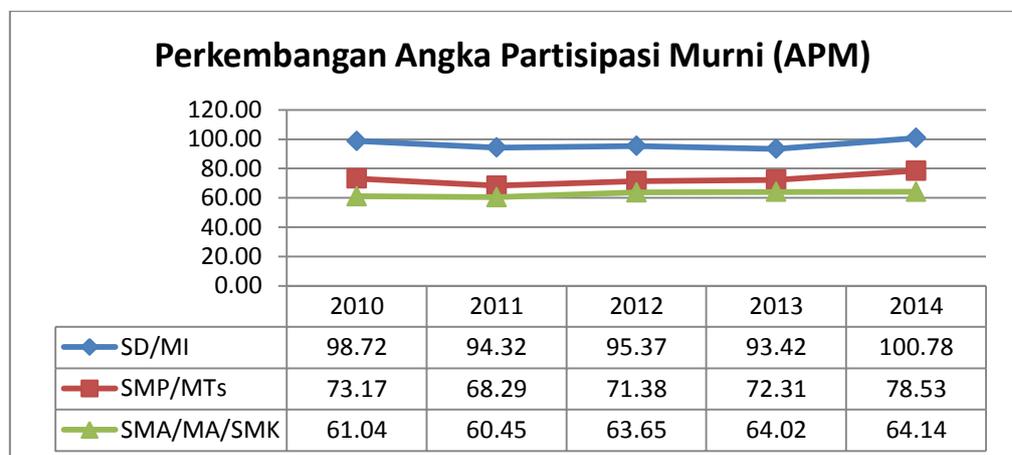


Target APM yang ditetapkan pada tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 95,90%, SMP/MTs sebesar 73,78% dan SMA/MA/SMK sebesar 65,90%. Target ini apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dimana pada saat itu untuk SD/MI sebesar 95,37%, SMP/MTs sebesar 71,34% dan SMA/MA/SMK sebesar 63,65%. Peningkatan target ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat .

Realisasi APM yang dicapai pada tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 100,78%, SMP/MTs sebesar 78,53% dan SMA/MA/SMK sebesar 64,14%. Capaian APM tersebut di atas untuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar, yaitu pada jenjang SD/MI, SMP/MTs apabila dibandingkan target Nasional untuk SD/MI sebesar 96,00% dan SMP/MTs sebesar 76,00%, maka capaiannya telah terealisasi melampaui target. Sedangkan realisasi APM yang dicapai pada tahun 2013 untuk SD/MI sebesar 93,42%, SMP/MTs sebesar 72,31% dan SMA/MA/SMK sebesar 64,02%.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) selama lima tahun terakhir pada masing-masing jenjang pendidikan terlihat pada grafik berikut:

**Grafik 3.1.2.1**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)**



Sumber Data: Dinas Pendidikan



Tabel 3.1.2.1

## Perbandingan Target dan Capaian APM Daerah dan Nasional

NO	Angka Partisipasi Murni (APM)	Target		Realisasi (%)	Keterangan
		RPJMD (%)	Nasional (%)		
1	SD/MI	98.99	96.00	100.78	Terlampauhi
2	SMP/MTs	73.57	76.00	78.53	Terlampauhi
3	SMA/MA/SMK	61.54	-	64.14	Terlampauhi

Sumber Data: Dinas Pendidikan

**b. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

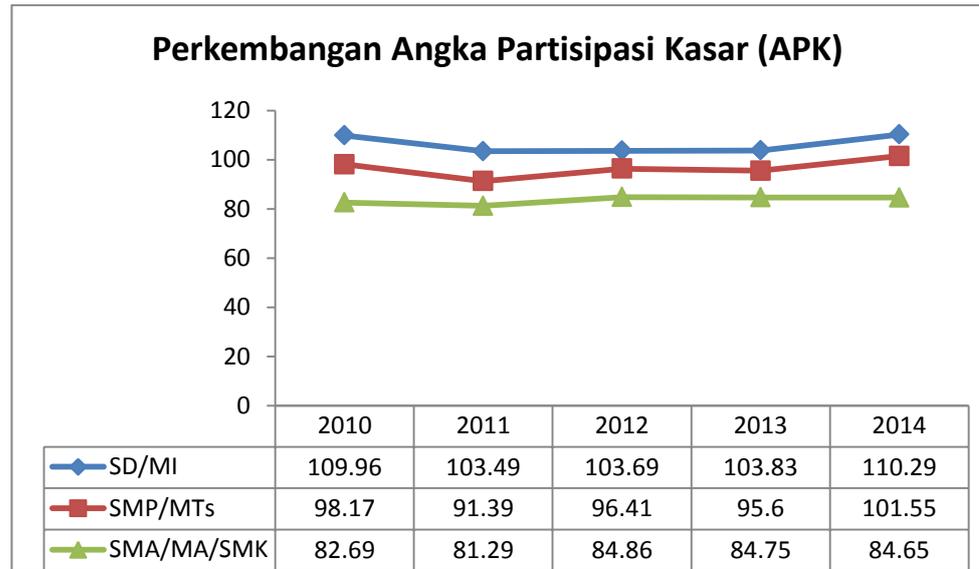
Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan antara jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut.

Target yang ditetapkan untuk APK tahun 2014, SD/MI sebesar 103,89%, SMP/MTs sebesar 97,27% dan SMA/MA/SMK sebesar 86,02%.

Sedangkan realisasi APK yang dicapai pada tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 110,29%, SMP/MTs sebesar 101,55% dan SMA/MA/SMK sebesar 84,65, Capaian APK tersebut di atas untuk jenjang SMA/MA/SMK apabila dibandingkan target Nasional sebesar 85,00%, maka capaiannya telah terealisasi melampaui target. Jika dibandingkan dengan Realisasi APK tahun 2013, SD/MI sebesar 103,83%, SMP/MTs sebesar 95,60% dan SMA/MA/SMK sebesar 84,75% maka terjadi penurunan pada jenjang SMA/MA/SMK. Hal tersebut disebabkan karena sebagian peserta didik jenjang SMA/MA/SMK memilih sekolah di luar wilayah Sidoarjo.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada masing-masing jenjang pendidikan selama tahun 2010 s.d 2014 sebagai berikut :

**Grafik 3.1.2.2**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)**



Sumber Data: Dinas Pendidikan

**Tabel 3.1.2.2**  
**Perbandingan Target dan Capaian APK Daerah dan Nasional**

NO	Angka Partisipasi Kasar (APM)	Target		Realisasi (%)	Keterangan
		RPJMD (%)	Nasional (%)		
1	SD/MI	110.30	-	110.29	-
2	SMP/MTs	98.45	-	101.55	-
3	SMA/MA/SMK	82.95	85,00	84.65	mendekati

Sumber Data: Dinas Pendidikan

### 1.1.3 Prosentase Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah angka (jumlah siswa) putus sekolah per 100 siswa pada setiap jenjang pendidikan.

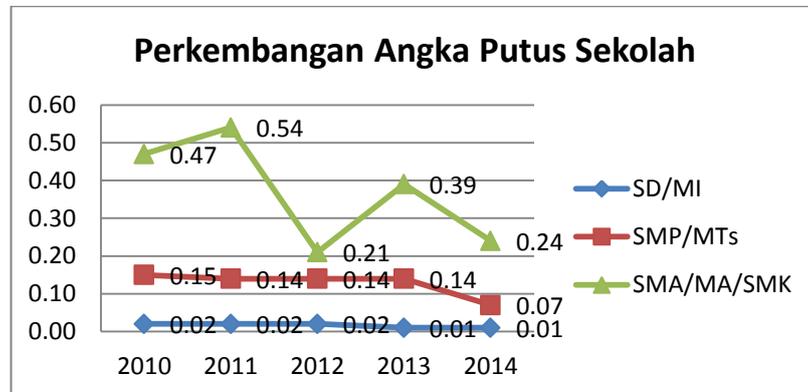
Target yang ditetapkan untuk APS tahun 2014 adalah untuk SD/MI sebesar 0,02%, SMP/MTs sebesar 0,13% dan SMA/MA/SMK sebesar 0,175%.

Realisasi APS pada tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 0,01%, SMP/MTs sebesar 0,07% dan SMA/MA/SMK sebesar 0,24%. Sedangkan realisasi tahun 2013 untuk SD/MI sebesar 0,01%, SMP/MTs sebesar 0,14% dan SMA/MA/SMK sebesar 0,39%.

Secara garis besar terjadi penurunan angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan, dan seluruhnya masih pada tingkat cukup baik karena **masih dibawah 0,50%**.

Perkembangan angka putus sekolah dapat dilihat dalam grafik berikut:

**Grafik 3.1.1.3**  
**Perkembangan Angka Putus Sekolah**



Sumber data : Dinas Pendidikan

#### 1.1.4 Prosentase Nilai rata-rata US dan UN

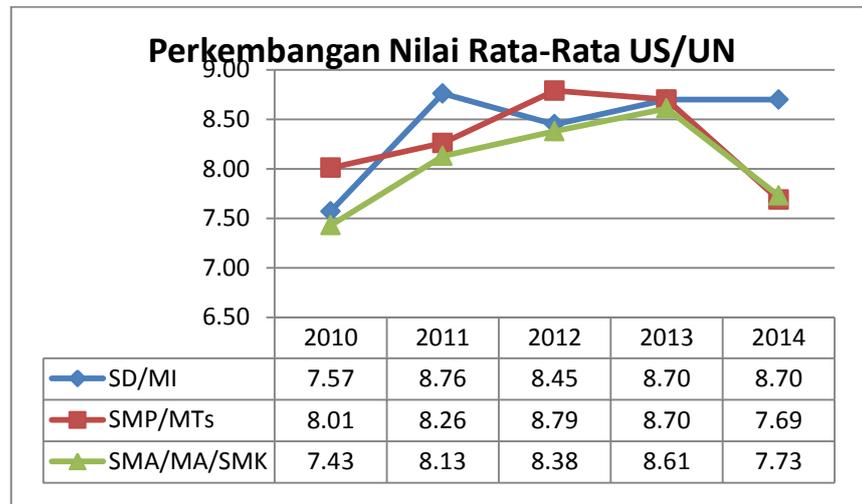
Nilai Ujian Sekolah (US), Ujian Nasional (UN) merupakan hasil akhir siswa yang merupakan salah satu gambaran pokok keberhasilan pendidikan yang dilakukan di setiap tingkatan pendidikan. Namun demikian nilai US/UN bukan merupakan ukuran mutlak keberhasilan pendidikan atau peningkatan kinerja pendidikan, melainkan masih banyak faktor yang mempengaruhi penilaian ini.

Target yang ditetapkan untuk Nilai rata-rata US dan UN tahun 2014 adalah untuk SD/MI sebesar 8,61, SMP/MTs sebesar 8,92 dan SMA/MA/SMK sebesar 8,51.

Realisasi nilai rata-rata US dan UN pada tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 8,70, SMP/MTs sebesar 7,69 dan SMA/MA/SMK sebesar 7,73.

Perkembangan nilai rata-rata US/UN selama lima tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :

**Grafik 3.1.1.4**  
**Perkembangan Nilai Rata-Rata US/UN**



Sumber Data : Dinas Pendidikan

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai rata – rata US/UN terjadi penurunan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, sebagaimana tercantum pada tabel disebabkan oleh peserta didik harus menyesuaikan dari 5 paket soal menjadi 20 paket soal.

### 1.1.5 Angka Melek Huruf Usia Diatas 15 Tahun

Pada tahun 2014, penduduk Sidoarjo usia di atas 15 tahun berjumlah 1.214.420 jiwa; sebanyak 1.214.093 orang atau sekitar 99,97 % telah melek huruf. Dengan demikian masih tersisa 0,03 % penduduk yang perlu diantaskan dari buta huruf khususnya penduduk yang berusia di atas usia produktif (lebih dari 45 tahun). Realisasi indikator tersebut telah melampaui target 2014 yang telah ditargetkan sampai dengan sebesar 10,09 % penduduk buta huruf. Dan juga telah melampaui target **Nasional** yang ditarget sampai dengan sebesar 4,18 % penduduk buta huruf.

**Tabel 3.1.5**  
**Perbandingan Target dan Capaian Angka Melek Huruf (AMH)**  
**Daerah dan Nasional**

NO	Indikator	Target		Realisasi	Keterangan
		RPJMD	Nasional		
1	AMH	10.09 %	4.18%	0.03 %	Terlampau

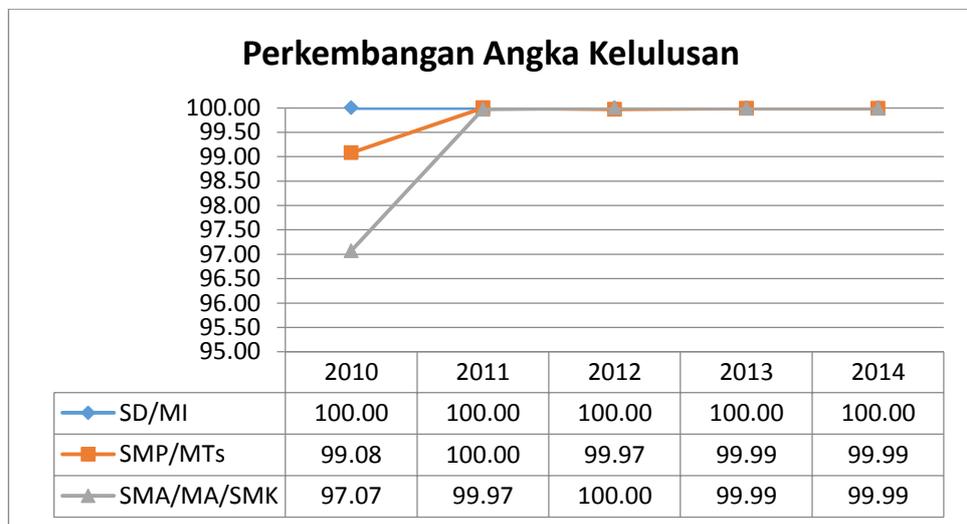
### 1.1.6 Prosentase angka kelulusan sekolah

Untuk menilai kualitas secara umum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten diukur dengan angka kelulusan. Kemampuan sekolah untuk meluluskan anak didiknya akan berbanding lurus dengan kualitas tersebut. Target yang ditetapkan untuk angka kelulusan tahun 2014 adalah untuk SD/MI sebesar 100% SMP/MTs sebesar 100% sedangkan SMA/MA/SMK sebesar 100%.

Realisasi Angka kelulusan sekolah pada tahun 2014 adalah untuk SD/MI sebesar 100%, SMP/MTs sebesar 99,99%, sedangkan SMA/MA/SMK sebesar 99,99%, angka kelulusan pada semua jenjang dapat dikatakan cukup baik.

Perkembangan Angka Kelulusanselama lima tahun, sebagaimana tergambar dalam grafis berikut.

**Grafik 3.1.6**  
**Perkembangan Angka Kelulusan**



Sumber Data : Dinas Pendidikan

### 1.1.7 Rasio ideal prasarana dan sarana pendidikan terhadap jumlah murid.

Selain ketersediaan guru berkualitas dan berkeahlian yang cukup terpenuhi, ketersediaan sarana yang layak merupakan modal dasar agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, sehingga keberadaannya harus senantiasa ditingkatkan. Indikator kinerja yang digunakan adalah :



**a. Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid**

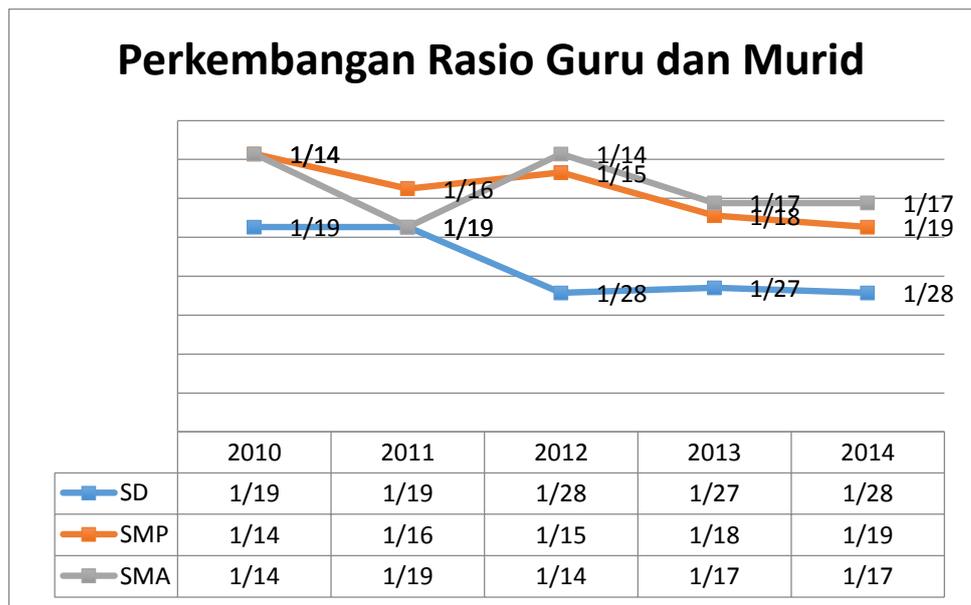
Rasio ini dapat dihitung dari jumlah guru dibanding dengan jumlah murid. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pasal 17 dinyatakan bahwa Ratio minimal jumlah guru terhadap murid untuk jenjang SD adalah 1:20, MI 1:15, SMP 1:20, MTs 1:15, SMA 1:20, MA 1:15, dan SMK 1:15.

Realisasi tahun 2014 untuk rasio ini adalah pada jenjang SD sebesar 1:28, MI sebesar 1:22 SMP sebesar 1:19 MTs sebesar 1:18 sedangkan SMA sebesar 1:17 MA sebesar 1:14 SMK sebesar 1:14.

Dari perbandingan Rasio Guru Murid, maka jenjang SD/MI masih kekurangan guru dan untuk jenjang SMP/MTS, SMA, MA dan SMK sudah terpenuhi.

Perkembangan rasio jumlah guru dan murid pada masing-masing jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Grafik 3.1.7.1**  
**Perkembangan Rasio Guru dan Murid**



Sumber Data : Dinas Pendidikan

**b. Rasio jumlah kelas terhadap murid**

Rasio ini dapat dihitung dari jumlah kelas dibanding dengan jumlah murid. Standar nasional berdasarkan standar ideal indikator

pemerataan pendidikan yang ditetapkan melalui Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar proses satuan pendidikan dasar dan menengah adalah SD/MI sebesar 1:28, SMP/MTs sebesar 1:32 dan SMA/MA/SMK 1:32.

Target yang ditetapkan untuk rasio jumlah kelas terhadap murid tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 1:28 SMP/MTs sebesar 1:28 sedangkan SMA/MA/SMK sebesar 1:32.

Realisasi tahun 2014 atas rasio ini adalah untuk SD/MI sebesar 1:29, SMP/MTs sebesar 1:33, sedangkan SMA/MA/SMK sebesar 1:36.

Perkembangan jumlah murid dan jumlah kelas pada masing-masing jenjang pendidikan tahun 2010 sampai dengan 2014 terlihat pada tabel ilustrasi ini :

**Grafik 3.1.7.2**

**Perkembangan Rasio Jumlah Kelas terhadap Murid**



Sumber Data : Dinas Pendidikan

**c. Kondisi Bangunan Sekolah (ruang kelas)**

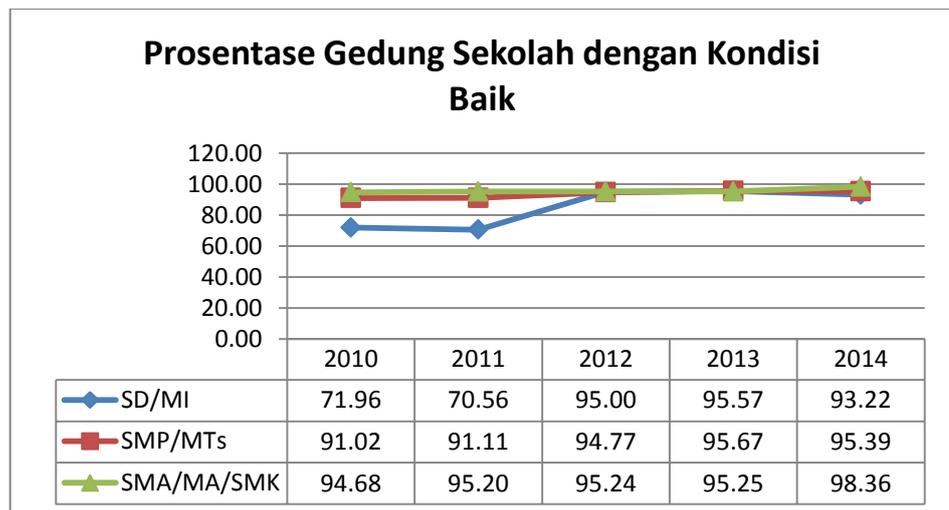
Untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan seluruh stakeholder yang ada perlu menjamin ketersediaan tempat belajar yang memadai.

Target yang ditetapkan dalam tahun 2014 untuk bangunan sekolah dalam kondisi baik adalah untuk SD/MI sebesar 90,46%, SMP/MTs sebesar 88,48% sedangkan SMA/MA/SMK sebesar 90,46%.

Realisasi tahun 2014 untuk bangunan sekolah dalam kondisi baik adalah untuk SD/MI sebesar 93,22%, SMP/MTs sebesar 95,39% sedangkan SMA/MA/SMK sebesar 98,36%.

Perkembangan kondisi bangunan sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan untuk tahun 2010 sampai dengan 2014 terlihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.1.7.3**  
**Prosentase Gedung Sekolah dengan Kondisi Baik**



Sumber Data : Dinas Pendidikan

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa gedung sekolah dalam kondisi baik untuk seluruh jenjang SD/MI menurun artinya terjadi penurunan kualitas bangunan sekolah, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK meningkat.

**Tabel 3.1.7.3**  
**Jumlah Kondisi Gedung**

No.	Jenjang/Kondisi	Tahun	
		2013	2014
1.	<b>SD/MI</b>		
	Baik	6.026	6.076
	Rusak Ringan/Sedang	69	125
	Rusak Berat	189	317
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.284</b>	<b>6.518</b>
2.	<b>SMP/MTs</b>		
	Baik	2.503	2547
	Rusak Ringan/Sedang	47	57
	Rusak Berat	56	66
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.606</b>	<b>2.650</b>



3.	<b>SMA/MA/SMK</b>		
	Baik	1.797	1854
	Rusak Ringan/Sedang	58	25
	Rusak Berat	21	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.876</b>	<b>1.885</b>

Sasaran 2. ***Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

### **1.2.1 Angka kematian bayi**

Untuk menilai hasil dari pelayanan kesehatan terhadap bayi dan anak balita dilakukan melalui beberapa standar pelayanan kepada bayi dan anak balita.

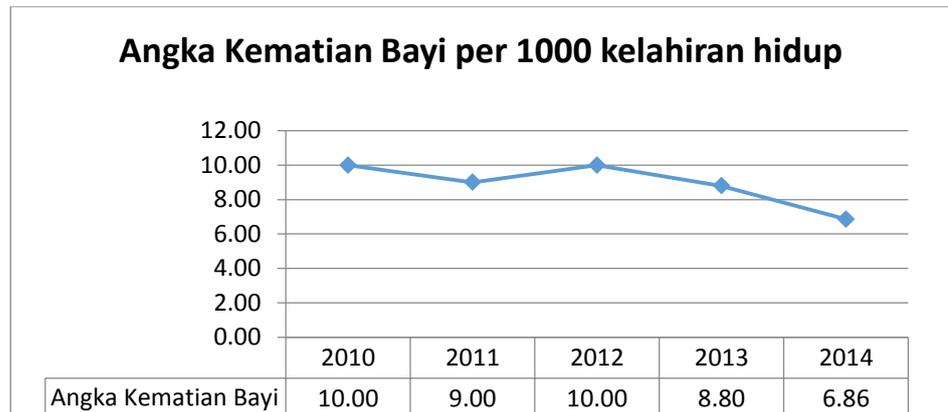
Angka kematian bayi yang ditargetkan tahun 2014 adalah sebesar <13 per 1.000 kelahiran hidup.

Realisasi angka kematian bayi pada tahun 2014 adalah sebesar 6,86 per 1.000 kelahiran hidup, menurun dari kejadian tahun 2013 sebesar 8,80 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan angka kematian bayi dikarenakan ketrampilan dan pengetahuan tentang tata laksana penanganan gawat darurat bayi sudah cukup optimal selain juga karena kesadaran para ibu hamil untuk selalu memeriksakan kandungannya pada bidan Puskesmas setempat dan atau pada fasilitas kesehatan ibu dan anak lainnya, sehingga kesehatan ibu dan anak dalam kandungan selalu terjaga dan lahirpun dalam keadaan baik dan selamat baik ibu maupun anak yang dilahirkannya.

Kematian bayi khususnya masa neonatal disebabkan oleh BBLR (Berat Bayi lahir Rendah); Keadaan ini terjadi karena beberapa kemungkinan antara lain dari faktor ibu dan janin itu sendiri, yang akhirnya menghambat pertumbuhan hasil konsepsi dan atau merangsang terjadinya persalinan sebelum waktunya.

Perkembangan angka kematian bayi sampai dengan 2014 terlihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.2.1**  
**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**



Sumber data : Dinas Kesehatan

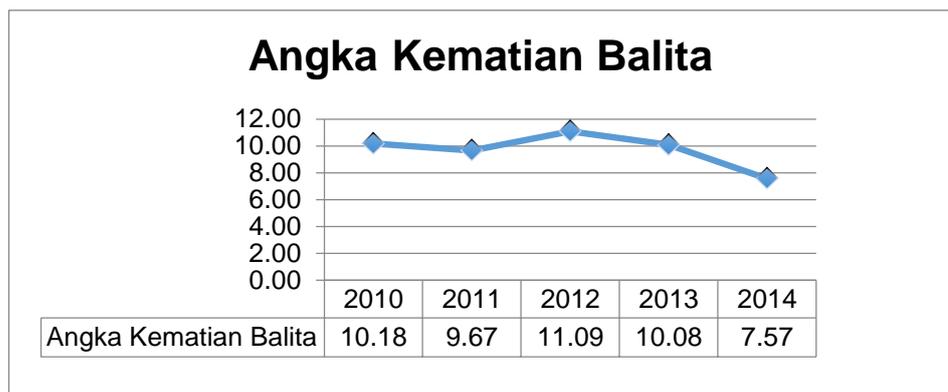
Beberapa Upaya yang dilakukan dalam penurunan angka kematian bayi adalah:

- ✓ Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen BBLR, asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
- ✓ Adanya rujukan dini terencana;
- ✓ Melaksanakan skill assesment pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan

### 1.2.2 Angka Kematian Anak Balita

Angka Nasional untuk angka kematian anak balita sebesar < 46 per 1.000 kelahiran hidup. Perkembangan angka kematian anak balita di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2014 terlihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.2.2**  
**Angka Kematian Balita**



Sumber data: Dinas Kesehatan



Realisasi angka kematian balita pada tahun 2014 adalah sebesar 7,57 per 1000 kelahiran hidup menurun dari realisasi tahun 2013 yang sebesar 10,08 per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian Balita seperti tersebut diatas sangat baik apabila dibandingkan dengan target RPJMD dan atau target Indonesia Sehat 2015 sebesar < 46 per 1000 kelahiran hidup.

Kematian Balita terbanyak karena Gastro Enteritis Acute (diare).

Menurunnya angka kematian balita pada tahun 2014 disebabkan antara lain karena meningkatnya pelaksanaan PHBS di masyarakat serta upaya deteksi tumbang pelaksanaan pemantapan ketrampilan manajemen terpadu balita sakit di fasilitas pelayanan kesehatan.

### **1.2.3 Angka kematian ibu**

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Target angka kematian ibu tahun 2014 sebesar < 89 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu tahun 2014 sebesar 80,02 per 100.000 kelahiran hidup, Angka ini meningkat cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercapai sebesar 72,82 per 100.000 kelahiran hidup. Peningkatan ini dikarenakan 4 Terlambat yaitu

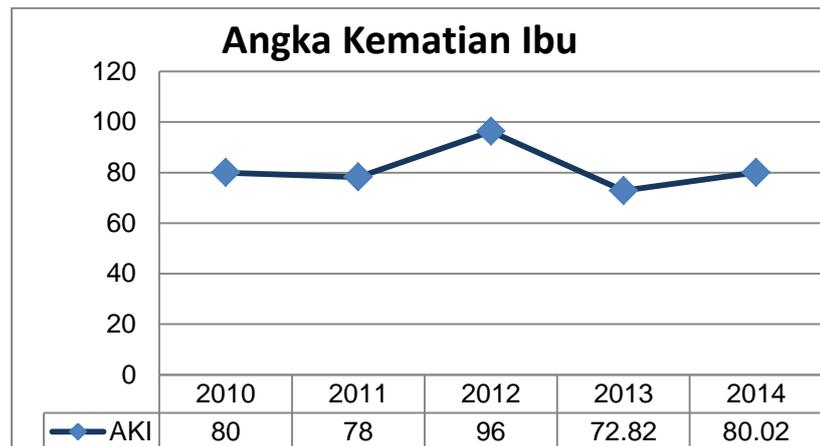
- Terlambat mendeteksi dan ambil keputusan
- Terlambat melakukan rujukan
- Terlambat mendapat penanganan di tempat rujukan

Kasus kematian ibu terbanyak pada tahun 2014 karena :

- Preeklamsia sebesar 42,46%
- Perdarahan sebesar 25%
- Lainnya karena infeksi, jantung emboli, HIV, Tb, Hepatitis sebesar 32,14%

Perkembangan angka kematian ibu sampai dengan tahun 2014 terlihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.2.3**  
**Angka Kematian Ibu**



Sumber data : Dinas Kesehatan

Upaya – upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu yaitu :

- Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (ANC terpadu)
- Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan dalam APN (Asuhan Persalinan Normal), kelas ibu
- Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu hamil guna memantau kesehatan ibu hamil
- Refreshing deteksi risti oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll)
- Optimalisasi Desa dengan P4K (perencanaan persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K.
- Melakukan skill asseement pada gawat darurat maternal dengan sasaran tenaga kesehatan
- Optimalisasi system rujukan : sms gateway, SIJARIEMAS, termasuk rujukan didni terencana
- Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah

#### 1.2.4 Angka Morbiditas

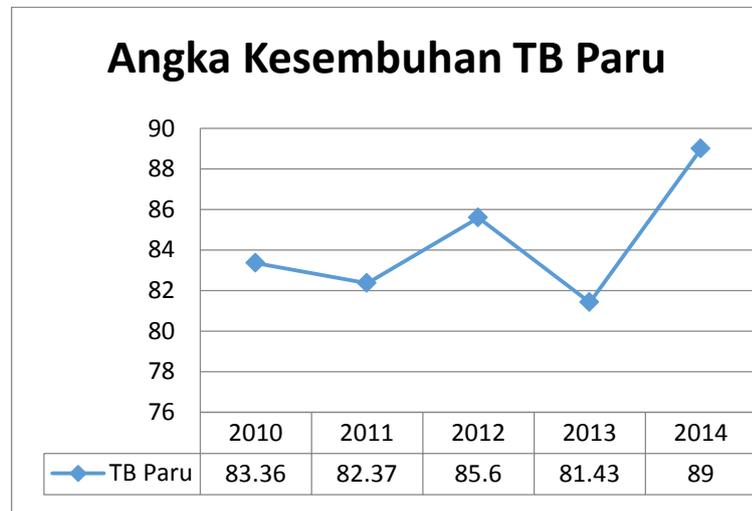
Untuk menilai pelayanan terhadap penanggulangan penyakit menular maka perlu diukur angka kesakitan beberapa penyakit yang potensial

terjadi. Penyakit tersebut adalah TB Paru, Demam Berdarah Dengue dan AFP pada anak < 15 tahun.

**a. Angka Kesembuhan TB Paru**

Perkembangan angka kesembuhan TB paru sampai dengan tahun 2014 terlihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.2.4.1**  
**Angka Kesembuhan TB Paru**



*Sumber data: Dinas Kesehatan*

Target angka kesembuhan TB Paru tahun 2014 adalah sebesar >85%.

Angka kesembuhan TB Paru (cure rate) selama tahun 2014 tercapai sebesar 89,00%. Realisasi ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2013 yang tercapai 81,43%. Jika dilihat dari angka kesuksesan (Success rate) TB Paru yaitu persentase penderita TB Paru yang telah selesai pengobatan, sudah mencapai 103,6%. Angka kesembuhan dapat dicapai apabila penderita yang sudah menyelesaikan pengobatan melaksanakan pemeriksaan dahak/sputum pada 1 bulan sebelum akhir pengobatan dan pada akhir pengobatan sebagai dasar evaluasi.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka kesembuhan TB Paru, antara lain :

1. Ketersediaan dan pemberian obat yang adekuat;



2. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku penderita terhadap program strategi DOTS;
3. Meningkatkan dukungan dan pengawasan keluarga / kader PMO;
4. Pemberian PMT bagi penderita TB secara gratis;
5. Faktor keluarga meliputi dukungan dan pengawasan, terhadap program;
6. Pengobatan TB secara gratis baik di sarana pelayanan tingkat dasar sampai lanjutan;
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi penanganan TB paru secara berkala;

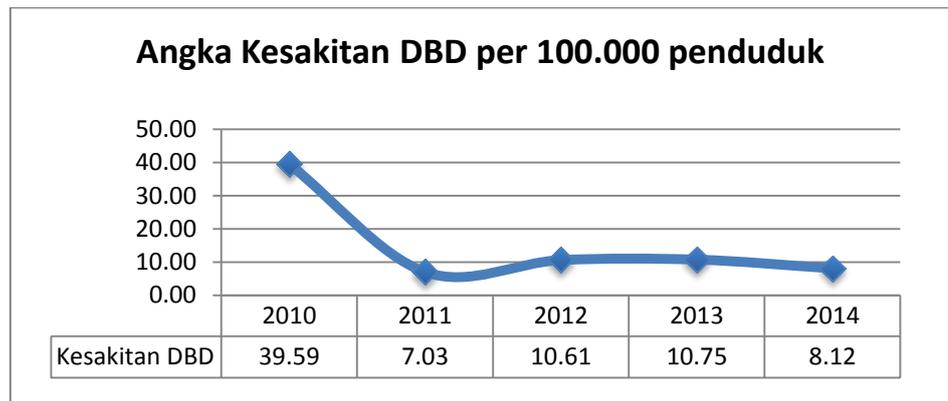
**b. Angka Kesakitan DBD**

Target angka kesakitan DBD tahun 2014 adalah sebesar < 52 per 100.000 penduduk.

Perkembangan angka kesakitan DBD sampai dengan tahun 2014 terlihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.2.4.2**

**Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk**



Sumber data: Dinas Kesehatan

Angka kesakitan DBD Kabupaten Sidoarjo berfluktuasi. Angka kesakitan DBD pada tahun 2014 sebesar 8,12 per 100.000 penduduk, menurun jika dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 10,75 per



100.000 penduduk, namun demikian angka tersebut sudah sangat jauh atau sangat berhasil melampaui dari target yang ditetapkan.

Beberapa Penyebab mengapa kasus DBD tetap ada karena :

- Perantara Nyamuk Aedes Aegypti masih ada
- Pemahaman tentang PSN belum sepenuhnya benar
- Pelaksanaan PSN belum serentak dan berkesinambungan
- Persepsi Masyarakat untuk memutuskan mata rantai penularan masih dominan dengan cara pengasapan.

Kabupaten Sidoarjo punya potensi sebagai wilayah endemis DBD dimana tingkat penularan DBD sangat tinggi, yang dipengaruhi antara lain curah hujan dan mobilitas penduduk yang tinggi, disertai masalah kebersihan lingkungan.

Namun demikian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cukup efektif untuk mencegah penularan DBD, sehingga penyebarannya dapat ditekan serendah mungkin. Upaya yang telah dilakukan pemerintah kabupaten antara lain :

- Mengkoordinasi juru pemantau jentik (Jumantik) untuk melaksanakan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB)
- Memotivasi tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat di sekitarnya melakukan gerakan 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur serta Mencegah Gigitan Nyamuk)
- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang DBD sehingga masyarakat dapat mencegah secara dini DBD serta meningkatkan intensitas kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN
- Penanggulangan focus penderita DBD melalui fogging (penyemprotan)
- Meningkatkan kerjasama lintas sektor di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

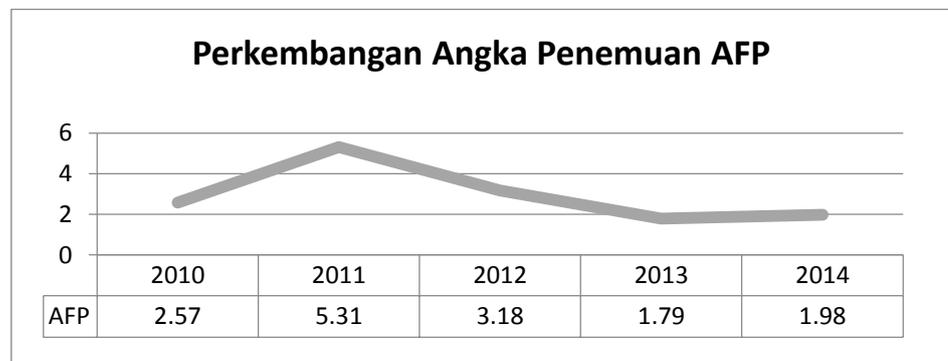
**c. Angka Penemuan AFP (*Acute Flaccid Paralysis* = Lumpuh Layuh Mendadak)**

Target angka penemuan AFP (*Acute Flaccid Paralysis* = Lumpuh Layuh Mendadak) tahun 2014 adalah sebesar  $\geq 2$  per 100.000 penduduk usia < 15 tahun. AFP rate tahun 2014 tercapai sebesar 1,98 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun dan setelah dilakukan cek laboratorium semuanya bukan kasus polio. Penurunan capaian AFP Rate ini dimungkinkan karena memang tidak ada lagi kasus AFP di masyarakat, diharapkan dengan keadaan ini bisa membuktikan bahwa eradikasi polio di Sidoarjo sudah berhasil.

Perkembangan angka kesakitan AFP sampai dengan tahun 2014 terlihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.2.4.3**

**Perkembangan Angka Penemuan AFP**



*Sumber data: Dinas Kesehatan*

Kegiatan surveilans epidemiologi terhadap kasus AFP pada kelompok umur <15 tahun terus dilaksanakan. Upaya ini sebagai pencegahan dan mencari kemungkinan masih adanya virus polio liar yang berkembang di masyarakat melalui pemeriksaan spesimen tinja penderita AFP yang ditemukan

Hambatan dalam penanganan kasus AFP selama ini antara lain kurangnya dukungan lintas sektor untuk tindak lanjut (rehabilitasi medik) kasus AFP. Untuk itu perlu komitmen dari semua bidang terkait agar penemuan kasus AFP dapat ditindaklanjuti secara optimal.

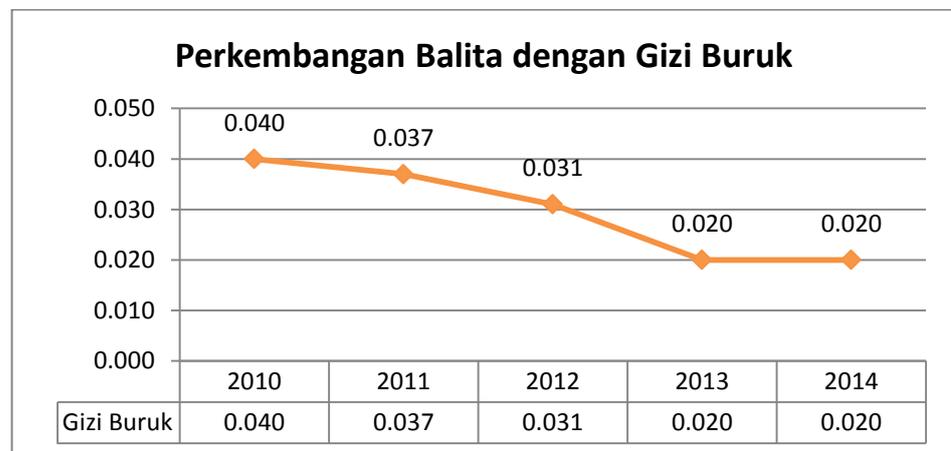
### 1.2.5 Balita dengan Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi yang didasarkan pada indeks menurut panjang badan atau tinggi badan dengan Z score  $< -3$  SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (*marasmur*, *kwashiorkor*, *marasmus kwashiorkor*).

Target balita dengan gizi buruk setiap tahunnya adalah sebesar  $< 1\%$  dari jumlah yang diperiksa/ditimbang. Pada tahun 2014, prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,02%.

Perkembangan balita gizi buruk terlihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.2.5**  
**Perkembangan Balita dengan Gizi Buruk**



Sumber data: Dinas Kesehatan

Jumlah balita gizi buruk semakin menurun. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi balita gizi buruk, antara lain :

1. Memotivasi masyarakat secara terus menerus dengan kerja sama lintas program dan lintas sektor secara terpadu dan berkesinambungan;
2. Membentuk Pos Gizi (kegiatan praktek perilaku pemulihan gizi) melalui pendekatan Positive Deviance (Penyimpangan Positif yaitu dengan mengadopsi perilaku berbeda/unik dari masyarakat kurang mampu tetapi mempunyai balita dengan status gizi yang baik);
3. Dukungan pemerintah melalui intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan.

### 1.2.6 Prevalensi Gizi Kurang

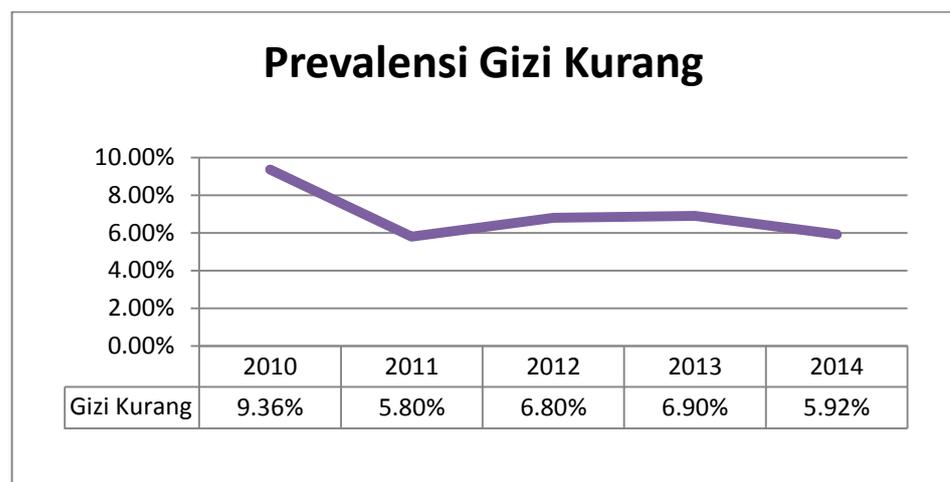
Prevalensi gizi kurang adalah persentase jumlah balita yang berada pada pita kuning dan BGM (Bawah Garis Merah) pada KMS dibanding balita yang diperiksa/ditimbang.

Prevalensi gizi kurang pada tahun 2014 sebesar 5,92%, menurun jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 6,90%.

Perkembangan prevalensi gizi kurang terlihat pada grafik sebagai berikut :

**Grafik 3.2.6**

#### Prevalensi Gizi Kurang



*Sumber data: Dinas Kesehatan*

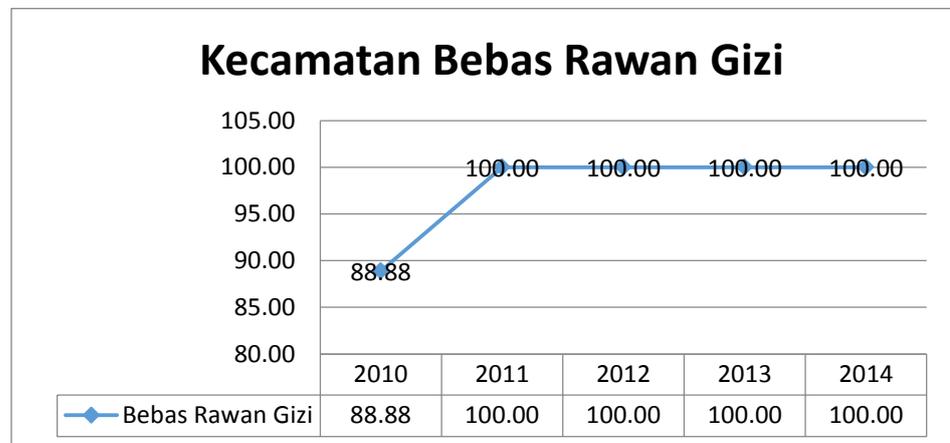
Angka ini cukup baik/berhasil dan akan diupayakan untuk dipertahankan dan apabila dibandingkan dengan target sebesar < 11% dari jumlah balita yang diperiksa, prevalensi gizi kurang pada tahun 2014 sudah memenuhi target. Akan tetapi harus tetap diwaspadai karena balita gizi kurang apabila tidak ditangani secara adikuat dapat jatuh pada kondisi gizi buruk.

### 1.2.7 Kecamatan bebas rawan Gizi

Kecamatan Bebas Rawan Gizi adalah kecamatan dengan prevalensi balita gizi kurang < 15%. Untuk menilai tingkat ketersediaan gizi di masyarakat perlu diukur jumlah kecamatan yang bebas rawan gizi. Hal ini berarti bahwa tingkat ekonomi dan ketersediaan pangan di kecamatan tersebut mampu menopang kebutuhan gizi masyarakatnya.

Target kecamatan bebas rawan gizi ditetapkan sebesar 80%. Perkembangan kecamatan bebas rawan gizi dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

**Grafik 3.2.7**  
**Kecamatan Bebas Rawan Gizi**



Sumber data : Dinas Kesehatan

Pencapaian Kecamatan Bebas Rawan Gizi pada tahun 2014 sebesar 100% atau semua kecamatan sebanyak 18 (delapan belas) kecamatan bebas rawan gizi dan ini sudah terjadi sejak tahun 2011. Untuk tetap mempertahankannya perlu promosi kesehatan terus menerus tentang gizi dan kesehatan masyarakat agar pengetahuan dan pemahaman masyarakat meningkat, sehingga masyarakat berPHBS yang berdampak pada penurunan prevalensi balita gizi kurang.

### 1.2.8 Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas

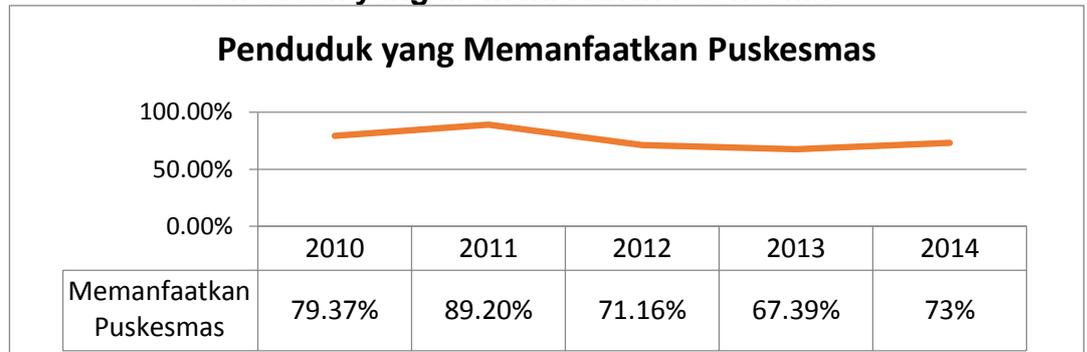
Untuk menilai tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka perlu diukur tingkat animo masyarakat untuk memanfaatkan puskesmas yang ada. Visit rate menunjukkan gambaran kunjungan Puskesmas yaitu rawat inap dan rawat jalan yang meliputi BP, BP gigi, KIA, UGD, Poli Lansia, pemeriksaan penunjang, keterangan surat sehat, pemeriksaan haji.

Target jumlah penduduk yang memanfaatkan puskesmas (visit rate) ditetapkan sebesar 60% dari seluruh jumlah penduduk. Realisasi



kunjungan ke Puskesmas tahun 2014 tercapai sebesar 73,89 %. Sebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas menitikberatkan pada pelayanan preventif (pencegahan), promotif, kuratif (pengobatan dasar) dan rehabilitatif (pemulihan). Peningkatan ini menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat yang semakin baik.

**Grafik 3.2.8**  
**Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas**



Sumber data : Dinas Kesehatan

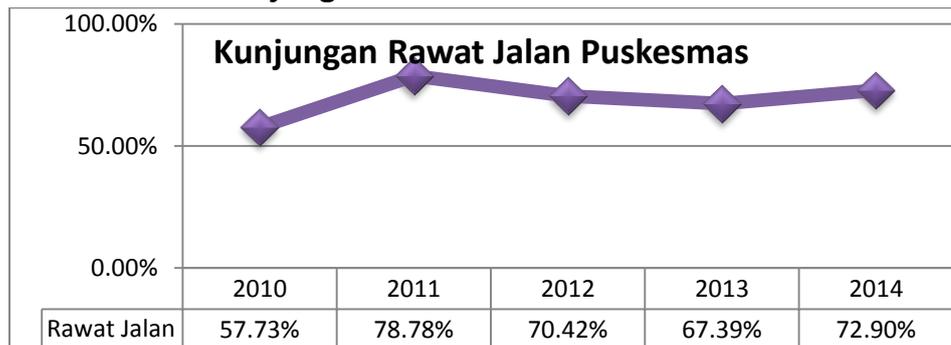
Dari data tersebut diatas terlihat bahwa Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas mengalami kenaikan di bandingkan dengan tahun 2013.

**a. Persentase kunjungan rawat jalan**

Persentase kunjungan rawat jalan di Puskesmas tahun 2014 sebesar 72,9% meningkat jika dibandingkan dengan dari realisasi tahun 2013 sebesar 67,39% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo.

Perkembangan kunjungan rawat jalan di Puskesmas sampai dengan tahun 2014 terlihat pada grafik berikut :

**Grafik 3.2.8.1**  
**Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas**



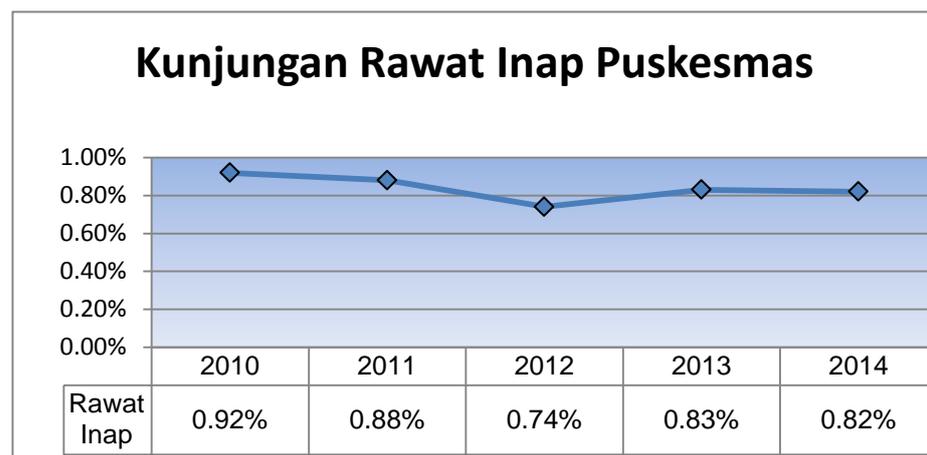
Sumber data : Dinas Kesehatan

**b. Persentase kunjungan rawat inap**

Persentase kunjungan rawat inap di Puskesmas Kabupaten Sidoarjo berfluktuasi terhadap target sebesar 1,50% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo.

Persentase kunjungan rawat inap di Puskesmas Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,82% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo.

Perkembangan prosentase kunjungan rawat inap di Puskesmas ditunjukkan pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.2.8.2****Kunjungan Rawat Inap Puskesmas**

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Capaian kunjungan rawat inap di Puskesmas tahun 2014 sebesar 0,82%. dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,83%. Pelayanan rawat inap di Puskesmas hanya pelayanan kesehatan dasar dimana kegiatan pokok di Puskesmas diutamakan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa meninggalkan kuratif dan rehabilitatif.

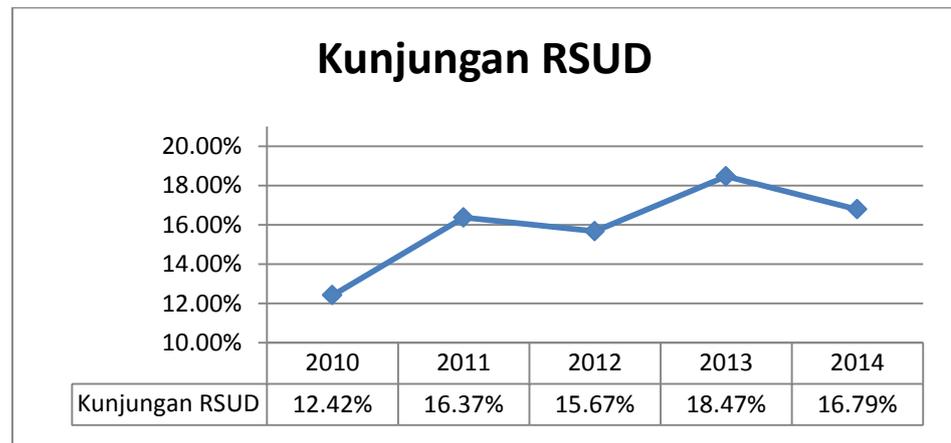
**1.2.9 Ratio penduduk yang memanfaatkan RSUD Kabupaten Sidoarjo**

Untuk menilai tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka perlu diukur tingkat animo masyarakat untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Target Nasional untuk kunjungan RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,5% dari jumlah penduduk, sebagaimana dalam indikator Indonesia Sehat 2015.

Jumlah kunjungan ke RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sebanyak 386.308 pengunjung dan tahun 2014 sebanyak 357.388 pengunjung. Sehingga prosentase kunjungan dibanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 yang sebesar 2.090.619 jiwa adalah 18,47% dan tahun 2014 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.127.348 jiwa diperoleh rasio sebesar 16,79%

**Grafik 3.2.9**  
**Kunjungan RSUD**



Sumber data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

Pada tahun 2014 terjadi penurunan rasio jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD. Hal ini dikarenakan :

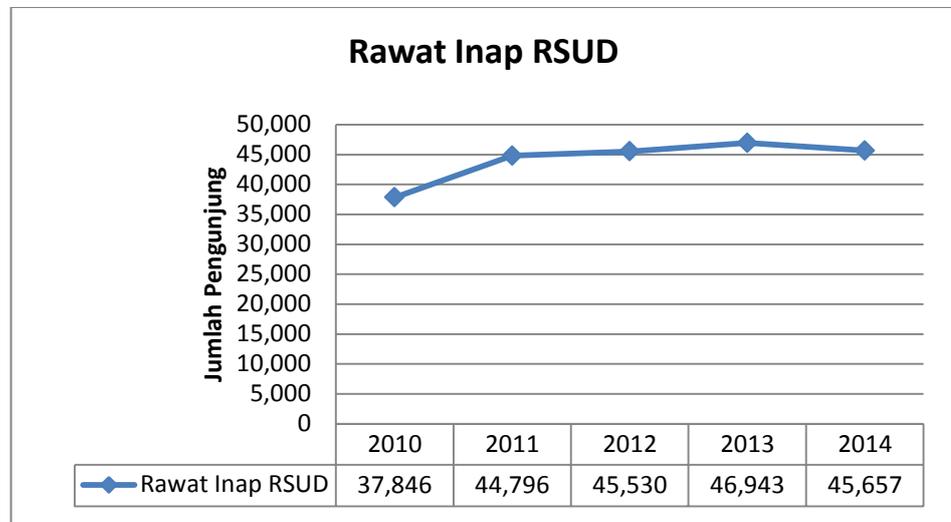
1. Tahun 2014 adalah tahun transisi pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
2. Banyak RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan di banyak pilihan rumah sakit. Sementara pada tahun 2013, peserta Askes hanya dilayani di RSUD Kabupaten Sidoarjo.

Namun demikian jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD Kabupaten Sidoarjo sudah melampaui standar nasional. Kondisi tersebut tergambar lebih lanjut dalam beberapa indikator yang mendukung sebagai berikut:

**a. Jumlah Kunjungan Rawat Inap**

Perkembangan jumlah kunjungan rawat inap pada RSUD terlihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 3.2.9.1  
Rawat Inap RSUD**



Sumber data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

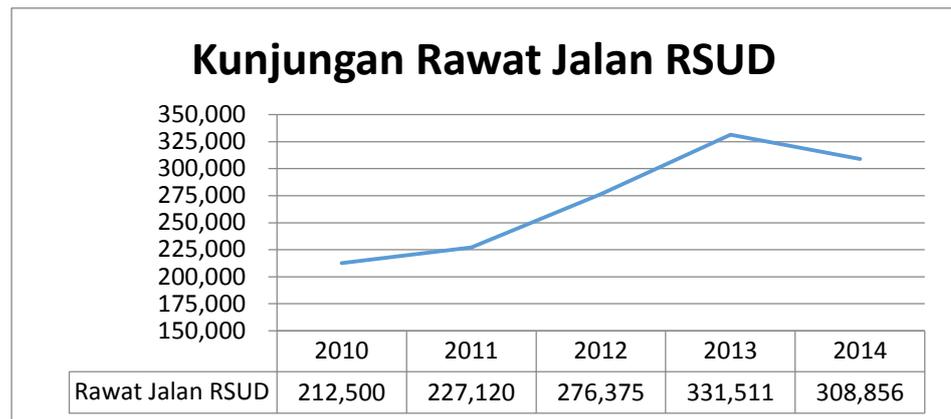
Dari data Realisasi kunjungan rawat inap di RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sebanyak 45.657 pasien dari target yang ditetapkan sebanyak 38.571 pasien. Jumlah ini turun dibandingkan tahun 2013 dengan kunjungan rawat inap sebanyak 46.943 pasien dari target yang ditetapkan sebanyak 36.302 pasien. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga masyarakat mempunyai pilihan rumah sakit tujuan lebih banyak.

**b. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan**

Perkembangan jumlah kunjungan rawat jalan pada RSUD Kabupaten Sidoarjo terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.2.9.2

## Kunjungan Rawat Jalan RSUD



Sumber data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah kunjungan rawat jalan di RSUD Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun sebenarnya selalu meningkat, namun di tahun 2014 turun menjadi sebanyak 308.856 pasien dari capaian tahun 2013 yang sebesar 331.511 orang, walaupun target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang sebesar 241.320 pasien telah terlampaui.

Hal ini dikarenakan banyak rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan. Selain itu di rumah sakit lain tersedia poli yang buka di sore hari sehingga pasien pekerja banyak memilih periksa sore. Walaupun di RSUD Kabupaten Sidoarjo ada Poli Eksekutif yang mulai beroperasi pada bulan April 2014, namun perkembangannya masih belum optimal.

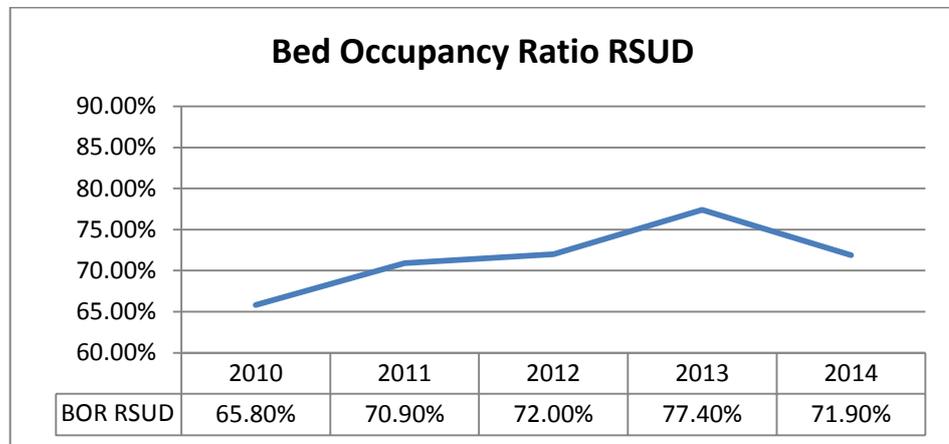
c. **Bed Occupancy Ratio (BOR)**

BOR merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit dalam kurun waktu tertentu. Tingkat pemanfaatan diukur dari penggunaan tempat tidur yang tersedia.

Standar BOR yang ditetapkan untuk setiap Rumah Sakit sebesar 60% s.d 85%. Hal ini untuk menggambarkan ketika tingkat pemanfaatan kurang dari 60% maka rumah sakit tersebut kurang diminati oleh masyarakat, sedangkan bila lebih dari 85%

dikhawatirkan akan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Target kinerja untuk tahun 2014 standar BOR ditargetkan sebesar 78%.

**Grafik 3.2.9.3**  
**Bed Occupancy Ratio RSUD**



Sumber data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

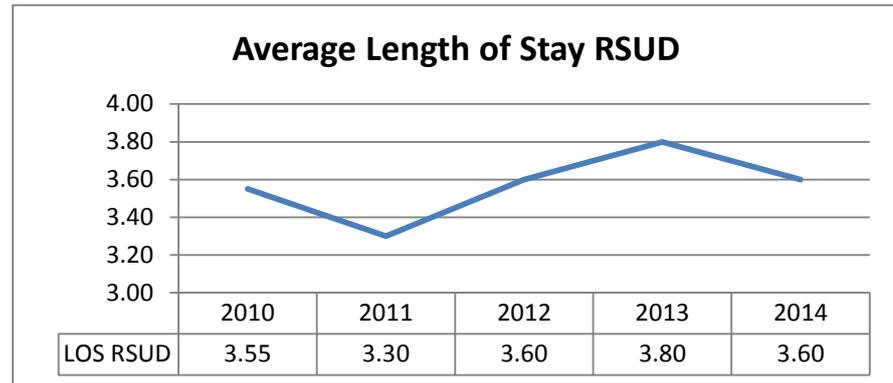
Dari data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi BOR RSUD Sidoarjo tahun 2014 berada pada angka 71,90%, angka yang ideal dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, akan diupayakan menjaga tingkat BOR selalu berada dalam kisaran angka target 60% s.d. 85%.

**d. Average Length of Stay (ALOS)**

ALOS merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata lama waktu pasien mendapat perawatan. Standar ALOS yang ditentukan di seluruh Rumah Sakittermasuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 6 s.d 9 hari. Angka ALOS yang terlalu rendah mengindikasikan kualitas layanan kesehatan baik dan secara ekonomi akan mengurangi cost yang dikeluarkan seorang pasien, sedangkan terlalu tingginya ALOS mengindikasikan lambatnya penanganan oleh tenaga medis.

Grafik 3.2.9.4

## Average Length of Stay RSUD



Sumber data :RSUD Kabupaten Sidoarjo

Capaian angka ALOS di RSUD Kabupaten Sidoarjo 5 tahun berturut-turut berfluktuasi dan berada pada kisaran 3,5 s.d 4 hari dari standar nasional yang berada pada range angka 3 s.d 6 hari.

Dari data di dalam tabel di atas terlihat bahwa realisasi ALOS RSUD Sidoarjo pada tahun 2014 adalah 3,6 hari, sedikit di bawah capaian ALOS pada tahun 2013 yang mencapai angka 3,8 hari.

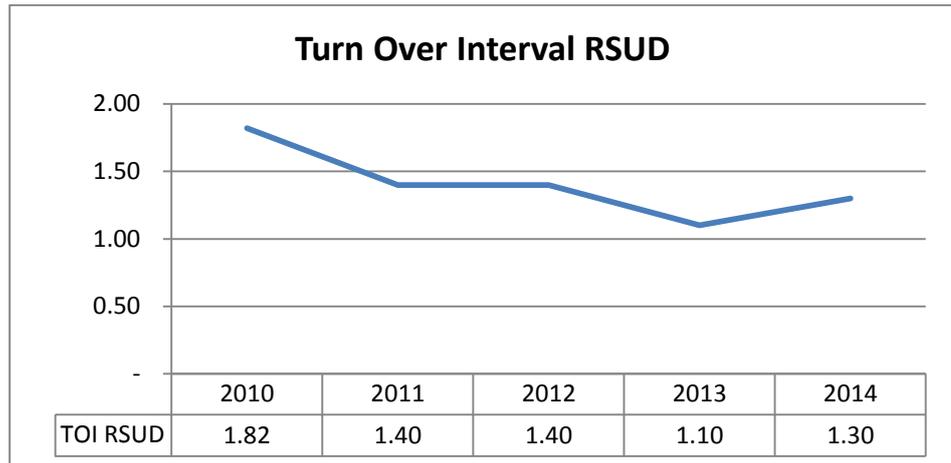
Angka ALOS yang rendah di RSUD Kabupaten Sidoarjo di satu sisi dapat bermakna pelayanan yang cepat dan tepat sehingga pasien dapat segera pulih, namun juga di sisi lain tingkat NDR yang cukup tinggi juga memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap rendahnya angka ALOS.

e. **Turn Over Interval (TOI)**

Turn Over Interval adalah indikator yang digunakan untuk mengukur waktu rata-rata tempat tidur kosong atau waktu antara satu tempat tidur ditinggalkan oleh pasien sampai ditempati lagi oleh pasien lain. Waktu interval ini dimaksudkan agar diperoleh waktu yang cukup untuk persiapan pergantian pasien baru sehingga tidak terjadi *infeksi nosokomial*.

Standar yang ditetapkan untuk TOI dan target kinerja yang ditetapkan sebesar 1 s.d 3 hari.

**Grafik 3.2.9.5**  
**Turn Over Interval RSUD**



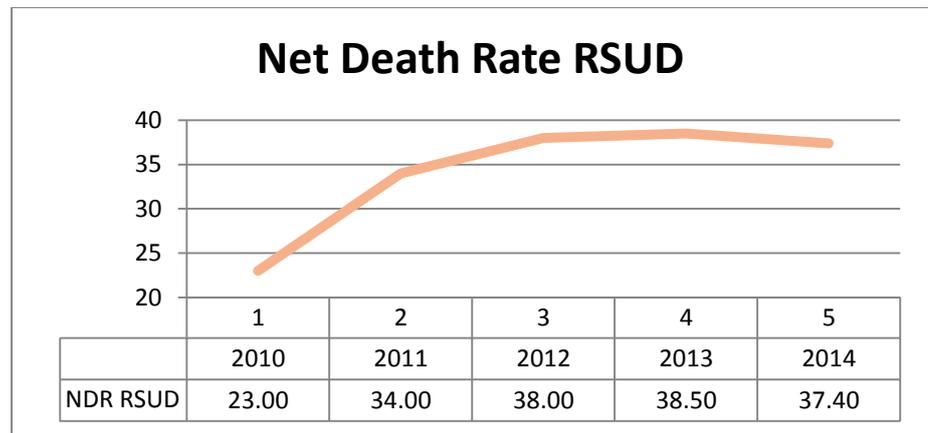
Sumber data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

Target TOI tahun 2014 sebesar 1 s.d 3 hari, realisasi yang dicapai oleh rumah sakit pada tahun 2014 ini adalah 1,3 hari artinya rata-rata tempat tidur tidak dihuni pasien selama 1,3 hari. Sementara pada tahun 2013 capaian TOI adalah 1,1 hari. Walaupun angka ini termasuk ideal karena masih berada dalam range angka TOI yang normal, RSUD Kabupaten Sidoarjo tetap harus memperhatikan proses sterilisasi ruangan sebelum dimanfaatkan kembali sehingga tidak sampai menurunkan mutu layanan yang ada di rumah sakit.

f. **Net Death Rate (NDR)**

*Net Death Rate (NDR)* merupakan salah satu *key performance indicator* sebuah Rumah Sakit. Meningkatnya Nilai NDR pada sebuah rumah sakit merupakan sebuah indikasi telah terjadi penurunan kinerja yang berakibat menurunnya kualitas atau mutu pelayanan di rumah sakit tersebut. Adapun perkembangan NDR pada RSUD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

**Grafik 3.2.9.6**  
**Net Death Rate RSUD**



*Sumber data : RSUD Kabupaten Sidoarjo*

Realisasi NDR tahun 2014 sebesar 37,4 permill dari target yaitu <25 permill.

Angka NDR pada tahun 2014 yang cukup tinggi disebabkan oleh :

1. Kondisi pasien pra rujukan sudah jelek. Data pra rujukan jelek ini merujuk pada level Emergency Severity Index (ESI) atau indeks tingkat kegawatdaruratan. Semakin rendah angka ESI maka semakin membahayakan nyawa seseorang. Dari data rekam medis RSUD Kabupaten Sidoarjo, selama tahun 2014 dari kasus kematian yang terjadi, 65,4% karena ESI levelnya berada pada level 1 dan 2 atau kondisi pasien ketika masuk RSUD Kabupaten Sidoarjo sudah jelek.
2. Kondisi sebagaimana tersebut di atas dapat dimaklumi karena RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu dari 7 (tujuh) pusat rujukan regional di Jawa Timur. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang berada di daerah Bangil, Pasuruan, Mojokerto dan Mojokerto apabila harus merujuk pasien, tujuan utamanya adalah RSUD Kabupaten Sidoarjo. Sehingga kebanyakan pasien rujukan dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya tersebut masuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi sudah parah.



Kasus Kematian sampai dengan Tahun 2014 di RSUD Kabupaten Sidoarjo.

No	ICD X	Diagnosis	Persentase
1	N18.0	End-stage renal disease	24,76%
2	A15.0	Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture	12,38%
3	E11.2	Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications	11,40%
4	I63.9	Cerebral infarction, unspecified	10,10%
5	I61.2	Intracerebral haemorrhage in hemisphere, unspecified	10,10%
6	E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	9,12%
7	E11.0	Non-insulin-dependent diabetes mellitus with coma	7,82%
8	A41.9	Septicaemia, unspecified	5,86%
9	B23.0	Acute HIV infection syndrom	4,23%
10	K74.6	Other and unspecified cirrhosis of liver	4,23%

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 3 besar penyebab kematian terbanyak di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 adalah :

1. Penyakit ginjal kronis, yang meliputi gagal ginjal kronis (End-stage renal disease) sebanyak 24,76% dan diabetes komplikasi ginjal (Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications) sebanyak 11,40%, atau apabila dijumlahkan maka penyakit ginjal kronis menyumbangkan penyebab kematian sebanyak 36,16% dari total 10 penyebab kematian terbanyak di RSUD Kabupaten Sidoarjo;
2. Penyakit stroke  
Penyakit stroke ini meliputi penyakit stroke karena penyumbatan (cerebral infarction) sebanyak 10,10% dan penyakit stroke karena pecahnya pembuluh darah (intracerebral haemorrhage in hemisphere, unspecified) juga sebanyak 10,10%. Sehingga gabungan dari kedua diagnosis ini menjadi penyebab kematian sebanyak 20,20%;
3. Penyakit TBC Paru (Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture) yang menduduki tempat ketiga penyebab kematian dengan persentase sebesar 12,38%.



Upaya yang akan dilakukan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien antara lain adalah :

- Koordinasi dengan faskes perujuk untuk stabilisasi pasien dulu
- Meningkatkan koordinasi antara jejaring rujukan
- Memberikan edukasi mengenai penyakit kepada pasien dan keluarga
- Meningkatkan kemampuan SDM RSUD dalam menangani pasien.

1.2.10 Perbandingan realisasi dan target nasional pada indikator kesehatan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.10**  
Perbandingan Realisasi dan Target Nasional  
Pada Indikator Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo

NO	Indikator	Target		Realisasi	Keterangan
		RPJMD	Nasional		
1	Angka kematian bayi		24 %	6.86 %	terlampau
2	Angka kematian ibu		118 %	80.02 %	terlampau
3	Angka kesembuhan TB Paru		88 %	89 %	terlampau
4	Angka penemuan AFP (Lumpuh Layuh Mendadak)		1.98 %	1.98 %	Tercapai
5	Balita dengan gizi buruk		<15.00%	0.02 %	terlampau
6	Prevalensi gizi kurang		<15.00%	5.92 %	terlampau
7	Prevalensi HIV / AIDS				
8	Umur Harapan Hidup (UHH)		72 (th)	70.99 (th)	mendekati

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

Sasaran 3. ***Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

### 1.3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran terbuka.

**Grafik 3.3.1**  
**Pengangguran Terbuka**



Sumber Data: berdasarkan analisa tren

Dari grafik di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka stagnasi pada kisaran angka 4,13% - 4,20%. Realisasi tingkat pengangguran Terbuka tahun 2014 sebesar 4,20% adalah upaya yang cukup berhasil karena mampu menekan pengangguran karena jauh di bawah target/proyeksi RPJMD tahun 2014 yang sebesar 8,15%.

Perkembangan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dibanding angkatan kerja seperti terlihat pada ilustrasi dibawah ini:

**Grafik 3.3.1.1**  
**Angkatan Kerja dan Yang Tidak Bekerja**



Sumber Data: berdasarkan analisa tren

### 1.3.2 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan

Perkembangan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.3.2**  
**Tenaga Kerja Yang ditempatkan**



Sumber Data: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2014, jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan meningkat dibanding tahun 2013, dan mencapai target yang ditetapkan tahun 2014 sebesar 4.200 orang. Hal ini menunjukkan kemampuan para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan secara mandiri atau menciptakan lapangan kerja secara mandiri (berwirausaha), namun demikian apabila dilihat dari tingkat pengangguran terbuka yang sedikit naik berarti pada tahun 2014 juga terjadi PHK/pengurangan pekerja pada beberapa perusahaan.

Dengan berkembangnya dan meningkatnya program-program kegiatan pelatihan dan produktifitas telah berdampak terhadap kemampuan kemandirian pencari kerja yang mengakses program tersebut sehingga pencari kerja mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri minimal untuk dirinya sendiri maupun untuk pencari kerja yang lain.

Banyaknya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dipengaruhi oleh:

- Kerjasama lembaga penempatan tenaga kerja swasta, pelaksanaan bursa kerja khususnya bursa kerja swasta.

- Pengenalan Dunia kerja dan persyaratan kerja pada Informasi Pasar Kerja, melalui Bursa Kerja Terbuka (BKT) dan Bursa Kerja Online (BKOL).
- Sosialisasi dan sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bersama perusahaan dan dunia pendidikan, lembaga pelayanan penempatan swasta, serta *stakeholder* lain yang peduli terhadap adanya pengangguran.

### 1.3.3 Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja

Kasus-kasus yang menimbulkan perselisihan antara pekerja / buruh dengan perusahaan menyangkut perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan peselisihan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan.

Berikut ini adalah perkembangan jumlah perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja.

**Grafik 3.3.3**

#### **Perselisihan Tenaga Kerja Dengan Perusahaan**



*Sumber Data: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja*

Secara keseluruhan perselisihan hubungan industrial, kecuali mogok kerja pada umumnya ada kecenderungan meningkat, kecuali mogok kerja yang sedikit menurun. Pada 2014 keseluruhan perselisihan sebanyak 112 kasus, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 94



kasus naik sejumlah 18 kasus perselisihan, jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2014 yang 130 kasus ada penurunan. Namun peningkatan kasus perselisihan hubungan industrial sebagian besar dapat diselesaikan dengan anjuran tertulis oleh Mediator Hubungan Industrial.

Sedangkan penurunan kasus mogok kerja disebabkan tuntutan pemenuhan hak-hak normatif pekerja/buruh, selain itu karena adanya tuntutan diluar ketentuan yang ada antara lain permintaan uang makan, uang transport dan peningkatan struktur pengupahan, yang secara akumulasi telah melebihi standart UMK. Namun demikian, untuk kasus mogok kerja berkat pendekatan secara persuasif oleh semua jajaran yang terkait (unsur pekerja, pengusaha, pemerintah, lembaga pengamanan), akhirnya dapat diselesaikan.

Berikut adalah tabel perkembangan jumlah perusahaan yang telah membuat/membentuk sarana hubungan industrial.

**Tabel 3.3.3**  
**Perkembangan jumlah perusahaan yang telah membentuk sarana hubungan Industrial**

**s**

<b>No<sub>r</sub></b>	<b>Jenis Sarana HI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1 a	Peraturan Perusahaan	962	1076	1120	1227	1.438
2 n	Perjanjian Kerja Bersama	202	204	204	215	259
3	LKS Bipartit	66	85	107	124	138
4	Serikat Pekerja/Buruh			415	389	255

**S**

arana hubungan industrial sangat penting dalam mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di dalam perusahaan. Hal ini karena dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama tercantum dengan jelas akan hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh.

Sedangkan keberadaan LKS (Lembaga Kerja Sama) Bipartit yang merupakan fórum komunikasi, konsultasi untuk musyawarah antara wakil serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh sangat diperlukan pada tingkat perusahaan guna membahas masalah hubungan industrial dalam

rangka peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja/ buruh yang menjamin kelangsungan usaha dan terciptanya kesempatan kerja.

Sehingga di Kabupaten Sidoarjo tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, sehingga para calon investor asing yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Sidoarjo dengan rasa aman dan nyaman.

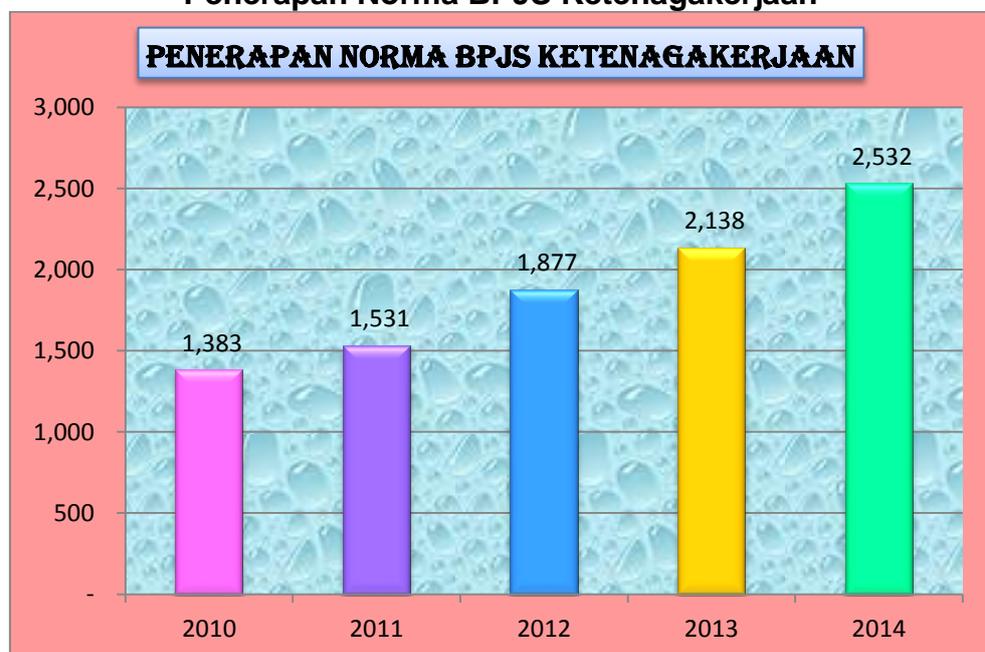
#### 1.3.4 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma BPJS

Bahwa sistem jaminan nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Di tahun 2014 Jamsostek telah berubah nama menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Pembinaan dan pengawasan mekanisme norma BPJS di perusahaan merupakan komitmen tegas dan lugas dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melindungi hak-hak pekerja / buruh.

Berikut ini adalah grafik perkembangan jumlah perusahaan yang menerapkan norma BPJS.

**Grafik 3.3.4**  
**Penerapan Norma BPJS Ketenagakerjaan**



Sumber Data: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja



Adapun jumlah perusahaan yang menerapkan norma BPJS menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2014, terdapat peningkatan 394 perusahaan yang menerapkan norma BPJS dibandingkan dengan tahun 2013, dan sudah melampaui target RPJMD tahun 2014 sebesar 1.463 perusahaan. Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek merupakan suatu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi bersama-sama *stakeholder* dalam pembinaan dan pengawasan norma jamsostek pada perusahaan.

Tahun / Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
Penerapan BPJS	1.383	1.531	1.877	2.138	2.532
Jmlh Persh yang ada terdaftar	2.049	2.188	2.406	2.560	2.635
Prosentase	67,50%	69,97%	78,01%	83,52%	96,09%

### 1.3.5 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Norma keselamatan kerja merupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diduga yang disebabkan oleh kelalaian kerja serta lingkungan kerja yang tidak kondusif/aman, perilaku kerja yang tidak baik serta peralatan yang dipergunakan tidak aman.

Perkembangan jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.3.5**  
**Perusahaan Menerapkan Norma K3**



Sumber Data: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja



Penerapan norma K3 ditinjau dari penggunaan alat-alat produksi perusahaan yang mempunyai legalitas serta dapat dijaminnya alat tersebut layak dipakai.

Pada grafik di atas, terlihat bahwa pada tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 dibandingkan pada tahun 2013 dan melampaui target RPJMD yang ditetapkan 2.049 perusahaan. Peningkatan perusahaan yang menerapkan Norma K3 ini merupakan hasil dari:

1. Komitmen pimpinan perusahaan terhadap norma K3 yang cenderung meningkat.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan dan pengawasan melalui bimbingan teknis Norma K3.
3. Program gerakan nasional membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja sudah merupakan tanggung jawab semua pihak.

Terhadap perusahaan yang belum melaksanakan norma K3 akan dilakukan upaya sinergis bersama-sama stakeholder dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan tentang K3 di perusahaan, serta membangun *brand image* positif dengan pelaksanaan K3 di perusahaan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Tahun / Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
Penerapan Norma K3	888	1.894	2.049	2.210	2.351
Jmlh Persh yang ada terdaftar	2.049	2.188	2.406	2.560	2.635
Prosentase	43,34%	86,56%	85,16%	86,33%	89,22%

### 1.3.6 Jumlah perusahaan yang ada

Keberadaan perusahaan atas dasar ketentuan wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1981 dapat dilihat dalam grafik berikut.

**Grafik 3.3.6**  
**Perkembangan Perusahaan**



*Sumber Data: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja*

Jumlah perusahaan yang ada (wajib lapor) pada tahun 2014 mengalami peningkatan sejumlah 75 perusahaan atau sebesar 2,93% dibandingkan tahun 2013. Capaian ini sudah melampaui target RPJMD tahun 2014 yang sebesar 2.049 perusahaan.

Upaya yang akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan agar melaporkan ketenagakerjaannya adalah dengan memberi pemahaman tentang pentingnya laporan ketenagakerjaan sebagai bahan bagi pemerintah dalam memetakan dan menyusun kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

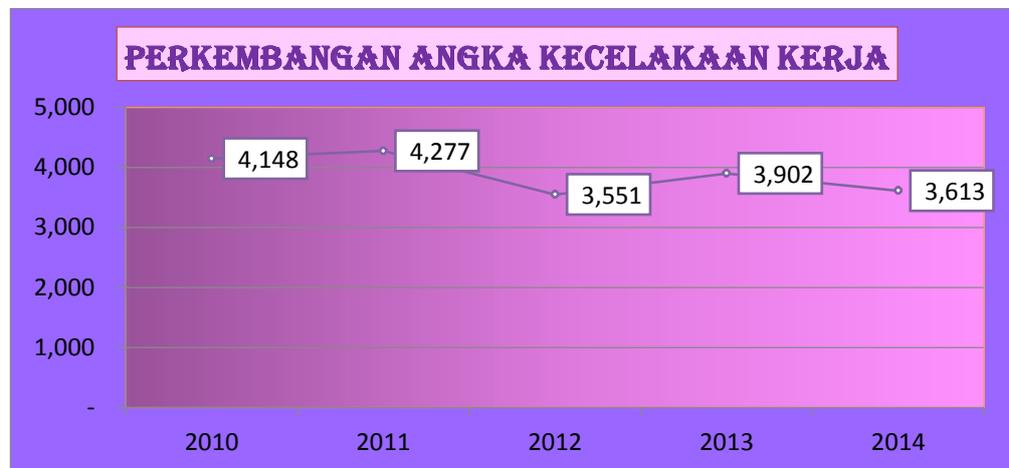
Dengan meningkat dan berkembangnya jumlah perusahaan di Sidoarjo saat ini sebagai daerah industri, maka yang perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeriksaan dan penyelesaian pengaduan.
2. Menambah jumlah kuantitas Pengawas dan jumlah wilayah pemeriksaan.
3. Meningkatkan target pemeriksaan perusahaan.

### 1.3.7 Angka kecelakaan kerja

Perkembangan angka kecelakaan kerja disajikan dalam grafik berikut ini.

**Grafik 3.3.7**  
**Angka Kecelakaan Kerja**



Sumber Data: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Angka kecelakaan kerja tahun 2014 menurun sebanyak 289 kejadian atau 7,41% dibanding tahun 2013. Capaian ini lebih baik dari target RPJMD yang sebesar 3.900 kejadian perusahaan.

Menurunnya angka kecelakaan kerja berkat upaya pembinaan dan pengawasan oleh pihak yang terkait yaitu oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta kesadaran dari para pengusaha dan pekerja untuk selalu tertib dalam pelaksanaan K3 pada upaya arah penciptaan zero accident.

Hampir seluruh kecelakaan kerja telah tertangani dengan baik atas kerjasama Dinas terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Upaya yang harus terus dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan kerja adalah dengan melakukan pembinaan mengenai pentingnya zero accident serta menjelaskan kepada perusahaan mengenai penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan.

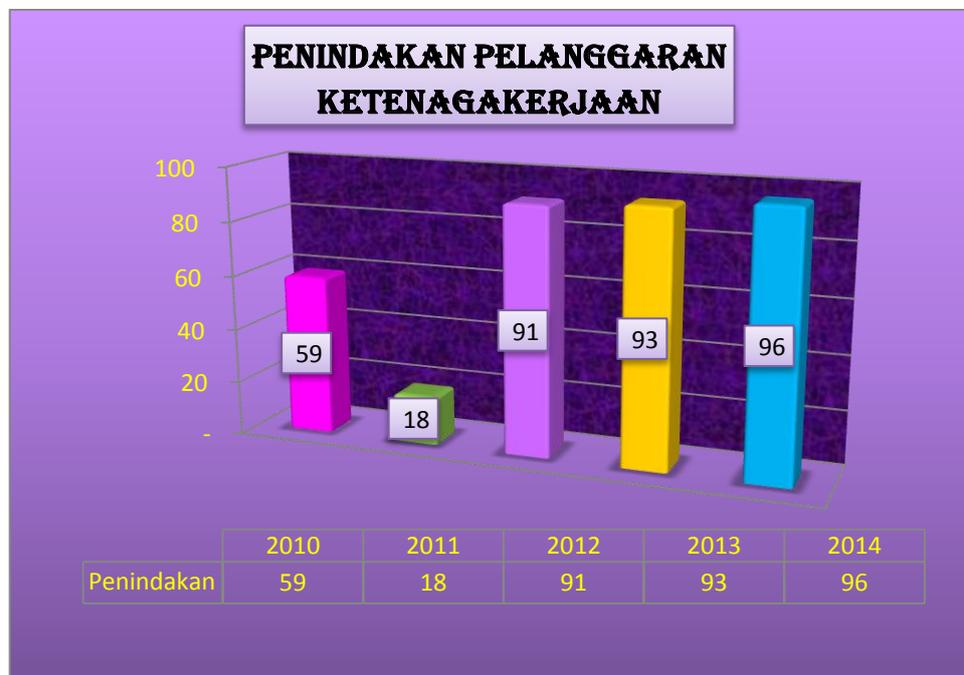
### 1.3.8 Jumlah penindakan kasus pelanggaran ketenagakerjaan

Penindakan atas kasus pelanggaran ketenagakerjaan diambil setelah kepada perusahaan yang melanggar diberikan pembinaan *non pro justisia* berupa nota pemeriksaan. Jika rekomendasi hasil pemeriksaan tidak

dilaksanakan, atas pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dengan tindakan *pro justisia*.

Perkembangan jumlah penindakan kasus pelanggaran ketenagakerjaan terlihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.3.8**  
**Penindakan Pelanggaran Ketenagakerjaan**



Sumber Data: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Dari total sejumlah 470 pelanggaran yang ada, sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut telah menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan. Pelanggaran ketenagakerjaan tersebut antara lain:

- a. UMK
- b. Upah Lembur
- c. Jamsostek (BPJS)
- d. Upah selama tidak dipekerjakan
- e. Perlindungan dan hak berorganisasi
- f. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara terus menerus
- g. Cuti
- h. Santunan kecelakaan kerja



Namun demikian, untuk perusahaan yang tidak menindaklanjuti dan menjalankan ketentuan, telah dilakukan penindakan yaitu sejumlah 96 perusahaan. Peningkatan penindakan kasus pelanggaran dibanding tahun 2013 sejumlah 93 kasus, menunjukkan adanya ketegasan kinerja pembinaan yang berdampak pada peningkatan kesadaran perusahaan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Namun dari target yang ditentukan sebesar 34 kasus ada peningkatan realisasi jumlah penindakan kasus pelanggaran ketenagakerjaan hal ini disebabkan komitmen pengawas ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk menindalanjuti pengaduan yang masuk ke bidang pengawasan.

Sasaran 4. ***Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil sejahtera*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

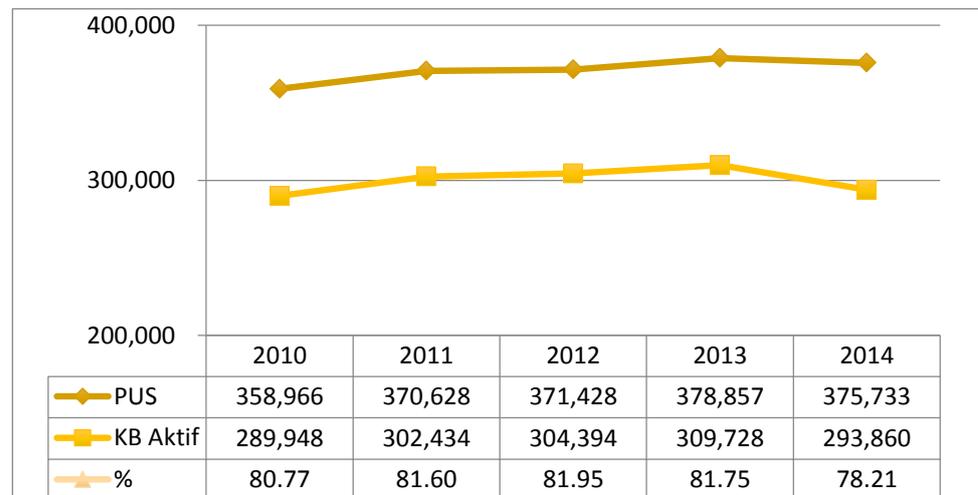
#### **1.4.1 Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif**

Tingkat prevalensi Peserta KB Aktif adalah perbandingan antara jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif, dibandingkan dengan jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdapat di suatu daerah/wilayah dalam suatu periode yang sama.

Dalam tahun 2014, tingkat prevalensi Peserta KB Aktif di Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 78,21%, yaitu perbandingan antara jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 293.860 akseptor dengan jumlah seluruh PUS yaitu sebanyak 375.733 pasangan. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 81,77% maka capaian kinerja sebesar 95,65%. Namun jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 65%, maka capaian sebesar 120 % artinya capaiannya telah melampaui target nasional, selanjutnya jika dibandingkan dengan tingkat prevalensi Peserta KB Aktif tahun 2013 yaitu sebesar 81,75%, maka tingkat prevalensi Peserta KB Aktif tahun 2014 secara prosentase mengalami penurunan sebesar 3,54%.

Perkembangan Peserta KB Aktif selama lima tahun terakhir terlihat pada grafik berikut :

**Grafik 3.4.1**  
**Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif**



Sumber data : BPMPKB Kabupaten Sidoarjo

Jumlah peserta KB aktif dari tahun ketahun terus meningkat, namun persentasenya terhadap PUS untuk tahun 2014 mengalami penurunan di banding tahun 2013. Hal ini disebabkan terdapat peserta KB aktif yang *drop out* atau Pasilitas Kesehatan KB perbatasan, sehingga pembinaan kepada peserta KB aktif masih perlu ditingkatkan melalui peran serta kader institusi masyarakat pedesaan (IMP) sebagai pengelola program KB tingkat Desa/Kelurahan, Dusun, RW,RT.

#### 1.4.2 Persentase perkawinan dibawah umur

Salah satu upaya penurunan kakelahiran selain penggunaan alat kontrasepsi adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi penduduk perempuan, sedangkan tolokukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan PUP tersebut adalah persentase perkawinan dibawah umur, yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk perempuan yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia dibawah 20 tahun (<20 tahun) dengan jumlah keseluruhan penduduk wanita yang melangsungkan perkawinan pertama dalam periode yang sama.

Dalam tahun 2014, capaian PUP di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 12.399 orang atau 99,81%, dari perkawinan pertama secara keseluruhan yaitu



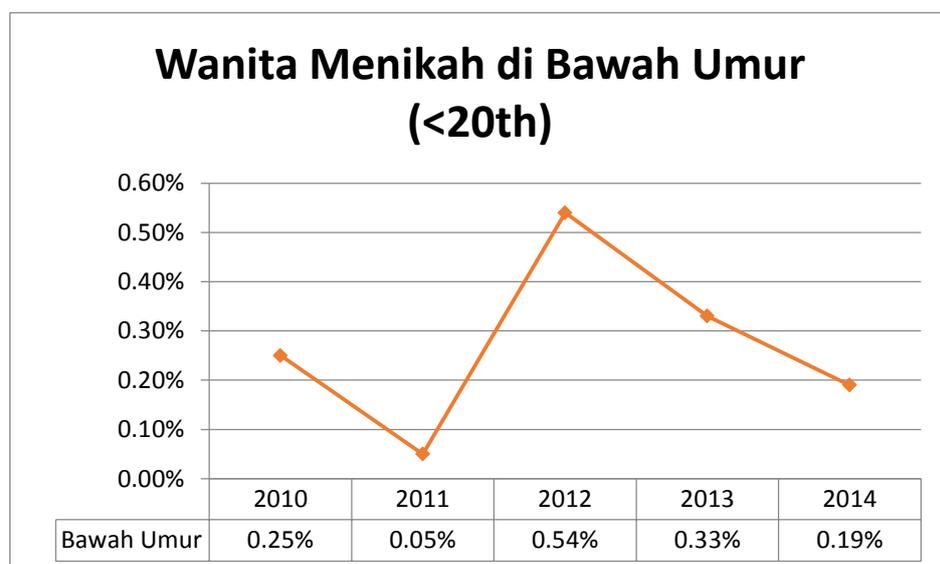
12.422 orang dan persentase perkawinan dibawah umur sebesar 0,19% atau sebanyak 23 orang. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 0,21%, maka capaian kinerja tahun 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD, Dan jika di bandingkan dengan capaian perkawinan dibawah umur tahun 2013 sebanyak 42 orang atau 0,33% dari jumlah keseluruhan penduduk perempuan yang melangsungkan pernikahan pertama yaitu sebanyak 12.888 orang, maka terjadi penurunan perkawinan dibawah umur atau peningkatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Hal ini disebabkan meningkatnya pemahaman para remaja terhadap pentingnya kesehatan reproduksi remaja.

Apabila dibandingkan dengan target Nasional prosentase perkawinan dibawah umur sebesar 3.5%, maka realisasi prosentase perkawinan dibawah umur di Kabupaten Sidoarjo yang terealisasi sebesar 0.19% telah melampaui target nasional.

Perkembangan Persentase Wanita Menikah di Bawah Umur (<20 tahun) selama lima tahun terakhir di Kabupaten Sidoarjo terlihat pada grafik berikut :

**Grafik 3.4.2**

**Wanita Menikah di Bawah Umur**



Sumber data : BPMPKB Kabupaten Sidoarjo



### **1.4.3 Total Fertility Rate**

Total Fertility rate ini menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dimiliki wanita usia subur sepanjang siklus kehidupan reproduksinya. Pada tahun 2014 pencapaian total fertility rate adalah 2,14 per Wanita Usia Subur (WUS) berdasarkan hasil perhitungan melalui Pendataan Keluarga tahun 2014 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo. Jika Capain tersebut dibandingkan dengan target kinerja RPJMD sebesar 2,09, terjadi peningkatan. Dan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 sebanyak 2,13 per WUS terjadi peningkatan, hal ini disebabkan Penambahan Pasangan Usia Muda di wilayah perumahan, Pengaruh Urbanisasi Sidoarjo sebagai tempat pemukiman dan pencari kerja. Upaya selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu memberikan KIE atau Informasi kepada masyarakat agar peduli terhadap kesehatan reproduksi dengan cara mengatur jarak kelahiran dan membatasi jumlah anak yang dilahirkan melalui Program Keluarga Berencana.

### **1.4.4 Rata - rata usia kawin pertama penduduk perempuan.**

Berdasarkan hasil Pencatatan dan Pelaporan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilakukan secara terpadu oleh BPMPKB dengan KUA se Kabupaten Sidoarjo, rata-rata Usia Kawin pertama penduduk perempuan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 tercapai 23,55 tahun atau 99,16% dari target dalam RPJMD 2014 sebesar 23,75 tahun. Jika dibandingkan pencapaian tahun 2013 yaitu rata-rata pada usia 23,36 tahun terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan usia penduduk perempuan di Kabupaten Sidoarjo sudah semakin dewasa ketika melangsungkan perkawinan pertama.

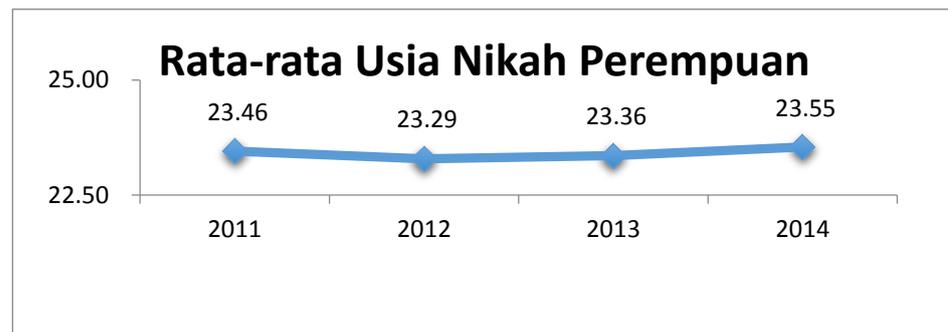
Tingginya pencapaian pendewasaan usia perkawinan (PUP) di Kabupaten Sidoarjo, selain dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan tingkat kelahiran di masa yang akan datang, keadaan tersebut juga menunjukkan :

- ✓ Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kualitas hidup perempuan

- ✓ Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi remaja,
- ✓ Meningkatnya kesempatan yang dimiliki kaum perempuan untuk menempuh jenjang pendidikan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas kaum perempuan di masa yang akan datang.

Perkembangan Rata-rata Usia Nikah Perempuan selama empat tahun terakhir terlihat pada grafik berikut :

**Grafik 3.4.4**  
**Rata-rata Usia Nikah Perempuan**



Sumber data : BPMPKB Kabupaten Sidoarjo

Sasaran 5. **Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

#### 1.5.1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program pemberdayaan dan bantuan modal untuk usaha ekonomi. Peran yang diambil pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pengentasan ini lebih banyak pada fungsi koordinasi dan distribusi sumber daya, mengingat masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah yang rumit karena begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kinerja atas indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani melalui pemberian modal kerja dan pelatihan pengembangan ketrampilan usaha dengan jumlah masyarakat penyandang masalah

kesejahteraan sosial di Kabupaten Sidoarjo maupun dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani untuk tahun 2014 sebanyak 14.343 jiwa atau 35,55% dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 40.342 jiwa, atau 1,73% dari jumlah penduduk.

Realisasi yang tertangani tahun 2014 meningkat 35,66% dari tahun 2013.

**Tabel 3.5.1.1**

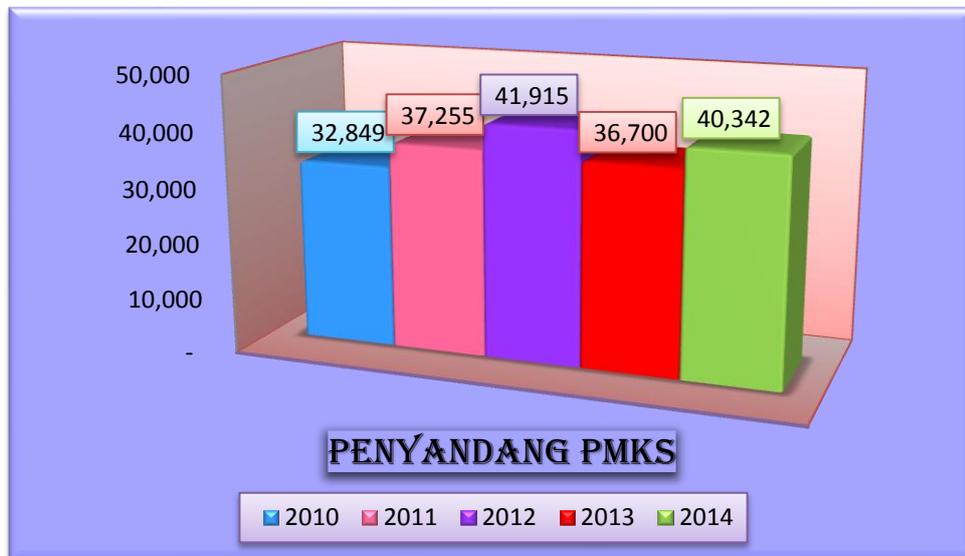
**Data Jumlah PMKS dan Jumlah Penduduk 2010 – 2014**

Tahun	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS tertangani	% Tertangani	Jumlah Penduduk *)	% pmks thd. Jmlh penduduk
2010	32.489	822	2,53%	1.950.000	1,67%
2011	37.255	9.135	24,52%	1.980.000	1,88%
2012	41.915	8.860	21,14%	2.053.467	2,04%
2013	36.700	10.573	28,80%	2.090.619	1,76%
2014	40.342	14.343	35,55%	2.127.043	1,90%

Sumber data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

**Grafik 3.5.1.2**

**Penyandang PMKS**



Sumber data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pada grafik di atas, jumlah PMKS pada tahun 2014 meningkat 3.642 jiwa atau 9,92% di banding tahun 2013, sedangkan target RPJMD tahun 2014 jumlah PMKS belum tercapai sejumlah 29.845 jiwa. Peningkatan jumlah PMKS pada Tahun 2014 disebabkan oleh :

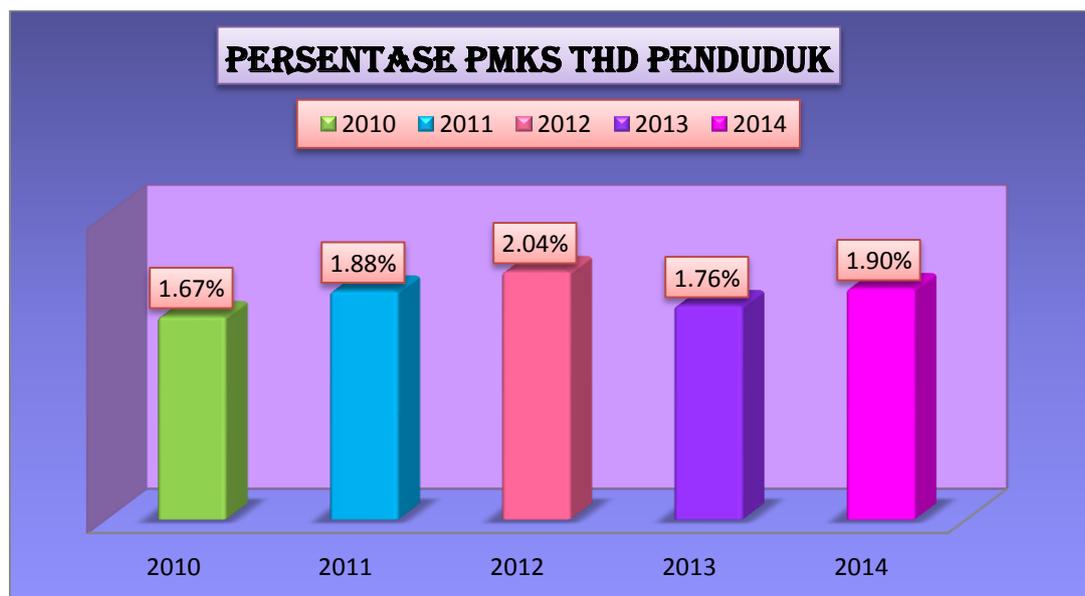
1. Dampak urbanisasi,
2. Peningkatan orang terlantar yang berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo
3. Meningkatnya fakir miskin yang diakibatkan berkurangnya area persawahan sehingga banyak para buruh tani yang kehilangan pekerjaan.

Namun demikian peningkatan PMKS di Kabupaten Sidoarjo telah direspon oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan meningkatkan penanganan PMKS.

Persentase jumlah PMKS terhadap jumlah penduduk tahun 2010 s.d 2014 dapat digambarkan pada grafik berikut:

**Grafik 3.5.1.3**

**Prosentase PMKS Terhadap Penduduk**



Sumber data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Penyandang masalah kesejahteraan sosial menuntut perhatian yang serius bukan hanya pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo saja, namun

partisipasi masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sangat dibutuhkan guna menekan populasi permasalahan sosial yang terjadi.

Pola penanganan yang telah dikembangkan selama ini untuk mengurangi jumlah masyarakat PMKS adalah melalui peningkatan kualitas SDM PMKS dengan memberikan pelatihan ketrampilan, bantuan peralatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

### 1.5.2 Jumlah penanganan PMKS.

Realisasi jumlah penanganan PMKS untuk tahun 2014 sebesar 14.343 jiwa atau 35,55% tertangani dari 40.342 jiwa penyandang PMKS. Capaian kinerja ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 950 jiwa. Jika dibanding dengan realisasi tahun 2013 sebesar 28,80%, realisasi 2014 naik sebesar 6,75% .

Penanganan PMKS tahun 2014 mengalami kenaikan seperti tergambar pada grafik di bawah ini:

**Grafik 3.5.2**

**Penanganan PMKS**



Sumber data : Dinas sosial dan tenaga kerja

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengoptimalkan penanganan para penyandang PMKS melalui antara lain dengan :



- 1) Mengoptimalkan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas instansi yang terkait dengan kegiatan pengentasan kemiskinan, antara lain : program raskin, BLT, PNPM Mandiri,dll;
- 2) Melakukan pembekalan manajemen kewirausahaan dan memberikan sarana bagi orang tua anak jalanan.
- 3) Program Keluarga Harapan (PKH).
- 4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui UPT Liponsos

**Tabel 3.5.2**  
**Data Penanganan PMKSTahun 2014**

NO	KEGIATAN	REALISASI (Org)
1	Program Keluarga Harapan	9.032
2	Bantuan Permakanan Panti Asuhan	2.349
3	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	1.150
4	Bantuan Penyandang Cacat	16
5	Bantuan bagi Keluarga Miskin	20
6	Bantuan anak Keluarga Kurang Mampu (KKM)	200
7	Bantuan bagi Tuna Rungu	20
8	Bantuan bagi Tuna Sosial	11
9	Jaminan Sosial Lanjut Usia Akut	100
10	Bantuan bagi Perintis Kemerdekaan, Veteran dan Janda cacat veteran	157
11	Bantuan bagi Lansia kurang mampu	400
12	Bantuan bagi Anak Jalanan	10
13	Aslut	78
14	Panti	800
<b>JUMLAH</b>		<b>14.343</b>

*Sumber data : Dinas sosial dan tenaga kerja*

### **1.5.3 Jumlah Penerima Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin)**

Untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin maka pemerintah pusat bersama dengan pemerintah kabupaten Sidoarjo menyalurkan bantuan beras bagi masyarakat miskin atau yang lebih



dikenal dengan program Raskin. Jumlah rumah tangga sasaran penerima raskin sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

**Tabel 3.5.3**  
**Penerimaan Raskin dari tahun 2010 s.d2014**

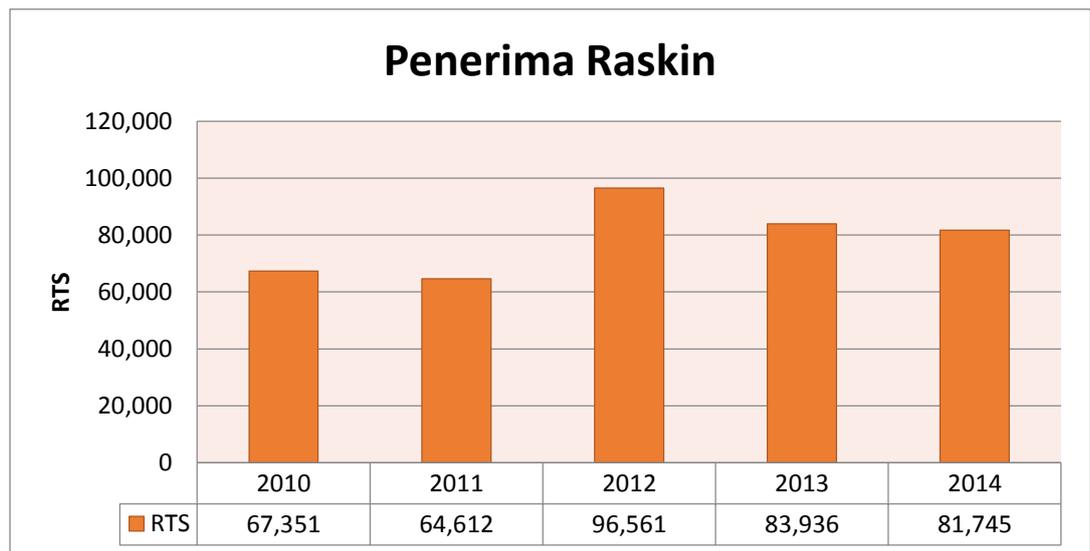
Sumber Dana	2010 (RTS)	2011 (RTS)	2012 (RTS)	2013 (RTS)	2014 (RTS)
APBN	61.971	61.971	93.243	78.103	78.103
APBD	5.380	2.641	3.318	5.833	3.642
Jumlah	67.351	64.612	96.561	83.936	81.745

Sumber data : Bagian Adm Kesra dan Kesmasayarakatan

Berdasar tabel tersebut diatas menunjukkan adanya penurunan jumlah penerima raskin (APBN-APBD) tahun 2014 dibanding tahun 2013 sebesar 2.191 RTS atau 37,56%, target RPJMD tahun 2014 juga tidak tercapai yaitu sebesar 131.465 RTS.

Apabila digambarkan dalam grafik, trendnya tampak seperti berikut :

**Grafik 3.5.3**



Sumber data : Bagian Adm Kesra dan Kesmasayarakatan

Alokasi dana yang disediakan untuk program tersebut berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Sidoarjo. Untuk raskin yang berasal dari dana APBD pendistribusiannya secara teknis menjadi tanggungjawab



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedangkan untuk raskin yang berasal dari dana APBN pendistribusiannya secara teknis menjadi tanggungjawab BULOG.

Kegiatan pendistribusian Raskin APBN yang menjadi tanggungjawab Bulog, sedangkan Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan melaksanakan kegiatan yang berupa Sosialisasi dan Monev. Selama tahun 2014 pelaksanaan Sosialisasi adalah 4 kali (pertriwulan) dan Monev adalah 12 kali (perbulan).

**Tabel 3.5.3.1**

**Sosialisasi dan Monev Raskin Tahun 2010 s.d 2014**

Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014
Sosialisasi	4	4	4	4	4
Monev	12	12	12	12	12

Kegiatan Sosialisasi dan Monev Raskin sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 konstan tidak berubah.

Sosialisasi Raskin dilaksanakan setahun 4 kali tribulan (Tribulan 1 sampai dengan Tribulan IV) sedangkan Monev atau Monitoring dan Evaluasi Raskin dilaksanakan setahun 12 kali atau tiap bulan (12 kali) dalam setahun.

Perkembangan alokasi dana raskin sebagai berikut :

**Tabel 3.5.3.2**

**Perkembangan alokasi dana Raskin tahun 2010 s.d2014**

Tahun	Sumber Dana (Rp)		Jumlah (Rp)
	APBN	APBD	
2010	48.917.428.560	3.288.706.000	52.206.134.560
2011	19.334.952.000	1.729.855.000	21.064.807.000
2012	26.853.984.000	3.023.487.350	29.877.471.350
2013	22.493.664.000	5.238.034.000	27.731.698.000
2014	22.493.664.000	3.727.250.000	26.220.914.000

Sumber data : Bagian Adm Kesra dan Kemasyarakatan

Tahun 2014 ada penurunan alokasi dana raskin baik APBN maupun APBD sebesar Rp. 1.510.784.000,00 atau 5,45%.



Pada masa yang akan datang diharapkan bantuan bagi masyarakat miskin dapat terus dilakukan sehingga dapat meringankan beban hidup bagi mereka.

#### 1.5.4 Jumlah rumah ibadah yang dibantu

Untuk memelihara kerukunan umat beragama oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo disiapkan bantuan bagi rumah ibadah. Bantuan tersebut berupa bantuan dana bagi kegiatan peribadatan baik membangun sarana maupun kegiatan ibadah.

**Tabel 3.5.4**

Jumlah Rumah Ibadah Yang Dibantu					
Rumah Ibadah	Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014
Masjid	38	93	111	101	123
Mushola	71	193	166	191	262
Pura	0	1	0	0	0
Jumlah.	109	286	277	292	385

*Sumber data : Bagian Adm Kesra dan Kesmasayarakatan*

Untuk pembangunan Masjid, dari 123 bangunan, 105 diantaranya tidak digunakan untuk Safari Sholat Jumat, sedangkan 18 bangunan lainnya digunakan untuk kegiatan Safari Sholat Jumat.

Jumlah yang dibantu setiap tahunnya berfluktuasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan cara mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah kabupaten. Jumlah rumah ibadah yang dibantu tahun 2014 ini sudah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 350 unit.

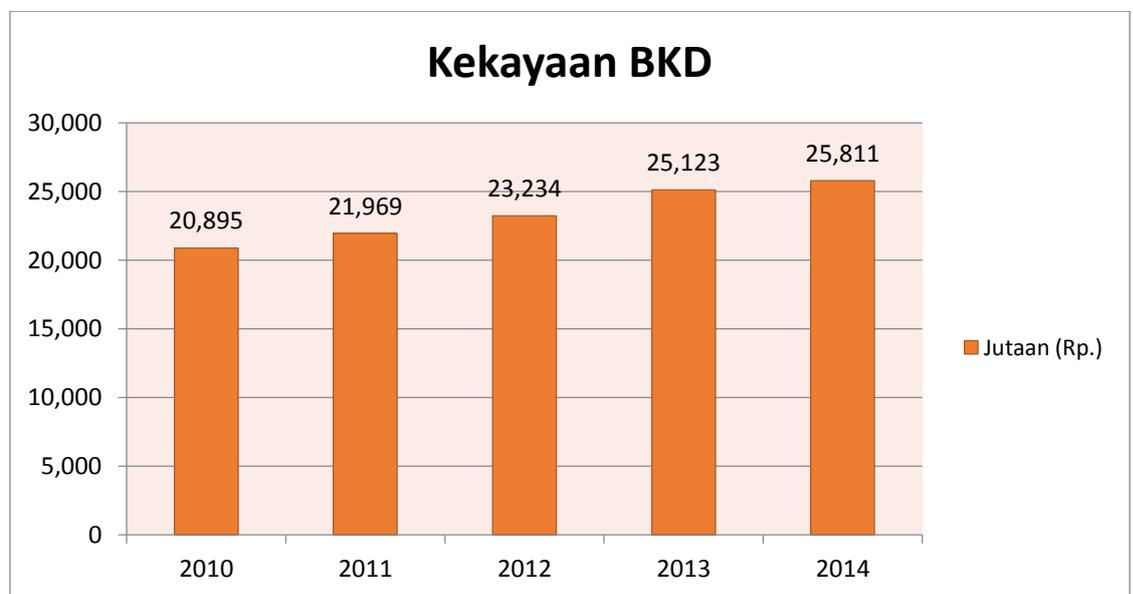
Alokasi dana untuk bantuan rumah ibadah tahun 2014 sebesar Rp. 3.995.000.000,00. Pada masa yang akan datang bantuan sosial keagamaan ini masih perlu diteruskan agar kehidupan beragama dapat lebih semakin baik dan meningkat melalui penganggaran secara tepat sehingga keperluan rumah ibadah bagi masyarakat dapat didukung secara optimal dan melayani masyarakat yang lebih banyak lagi.

### 1.5.5 Jumlah Badan Kredit Desa

Untuk meningkatkan dan menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan maka perlu dikembangkan Badan Kredit Desa (BKD) yang telah terbentuk sebelumnya. Lembaga berasal dari Bank desa dan Lumbung desa. BKD didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat desa melalui rembug desa. BKD merupakan badan usaha milik desa yang merupakan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan desa. BKD ini dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi pedesaan.

Jumlah Badan Kredit Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sebanyak 116 BKD, Badan Kredit Desa yang aktif 97 BKD dan yang non aktif 19 BKD.

**Grafik 3.5.5**  
**Kekayaan Badan Kredit Desa**



Sumber Data : Bagian Adm Perekonomian & SDA

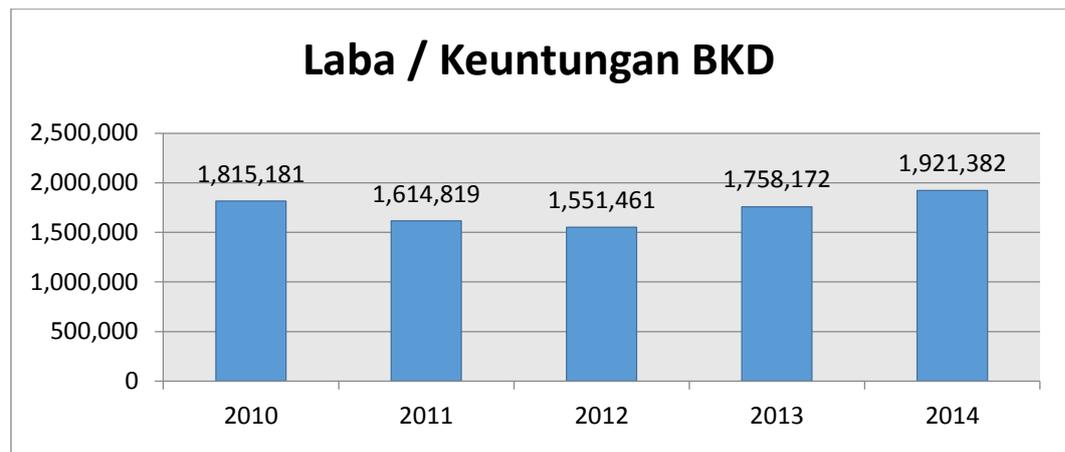
Dari sisi kekayaan dibanding tahun 2013, pada tahun 2014 kekayaan BKD mengalami peningkatan sebesar Rp 688.304.000,00 atau 2,74% yaitu dari kekayaan tahun 2013 yang sebesar Rp.25.122.872.000,00 menjadi sebesar Rp.25.811.176.000,00 di tahun 2014, disebabkan adanya rutinitas pemantauan, pembinaan dan pengembangan yang selalu dilakukan oleh tim badan kredit desa dari instansi terkait. Realisasi

tahun 2014 ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 24.189.000.000,00.

Sedangkan dari sisi laba / keuntungan BKD secara kumulatif juga mengalami peningkatan sebesar Rp.163.210.000,00 dari laba tahun 2013 yang sebesar Rp.1.758.172.000,00, menjadi sebesar Rp.1.921.382.000,00 di tahun 2014.

### Grafik 3.5.5.1

#### Laba/Keuntungan BKD



Sumber Data : Bagian Adm perekonomian & SDA

Upaya oleh BKD untuk meningkatkan laba antara lain :

- 1) Penagihan secara intensif kepada nasabah yang mempunyai tunggakan;
- 2) Efisiensi pengeluaran khususnya biaya operasional

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja BKD, antara lain :

- 1) Selalu melakukan pembinaan dan pemantauan secara rutin oleh Tim Badan Kredit Desa dari Instansi Terkait;
- 2) Mengadakan Bimtek terhadap pengelola BKD;

Lembaga ini cukup dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu pada masa yang akan datang perlu diperkuat kelembagaannya dan melakukan penagihan tunggakan lebih intensif, sehingga lembaga ini dapat mencakup dan melayani masyarakat yang lebih banyak lagi.

Sasaran 6. **Meningkatnya Minat Baca bagi Masyarakat utamanya bagi para pelajar** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

### 1.6.1 Pengunjung Perpustakaan

Perkembangan Jumlah pengunjung perpustakaan seperti terlihat pada grafik berikut ini

**Grafik 3.6.1**

#### Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan



Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip

Realisasi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2014 tercapai sebanyak 85.185 pengunjung dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 59.621 pengunjung, maka realisasi tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 25.564 pengunjung atau 42,88% dan sudah melampaui target RPJMD tahun 2014 sebesar 46.590 pengunjung, maka capaian target tingkat kunjungan perpustakaan telah tercapai sebesar 182,83%. Hal ini disebabkan :

- (1) Peningkatan prasarana perpustakaan yang representatif berupa adanya penambahan ruang area *free wifi*
- (2) Penambahan koleksi Buku
- (3) Penambahan Jam pelayanan dari 9 jam menjadi 11 jam
- (4) Adanya armada perpustakaan keliling sebanyak 3 (tiga) unit



- (5) Perpustakaan Online/dibukanya media jejaring sosial (internet) pada Perpustakaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Upaya untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan, antara lain :

- (1) Menyebarkan brosur kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo dan pengunjung perpustakaan
- (2) Mengoperasionalkan Mobil Perpustakaan Keliling ke sekolah - sekolah dan ke Desa/Kelurahan serta mengikuti kegiatan car free day setiap minggu
- (3) Memberikan layanan yang mudah dan cepat pada pengunjung perpustakaan dalam hal pembuatan kartu anggota maupun dalam hal peminjaman koleksi perpustakaan
- (4) Mengadakan kegiatan peningkatan SDM masyarakat tanpa dipungut biaya seperti
  - kursus komputer
  - kursus bahasa inggris
  - Pelatihan jurnalistik
- (5) Mengadakan kegiatan - kegiatan yang melibatkan masyarakat dan mitra perpustakaan seperti :
  - Lomba memasak hasil baca buku dari Perpustakaan
  - Lomba mendongeng
  - Lomba uji cerdas implementasi baca

### **1.6.2 Jumlah buku perpustakaan**

Realisasi jumlah buku pada tahun 2014 tercapai sebanyak 74.708 eksemplar, sudah melampaui target RPJMD tahun 2014 sebanyak 57.000 eksemplar atau capaiannya sebesar 131%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 70.032 eksemplar jumlah buku mengalami peningkatan sebanyak 4.676 eksemplar atau 6,68%. Dengan semakin banyaknya koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan ini diharapkan akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan.

Perkembangan jumlah buku perpustakaan seperti terlihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.6.2**  
**Perkembangan Jumlah Buku Perpustakaan**



*Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip*

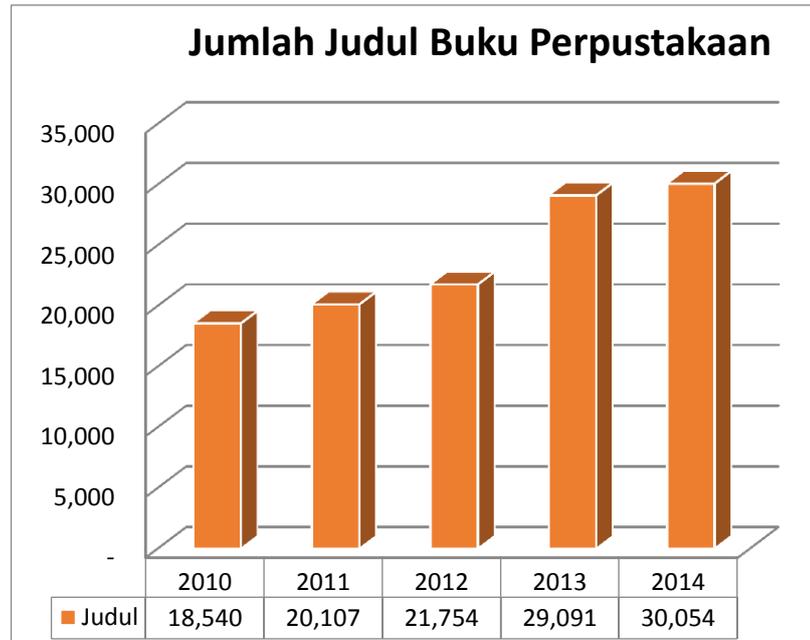
Jumlah buku perpustakaan dari tahun ke tahun semakin meningkat karena pengadaan buku menjadi prioritas utama kegiatan perpustakaan. Dari grafik terlihat bahwa penambahan buku sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu bertambah/meningkat secara signifikan, hal ini karena meningkatnya minat baca dan permintaan judul buku oleh masyarakat pengguna perpustakaan.

### **1.6.3 Jumlah judul buku perpustakaan**

Realisasi tahun 2014 sebanyak 30.054 judul, sedangkan realisasi tahun 2013 sebanyak 29.091 judul ada peningkatan sebanyak 963 judul atau 3,31% dan sudah melampaui target RPJMD tahun 2014 sebanyak 25.151 judul buku.

Dengan semakin banyaknya judul buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Sidoarjo merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan peminjam di Perpustakaan Sidoarjo.

Perkembangan jumlah judul buku perpustakaan seperti terlihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.6.3****Jumlah Judul Buku Perpustakaan**

Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip

Jumlah judul buku perpustakaan dari tahun ke tahun semakin meningkat karena pengadaan buku menjadi prioritas utama kegiatan perpustakaan.

**1.6.4 Jumlah peminjam**

Target yang ditetapkan untuk tahun 2014 adalah sebanyak 23.500 peminjam dan terealisasi sebanyak 38.538 peminjam atau tercapai 164%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 27.981 peminjam terjadi peningkatan sebanyak 10.557 peminjam atau sebesar 38,07%.

Peningkatan jumlah pengunjung Perpustakaan, yang cukup besar ini disebabkan antara lain, yaitu :

- (1) Peningkatan pelayanan di perpustakaan yang berbasis otomasi.
- (2) Penyederhanaan sistem pelayanan di perpustakaan
- (3) Publikasi koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan melalui jejaring sosial dan web perpustakaan serta pembuatan Bibliografi

Perkembangan jumlah peminjam dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.6.4

## Perkembangan Jumlah Peminjam Perpustakaan



Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip

### 1.6.5 Jumlah Perpustakaan keliling

Perpustakaan keliling di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) unit mobil yang melayani masyarakat di 18 kecamatan secara bergiliran terjadwal, tidak ada penambahan unit mobil perpustakaan keliling sejak tahun 2012. Perpustakaan keliling juga sebagai sarana promosi bagi masyarakat untuk datang ke perpustakaan.

Adapun upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan untuk pencapaian semua target tersebut adalah :

1. Menambah jumlah SDM untuk mengemudikan mobil perpustakaan
2. Mengoperasionalkan mobil perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah dan desa/kelurahan serta mengikuti kegiatan car free day setiap minggu.

Prestasi di Tingkat Provinsi yang diraih :

- Tahun 2011
  - Juara III Lomba Mendongeng Tingkat SD se Propinsi Jawa Timur Tahun 2011.



- Tahun 2012
  - Juara II Lomba Mendongeng Tingkat SD se Propinsi Jawa Timur Tahun 2012
  - Juara Harapan II Lomba Perpustakaan Tingkat SMA se Propinsi Jawa Timur Tahun 2012
- Tahun 2014 :
  - Juara Harapan II Lomba Perpustakaan Sekolah SLTA Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Perpustakaan SMK Negeri 2 Buduran
  - Kategori 10 Besar Perpustakaan Desa Terbaik se- Jawa Timur Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
  - Kategori 10 Besar Perpustakaan Sekolah Terbaik se- Jawa Timur MTs Negeri Sidoarjo

Perkembangan Jumlah pengunjung perpustakaan seperti terlihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.6.5**

**Jumlah Pengunjung Perpustakaan**



Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip



Sasaran 7. **Meningkatnya pelayanan Ketrasmigrasian** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

Pada tahun 2014 transmigran yang akan diberangkatkan ke Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 5KK (20 Jiwa) belum dapat diberangkatkan karena SPP (Surat Perintah Pemberangkatan) belum diterbitkan karena daerah tujuan masih terdapat kendala yaitu Lahan Usaha (LU) II masih dalam penyelesaian dan direncanakan selesai pada awal Tahun 2015 dan Transmigran direncanakan diberangkatkan pada triwulan I tahun 2015. Sehingga target tahun 2014 belum dapat dicapai.

**MISI 2. Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat**

Untuk mencapai misi **menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat** ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran.

Hasil penilaian pencapaian sasaran misi ini pada tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Tujuan – Sasaran	Tingkat keberhasilan
Tujuan 1 : <i>Meningkatnya Daya Saing Daerah</i>		
Sasaran :		
1.	Meningkatnya daya saing sektor UMKM dan Koperasi	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah (utama)	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian	Sangat Berhasil
5.	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Sangat Berhasil
6.	Meningkatnya produksi sektor industri	Sangat Berhasil
7.	Meningkatnya Volume Perdagangan	Sangat Berhasil

Pencapaian ke 7 (tujuh) sasaran tersebut dilaksanakan melalui 7 (tujuh) urusan yaitu urusan koperasi usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, perindustrian dan urusan



perdagangan oleh satuan kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

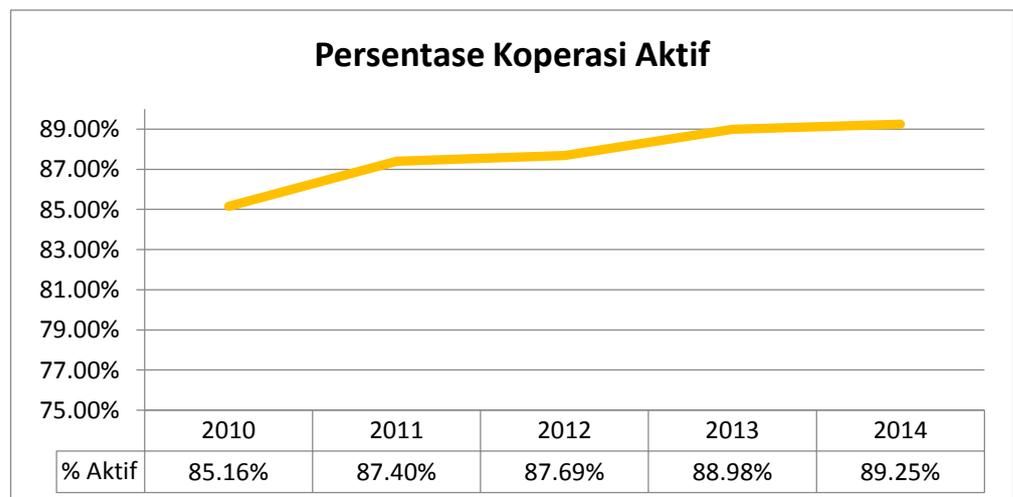
Uraian hasil pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. **Meningkatnya daya saing sektor UMKM dan Koperasi** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

### 2.1.1 Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif pada tahun 2014 sebesar 89,25%, dimana sebanyak 1.179 unit koperasi dinyatakan masih aktif beroperasi dari sekitar 1.321 unit koperasi. Jumlah ini sudah melampaui target RPJMD sebesar 87,79 %. Jika dibandingkan dengan persentase koperasi aktif tahun 2013 sebesar 88,98% terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,27%. Perkembangan persentase koperasi aktif selama lima tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut :

**Grafik 3.2.1.1**  
**Persentase Koperasi Aktif**

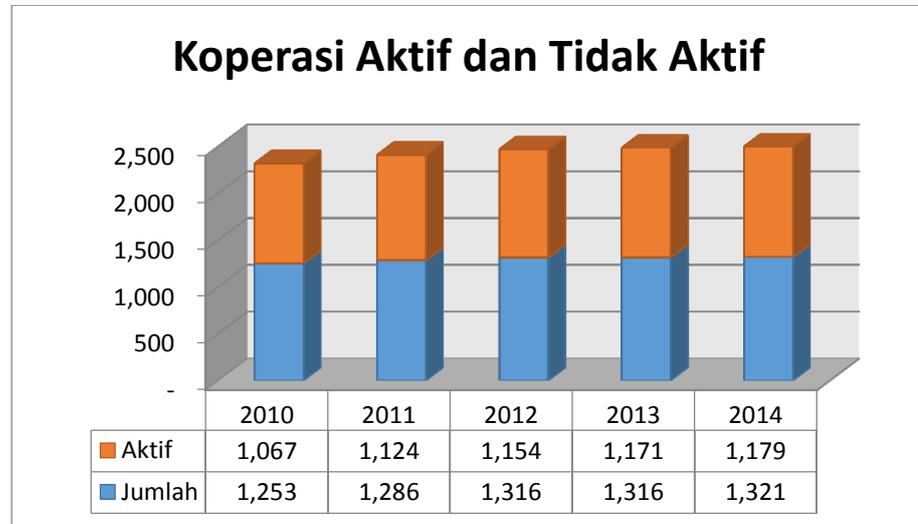


Sumber data :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Jumlah koperasi aktif pada tahun 2013 sebanyak 1.171 unit menjadi 1.179 unit ditahun 2014 atau terjadi peningkatan 8 unit koperasi.

Perkembangan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif selama lima tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut :

**Grafik 3.2.1.1.1**  
**Koperasi Aktif dan Tidak Aktif**



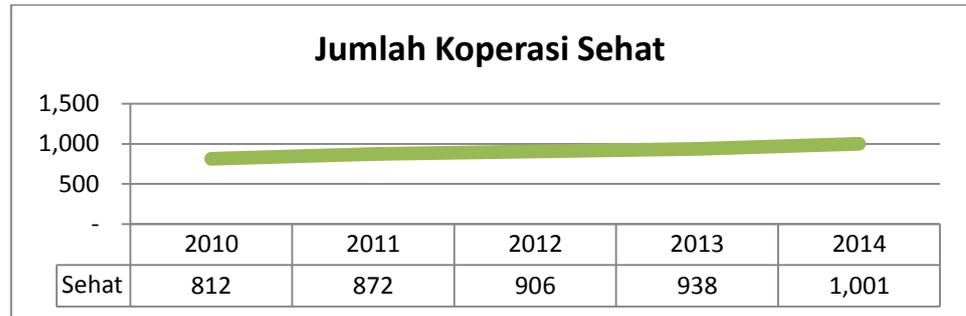
Sumber data :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Jumlah koperasi aktif meningkat, hal ini disebabkan karena adanya pendirian koperasi baru di Kecamatan Sidoarjo (3 koperasi), Kecamatan Porong (1 koperasi) dan Kecamatan Prambon (1 koperasi). Sedangkan koperasi yang sudah tidak aktif dan akan diaktifkan kembali sebanyak 3 koperasi yaitu Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sidoarjo.

### 2.1.2 Jumlah KSP/USP Sehat

Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek yaitu pemodalannya, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Berikut adalah grafik perkembangan jumlah KSP/USP sehat selama lima tahun terakhir.

**Grafik 3.2.1.2**  
**Jumlah Koperasi Sehat**



Sumber data :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Jumlah KSP/USP sehat tahun 2014 sebanyak 1.001 koperasi, tercapai 101,73% dibandingkan dengan target yang direncanakan sebanyak 984 koperasi. Apabila dibandingkan dengan KSP/USP sehat tahun 2013 sebanyak 938 koperasi terjadi kenaikan 63 koperasi.

### 2.1.3 Jumlah Modal Koperasi

Permodalan merupakan salah satu input usaha koperasi. Semakin besar modal koperasi semakin tinggi kemampuan koperasi melakukan ekspansi usaha. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar/pinjaman. Perkembangan jumlah modal koperasi selama lima tahun terakhir terangkum pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.1.3**



Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

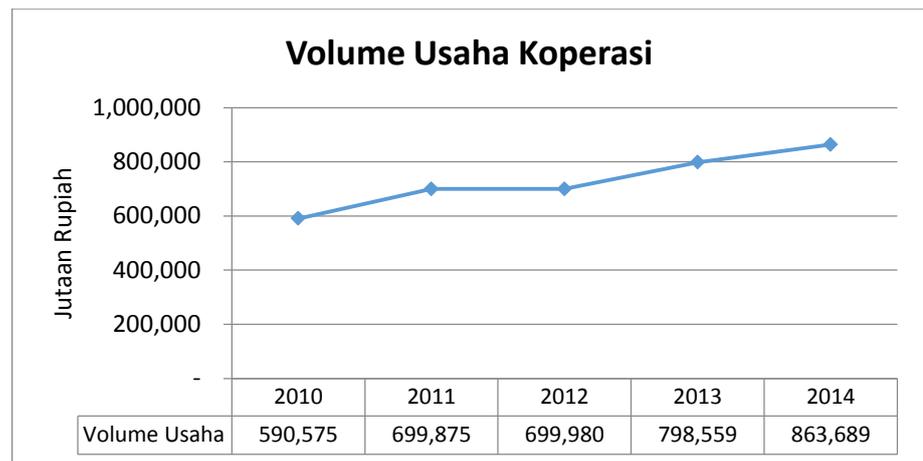
Realisasi jumlah modal koperasi pada tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2013 dari Rp. 624.293.767.000,00 menjadi Rp.651.355.397.000,00. Realisasi tahun 2014 ini jauh melebihi target RPJMD yang sebesar Rp. 172.296.810.344,00.

#### 2.1.4 Jumlah volume usaha koperasi

Sebagai salah satu bentuk usaha, *output* koperasi dinyatakan dalam volume usaha. Semakin besar volume usaha mencerminkan semakin berkembangnya bisnis dan ekonomi koperasi.

Perkembangan jumlah volume usaha koperasi selama empat tahun terakhir terdapat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.1.4**



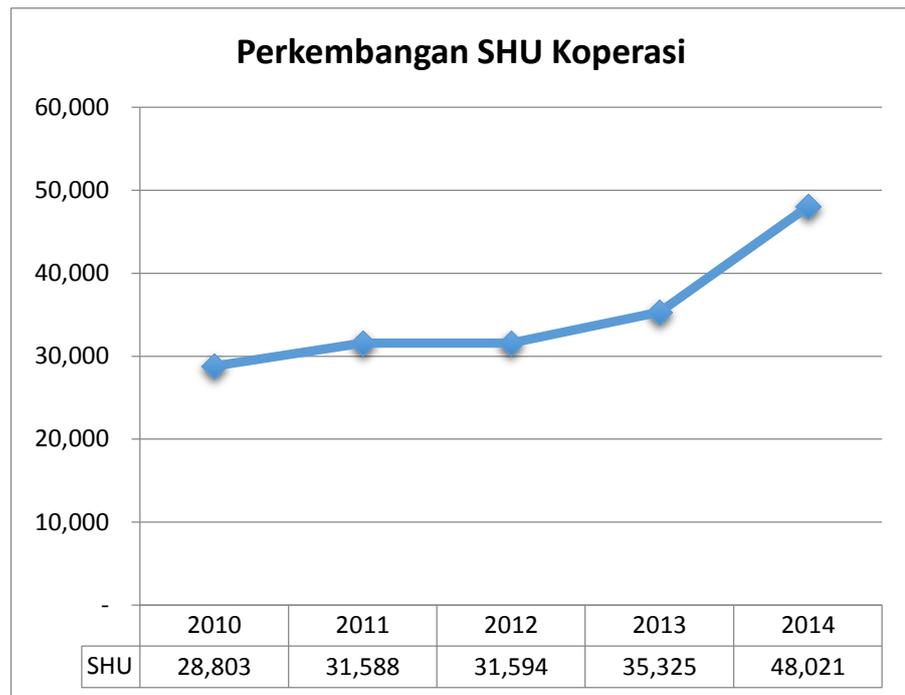
Sumber data :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Realisasi jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 863.689.504.000,00 atau meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp. 798.558.685.000,00. Dibandingkan target yang ditetapkan tahun 2014 sebesar Rp. 585.506.598.116,00 maka capaian kinerjanya tercapai sebesar 147,51%. Upaya yang dilakukan adalah monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi aktif dan tidak aktif serta bimbingan teknis perkoperasian bagi wirausaha.

#### 2.1.5 Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi

Jumlah SHU koperasi cenderung terus meningkat, sebagaimana dapat dilihat selama empat tahun terakhir pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.1.5**  
**Perkembangan SHU Koperasi**



Sumber data :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Jumlah SHU koperasi tahun 2014 sebesar Rp. 48.021.918.000,00 meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp. 35.324.596.000,00. Realisasi tahun 2014 ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar Rp. 28.802.916.056,00. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah anggota koperasi yang melakukan simpan pinjam.

#### **2.1.6 Jumlah usaha mikro**

Perkembangan jumlah usaha mikro selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.1.6**  
**Perkembangan Usaha Mikro**



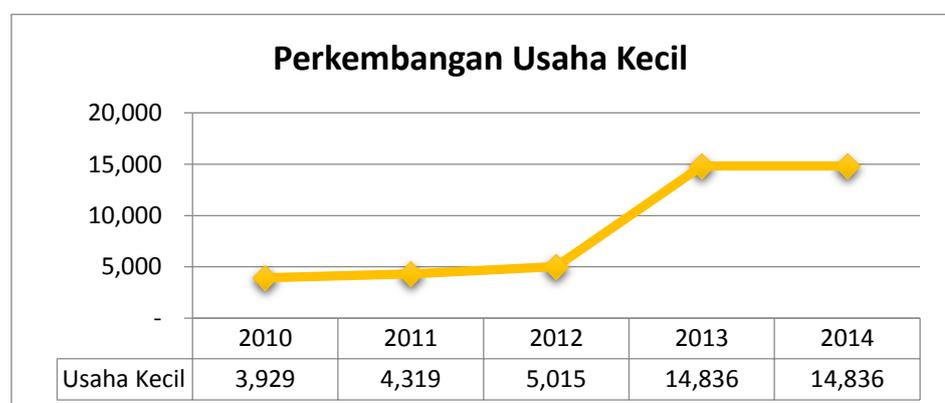
Sumber data :Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo

Realisasi tahun 2014 sebanyak 154.892 unit sama dengan realisasi tahun 2013, hal ini disebabkan karena pihak BPS masih melakukan pendataan ulang. Capaian realisasi ini jauh melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 9.074 unit.

### 2.1.7 Jumlah usaha kecil

Perkembangan jumlah usaha kecil selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.1.7**  
**Perkembangan Usaha Kecil**



Sumber data :Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo



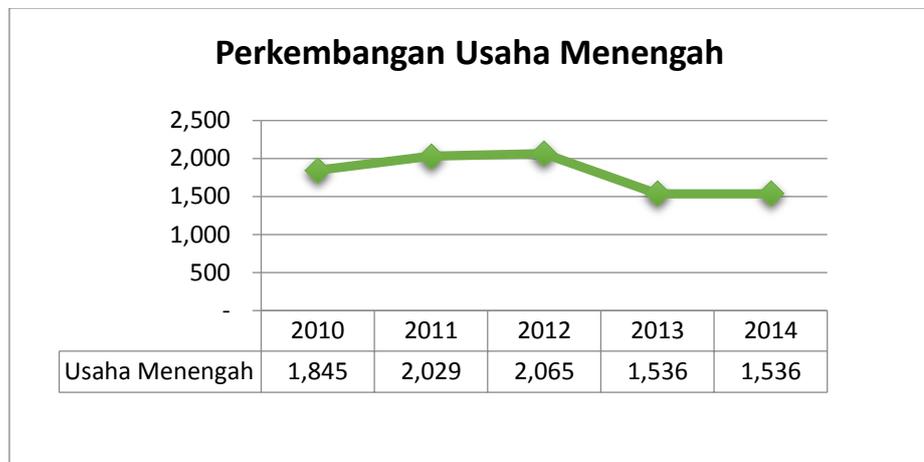
Jumlah usaha kecil pada tahun 2014 sama dengan tahun 2013 atau tidak terjadi perubahan, yaitu sebanyak 14.836 unit. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2014 sebanyak 4.005 unit tercapai sebesar 371,11%. Hal ini disebabkan antara lain pembinaan, pelatihan, bantuan peralatan ketrampilan dan pemberian pinjaman modal lunak dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

### 2.1.8 Jumlah usaha menengah

Perkembangan jumlah usaha menengah selama lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.1.8**

#### Perkembangan Usaha Menengah



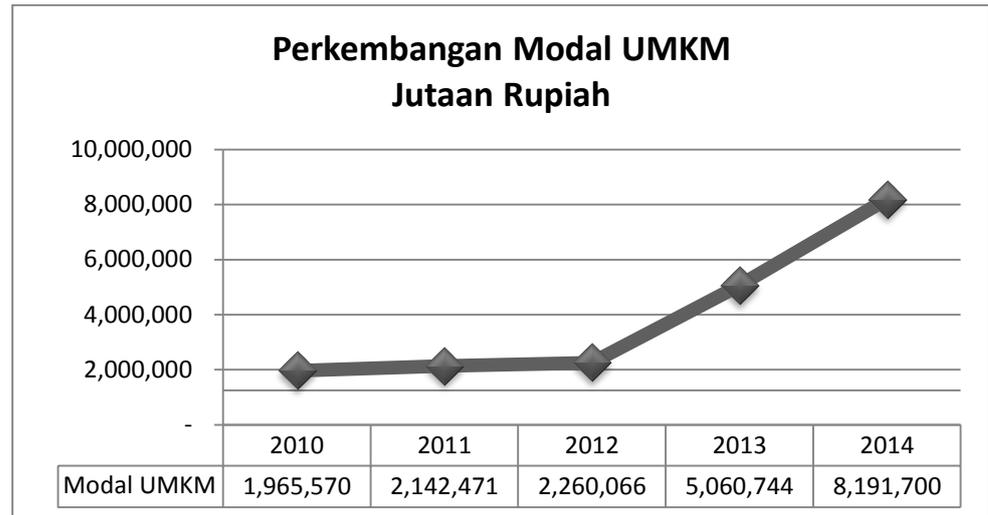
Sumber data :Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo

Realisasi jumlah usaha menengah tahun 2014 juga masih sama dengan tahun 2013 yaitu sebanyak 1.536 unit. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2014 sebanyak 2.053 unit tercapai sebesar 74,82%. Hal ini disebabkan sebagian unit usaha menengah memecah diri menjadi usaha-usaha mikro yang mandiri.

### 2.1.9 Jumlah Modal UMKM

Berikut ini adalah grafik perkembangan jumlah modal UMKM selama lima tahun terakhir.

**Grafik 3.2.1.9**  
**Jumlah Modal UMKM**



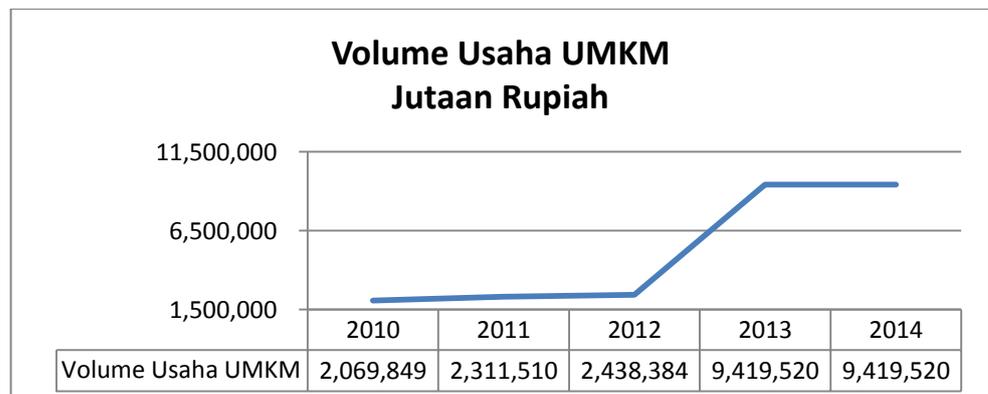
Sumber data :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Realisasi jumlah modal UMKM tahun 2014 sebesar Rp.8.191.700.000.000,00 meningkat sebesar 62,19% dibanding realisasi tahun 2013 yang sebesar Rp. 5.060.744.000.000,00. Realisasi tersebut tercapai sebesar 416,76% dari target yang ditetapkan tahun 2014 sebesar Rp. 1.965.570.000.395,00. Hal ini disebabkan semakin banyaknya UMKM dari tahun ke tahun yang ada di Sidoarjo

#### 2.1.10 Jumlah volume usaha UMKM

Perkembangan jumlah volume usaha UMKM selama lima tahun terakhir terdapat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.2.1.10**



Sumber data :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



Realisasi jumlah volume usaha UMKM tahun 2014 sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 9.419.520.000.000,00.

Realisasi tersebut tercapai 456,41% dari target yang direncanakan tahun 2014 sebesar Rp. 2.063.848.500.412,00. Hal ini disebabkan Sidoarjo sebagai kota UMKM dimana semakin tumbuh kembangnya UMKM yang ada di Sidoarjo.

Sasaran 2. ***Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

### **2.2.1 Pola Pangan Harapan.**

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi.

Sub sistem ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari produksi Kabupaten, cadangan pangan dalam Kabupaten maupun dari luar Kabupaten.

Sub sistem distribusi mencakup pengaturan untuk menjamin aksesibilitas penduduk secara fisik dan ekonomi terhadap pangan antar-wilayah dan waktu serta stabilitas harga pangan strategis.

Sub sistem konsumsi mencakup pengelolaan pangan di tingkat daerah maupun rumah tangga. Untuk menjamin setiap individu memperoleh pangan dalam jumlah, gizi, keamanan, keragaman dan keterjangkauan sesuai kebutuhan dan pilihan.

Aspek ketersediaan pangan di Kabupaten Sidoarjo telah mencukupi sampai pelosok wilayah, walaupun produksi tidak cukup tersedia, sehingga untuk mencukupi ketersediaan diperlukan bahan pangan dari luar daerah Kabupaten Sidoarjo.

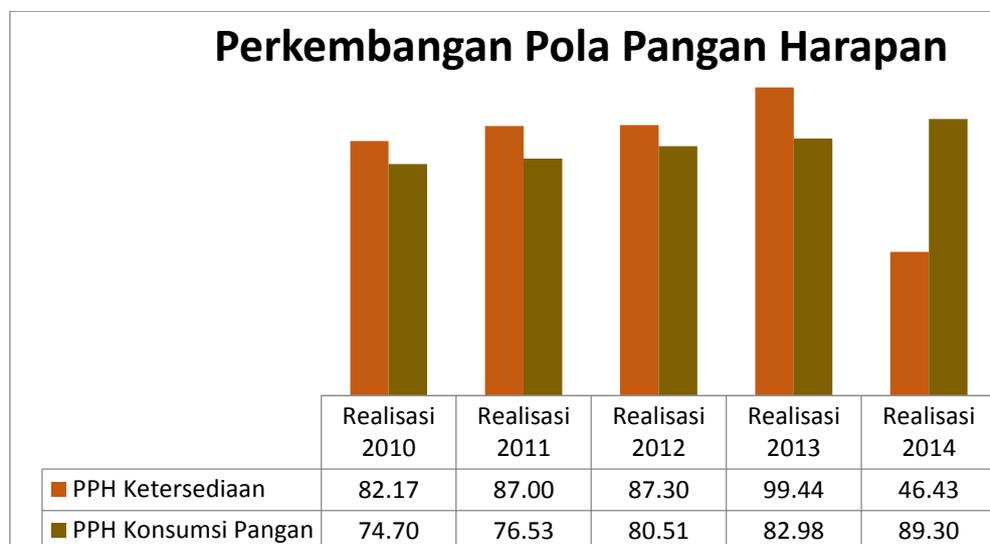
Untuk aspek kualitas pangan dari semua unsur yang dibutuhkan yaitu karbohidrat, protein nabati maupun hewani telah tersedia dan cukup untuk dikonsumsi meskipun sebagian mendatangkan dari luar daerah.

Aspek distribusi yang berfungsi dengan baik akan mampu menggerakkan produk pangan kepada konsumen dalam waktu, tempat, bentuk dan mutu yang diinginkan dengan biaya minimal. Dengan

demikian efisiensi sistem distribusi secara langsung ataupun tidak langsung akan berkaitan dengan daya beli masyarakat dan pendapatan petani.

Aspek konsumsi pangan dikatakan ideal apabila pangan masyarakat telah memenuhi kaidah pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Kondisi itu dapat dilihat dari aspek kuantitas dan aspek kualitas. Kuantitas pangan digunakan untuk mengetahui cukup atau tidaknya jumlah konsumsi pangan penduduk untuk hidup sehat dan produktif, sedangkan kualitas pangan digunakan untuk mengetahui keseimbangan gizi dari anekaragam pangan yang dikonsumsi penduduk. Perkembangan realisasi pola pangan harapan selama lima tahun terakhir terlihat pada grafik berikut :

**Grafik 3.2.2.1**



*Sumber data : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan*

Realisasi skor PPH Ketersediaan tahun 2014 sebesar 46,43 hal ini disebabkan produktifitas kurang antara lain disebabkan :

- Terjadinya anomaly iklim
- Adanya alih fungsi lahan
- Beralih tenaga kerja sector pertanian ke sektor industry

Adapun PPH Ketersediaan tahun 2014 sebagaimana daftar sebagai berikut :



Tabel 3.2.2.1  
PPH Ketersediaan Tahun 2014

No	Kelompok Pangan	Gr/Kop/Hr	Kkal/Kop/Hr	%	Skor PPH
1	Padi – Padian	272.02	978	70.66	20.38
2	Umbi – Umbian	72.23	94.62	6.84	1.97
3	Pangan Hewani	65.34	69.09	4.99	5.76
4	Minyak dan Lemak	0.57	4	0.29	0.08
5	Buah/Biji Berminyak	0	0	0.00	0.00
6	Kacang - Kacangan	26.17	100	7.23	8.33
7	Gula	24.96	90.85	6.56	1.89
8	Sayur dan Buah	191.05	38.5	2.78	8.02
	<b>Jumlah</b>	652.34	1.384,1	100.000	46.43

Sumber : Hasil Kajian Universitas Brawijaya Malang

Realisasi konsumsi pangan tahun 2014 sebesar 89,25 %. Apabila dibandingkan target RPJMD yang sebesar 92,60 % telah mencapai 96,44 %.

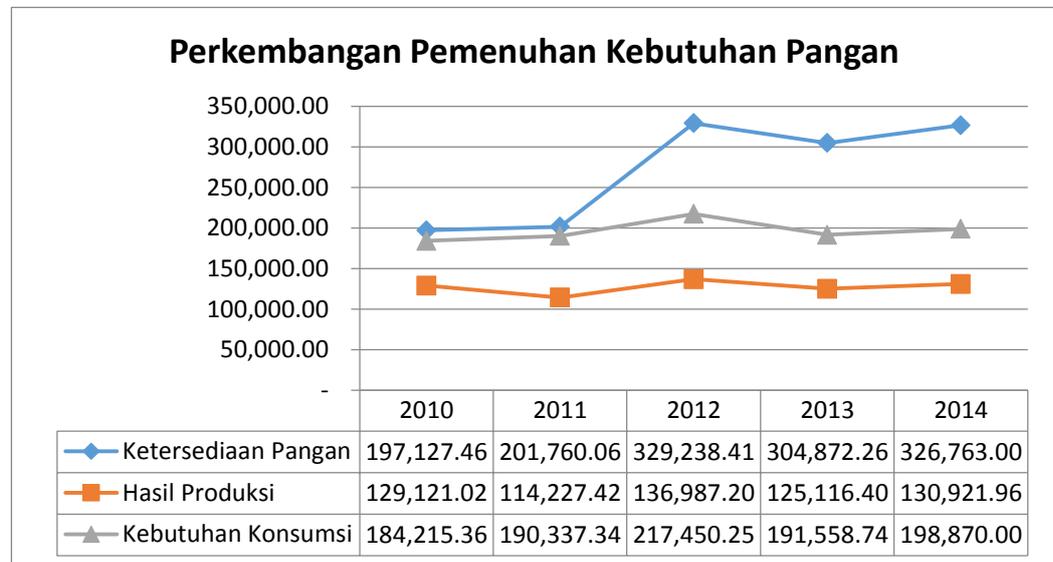
## 2.2.2 Ketersediaan Pangan Daerah

Hasil produksi kabupaten Sidoarjo untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah masih kurang, sehingga perlu dipasok dari daerah lain. Untuk memenuhi ketersediaan pangan khususnya beras.

Perkembangan pemenuhan kebutuhan pangan khususnya beras tahun 2010 s.d 2014 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.2.2.2**

Perkembangan Pemenuhan Kebutuhan Pangan



Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan

Realisasi ketersediaan pangan tahun 2014 sebesar 326.763 ton. Dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 373.800 ton, capaiannya sebesar 87,42 %.

Untuk menunjang Ketersediaan Pangan berupa energy 2400 kkd/kap/hr dan protein 63 gr/kop/hr diperlukan berbagai upaya berikut :

- Optimalisasi pekarangan melalui pengembangan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat meningkat ketersediaan pangan (protein dan mineral) ditingkat rumah tangga sehingga kecukupan pangan dapat terpenuhi. Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan KRPL di 16 Kelompok/Desa;
- Peningkatan cadangan pangan melalui kegiatan Lembaga Pembelian Gabah Petani (LPG) diharapkan dapat menjadi mitra kerja kelompok tani / gapoktan mampu untuk menyediakan pangan khususnya beras dan menstabilkan harga gabah ditingkat petani,



untuk tahun 2014 terdapat 35 LPG yang mendapatkan dana bergulir untuk pembelian gabah petani.

Sasaran 3. ***Meningkatnya Produksi Perikanan*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

### **2.3.1 Produksi perikanan**

Meningkatnya produksi perikanan digambarkan dengan jumlah produksi perikanan yang dihitung dalam satuan kilogram (kg).

Realisasi hasil tangkap ikan laut pada tahun 2014 sebesar 14.828.000 kg meningkat sebesar 168.404kg apabila dibanding tahun 2013 sebesar 14.659.596 kg dan telah melampaui target kinerja (RPJMD) tahun 2014 yang sebesar 13.819.600 kg. Produksi perikanan laut mengalami peningkatan karena adanya :

- 1) Penambahan 2 (dua) jenis komoditi tangkapan dari 10 (sepuluh) menjadi 12 (dua belas) yaitu ikan kakap dan keong laut.
- 2) Pembinaan atau pelatihan dan hibah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo terhadap para nelayan

Realisasi hasil tangkap perairan umum pada tahun 2014 sebesar 449.280 kg meningkat sebesar 65.500 kg dibandingkan tahun 2013 sebesar 383.780 kg, dan sudah mencapai target dalam RPJMD tahun 2014 yang sebesar 422.400 kg. Produksi perikanan perairan umum mengalami pasang surut dan masih terdapat permasalahan sehubungan dengan pencarian ikan di perairan umum yaitu masih banyak pencari ikan yang menggunakan electrical fishing (setrum) dan bahan peledak sehingga merusak ekosistem di perairan umum, Sejalan ini pemerintah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang cara penangkapan ikan yang benar dan menebar benih ikan di sungai-sungai, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan stock sumber daya ikan pada perairan umum dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatannya.



Realisasi hasil produksi kolam pada tahun 2014 sebesar 18.377.900kg meningkat sebesar 2.828.900 kg dibandingkan tahun 2013 sebesar 15.549.000 kg dan telah jauh melampaui target kinerja (RPJMD) tahun 2014 yang sebesar 4.140.000 kg.

Produksi perikanan kolam mengalami peningkatan cukup tinggi dikarenakan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pada budi daya ikan. Produksi perikanan kolam mengalami peningkatan utamanya untuk jenis ikan lele, namun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produksi ikan kolam adalah terbatasnya lahan untuk pengembangan budidaya, dan anggapan pembudi daya bahwa budidaya ikan adalah kegiatan sampingan. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan kolam adalah :

- a. Pelatihan/ pembinaan budi daya ikan air tawar .
- b. Peningkatan teknologi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi pada budi daya ikan air tawar.
- c. Memberikan stimulan/bantuan/hibah sarana dan prasarana budidaya

Perkembangan jumlah produksi perikanan tahun 2010 - 2014 terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.2.3.1



Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan



Untuk realisasi produksi tambak tahun 2014 adalah sebesar 77.223.800 kg. Apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2013 yang sebanyak 70.887.300 kg peningkatan sebesar 6.336.500 kg, dan telah melampaui target kinerja (RPJMD) tahun 2014 yang sebesar 56.373.800 kg. Produksi perikanan tambak yang mengalami peningkatan utamanya untuk jenis ikan bandeng, nila dan udang vannamei. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan tambak supaya lebih optimal dan untuk tetap mempertahankan kondisi tambak tidak rusak, yaitu pembinaan yang lebih efektif terhadap Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi pembudidaya, dan kegiatan rehabilitasi saluran tambak.

Grafik 3.2.3.1.1



### 2.3.2 Tingkat produktivitas

Meningkatnya produktivitas udang windu dan bandeng digambarkan dengan jumlah produksi udang windu dan bandeng per hektar per tahun dengan satuan kg/ha/th.

Perkembangan produktivitas udang windu dan bandeng tahun 2010 s.d 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.2.3.2



Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan

Realisasi produktivitas udang windu pada tahun 2014 sebesar 259 kg/ha/th meningkat sebesar 5 kg/ha/th dari tahun 2013 sebesar 254 kg/ha/th, namun demikian belum mencapai target RPJMD tahun 2014 yang ditetapkan sebesar 263 kg/ha/th disebabkan pola budidaya masih tradisional (organik) dan adanya penyakit WSSV (White Spot Syndrome Vyrus).

Sedangkan realisasi produktivitas bandeng pada tahun 2014 sebesar 2.225 kg/ha/th meningkat sebesar 225 kg/ha/th dari tahun 2013 sebesar 2.000 kg/ha/th. Untuk produktivitas bandeng juga belum mencapai target RPJMD tahun 2014 yang ditetapkan sebesar 2.534 kg/ha/th disebabkan mayoritas pola budidaya masih tradisional (tanpa pakan), padat tebar, benih rendah, beberapa tambak mengalami tanggul jebol (pasang tinggi pada bulan Mei 2014)

Faktor-faktor pendukung yang berpengaruh terhadap meningkatnya produktivitas udang dan bandeng adalah :

- 1) Pelatihan/Pembinaan pada pembudidaya

- 2) Adanya bantuan / hibah sarana produksi tambak dari APBD
- 3) Intensifikasi dan peningkatan teknologi pada budidaya tambak

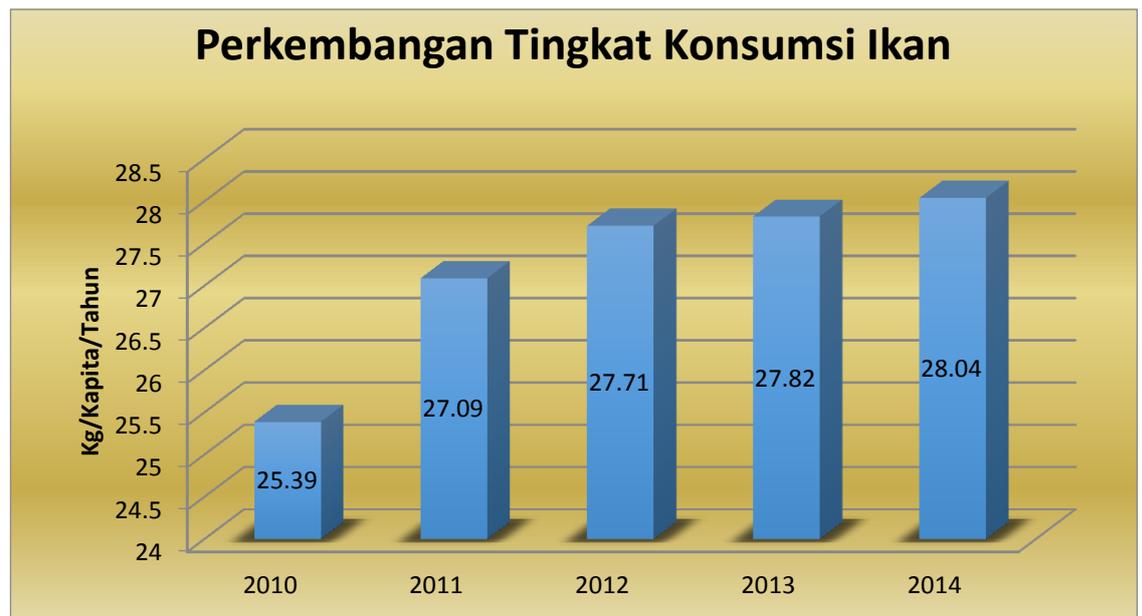
### 2.3.3 Tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Sidoarjo tahun 2014 sebesar 28,04 kg/kapita/th dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 27,82 kg/kapita/th terjadi peningkatan konsumsi ikan sebesar 0,22 kg/kapita/th. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Sidoarjo karena semakin bertambahnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan, adanya sosialisasi gemar ikan, selain itu Diversifikasi olahan ikan, harga ikan relatif lebih murah dan kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan protein hewan lain.

Perkembangan tingkat konsumsi ikan untuk tahun 2014 sudah melampaui target RPJMD tahun 2014 sebesar 27,25 kg/kapita/th.

Perkembangan tingkat konsumsi ikan dari tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.2.3.3



Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan

Sasaran 4. **Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:



### 2.4.1 Produksi tanaman pangan dan hortikultura berupa padi, jagung, kacang hijau, kedelai, sawi, bayam dan kangkung

Perkembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.4.1**

#### **Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kw)**

JENIS/TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Padi</b>	2.061.515,00	1.972.500,38	2.112.338,00	1.979.690,00	2.041.380,00
<b>Jagung</b>	7.156,00	15.712,10	14.444,00	11.766,00	2.170,00
<b>Kacang Hijau</b>	13.073,00	22.789,68	22.317,00	19.040,00	23.340,00
<b>Kedelai</b>	13.186,00	12.294,73	13.151,00	15.627,00	18.028,00
<b>Sawi</b>	74.561,00	54.562,00	53.967,00	49.243,00	45.098,00
<b>Bayam</b>	31.274,00	40.285,00	41.389,00	47.188,00	52.535,00
<b>Kangkung</b>	43.445,00	35.785,00	48.723,00	49.190,00	47.040,00

*Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan*

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa produksi komoditas padi, kacang hijau, kedelai dan bayam mengalami peningkatan disebabkan petani menggunakan benih / bibit unggul yang berlabel dan adanya antisipasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara dini untuk mengatasi serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT yaitu Wereng Batang Coklat (WBC), tikus dan *Xantomonas Oryzae* di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sehingga serangan OPT tidak menyebar luas ke seluruh wilayah kabupaten Sidoarjo.

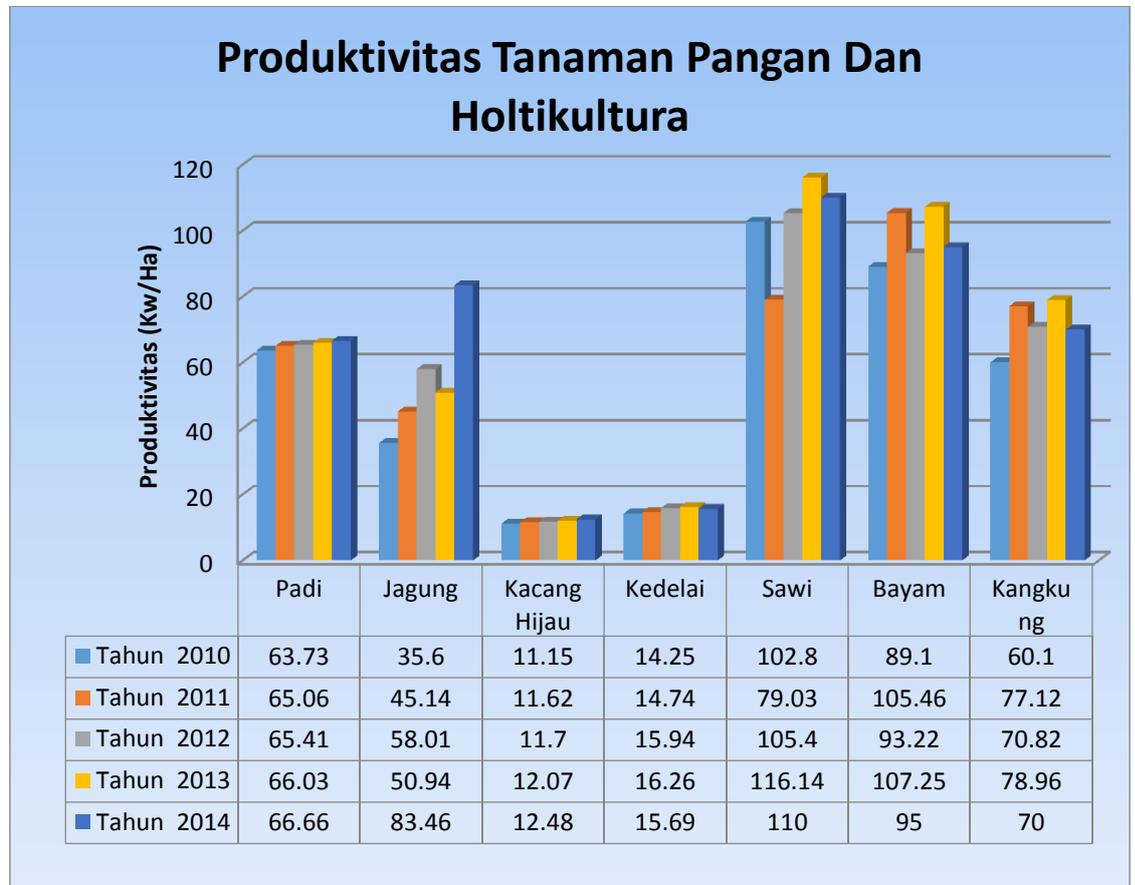
Produksitanaman sawi dan kangkung produksinya menurun dibanding tahun sebelumnya, disebabkan banyak petani yang beralih menanam komoditas lain seperti kacang hijau karena sepanjang tahun 2014 curah hujan di wilayah Kabupaten Sidoarjo rendah sehingga lebih potensial untuk menanam komoditas tersebut. Sedangkan untuk tanaman jagung produksinya menurun karena banyak yang dipanen muda, hal ini lebih menguntungkan petani baik dari segi waktu maupun penjualan.

### 2.4.2 Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Perkembangan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.4.2**

**Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura**



*Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan*

Produktivitas tanaman pangan padi, jagung, kacang hijau mengalami peningkatan. hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang mendorong terjadinya peningkatan produktivitas antara lain kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), penerapan teknologi tepat guna, Sistem Rice Intensification (SRI), perbaikan sarana prasarana pengairan berupa pembangunan/pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), penggunaan benih unggul dan pupuk berimbang sekaligus pupuk organik.

Sedangkan produktivitas tanaman kedelai, sawi, bayam menurun karena curah hujan di wilayah Kabupaten Sidoarjo rendah sehingga kurang potensial untuk menanam komoditas tersebut. Untuk tanaman kangkung produktivitasnya menurun hal ini disebabkan harga kangkung turun sehingga petani cenderung menanam kangkung untuk diambil bijinya yang akan digunakan benih.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman padi dan palawija agar dapat mencapai target adalah sebagai berikut:

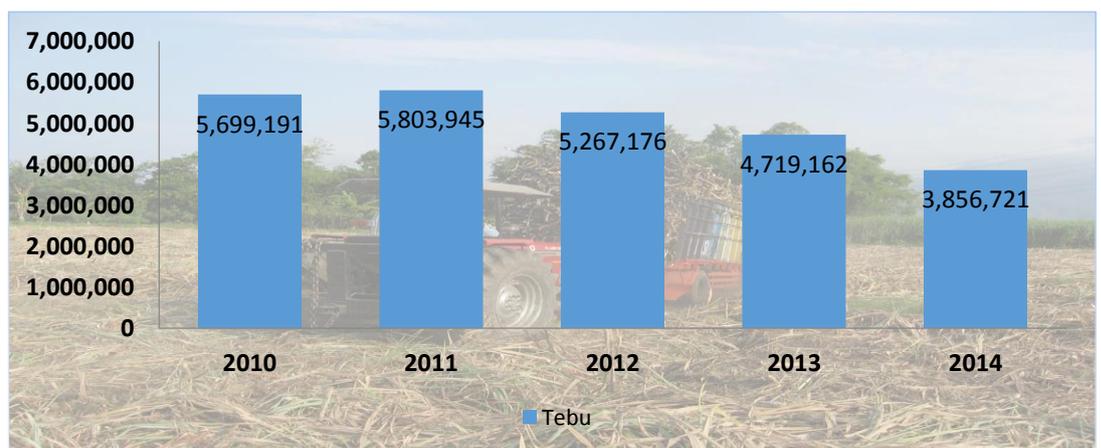
- Melakukan sosialisasi dan pendampingan penerapan teknologi tepat guna
- Menyediakan dan menggunakan benih / bibit unggul berlabel.
- Menambah persediaan pestisida agar penanganan/ pengendalian hama cepat dapat ditangani.
- Menggunakan sarana dan prasarana mekanisasi pertanian.
- Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

### 2.4.3 Produksi perkebunan tebu

Perkembangan produksi perkebunan tebu dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.4.3**

**Perkembangan Produksi Tebu**



Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan



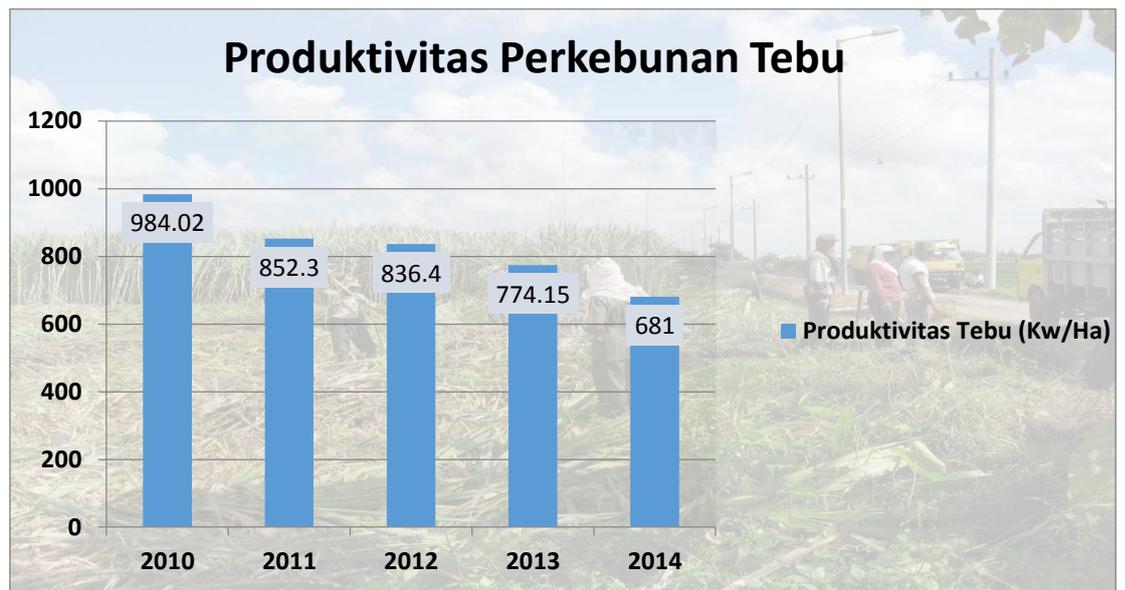
Sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik, produksi tanaman tebu tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan dari 4.719.162 Kw menjadi 3.856.721 Kw. Juga belum mencapai target RPJMD yang sebesar 5.837.207,98 kw. Hal ini disebabkan karena banyak faktor antara lain :

1. Bibit yang sudah waktunya harus diganti, namun tidak segera diganti.
2. Pola budidaya petani tebu di kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan baku teknis yang telah ditetapkan dimana kupas/kletek daun kering atau daduk tidak rutin dilakukan
3. Pemupukan yang dilakukan sejauh ini masih belum berimbang.
4. Adanya anomali iklim

#### **2.4.4 Produktivitas perkebunan tebu**

Produktivitas perkebunan tebu pada tahun 2014 sebesar 681 kwintal/ha. Produktivitas ini menurun sebesar 12% jika dibandingkan dengan produktivitas tahun 2013 yang sebesar 774,15 kwintal/ha. Juga dibandingkan target RPJMD yang sebesar 1.065,12 kw/ha, capaiannya sebesar 63,94 %. Hal ini disebabkan karena pola budidaya petani tebu di kabupaten Sidoarjo yang belum maksimal dimana kupas daun kering/daduk tidak rutin dilakukan dan pemupukan yang dilakukan sejauh ini masih belum berimbang sehingga mempengaruhi bobot batang tebu. Perkembangan produktivitas perkebunan tebu sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2.4.4



Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Upaya-upaya yang akan dilakukan agar produksi dan produktivitas Tanaman tebu mencapai target adalah :

1. Menanam tebu menggunakan varitas unggul sesuai masa tanam
2. Menggunakan pupuk berimbang
3. Melakukan budidaya tanaman tebu sesuai baku teknis yang berlaku.
4. Menebang tebu yang masak optimal

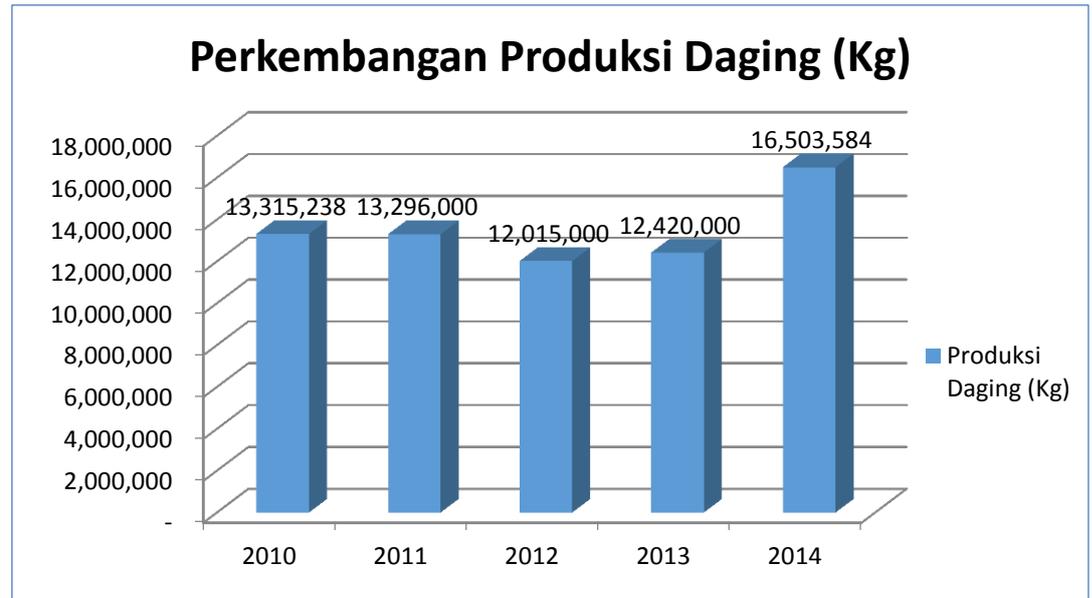
## 2.4.5 Produksi peternakan

### 1) Daging

Produksi daging tahun 2014 sebesar 16.503.584 kg. Apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2013 terjadi peningkatan produksi sebesar 4.083.584 Kg atau 33 %, dan melampaui target RPJMD yang sebesar 13.847.520 kg. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi daging ternak terutama daging sapi dan unggas semakin tinggi sehingga permintaan dan pemotongan ternak naik. Meningkatkannya permintaan daging menyebabkan para peternak cenderung memotong hewan ternaknya untuk dijual dagingnya. Perkembangan produksi daging dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.2.4.5.1

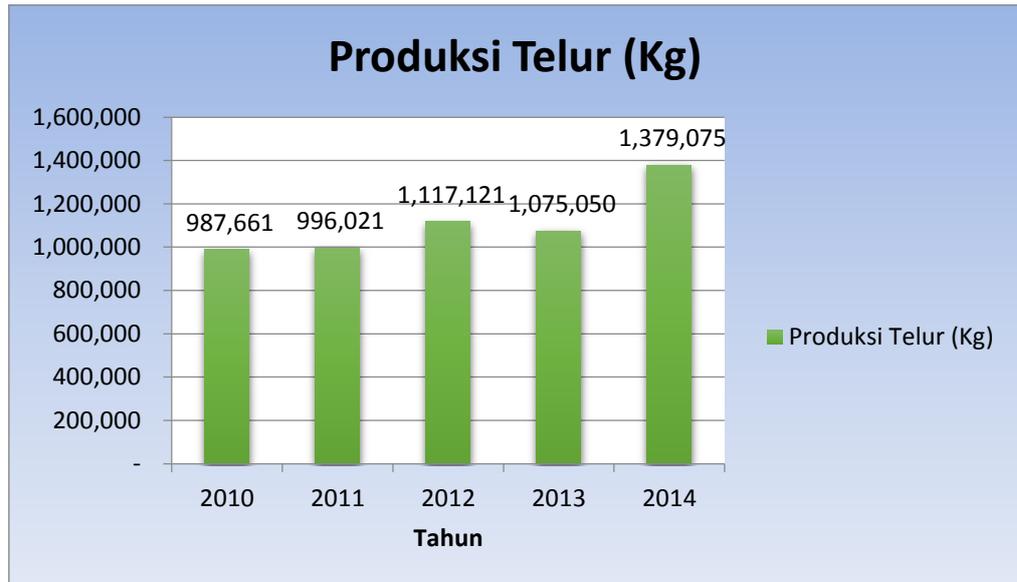
## Daging



Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

**2) Telur (kg)**

Produksi telur pada tahun 2014 sebesar 1.379.075 kg atau apabila dibandingkan dengan produksi telur tahun 2013 sebesar 1.075.050 kg terdapat kenaikan sebesar 304.025 kg atau 29 %. Realisasi produksi telur ini juga telah melampaui target RPJMD yang sebesar 1.027.167 kg. Hal ini disebabkan pada Tahun 2014 Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan banyak melakukan kegiatan pelatihan pada peternak sehingga para peternak semakin menyadari pentingnya penanganan kesehatan, higienis sanitasi kandang dan manajemen pakan yang baik akan meningkatkan produktifitas telur yang dihasilkan.

**Grafik 3.2.4.5.2****Telur**

Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

**3) Susu (Liter)**

Produksi susu pada tahun 2014 apabila dibandingkan tahun 2013 terdapat peningkatan 2.089.124liter atau 45,59%,dan jauh melampaui target RPJMD yang sebesar 3.335.461 liter. Hal ini disebabkan pada Tahun 2014 Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan banyak melakukan kegiatan pelatihan pada peternak sehingga para peternak semakin menyadari pentingnya penanganan kesehatan, higienis sanitasi kandang dan manajemen pakan yang baik akan meningkatkan produktifitas sapi perahnya.

Perkembangan Produksi susu dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2.4.5.3

## Susu



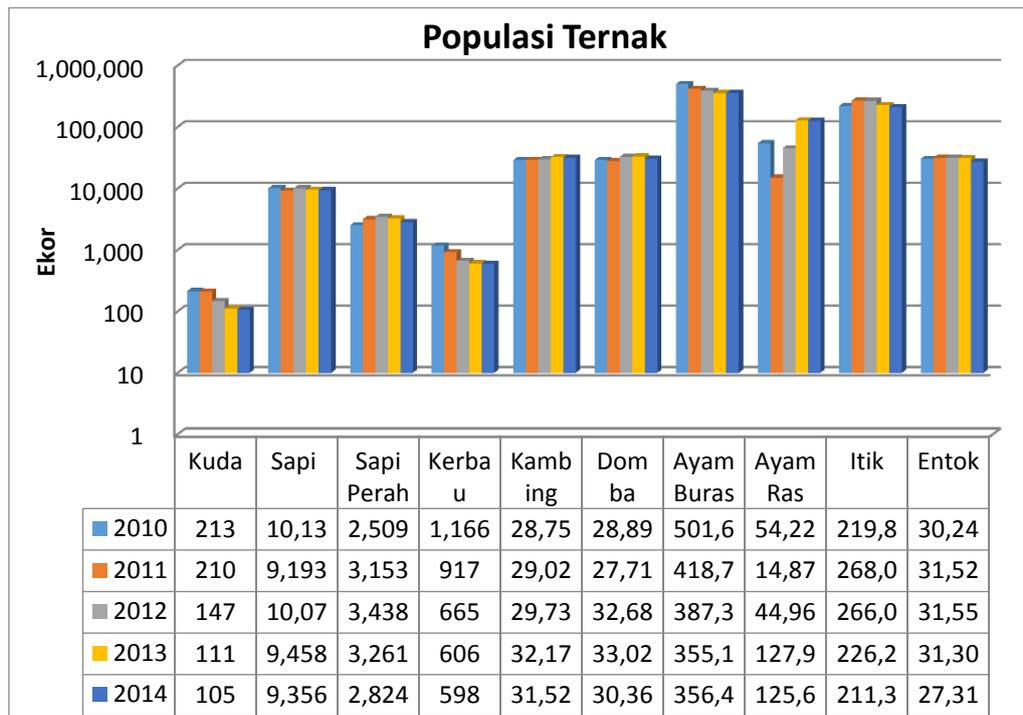
Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

#### 2.4.6 Populasi ternak (kuda, sapi, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, enthok)

Jumlah populasi hewan ternak yang dihitung terdiri dari 6 jenis hewan yaitu kuda, sapi, sapi perah, kerbau, kambing, domba dan 4 jenis unggas yaitu ayam buras, ayam ras, itik, dan enthok.

Perkembangan populasi binatang ternak dan unggas sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Grafik 3.2.4.6**  
**Populasi ternak dan unggas**



Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Populasi 2014 sebanyak 795.522ekor menurun dibanding tahun 2013 yang mencapai 819.199 ekor ternak. Serta belum mencapai target RPJMD yang sebesar 868.855 ekor. Populasi ternak rata – rata mengalami penurunan hal ini disebabkan biaya produksi dan harga pakan yang tinggisehingga petani cenderung menjual ternaknya untuk dipotong. Populasi ternak besar menurun karena terbatasnya tenaga kerja dan lahan pemeliharaan, peternak di daerah perkotaan terdesak harus memindahkan ternaknya ke daerah pinggiran. Sedangkan populasi ternak unggas menurun karena banyaknya kasus penyakit (AI) yang menyerang ternak.

Sasaran 5. **Meningkatnya Kunjungan Wisata** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

### 2.5.1 Jumlah kunjungan wisata

Kabupaten Sidoarjo memiliki berbagai obyek wisata yang dipetakan dalam beberapa jenis antara lain adalah wisata religi, wisata sejarah dan budaya, wisata bahari, wisata air, wisata kuliner, wisata industri dan



belanja, dan wisata olahraga dan ruang terbuka hijau. Realisasi kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara tahun 2014 adalah 1.750.153 pengunjung yang terdiri dari pengunjung hotel (139.203) dan pengunjung obyek wisata (1.610.950). Realisasi ini melampaui target RPJMD yang sebesar 760.430 pengunjung. Obyek wisata yang paling sering dikunjungi antara lain sebagai berikut :

NO	Nama Obyek	Lokasi	Pengunjung		Total
			Wisman	Wisnus	
1	Kolam Pancing Delta Fishing	Desa Prasung Kecamatan Buduran	122	542.306	542.428
2	Makam Mbah Ud	Desa Pagerwojo	0	328.518	328.518
3	Sentra Industri Tas dan Koper Tanggulangin (Mitra, Maju Makmur, Pasar Wisata, dll)	Kec. Tanggulangin	54	334.918	334.872

Bila dibandingkan tahun 2013 sebanyak 1.737.067 pengunjung maka ada peningkatan sebesar 13.086 pengunjung atau 0,75%.

Perkembangan jumlah kunjungan wisata sejak tahun 2010 – 2014 menunjukkan tren meningkat sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 3.2.5.1**  
**Jumlah kunjungan wisata**



Sumber Data: Disporabudpar

Perkembangan jumlah pengunjung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terjadi penurunan hal ini bisa dilihat dari grafik sebagai berikut :

**Grafik 3.2.5.1.1**  
**Perkembangan Jumlah Wisatawan**



Sumber Data: Disporabudpar

Jika dilihat dari Grafik diatas terjadi peningkatan realisasi jumlah pengunjung tahun 2014 sebesar 13.086 pengunjung. namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata, antara lain :

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menuju lokasi wisata;
- 2) Meningkatkan publikasi obyek-obyek wisata di wilayah sidoarjo;
- 3) Meningkatkan pemasaran obyek wisata yang ada;
- 4) Meningkatkan sarana pendukung fasilitas obyek wisata.

## 2.5.2 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Obyek Wisata

Jumlah obyek wisata menunjukkan kecenderungan meningkat.

Jumlah obyek wisata menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari 95 Obyek Wisata di Tahun 2013 menjadi sebanyak 98 Obyek Wisata (penambahan 2 kolam renang dan 1 Ruang Terbuka Hijau (Tanjungpuri) di Tahun 2014, yang antara lain terdiri dari :



1) Wisata religi sebanyak 4 obyek, antara lain :

NO	NAMA	ALAMAT
1	Masjid Agung Sidoarjo	Jl. Sultan Agung
2	Makam Dewi Ayu Sekardadu	Dusun Kepetingan Desa Sawahan Kecamatan Buduran
3	Klenteng Krian	Jl. Hang Tuah Sidoarjo
4	Makam Mbah Ali Mas'ud	Desa Pagerwojo

2) Wisata sejarah dan budaya sebanyak 23 obyek, antara lain :

NO	NAMA	ALAMAT
1	Candi Pari	Desa Candi Pari Kecamatan Porong
2	Candi Dermo	Desa Candi Negoro Kecamatan Wonoayu
3	Candi Pamotan	Desa Pamotan Kecamatan Porong
4	Candi Sumur	Desa Candi Pari Kecamatan Porong
5	Candi Medalun & Sumur Kuno	Desa Medalun Tulangan
6	Candi Tawang Alun	Desa Buncitan Kecamatan Sedati
7	Candi Klagen	Desa Tropodo Kecamatan Krian
8	Situs Medowo	Dusun Medowo
9	Situs Patar Kidul	Desa Semambung Rejo Kecamatan Sukodono
10	Situs Kedung Klintar	Desa Kedung Bacok Kecamatan Tarik
11	Situs Watu Tulis	Desa Watu Tulis Kecamatan Prambon
12	Situs Terung Wetan	Desa Terung Wetan Kecamatan Krian
13	Situs Candi Wangkal	Desa Wangkal Kecamatan Krembung
14	Bakalan Prasasti	Desa Gamping Rowo Kecamatan Tarik
15	Prasasti Lingga	Desa Tropodo Klagen Kecamatan Krian
16	Prasasti Kemplagian	Desa Tropodo Kecamatan Krian
17	Prasasti Peripik	Desa Candi Pari Kecamatan Porong
18	Fragmen Arca	Desa Pamotan Kecamatan Porong
19	Gedung Juang 45 Sidoarjo	Jl. Gubernur Suryo Sidoarjo
20	Rumah Induk Bupati Sidoarjo	Jl. Gubernur Suryo Sidoarjo
21	Stasiun Kereta Api	Porong dan Gedangan
22	Museum Mpu Tantular	Sidoarjo
23	Bangunan Bekas PG Tanggulangin	Tanggulangin



3) Wisata bahari sebanyak 1 Obyek, yaitu :

NO	NAMA	ALAMAT
1	Wisata Bahari Tlocor	Desa Tlocor Kecamatan Jabon

4) Wisata air sebanyak 25 Obyek, antara lain :

NO	NAMA	ALAMAT
1	Kolam Renang Sendang Delta	Kawasan GOR Sidoarjo
2	Kolam Renang Water Park	Jl. Pahlawan Sidoarjo
3	Kolam Renang Water Fantasy	Citra Garden Buduran
4	Kolam Renang Tivoli	Perum Bumi Citra Fajar
5	Kolam Renang Sport Club Puri Surya Jaya	Gedangan
6	Kolam Renang Tirta Krida Juanda	Juanda - Sedati
7	Kolam Renang Graha Tirta	Waru
8	Kolam Renang Rahayu Park	Prambon
9	Kolam Renang Permata	Tanggulangin
10	Kolam Renang Candi Pari	Desa Candi Pari Kec. Porong
11	Kolam Renang Jala Sari	Tulangan
12	Kolam Renang Suko Asri	Desa Suko Kec. Sidoarjo
13	Kolam Renang Sport Club Pondok Chandra	Waru
14	Kolam Renang Tirta Agung	Sukodono
15	Kolam Renang Delta Center	Waru
16	Kolam Renang dan Pemancingan Delta Fishing	Desa Prasung Kec. Buduran
17	Kolam Renang Jati Mas	Candi
18	Kolam Renang Citra Harmoni Park	Sepanjang - Taman
19	Kolam Renang Krian Indah	By Pass Krian
20	Kolam Renang Golden Aquatic	Sukodono
21	Kolam Renang Antares Green Park	Krian
22	Sarana Pemancingan Sedati	Sedati
23	Kolam Renang dan Pemancingan Minopolithan "Kusuma Tirta"	Desa Kedung Peluk Kec. Candi
24	Kolam Renang Anugerah Alam Sejahtera (Alas)	Prambon
25	Kolam Renang Tirta Rani	Sukodono

5) Wisata kuliner sebanyak 3 Obyek, antara lain :

NO	NAMA	ALAMAT
1	Bursa Kupang	Gedangan
2	Kampung Jajanan	Desa Kedung Sumur Kecamatan Krembung
3	Pasar Kuliner "PAZKUL"	Perum Kahuripan Nirwana Sidoarjo



Realisasi jumlah obyek wisata tahun 2014 ini telah mencapai target RPJMD yang sebanyak 86 obyek wisata.

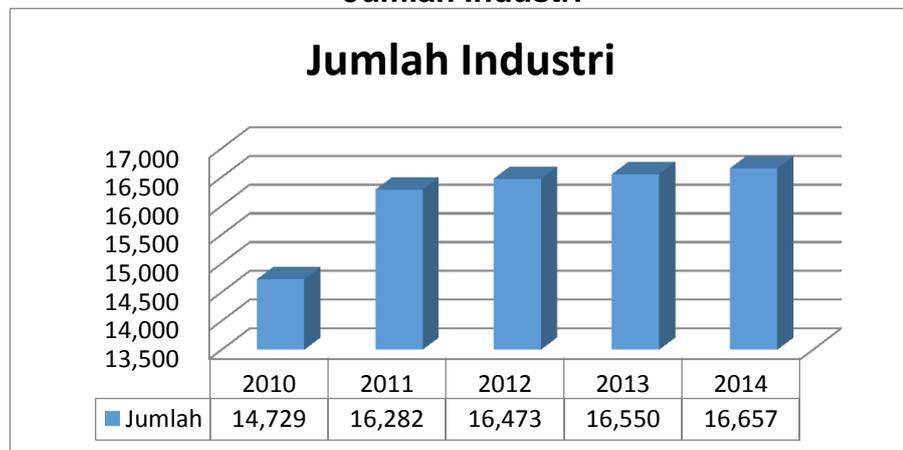
Sasaran 6. **Meningkatnya produksi sektor industri** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

### 2.6.1 Jumlah Industri

Jumlah industri yang ada tahun 2014 sebanyak 16.657 unit usaha. Jumlah ini meningkat 107 unit atau 0,53% dibandingkan dengan jumlah industri pada tahun 2013 yang sebanyak 16.550 unit. Realisasi tahun 2014 telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 15.085 unit.

Perkembangan jumlah industri selama lima tahun terakhir terlihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.6.1**  
**Jumlah Industri**



Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan &ESDM

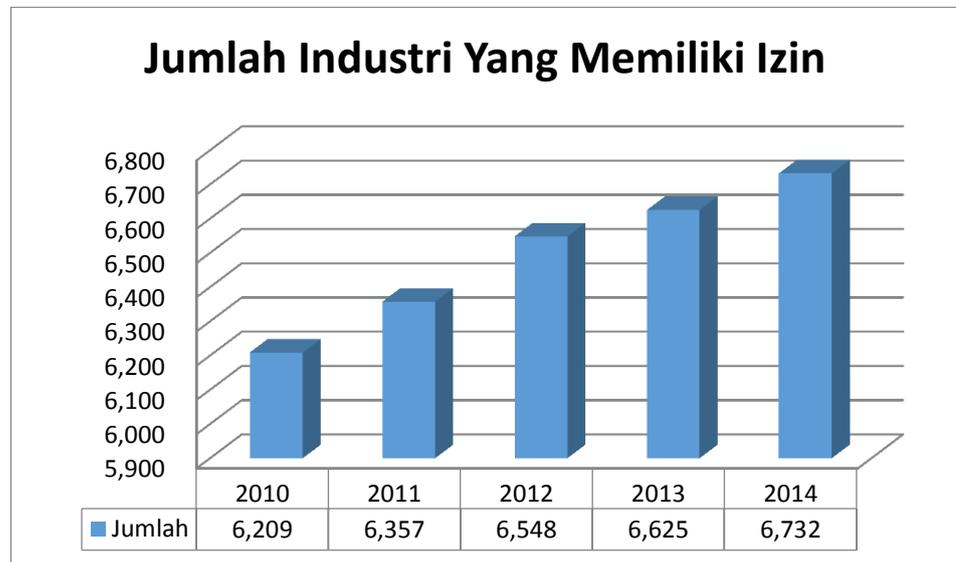
### 2.6.2 Jumlah industri yang memiliki izin

Perkembangan jumlah industri yang memiliki izin usaha dari tahun ke tahun berfluktuasi menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah industri yang memiliki izin usaha pada tahun 2014 sebanyak 6.732 unit. Jumlah ini meningkat sebanyak 107 unit atau 1,31% dibandingkan dengan jumlah industri tahun 2013 yang sebanyak 6.625 unit. Hal ini disebabkan adanya peran serta pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk pengurusan perijinan dan fasilitas usaha aktif. Namun demikian

peningkatan ini belum dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebanyak 7.027 unit.

Perkembangan jumlah industri yang memiliki izin selama lima tahun terakhir terlihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.6.2**  
**Jumlah industri yang memiliki izin**



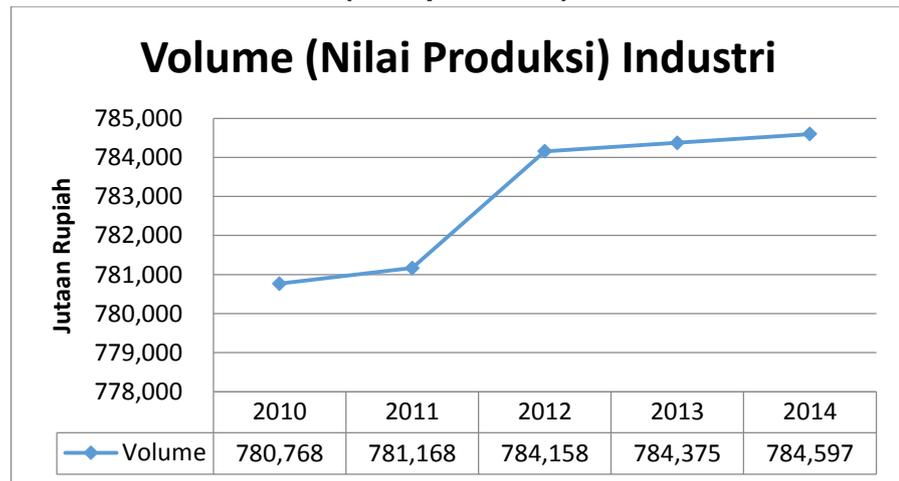
Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan &ESDM

### 2.6.3 Volume (nilai produksi) industri

Volume industri berupa nilai produksi tahun 2014 sebesar Rp. 784.597.771.000,00. Jumlah ini meningkat sebesar Rp.222.740.000,00 atau 0,03% dibandingkan dengan volume nilai produksi industri pada tahun 2013 yang sebesar Rp. 784.375.031.000,00. Realisasi nilai produksi tahun 2014 masih belum dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp. 949.028.250.000,00. Hal ini disebabkan daya beli dari masyarakat menurun.

Perkembangan volume industri selama lima tahun terakhir terlihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.6.3**  
**Volume (nilai produksi) industri**



Sumber Data : Diskoperindag &ESDM

#### 2.6.4 Tenaga Kerja yang terserap dari sektor industri

Jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor industri tahun 2014 sebanyak 155.364 orang. Jumlah ini sama dengan jumlah yang terserap pada tahun 2013 yang juga sebanyak 155.364 orang. Sehingga tidak ada penyerapan tenaga kerja baru dari sektor industri. Realisasi jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor industri tahun 2014 ini tercapai sebesar 83,85% dari target RPJMD sebanyak 185.294 orang.

Perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor industri selama lima tahun terakhir terlihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.6.4**  
**Tenaga Kerja yang terserap dari sektor industri**



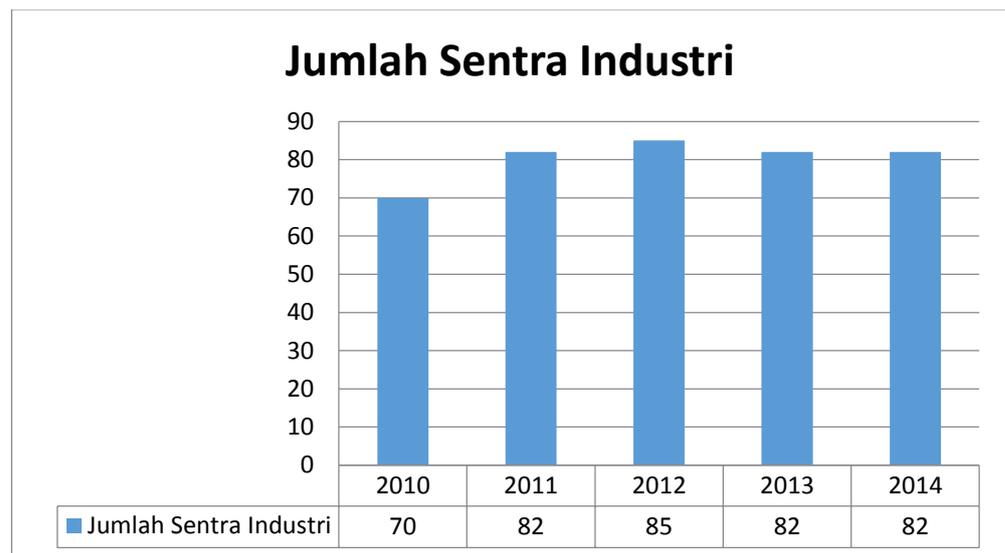
Sumber Data : Diskoperindag &ESDM

### 2.6.5 Jumlah sentra industri

Jumlah sentra industri pada tahun 2014 masih sebanyak 82 unit. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dengan jumlah sentra industri tahun 2013 yang juga sebanyak 82 unit. Realisasi jumlah sentra industri tahun 2014 ini tercapai sebesar 110,81% dari target RPJMD sebanyak 74 unit.

Perkembangan jumlah sentra industri selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.6.5**  
**Jumlah sentra industri**



Sumber Data : Diskoperindag &ESDM

Sasaran 7. **Meningkatnya Volume Perdagangan** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

#### 2.7.1 Volume perdagangan

Realisasi volume perdagangan yang berhasil dicapai Tahun 2014 pada kisaran angka sebesar Rp. 11.535.562.550.000,00 meningkat sebesar 8,8% bila dibandingkan dengan volume perdagangan tahun 2013 sebesar Rp. 10.192.329.000.000,00. Realisasi volume perdagangan tahun 2014 ini mencapai target RPJMD sebesar Rp. 11.535.562.550.000,00.

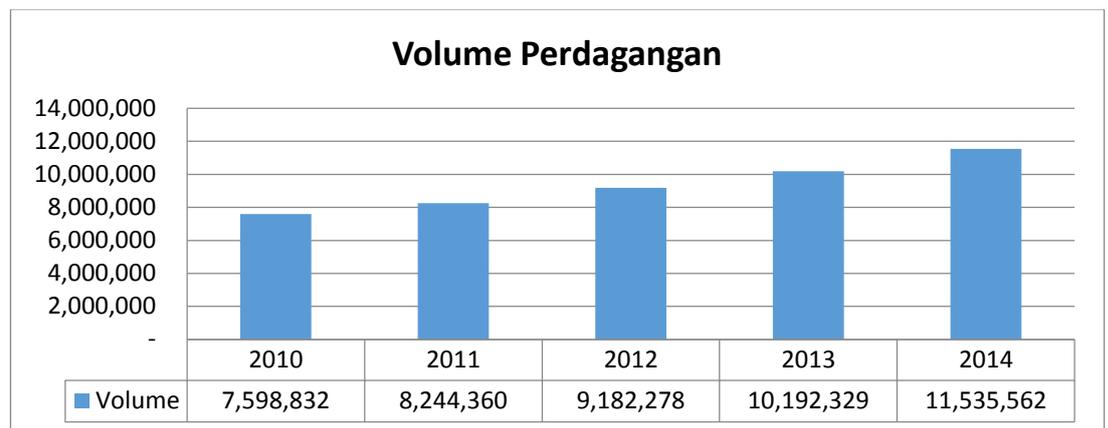
Peningkatan ini disebabkan karena iklim usaha di Kabupaten Sidoarjo yang semakin kondusif dan peningkatan investasi di sektor perdagangan. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target adalah

meningkatkan promosi produk unggulan daerah melalui kegiatan pameran, misi dagang dan temu bisnis baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta membantu UKM meningkatkan daya saing produk melalui kegiatan pelatihan, bantuan mesin/peralatan usaha dan modal kerja.

Perkembangan volume perdagangan selama lima tahun terakhir terdapat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.7.1**

**Perdagangan**



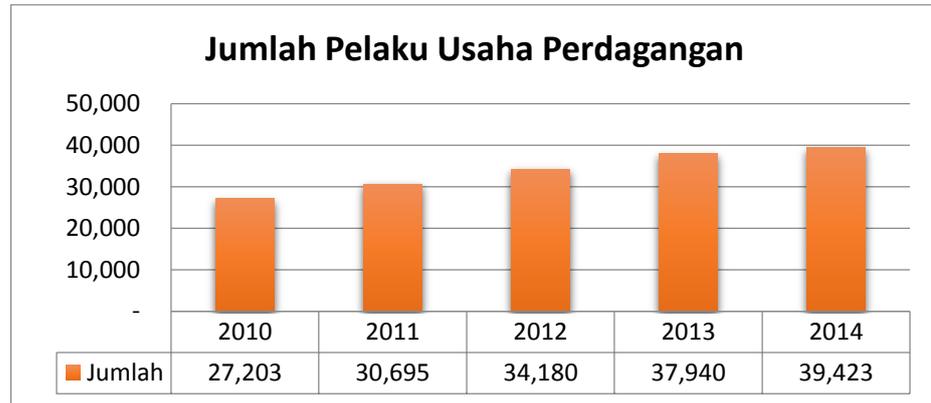
*Sumber Data : Diskoperindag & ESDM*

### 2.7.2 Jumlah pelaku usaha perdagangan

Realisasi jumlah pelaku usaha perdagangan pada tahun 2014 sebanyak 39.423 pelaku usaha, meningkat 3,91% dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha perdagangan tahun 2013 yang sebanyak 37.940 pelaku usaha. Realisasi jumlah pelaku usaha perdagangan tahun 2014 ini tercapai sebesar 103,91% dari target RPJMD sebanyak 37.940 pelaku usaha.

Perkembangan Jumlah pelaku usaha dagang selama tahun 2010 s.d 2014 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.2.7.2**  
**Jumlah pelaku usaha perdagangan**



Sumber Data : Diskoperindag & ESDM

### 2.7.3 Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor perdagangan

Realisasi jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor perdagangan tahun 2014 sebanyak 281.985 orang, meningkat 2,21% dibanding tahun 2013 yang sebanyak 275.888 orang. Realisasi jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor perdagangantahun 2014 ini tercapai sebesar 86,52 % dari target RPJMD sebanyak 325.911 orang.

Perkembangan Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor perdagangan selama tahun 2010 s.d 2014 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.2.7.3**  
**Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor perdagangan**



Sumber Data : Diskoperindag & ESDM

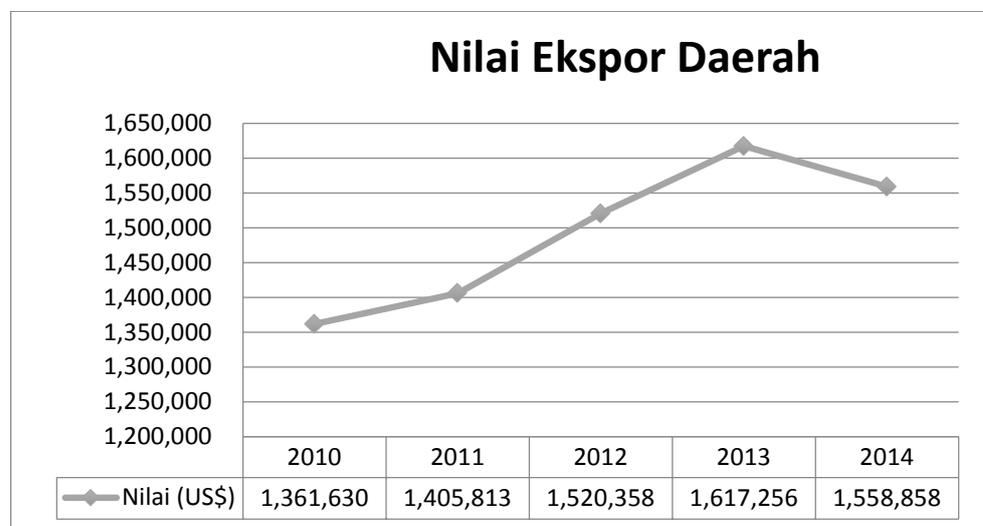
#### 2.7.4 Nilai ekspor daerah

Realisasi nilai ekspor non-migas daerah tahun 2014 sebesar US\$ 1.558.858.500,18 turun signifikan sebesar US\$ 58.397.732 atau 0,96% dibanding tahun 2013 yang sebesar US\$ 1.617.256.232,00. Realisasi nilai ekspor non-migastahun 2014 ini tercapai sebesar 78,19% dari target RPJMD sebesar US\$ 1.993.561.888,71.

Angka penurunan tersebut disebabkan adanya transisi masa kepemimpinan sehingga pengusaha eksport masih menunggu kebijakan dari pemerintahan yang baru.

Perkembangan nilai ekspor daerah ditunjukkan oleh grafik berikut ini:

**Grafik 3.2.7.4**  
**Ekspor daerah**



Sumber Data : Diskoperindag & ESDM

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja tersebut antara lain :

- a. Memberikan kemudahan kepada pengusaha dalam pengurusan izin/legalitas perusahaan dan dokumen-dokumen ekspor
- b. Fasilitasi Pemerintah Daerah kepada pengusaha di bidang promosi baik dengan melaksanakan pameran di luar negeri

### 2.7.5 Persentase Pedagang yang menempati pasar

Pasar merupakan Pasar Daerah / Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dimana Jumlah Pasar yang dikelola sebanyak 18 unit Pasar yang tersebar di kecamatan-kecamatan.

Penyediaan Pasar Daerah dimaksud merupakan salah satu dari pelayanan urusan perdagangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan dinas teknis pengelolanya adalah Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. Sebagai dinas teknis Dinas Pasar diberikan amanah untuk menyediakan pelayanan pasar, adapun indikator kinerja Pelayanan Pasar yang ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015 adalah "Prosentase pedagang yang menempati pasar". Maksud dari indikator tersebut adalah tersedianya fasilitas tempat berdagang bagi pedagang yang menempati pasar.

Adapun fasilitas pelayanan pasar yang disediakan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar adalah, antara lain : Toko Gudang (Togu/Ruko), Kios, Los, Fasilitas Lainnya yang disediakan untuk berdagang di Pasar. Dari fasilitas yang tersedia tersebut, perkembangan kapasitas pasar dapat disampaikan sebagaimana grafik di bawah ini :

**Grafik 3.2.7.5**  
**Perkembangan kapasitas pasar**



Sumber Data : Dinas Pasar



Dari grafik tersebut di atas, bahwa kapasitas stand pasar yang disediakan selalu meningkat dari tahun ke tahun, yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mencapai 13.881 stand pasar.

Sampai tahun 2014 stand pasar yang disediakan memang belum mampu melayani seluruh kebutuhan perkembangan pedagang yang menempati pasar, adapun perbandingan perkembangan jumlah stand pasar dengan jumlah pedagang adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2.7.5**  
**Perbandingan perkembangan jumlah stand pasar dengan jumlah pedagang**

No	Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kapasitas Pasar	13.178	13.609	13.855	13.881	13.881
2	Jumlah pedagang	17.411	14.842	15.088	15.229	15.220
3	Jumlah pedagang yang menempati stan yang disediakan	8.538	8.969	9.322	9.436	10.060
4	Jumlah stan tutup	4.640	4.640	4.533	4.549	3.821
5	Jumlah pedagang lesehan	1.233	1.233	1.233	1.244	1.339

Sumber Data : Dinas Pasar

Dari tabel tersebut diatas, bahwa perkembangan jumlah pedagang memang lebih tinggi dari jumlah penyediaan fasilitas stand pasar, dimana masih terdapat 1.339 pedagang belum tertampung dalam bangunan stand pasar, dan masih berjualan dengan cara lesehan di halaman pasar.

Meskipun dengan cara berjualan lesehan masih diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku, tetapi pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap berusaha penampungannya ketempat yang selayaknya dengan berencana mengembangkan Pasar-Pasar yang secara kelayakan untuk dikembangkan. Pasar-pasar dimaksud antara lain : Pasar Taman, Pasar Tulangan, Pasar Wadungasri.

Yang juga perlu mendapat perhatian dari kondisi pasar tersebut adalah masih banyaknya kondisi stand pasar yang tutup, yaitu kurang lebih



terdapat 3.821 pedagang, hal ini berdasarkan pendataan alasan yang disampaikan adalah lokasi stand yang kurang strategis, tetapi dengan pembinaan yang dilakukan secara intensif, maka jumlah stand pasar yang tutup dari tahun ketahun semakin menurun, dimana pada tahun 2013 yang tutup sebesar 4.549 stand dan pada tahun 2014 menurun menjadi 3.821 stand.

**MISI 3. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban**

Untuk mencapai misi **meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban** ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran.

Hasil penilaian pencapaian sasaran misi ini pada tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Tujuan – Sasaran	Tingkat keberhasilan
Tujuan 1 : <i>Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian dan beriman</i>		
Sasaran :		
1.	Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian dengan pemberdayaan pemuda dan olahraga	Sangat Berhasil
2.	Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian melalui pelestarian kebudayaan lokal	Sangat Berhasil

Pencapaian ke 2 (dua) sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) urusan yaitu urusan pemuda dan olah raga, dan urusan kebudayaan oleh satuan kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Uraian hasil pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. ***Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian dengan pemberdayaan pemuda dan olahraga*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:



### 1.1.1 Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat Nasional.

Untuk mengukur keberhasilan pembinaan olah raga adalah dengan mengukur tingkat prestasi dari cabang olah raga yang mampu memberikan prestasi.

Dari target jumlah cabang olahragayang berprestasi di tingkat provinsi/nasional pada tahun 2014sebanyak 6cabang olahraga,terrealisasi sebanyak 20 cabang olahragatingkat provinsi atau 333%, 4 cabang olahraga tingkat nasional atau 57%dan 1 cabang olahraga tingkat internasional.

Jumlah cabang olahraga yang berprestasi untuk tingkat Provinsi sebanyak 20 cabang, yaitucabang olahraga Selam, Atletik, Catur, Judo, Bulutangkis, Karate, Wushu, Aeromodelling, NPC, Futsal, Hockey, Panjat Tebing, Taekwondo, Voli Indoor, Renang, Gulat, Panahan, Anggar, Bola Basket dan Bola Voli Pantai

Jumlah cabang olahraga yang berprestasi untuk tingkat nasional sebanyak 4 cabang, yaitu cabang olahraga Selam, Atletik, Taekwondo, dan Bola Voli Pantai.

Sedang untuk tingkat internasional ada 1 cabang olahraga yaitu bola voli pantai yang mendapat 3 medali emas yaitu pada kejuaraan kualifikasi YOG Zone Asia Pasifik di Thailand yang mendapat 2 emas dan Kejuaraan POM ASEAN di Palembang mendapat 1 emas.

Berikut adalah tabel perbandingan cabang olahraga yang berprestasi antara Tahun 2013 dan Tahun 2014 :

Indikator	Tahun 2013		Tahun 2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi				
a. Tingkat Propinsi	5 Cabor	13 Cabor	6 Cabor	20 Cabor
b. Tingkat Nasional	5 Cabor	7Cabor	6 Cabor	4 Cabor

Apabila dibandingkan jumlah cabang olahraga yang berprestasi tingkat provinsi dan nasional pada tahun 2013, yaitu 13 cabang tingkat provinsi dan 7 cabang tingkat nasional, terdapat kenaikan sebanyak 7 cabang



olahraga tingkat provinsi dan penurunan sebanyak 3 cabang olahraga tingkat nasional.

Penurunan jumlah cabang olah raga yang berprestasi tingkat nasional disebabkan :

- a) Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Pengurus Cabang (Pencab) masing-masing Cabang Olahraga (Cabor) kepada para atlet, selain itu masih terbatasnya pemberian reward/penghargaan kepada para atlet (termasuk bonus dan insentif) dikarenakan keterbatasan anggaran. Di tahun mendatang, faktor ini akan lebih diintensifkan lagi agar lebih mendukung peningkatan prestasi para atlet.
- b) Fasilitas sarana dan prasarana olahraga di kawasan GOR Gelora Delta dan stadion jenggolo yang saat ini masih dalam proses rehabilitasi/perbaikan.

#### 1.1.2 Jumlah sarana olahraga milik pemerintah yang meningkat kualitasnya

Untuk memasyarakatkan olahraga di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan sarana olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jumlah sarana olahraga milik pemerintah tahun 2014 masih berjumlah 3 kawasan yaitu Kawasan Gelora Delta, Stadion Jenggolo dan Gedung Bulutangkis Sulaksana, sedangkan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Sidoarjo seluruhnya sebanyak 379 unit termasuk didalamnya milik swasta, yang terdiri dari stadion/lapangan sepak bola, bola voli, bola basket, bulutangkis, renang, tenis lapangan, tenis meja, senam/fitness, futsal, atletik, pencak silat dan bilyard. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana olahraga sesuai status kepemilikannya Tahun 2014:

	JENIS LAPANGAN OLAHRAGA	JUMLAH			TOTAL
		KABUPATEN	DESA	SWASTA	
1	Sepak Bola	2	103	8	113
2	Bola Voli	2	56	23	81



3	Bola Basket	1	3	3	7
4	Bulutangkis	1	36	50	87
5	Renang	1	0	20	21
6	Tenis Lapangan	1	0	4	5
7	Tenis Meja	0	14	7	21
8	Senam/Fitness	0	3	7	10
9	Futsal	0	6	13	19
10	Atletik	1	1	0	2
11	Pencak Silat	0	1	0	1
12	Billyard	0	0	13	13
13	Panjat Tebing	2	0	2	4
14	Sepak Takraw	1	0	1	2
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>223</b>	<b>151</b>	<b>386</b>

Sedangkan rincian sarana dan prasarana olahraga sesuai status kepemilikannya Tahun 2013:

NO	JENIS LAPANGAN OLAHRAGA	JUMLAH			TOTAL
		KABUPATEN	DESA	SWASTA	
1	Sepak Bola	2	54	0	56
2	Bola Voli	2	27	10	39
3	Bola Basket	29	0	5	34
4	Bulutangkis	1	3	38	42
5	Renang	1	0	14	15
6	Tenis Lapangan	1	0	17	18
7	Tenis Meja	0	1	2	3
8	Senam/Fitness	0	0	0	0
9	Futsal	1	0	24	25
10	Atletik	0	0	0	0
11	Pencak Silat	0	0	0	0
12	Billyard	0	0	0	0
13	Panjat Tebing	2	0	2	4
14	Lap. Sepak Takraw	1	0	1	2
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>85</b>	<b>113</b>	<b>238</b>

Jika dibanding tahun 2013 terdapat peningkatan sebanyak 141 unit atau 59,24% sarana dan prasarana olahraga yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah perbandingan jumlah sarana dan prasarana olahraga antara tahun 2013 dan 2014 :



Indikator	Tahun 2013		Tahun 2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang meningkat kualitasnya	3 Kawasan	3 Kawasan, 238 Unit	3 Kawasan	3 Kawasan, 379 Unit

Keseluruhan sarana dan prasarana tersebut dipelihara sesuai kemampuan keuangan daerah agar tetap dapat berfungsi optimal.

### 1.1.3 Jumlah Grup Olahraga

Dalam meningkatkan prestasi olahraga perlu didukung dengan pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan, terutama untuk membina mental dan memupuk bakat-bakat yang ada.

Dalam rangkaian tersebut, dukungan klub-klub olahraga akan sangat membantu untuk menciptakan bibit-bibit pemuda yang berprestasi dibidang olahraga. Target yang ditetapkan dalam RPJMD untuk jumlah klub olahraga adalah sebanyak 29 klub sedangkan realisasi pada tahun 2014 sudah melebihi target yaitu tercatat 1.149 klub olahraga yang meliputi :

- 1) 28 cabang olahraga prestasi, sebanyak 344 klub
- 2) 4 cabang olahraga massal, sebanyak 99 klub
- 3) 6 cabang olahraga tradisional, sebanyak 191 klub
- 4) 4 cabang olahraga khusus, sebanyak 5 klub
- 5) 10 cabang olahraga rekreasi, sebanyak 510 klub

Jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 1.136 Klub terdapat peningkatan sebanyak 13 klub. Berikut adalah tabel perbandingan klub olahraga antara Tahun 2013 dan Tahun 2014 :

Indikator	Tahun 2013		Tahun 2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Peningkatan dan pemasyarakatan olahraga (jumlah grup olahraga)	28 Klub	1.136 Klub	29 Klub	1.149 Klub



Peningkatan jumlah klub olahraga tersebut dikarenakan mudahnya persyaratan yang diberikan dalam pendirian sebuah klub olahraga dan adanya dukungan sarana dan prasarana olahraga.

#### **1.1.4 Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat Nasional.**

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pemuda di Kabupaten Sidoarjo dengan menghitung jumlah pemuda yang berprestasi pada berbagai bidang di skala nasional.

Pencapaian indikator ini pada tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dari target pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional sebanyak 2 orang, terealisasi sebanyak 3 orang atau 150%, yaitu :

- 1) Alex Setiawan Siwy lolos seleksi Jambore Pemuda Indonesia Daerah dan berhak mewakili Sidoarjo untuk melaksanakan tugas Jambore Pemuda Indonesia.
- 2) Octavian Radjuabdi Widodo (Putra) dan Yunita Findari (Putri) lolos seleksi Tingkat Propinsi dan ikut seleksi Paskibraka tingkat Nasional.

Untuk lebih meningkatkan prestasi pemuda akan dilakukan pembinaan yang lebih terfokus pada bidang unggulan yang teridentifikasi berpotensi meraih prestasi di tingkat nasional.

Sasaran 2. ***Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian melalui pelestarian kebudayaan lokal*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

#### **3.2.1 Jumlah Kelompok Seni dan Budaya.**

Untuk menopang pelestarian seni dan budaya daerah maka harus dijaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat, salah satunya adalah pelestarian upacara adat.



Pada tahun 2014 upacara adat yang masih terdapat di masyarakat ada 12 jenis, yaitu:

- 1) Temanten Khas Sidoarjo (Putri Jenggolo)
- 2) Nyadran/ Petik Laut
- 3) Keleman
- 4) Sedekah Bumi/ Ruwat Desa
- 5) Mitoni/ Tingkepan
- 6) Tugel Kunciung
- 7) Baiat Besaran Ruwatan
- 8) Lelang Bandeng
- 9) Tayuban
- 10) Aqiqah
- 11) Tedhak Siti / Mudhun Lemah
- 12) Ujung

Kelompok seni yang ada pada tahun 2014 ditargetkan sejumlah 382 kelompok namun terealisasi hanya sebanyak 344 kelompok atau 90,05% terjadi penurunan sebanyak 39 kelompok atau 9,95% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 385 kelompok seni. Berikut adalah tabel perbandingan jumlah kelompok seni :

Indikator	Tahun 2013		Tahun 2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah kelompok seni budaya yang melestarikan upacara adat budaya daerah (jumlah kelompok seni dan budaya)	382 Kelompok	385 Kelompok	382 Kelompok	344 Kelompok

Kelompok seni budaya lain yang terbentuk terbagi dalam beberapa bidang seni yaitu Orkes Melayu, Campursari/Karawitan, Dalang/Wayang, Ludruk, Reog/Jaranan, Qasidah, Macapat, Tari/Teater, total sampai dengan tahun 2014 sebanyak 344 kelompok seni.

Perkembangan jumlah kelompok seni budaya tahun 2010 s.d tahun 2014 seperti pada grafik berikut:

**Grafik 3.3.2.1**

**Perkembangan jumlah kelompok seni budaya**



Sumber Data : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata

Dilihat dari grafik diatas tahun 2014 terdapat jumlah kelompok seni dan budaya sebanyak 344 kelompok, terjadi penurunan sebanyak 39 kelompok jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 385 kelompok, penurunan kelompok seni budaya ini karena :

- Banyaknya pelaku seni yang alih profesi atau pindah tempat kerja;
- Kurangnya kesadaran dari pelaku seni untuk memperpanjang Kartu Induk Kesenian, karena Kartu Induk Kesenian hanya berlaku untuk 1 (satu) Tahun;
- Adanya *image* bahwa kegiatan Seni tidak memberikan jaminan hidup layak.

### 3.2.2 Jumlah desa yang melestarikan budaya nelayan pesisir

Adat budaya adalah nilai-nilai sejarah tradisi budaya yang perlu dilestarikan.



Tradisi budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjoyaitu tradisi budaya nelayan pesisirsampai saat inidilestarikan oleh 6 desa, sehinggaadanya peningkatan pada jumlah desa pesisir dibandingkan tahun 2013 sebanyak 2 desa.

Enam (6) desa dimaksud yaitu :

- 1) Desa Balongdowo, Kecamatan Candi
- 2) Desa Balonggabus, Kecamatan Candi
- 3) Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi
- 4) Desa Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo
- 5) Desa Gisikcemandi, Kecamatan Sedati
- 6) Desa Kepetingan, Kecamatan Sidoarjo

Tradisi budaya nelayan pesisir yang dilestarikan yaitu upacara nyadran di desa Balongdowo, Balonggabus dan Kedung Peluk, petik laut di desa Bluru Kidul, Gisik Cemandi dan Kepetingan.

Tradisi ini sampai beberapa tahun terakhir masih terpelihara dan terjaga kelestariannya.

**MISI 4.Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender**

Untuk mencapai misi **mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender**ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran.

Hasil penilaian pencapaian sasaran misi ini pada tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Tujuan – Sasaran	Tingkat keberhasilan
Tujuan 1 : <i>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.</i>		
Sasaran :		
1.	Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek	Sangat Berhasil



No	Tujuan – Sasaran	Tingkat keberhasilan
2.	Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan	Sangat Berhasil

Pencapaian ke 2 (dua) sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) urusan yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pembudayaan masyarakat dan desa oleh satuan kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Uraian hasil pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. ***Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

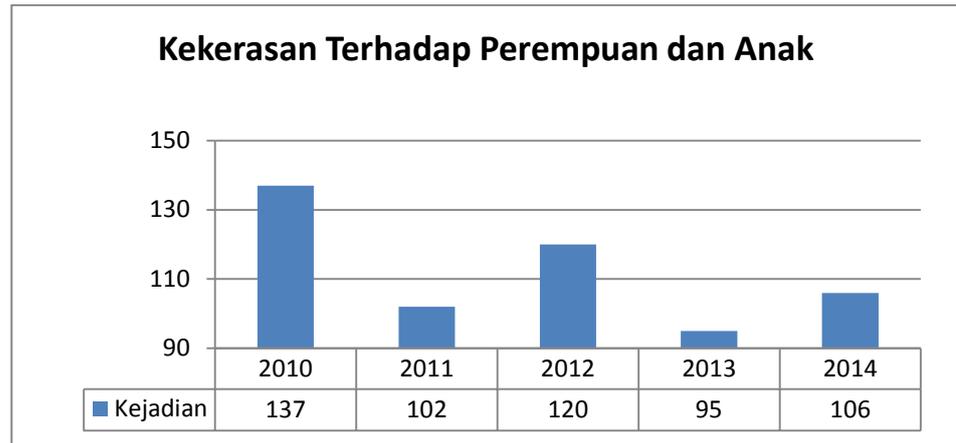
#### **4.1.1 Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh pelayanan advokasi.**

Untuk mengukur perhatian pemerintah kabupaten terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah dengan mengukur sampai sejauh mana fasilitasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo penanganannya di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemukan tahun 2014 melalui P2TP2A sebanyak 106 kasus dan seluruhnya atau 100% teradvokasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang ditemukan sebanyak 95 kasus, terjadi peningkatan sebanyak 11 kasus atau 11,6%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2014 sebesar 152 kasus, maka terjadi penurunan sebanyak 46 kasus atau 30,3%.

Perkembangan Temuan Kasus KDRT selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Grafik 3.4.1.1****Jumah anak dan perempuan korban tindak kekerasan**

Sumber data : BPMPKB Kabupaten Sidoarjo

Jika dilihat table tersebut diatas meningkatnya kasus kekerasan tahun 2014 dibanding tahun 2013 ini disebabkan :

- a. Pengaruh dari perkembangan teknologi informasi serta pergaulan bebas;
- b. Semakin sadarnya orang atau masyarakat sehingga korban melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya;
- c. Semakin sadar akan haknya yang terlanggar

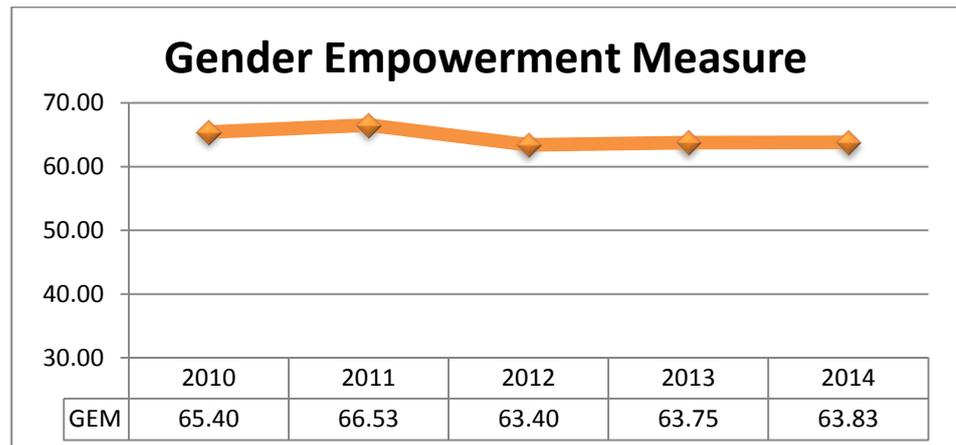
Dengan demikian sosialisasi oleh segenap aparat pemerintah dan peran serta LSM dan masyarakat mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat perlu dilakukan dan ditingkatkan.

**4.1.2 Gender Empowerment Measurement (GEM)**

*Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Perkembangan IDJ selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Grafik 3.4.1.2****Gender Empowerment Measurement**



Sumber data : BPMPKB dan Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Adapun variabel penyusun IDJ Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 49,77% sedangkan perempuan sebesar 50,22%;
- 2) Keterwakilan di parlemen, laki-laki 84% sedangkan perempuan 16%;
- 3) Proporsi manager, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, laki-laki 55,32% sedangkan perempuan 44,68%;
- 4) Proporsi angkatan kerja (persentase penduduk aktif dalam kegiatan ekonomi), laki-laki 71,85% sedangkan perempuan 28,15%;

Dari tabel diatas capaian GEM atau IDJ tahun 2014 sebesar 63,83% belum mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 91,74 % Hal tersebut disebabkan :

- a) Karena jumlah pejabat perempuan hanya 37,76% atau 333 orang perempuan dan 62,24% atau 549 orang laki-laki dari 882 orang pejabat yang ada.
- b) Jumlah keanggotaan DPRD perempuan belum mencapai target 30% dan Kabupaten Sidoarjo hanya 14% atau 7 orang anggota DPRD perempuan sedangkan laki – laki 86% atau 43 orang dari jumlah 50 orang keseluruhan anggota DPRD.

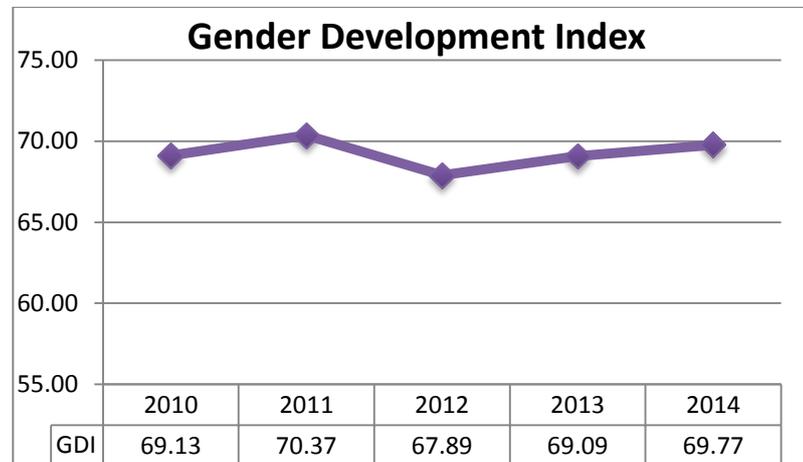
#### 4.1.3 Gender Development Index (GDI)



*Gender Development Indeks (GDI)* atau Indeks Pembangunan Jender (IPJ) digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas jender.

Perkembangan IPJ selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Grafik 3.4.1.3**  
**Gender Development Index**



Sumber data : BPMPKB dan Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Variabel penyusun IPJ Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 49,77% sedangkan perempuan sebesar 50,22%;
- 2) Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk kabupaten Sidoarjo, yaitu penduduk laki-laki dari 69,36 tahun sedangkan untuk penduduk perempuan 73,38 tahun;
- 3) Angka Melek Huruf (AMH) yaitu untuk penduduk laki-laki 99,88% sedangkan untuk penduduk perempuan 98,26%;
- 4) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu untuk penduduk laki-laki dari 10,80 tahun, sedangkan untuk penduduk perempuan 9,94 tahun;
- 5) Proporsi Sumbangan Pendapatan (PSP), laki-laki 71,85% sedangkan perempuan 28,15%;

Dari tabel diatas capaian GDI atau IPJ tahun 2014 sebesar 69,77% telah belum mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 80,50%.



Sasaran 2. ***Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

**4.2.1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa / kelurahan terhadap bantuan stimulan yang diberikan**

Pembangunan di suatu daerah bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi memerlukan peran serta aktif masyarakat; baik berupa pemikiran maupun material.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih baik pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat program pemberdayaan berupa stimulus yang dapat menggugah minat partisipasi masyarakat.

Dalam tahun 2014, jumlah dana pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya di wilayah Desa/kelurahan adalah sebanyak Rp. 88.513.303.300,00. Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar Rp. 88.514.000.000,00 tercapai sebesar 99,99% dengan dana stimulan yang disalurkan sebesar Rp. 9.537.000.000,00 untuk 346 Desa/Kelurahan dan 565 lembaga.

Tercapainya partisipasi masyarakat disebabkan karena masyarakat merasa bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan menjadi tanggungjawab bersama.

Namun demikian sosialisasi secara terus menerus dan bersinambungan dengan budaya gotong royong tentang partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan dengan melibatkan seluruh SKPD yang terkait, Tokoh Masyarakat, Ulama, LSM perlu ditingkatkan.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan jumlah dana pembangunan swadaya masyarakat tahun 2013 yaitu sebesar Rp.80.637.928.450,00. maka jumlah dana pembangunan swadaya masyarakat tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp.7.875.374.850,00 atau 9,76%.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya di wilayah Desa/Kelurahan terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu :

- 1) Pembangunan Fisik, yaitu pembangunan berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang

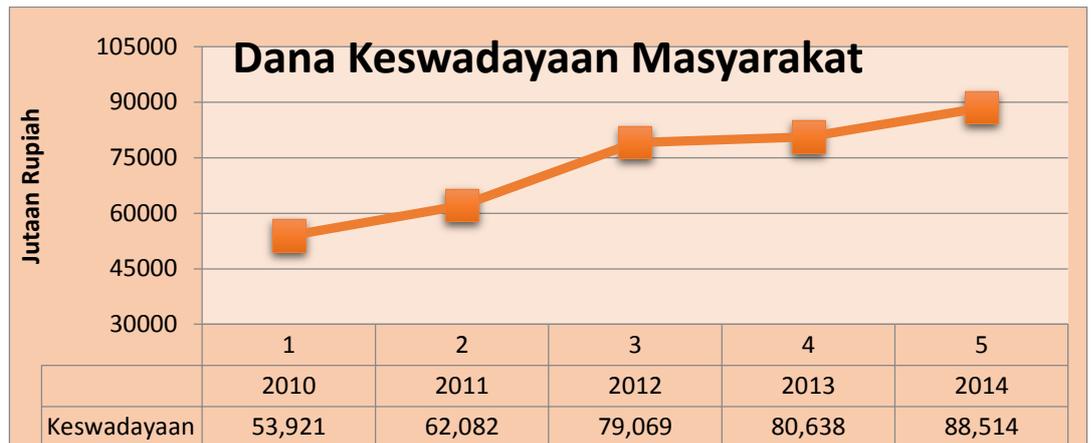


kelancaran aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari seperti : pembuatan pos kamling, portal jalan, penghijauan, pengecatan sarana/prasarana umum, pemeliharaan prasarana lingkungan, Paving, Drainase, Jembatan, Pendamping jalan, Gorong-gorong, Plengsengan dan Kios pasar yang dilaksanakan oleh masyarakat secara gotong royong,

- 2) Pembangunan Non Fisik, yaitu pembangunan berupa peningkatan SDM seperti : pengajian rutin, tahlil, jaga malam/keamanan, penyuluhan kesehatan lingkungan, posyandu, senam kesegaran jasmani, Pemuda Karang taruna, Kerjabakti, Rukun kematian, Operasional RT/RW, Kegiatan PKK, Penerangan Lampu Jalan, Peringatan Hari besar Agama, Peringatan Hari besar Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Dana Keswadayaan Masyarakat selama lima tahun terakhir terlihat pada grafik berikut :

**Grafik 3.4.2.1**  
**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa / kelurahan**



Sumber data : BPMPKB

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat dipedesaan melalui perkembangan usaha ekonomi yaitu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Program Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

**Pencapaian UPPKS Dasar** tahun 2014 yaitu 87 usaha atau 48,06% dari jumlah kelompok UPPKS sebanyak 181 unit usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 12 usaha atau 16% jika dibandingkan pencapaian tahun 2013 sebanyak 75 usaha

**Sedangkan Pencapaian UPPKS Berkembang** tahun 2014 yaitu 63 atau 34,80% dari jumlah kelompok UPPKS sebanyak 181 unit usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 12 usaha jika dibandingkan pencapaian tahun 2013 sebanyak 51 usaha

**Demikian pula untuk Pencapaian UPPKS Mandiri** tahun 2014 yaitu 31 usaha atau 17,13% dari jumlah kelompok UPPKS sebanyak 181 unit usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 3 usaha pencapaian tahun 2013 sebanyak 28 usaha.

**Pencapaian UED-SP Dasar** tahun 2014 sebanyak 53 usaha atau 48,18% dari jumlah kelompok UED-SP sebanyak 110 unit usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 8 usaha atau 17,77% jika dibandingkan pencapaian tahun 2013 sebanyak 45 usaha.



**Sedangkan Pencapaian UED-SP Berkembang** tahun 2014 sebanyak 36 usaha atau 32,72% dari jumlah kelompok UED-SP sebanyak 110 unit usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 5 usaha atau 16,12% jika dibandingkan pencapaian tahun 2013 sebanyak 31 usaha.

**Demikian pula untuk Pencapaian UED-SP Mandiri** tahun 2014 sebanyak 21 usaha atau 19,10% dari jumlah kelompok UED-SP sebanyak 110 unit usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 5 usaha atau 31,25% jika dibandingkan pencapaian tahun 2013 sebanyak 16 usaha

**Pencapaian P3EL Dasar** tahun 2014 sebanyak 98 usaha atau 56% dari jumlah kelompok P3EL sebanyak 175 kelompok usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 12 usaha atau 13,95% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 sebanyak 86 usaha.

**Sedangkan Pencapaian P3EL Berkembang** tahun 2014 sebanyak 50 usaha atau 28,57%, dari jumlah kelompok P3EL sebanyak 175 kelompok usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 6 usaha atau 13,63% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 sebanyak 44 usaha.

**Demikian pula untuk Pencapaian P3EL Mandiri** tahun 2014 sebanyak 27 usaha atau 15,43% dari jumlah kelompok P3EL sebanyak 175 kelompok usaha, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 4 usaha atau 17,39% jika dibandingkan pencapaian tahun 2013 sebanyak 23 usaha.

**Pencapaian BUMDES Dasar** tahun 2014 sebanyak 15 usaha atau 38,46% , dari jumlah BUMDES sebanyak 39 usaha.

**Sedangkan Pencapaian BUMDES Berkembang** tahun 2014 sebanyak 16 usaha atau 41,02% dari jumlah BUMDES sebanyak 39 usaha.

**Demikian pula untuk Pencapaian BUMDES Mandiri** tahun 2014 sebanyak 8 usaha atau 20,51% dari jumlah BUMDES sebanyak 39 usaha.



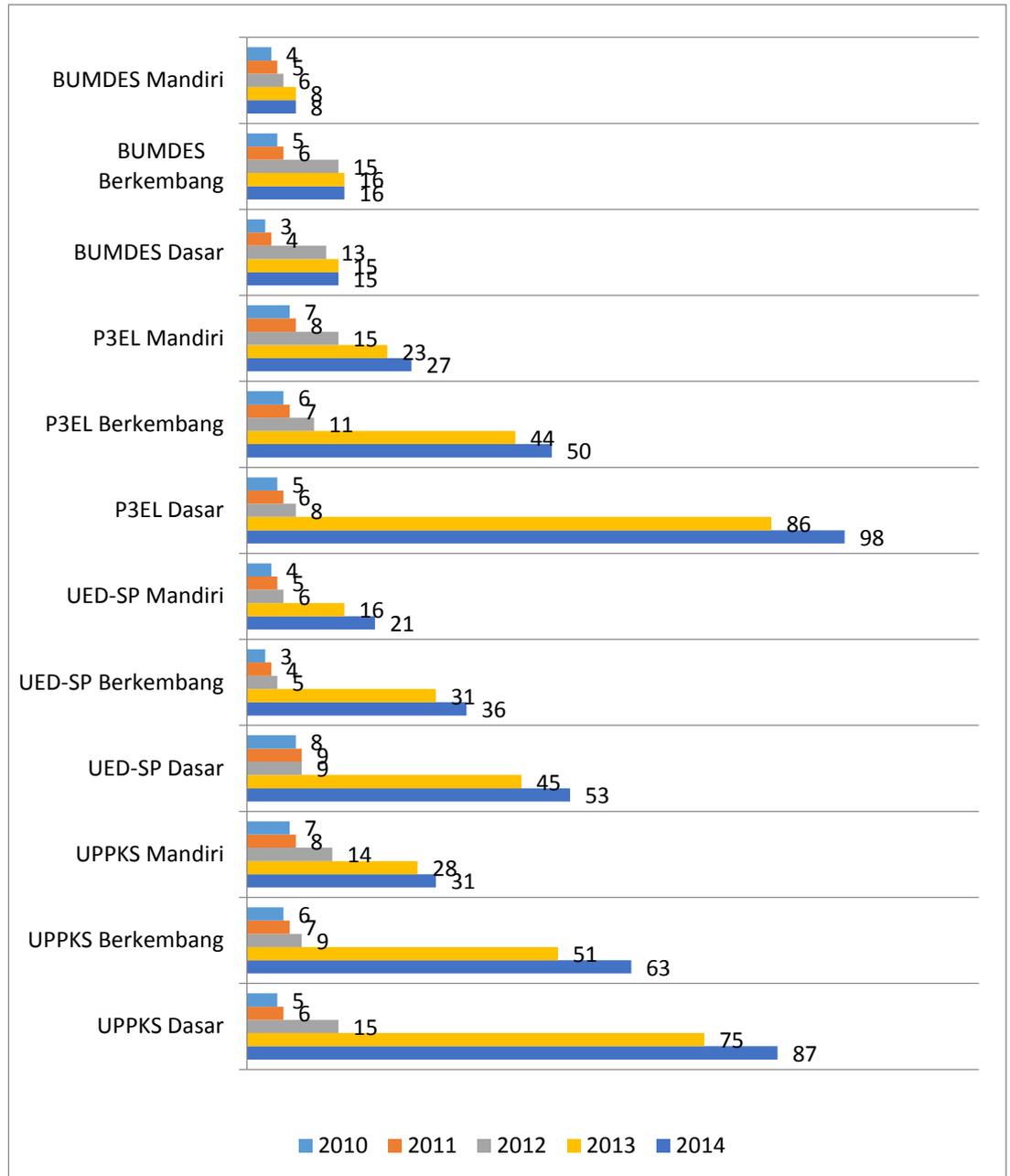
Untuk tahun 2014 kegiatan Badan Usaha Milik Desa tidak ada perkembangan karena tidak ditunjang dengan bantuan modal yang diberikan.

Apabila dilihat dari perkembangan usaha ekonomi melalui UPPKS, P3EL, UED-SP dan BUMDES, jumlah kelompok usaha dengan kategori dasar lebih besar dari pada kategori berkembang maupun mandiri sehingga masih diperlukan pembinaan, motivasi maupun dukungan agar usaha yang dilakukan semakin bertambah maju sebagai upaya menambah ekonomi keluarga.

Perkembangan tersebut selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut :



**Grafik 3.4.2.1.1**  
**Tingkat Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang Berkembang**



Sumber data : BPMPKB

Dari grafis terlihat bahwa perkembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan semakin membaik yang mencerminkan keberhasilan peningkatan peranserta dan inovasi masyarakat.



#### **4.2.2 Jumlah Rehabilitasi/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH)**

Jumlah rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi/perbaikan pada tahun 2014 sebanyak 175 unit rumah ( program reguler 100 unit dan PTBK 75 unit ) atau terealisasi 100%, dari target yang direncanakan sebanyak 175 unit rumah sesuai data PPLS. Untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selain memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi/perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 985 rumah, 1.000 unit rumah yang direhabilitasi oleh KODIM Sidoarjo pada tahun 2010 dengan menggunakan dana APBD Provinsi dan melalui program CSR sebanyak 100 rumah, sehingga total rumah yang sudah direhabilitasi sebanyak 1.985 atau 99,79% dari jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebanyak 1.989 rumah.

Jika dibandingkan dengan jumlah rumah keluarga miskin yang sudah mendapatkan bantuan rehabilitasi/perbaikan tahun 2013 sebanyak 1.810 rumah, maka dalam tahun 2014 terdapat peningkatan sebanyak 175 rumah.

Perkembangan perbaikan/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang didukung dari dana pemerintah selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 3.4.2.2

## Jumlah Rehabilitasi/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH)



Sumber data : BPMPKB

**MISI 5. Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima**

Untuk mencapai misi **meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima** ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dan 6 (enam) sasaran.

Hasil penilaian pencapaian sasaran misi ini pada tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Tujuan – Sasaran	Tingkat keberhasilan
Tujuan 1 : <i>Meningkatnya transparansi, profesionalisme, dan produktivitas aparatur</i>		
Sasaran :		
1.	Meningkatnya pelayanan kependudukan	Sangat Berhasil
2.	Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Pengembangan budaya pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi	Sangat Berhasil
4.	Tersedianya dokumen statistik	Sangat Berhasil
5.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sistem yang adil dan merata	Sangat Berhasil
6.	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif, inovatif memperhatikan kepentingan masyarakat	Sangat Berhasil



Pencapaian ke 6 (enam) sasaran tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) urusan yaitu urusan kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kearsipan dan urusan perencanaan pembangunan oleh satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Perpustakaan dan Arsip, Badan Perencanaan Pembangunan, Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta 18 (delapan belas) Kecamatan.

Uraian hasil pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. ***Meningkatnya pelayanan kependudukan*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

#### **5.1.1 Persentase penduduk ber KTP**

Untuk mengukur pelayanan kependudukan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat, perlu dilihat berapa jumlah penduduk yang ber-KTP. Pemilikan KTP bukan saja merupakan pemenuhan hak perorangan tetapi juga untuk keperluan tertib administrasi kependudukan.

Realisasi jumlah penduduk yang ber-KTP ditahun 2014 sebanyak 1.212.670 jiwa atau 66,90% dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP sebanyak 1.583.324 jiwa.

---

#### **Grafik 3.5.1.1**



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam KTP-EL sampai dengan tahun 2014 sebanyak 1.212.670 jiwa dari yang wajib ber KTP 1.583.324 jiwa atau sekitar 76,59%. Jumlah yang sudah terekam meliputi :

1. Penduduk yang masih ber KTP manual;
2. Penduduk wajib KTP Pemula.
3. Penduduk pindah datang ke Kabupaten Sidoarjo.

Capaian ini sudah memenuhi target RPJMD dan Penetapan Kinerja yang hanya 65 %.

Adapun kendala dalam perekaman KTP Elektronik, antara lain :

1. Ketersediaan perangkat perekaman KTP elektronik yang terbatas dalam kondisi tidak optimal difungsikan.
2. Dalam tahun 2014 Cetak KTP elektronik masih dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjend Adminduk sehingga hasil pencetakan perekaman KTP-Elektronik belum maksimal .
3. Adanya penduduk yang bekerja di luar daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga tidak bisa datang perekaman data KTP-Elektronik tepat waktu

Dalam tahun 2015 pencetakan KTP-Elektronik sepenuhnya diserahkan kepada masing – masing Kabupaten/Kota, namun demikian Ketersediaan Blangko KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri yang dikirim ke Kabupaten tidak sesuai kuota wajib KTP elektronik sehingga terjadi keterlambatan dalam pencetakan KTP-Elektronik.

**Grafik 3.5.1.1.1**



*Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Di samping kepemilikan KTP, masing-masing keluarga perlu memiliki Kartu Keluarga untuk mendukung data kependudukan terutama bagi anggota keluarga yang belum wajib ber-KTP. Perkembangan keluarga yang memiliki Kartu Keluarga seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.5.1.1.2



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prosentase capaian penduduk yang memiliki KK tahun 2014 sebesar 90,04% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 89,54% ada peningkatan sebesar 0,10%, walaupun peningkatannya kecil namun Capaian tahun 2014 sudah melampaui target yang hanya 65 %.

Peningkatan penduduk yang memiliki KK ini disebabkan adanya upaya sebagai berikut

- 1) Kesadaran masyarakat yang tinggi akan program KK SIAK.
- 2) Terwujudnya konsistensi sosialisasi bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung pelaksanaan program KK SIAK.
- 3) Fasilitas jaringan dan aplikasi yang sudah berjalan secara on line, baik dari Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maupun Kemendagri.
- 4) SDM operator SIAK Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil yang sudah cukup mumpuni.



### 5.1.2 Persentase penduduk ber Akta kelahiran

Untuk mendaftarkan penduduk yang baru lahir maka perlu diterbitkan Akta kelahiran. Akta ini dikeluarkan bagi seluruh penduduk yang lahir di Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2014 penduduk yang mengurus Akta kelahiran sesuai Akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebanyak 29.440 orang, apabila dibandingkan dengan pengurusan tahun 2013 sebanyak 29.902 orang terjadi penurunan sebanyak 462 orang (1,55%).

Adapun jumlah kepemilikan akta kelahiran tersebut sampai dengan tahun 2014 sebanyak 798.758 orang atau 37,55% dari jumlah penduduk. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yang sebesar 769.318 orang atau 36,80% ada peningkatan sebesar 0,75% walaupun peningkatannya kecil namun Capaian tahun 2014 sudah melampaui target RPJMD dan Penetapan Kinerja yang hanya 35%.

Peningkatan Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran secara keseluruhan ini dikarenakan adanya upaya

Antara lain :

- 1) Kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya Akta Kelahiran meningkat.
- 2) Adanya peningkatan frekuensi pelaksanaan pendekatan pelayanan untuk masyarakat (program Jemput Bola) dalam pengurusan akta kelahiran..
- 3) Adanya dukungan regulasi yang jelas telah memotifasi masyarakat untuk memahami pentingnya dokumen pencatatan sipil.
- 4) Adanya kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan program penyuluhan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Grafik 3.5.1.2

## Persentase penduduk ber Akta kelahiran



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 5.1.3 Jumlah Pelayanan Akta Kependudukan

Selain Akta Kelahiran, untuk ketertiban administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memberikan pelayanan Akta Pencatatan Sipil lainnya.

Pelayanan akta pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap warga negara khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pelayanan-pelayanan dokumen kependudukan itu dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.5.1.3

## Jumlah Pelayanan Akta Kependudukan



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pelayanan Akta Pencatatan Sipil selain Akta Kelahiran juga dilakukan oleh masyarakat. Akta Perkawinan hanya dimintakan oleh masyarakat yang melakukan perkawinan di luar agama Islam, bagi yang beragama Islam sesuai ketentuan pencatatan melalui Akta Nikah di Kantor Urusan Agama. Sedangkan untuk Akta Kematian, sebagian besar masyarakat masih menganggap belum merasa perlu untuk mengurus surat tersebut secara langsung pada saat terjadinya peristiwa kematian sehingga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta-akta catatan sipil, maka frekuensi kegiatan penyuluhan akan lebih ditingkatkan.

Pada tahun 2014 jumlah pelayanan akta pencatatan sipil sebanyak 30.359 akta, ada penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 30.764 akta, terutama untuk pelayanan akta kelahiran, serta belum mencapai target dalam RPJMD dan Penetapan Kinerja 2014 sebanyak 54.183 akta.

Menurunnya jumlah pelayanan akta pencatatan sipil pada Akta utamanya untuk Akta Kelahiran dikarenakan :

1. Berhasilnya program pemerintah di Bidang Keluarga Berencana.
2. Menurunnya Angka Kematian Bayi.
3. Pengurusan Akta kelahiran masih didominasi anak usia sekolah.
4. Tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan karena mobilitas penduduk (urbanisasi).

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan, antara lain :

1. Pelayanan akta kelahiran secara jemput bola ke Puskesmas, Desa/Kelurahan dan Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo
2. Peniadaan biaya retribusi untuk semua jenis pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
3. Tanggap terhadap keluhan atau pengaduan masyarakat
4. Meminimalkan gangguan pada jaringan SIAK
5. Mengadakan bimbingan teknis petugas operator SIAK dinas dan kecamatan



6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, siaran radio SS/EI Viktor Surabaya, penyebaran brosur, pembuatan website, dll

Sasaran 2. ***Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

### **5.2.1 Jumlah media informasi**

Jumlah media informasi yang dimiliki Kabupaten pada tahun 2014 berupa situs sebanyak 1 (satu) domain yaitu <http://www.sidoarjokab.go.id/> dan 47 subdomain yaitu meliputi 18 Kecamatan, 3 Bagian Setda, 28 Unit Kerja, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M), Media Center Kabupaten Sidoarjo dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi produk Hukum (SJDIH).

Jumlah media informasi tahun 2014 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 1 buah situs.

Media informasi selain situs yang dimiliki saat ini yaitu berupa:

- 1) 3 (tiga) papan pengumuman;
- 2) 1 (satu) pos pengaduan;
- 3) 3 (tiga) Leaflet / selang pandang;
- 4) 1 (satu) media cetak yaitu majalah Gema Delta;
- 5) 1 (satu) media center yaitu media center kabupaten Sidoarjo;
- 6) 3(tiga) Website, yaitu [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id), [www.mediacentersidoarjo.com](http://www.mediacentersidoarjo.com), [www.ppid.sidoarjokab.go.id](http://www.ppid.sidoarjokab.go.id).

Jumlah media informasi selain situs yang dimiliki tahun 2014 telah melebihi target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan Tapkin 2014 sebesar 10 buah.

Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) yang berfungsi menerima, melaporkan dan menindaklanjuti pengelolaan pengaduan.

Realisasi Tahun 2014 sebanyak 218 pengaduan yang masuk dari masyarakat dan yang ditindak lanjuti 199 atau 91,28%.



### 5.2.2 Jumlah media komunikasi

Jumlah media komunikasi yang dimiliki sampai saat ini masih sebanyak 1 (satu) media yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Media komunikasi tersebut telah ada sejak tahun 2005. Dan jumlah media komunikasi tahun 2014 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan Tapkin 2014 sebanyak 1 buah. Sedangkan pada tahun 2014 telah diadakan 6 kali kegiatan dalam rangka media komunikasi, yaitu kegiatan penyuluhan (sosialisasi) KIM di Kecamatan : Porong, Buduran, Wonoayu, Candi, Tanggulangin, Krian.

Media komunikasi tersebut bertujuan menunjang kelancaran komunikasi antar anggota dan pengurus kelompok informasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna informasi yang ada dan melakukan pendokumentasian data dan informasi agar bisa disajikan secara tepat, lengkap dan aman.

Tahun 2014 Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan sebagai kelompok KIM terbaik tingkat Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) I Jawa Timur.

Sasaran 3. ***Meningkatnya Pengembangan budaya pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

#### 5.3.1 Realisasi PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen pendapatan yang dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai operasional dan pembangunan daerahnya. Semakin besar PAD yang mampu dihimpun akan semakin menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhannya.

Target PAD yang ditetapkan dalam APBD tahun 2014 sebesar Rp. 1.003.045.392.951,00. Realisasi PAD tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 1.115.492.034.740,16 atau tercapai 111,21%.

Sejak tahun 2010 PAD selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2010 realisasi sebesar Rp. 356.161.848.548,24 dan realisasi tahun 2011 sebesar Rp. 484.313.737.307,27 meningkat sebesar 35,98%, tahun

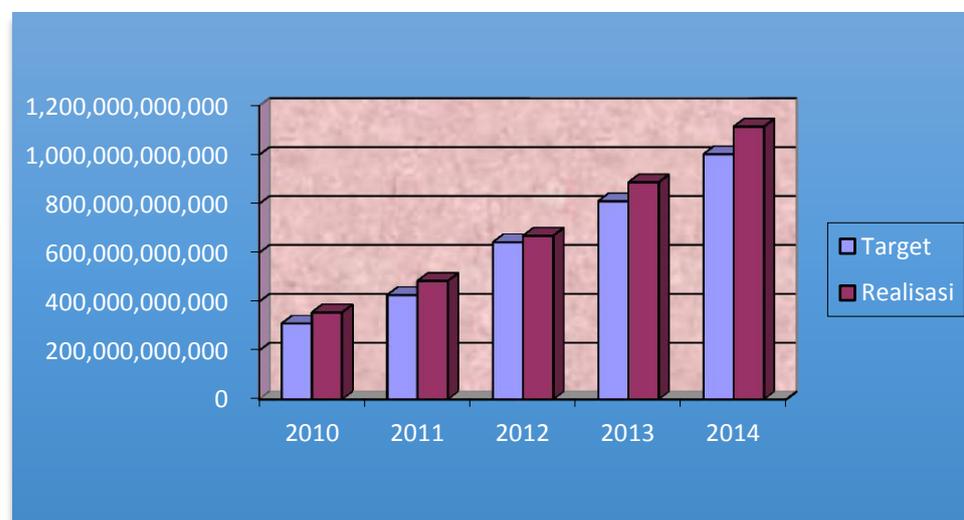
2012 meningkat menjadi Rp. 669.617.556.904,41 atau 38,26%, tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 862.617.340.329,95 atau 28,82%, sedangkan di tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 1.115.492.034.740,16 atau 29,31%.

Apabila dibandingkan dengan besaran belanja setiap tahunnya maka proporsi PAD telah mampu menyumbang rata – rata sebesar 21,50% s.d 37% dari total realisasi belanja. Jumlah ini sudah memenuhi target RPJMD.PAD pada tahun 2014 mampu memberikan kontribusi atas kekuatan APBD (belanja) sebesar 37,10%.

Upaya optimalisasi atas penerimaan PAD akan terus ditingkatkan, target RPJMD tahun 2015 sebesar 29% - 30% dapat dicapai tahun 2014 sebesar 37,10% melebihi targetnya, namun peningkatan ini harus tetap dipertahankan sampai dengan masa berakhirnya RPJMD tahun 2015.

Peningkatan PAD yang cukup tinggi ini harus diapresiasi dengan baik. Terutama dari sektor pajak daerah, Penerimaan PAD selama ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disamping semakin baiknya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban keuangannya kepada daerah.

**Grafik 3.5.3.1**  
**Perkembangan PAD**



Sumber data : DPPKA



**Tabel 3.5.3.1**  
**Perkembangan PAD**

PAD DAN KENAIKAN PAD			
TAHUN	TARGET	REALISASI (JUMLAH)	%
Tahun 2010	310.343.872.396,04	356.161.848.548,24	114,76
Tahun 2011	427.071.360.790,38	484.313.737.307,27	113,40
Tahun 2012	643.003.585.848,00	669.617.556.904,41	104,14
Tahun 2013	810.800.099.696,00	862.617.340.326,95	106,39
Tahun 2014	1.003.045.392.951,00	1.115.492.034.740,16	111,21

Sumber data : DPPKA

Kenaikan yang tertinggi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal Pajak Daerah.

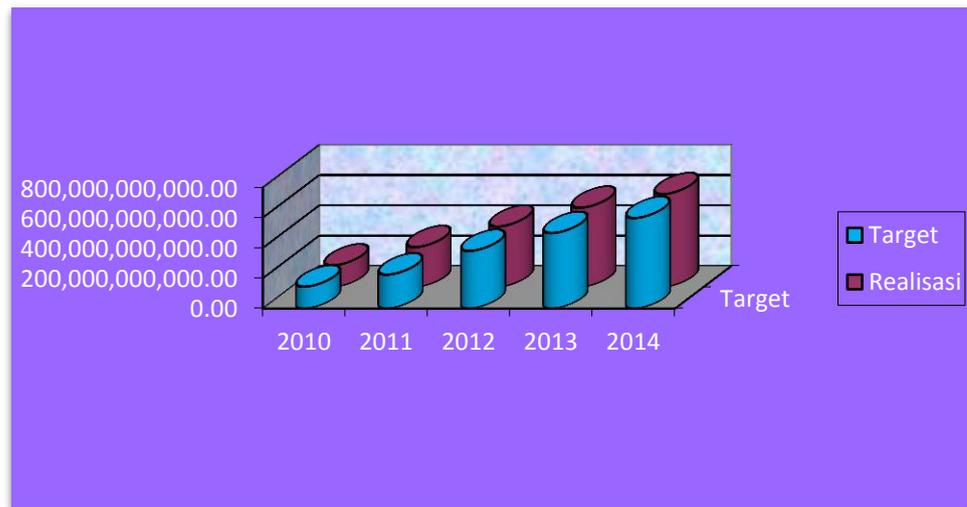
#### **Realisasi Pajak Daerah**

Secara keseluruhan dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013 baik target maupun realisasi Pajak Daerah terus mengalami kenaikan, tahun anggaran 2013 pajak daerah dianggarkan sebesar Rp. 498.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 524.764.658.686,30 tercapai sebesar 105,35%.

Pada tahun 2010 Pajak daerah selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2010 realisasi sebesar Rp. 143.915.458.137,16, realisasi tahun 2011 sebesar Rp. 264.538.593.736,65 meningkat sebesar 83,82%, tahun 2012 sebesar Rp. 400.366.973.028,30 meningkat sebesar 51,35%, tahun 2013 sebesar Rp 524.764.658.686,30 meningkat sebesar 31,07%.

#### **Grafik 3.5.3.1.1**

### Perkembangan Pajak Daerah



Sumber data : DPPKA

Pajak Daerah dan Kenaikannya			
Tahun	Target	Realisasi (Jumlah)	%
2010	144.050.000.000,00	143.915.458.137,16	99,91
2011	223.500.000.000,00	264.538.593.736,65	118,36
2012	380.312.000.000,00	400.366.973.028,30	105,27
2013	498.100.000.000,00	524.764.658.686,30	105,35
2014	597.600.000.000,00	614.284.967.311,40	102,79

Sumber data : DPPKA

### Realisasi Dana Perimbangan

Untuk pendapatan Dana Perimbangan tahun 2014 realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.403.069.829.236,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.425.650.988.426,00. Target dan realisasi penerimaan yang berasal dari pendapatan dana perimbangan dari tahun 2010 sampai dengan 2014, secara jelas dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

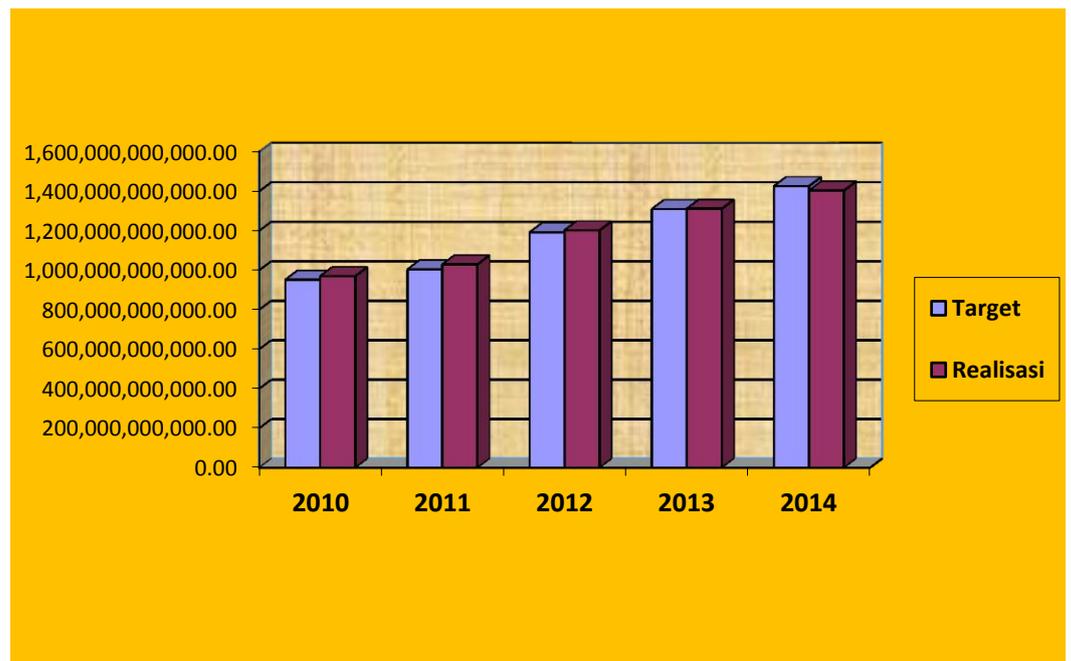
Dana Perimbangan dan Kenaikannya			
Tahun	Target	Realisasi (Jumlah)	%
2010	951.368.788.431,00	969.298.842.540,00	101,88
2011	1.003.815.337.129,00	1.029.082.329.425,00	102,52
2012	1.191.772.398.581,00	1.201.941.011.351,00	100,85
2013	1.309.290.400.966,00	1.311.016.195.099,00	100,13
2014	1.425.650.988.426,00	1.403.069.829.236,00	98,42

Sumber data : DPPKA

### Grafik 3.5.3.1.2



### Perkembangan Dana Perimbangan



Sumber data : DPPKA

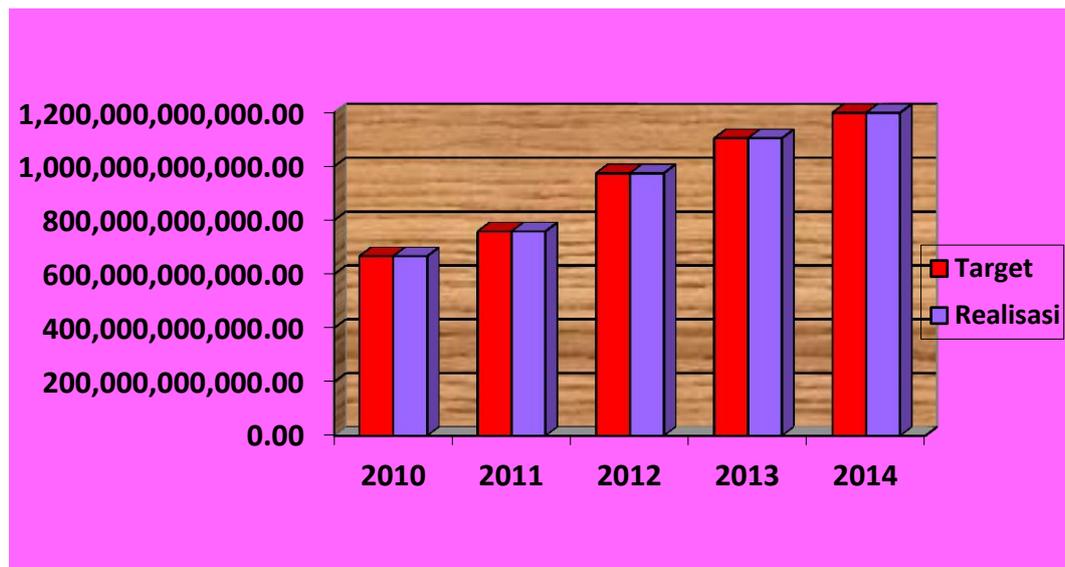
Kenaikan pendapatan dana perimbangan yang terbesar berasal dari dana alokasi umum, sebagaimana penjelasan tabel dibawah ini:

Dana Alokasi Umum dan Kenaikannya			
Tahun	Target	Realisasi (Jumlah)	%
2010	666.336.274.000,00	666.336.274.000,00	100,00
2011	758.701.153.000,00	758.701.153.000,00	100,00
2012	974.570.533.000,00	974.570.533.000,00	100,00
2013	1.104.580.340.000,00	1.104.580.340.000,00	100,00
2014	1.199.036.154.000,00	1.199.036.154.000,00	100,00

Sumber Data : DPPKA

### Grafik 3.5.3.1.3

### Perkembangan Dana Alokasi Umum



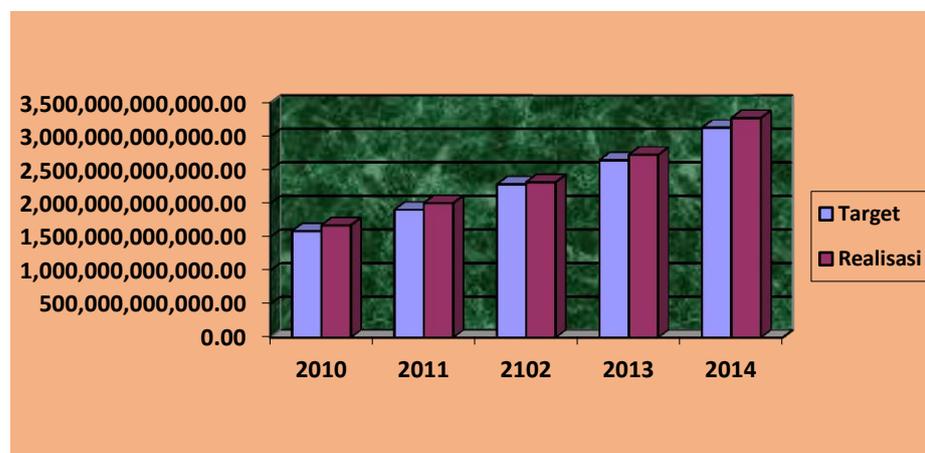
Sumber data : DPPKA

### 5.3.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah gambaran kemampuan daerah dalam membiayai seluruh aktivitasnya. Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah.

Grafik 3.5.3.2

### Perkembangan Pendapatan Daerah



Sumber data : DPPKA

Tabel 3.5.3.2

**Perkembangan Pendapatan Daerah**

<b>KENAIKAN PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI (JUMLAH)</b>	<b>%</b>
Tahun 2010	1.588.321.489.393,04	1.674.833.481.145,32	105,45
Tahun 2011	1.905.993.882.859,38	2.005.191.397.714,27	105,20
Tahun 2012	2.284.511.936.806,00	2.317.444.096.384,41	101,44
Tahun 2013	2.644.581.299.007,00	2.699.453.827.776,95	103,02
Tahun 2014	3.128.535.332.717,00	3.273.539.052.235,16	104,63

Sumber data : DPPKA

Pendapatan yang dianggarkan untuk tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp. 3.128.535.332.717,00, terealisasi sebesar Rp. 3.273.539.052.235,16 atau naik sebesar 21,27%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2013.

Peningkatan pendapatan daerah yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghimpun dana bagi pembangunan daerah telah berjalan dengan baik sehingga percepatan pembangunan daerah cepat terwujud.

**5.3.3 Jumlah Belanja Daerah**

Kinerja keuangan yang lain adalah kemampuan daerah untuk mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang diperoleh dalam bentuk belanja untuk kepentingan publik.

Kinerja keuangan yang lain adalah kemampuan daerah untuk mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang diperoleh dalam bentuk belanja untuk kepentingan publik.

Belanja daerah pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 3.577.576.573.478,34 atau 84,04% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.006.567.451.395,01. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 0,04%.

Anggaran dan realisasi penyerapannya untuk tahun 2014 seperti tabel berikut:

**Tabel 3.5.3.3**



### Belanja Daerah

NO	BELANJA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.781.835.997.465,14	1.576.227.733.090,00	(205.608.264.375,14)	<b>88,46</b>
2.	Belanja Langsung	1.795.740.576.013,20	1.430.339.718.305,01	(365.400.857.708,19)	<b>79,65</b>
	Jumlah Belanja Daerah	3.577.576.573.478,34	3.006.567.451.395,01	(571.009.122.083,33)	<b>84,04</b>

Sumber data : DPPKA

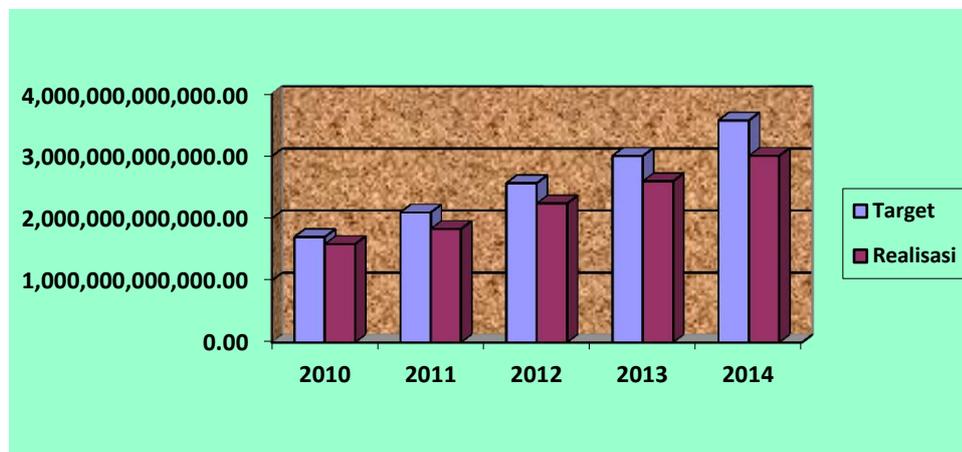
Tabel realisasi penyerapan belanja adalah sebagai berikut :

PERKEMBANGAN BELANJA DAERAH			
Tahun	Anggaran	Realisasi	%
Tahun 2010	1.698.329.944.563,66	1.584.364.436.412,19	93,29
Tahun 2011	2.093.437.864.285,53	1.828.757.388.074,71	87,36
Tahun 2012	2.565.342.909.483,71	2.238.524.285.888,37	87,26
Tahun 2013	3.005.305.068.354,75	2.572.000.670.254,38	85,58
Tahun 2014	3.577.576.573.478,34	3.006.567.451.395,01	84,04

Sumber data : DPPKA

Grafik 3.5.3.3

#### Perkembangan Belanja Daerah



Sumber data : DPPKA



Peningkatan belanja menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah Sidoarjo ini telah berjalan semakin baik sehingga kemakmuran masyarakat dapat segera terwujud, namun demikian upaya optimalisasi penyerapan dana anggaran perlu dilakukan paling tidak.

#### 5.3.4 Opini BPK atas laporan keuangan.

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan menilai opini BPK atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Untuk memperoleh kinerja yang baik, Dinas pendapatan, Pengelolaan keuangan dan aset telah menggunakan sistem informasi dalam menatausahakan keuangan daerah yang bernama SIPAA selain itu pengelolaan aset daerah juga telah menggunakan sistem Simbada dengan menerapkan sistem ini diharapkan pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik.

Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2010s.d 2013 adalah :

No	Tahun	Opini
1	2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

*Sumber data : DPPKA*

Dari opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik, walaupun masih terdapat Paragraf Penjelasan (PP). Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK.



### 5.3.5 Jumlah temuan/nilai pemeriksaan BPK dan tindak lanjutnya.

Untuk menilai efektivitas pengawasan oleh aparat pengawas fungsional maka jumlah temuan hasil audit dapat mewakili kinerja pengawasan yang dilakukan.

Jumlah temuan BPK pelaksanaan Audit Tahun 2014 sebanyak 22 temuan dengan nilai Rp 16.702.343.223,76, seluruh temuan tersebut sampai dengan akhir tahun 2014 telah ditindak lanjuti dan oleh BPK telah dinyatakan tuntas.

Tabel 3.5.3.5

#### TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK 2014

TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK 2014			
1	Temuan BPK tahun 2014	22	Rp 16.702.343.223,76
2	Temuan BPK tahun 2014 yang telah ditindak lanjuti	22	Rp 16.702.343.223,76
3	<b>Yang belum ditindak lanjuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Namun demikian masih terdapat sisa tunggakan tahun sebelumnya yang belum dapat dituntaskan terinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah temuan
1	Tahun 2011 belum ditindak lanjuti	3
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

Jumlah saldo temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 yang masih belum ditindak lanjuti sebanyak 3temuan,Sedangkan Jumlah Temuan tahun 2014 sebanyak 22 temuan dengan nilai Rp. 16.702.343.223,76 seluruhnya telah ditindak lanjuti dan dinyatakan tuntas oleh BPK Perwakilan Jawa Timur.

Sisa temuan pada tahun 2011 yang belum ditindaklanjuti merupakan temuan hasil pemeriksaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.



Atas sisa temuan tahun 2010 dan tahun 2011 pihak Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dengan didukung oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Tim Penyelesaian Kerugian daerah (TPKD), telah berupaya melakukan penagihan dan penyelesaiannya akan dilakukan secara berkelanjutan.

### 5.3.6 Jumlah temuan/nilai pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dan tindak lanjutnya.

Sebagai bentuk upaya perbaikan Tatakelola Keuangan Daerah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah melakukan tindak pengawasan/pemeriksaan.

Untuk sisa 7 temuan Inspektorat Tahun 2013 dengan total nilai sebesar Rp1.020.104.128,00 akan tetap dilakukan pemantauan dan penagihan.

Sedangkan untuk temuan tahun 2014 sebanyak 533 temuan dengan nilai Rp 8.141.894.571,64 sudah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait sebanyak 518 temuan dengan nilai Rp 3.034.323.702,64 atau 37%, sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 15 temuan dengan nilai Rp5.107.570.869,00 akan diupayakan selesai pada tahun 2015.

Dari seluruh temuan dan tindaklanjut hasil temuan ini menggambarkan bahwa kualitas hasil audit oleh aparat pengawas fungsional cukup berkualitas.

**Tabel 3.5.3.6**

**TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT 2013**

<b>TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT 2013</b>			
<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nilai</b>
1	Temuan Inspektorat Thn 2013	569	2.622.925.328,89
2	Temuan Inspektorat Thn 2013 yang telah ditindak lanjuti	562	1.602.821.200,89
3	Yang belum ditindak lanjuti	7	1.020.104.128,00
<b>TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT 2014</b>			
1	Temuan Inspektorat Thn 2014	533	8.141.894.571,64
2	Temuan Inspektorat Thn 2014 yang telah ditindak lanjuti	518	3.034.323.702,64
3	Yang belum ditindak lanjuti	15	5.107.570.869,00

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Sidoarjo



### 5.3.7 Jumlah Pelanggaran Disiplin

Jumlah hukuman yang dikenakan atas pelanggaran disiplin yang terjadi selama tahun 2014 sebanyak 23 hukuman atau sebesar 0,15 % dari 14.608 orang PNS. Sedangkan untuk tahun 2013 jumlah hukuman yang dikenakan atas pelanggaran disiplin sebanyak 27 pelanggaran atau 0,18% dari 14.619 orang PNS, sehingga terjadi penurunan jumlah hukuman yang dikenakan atas pelanggaran disiplin sebesar 0,03% dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

Pegawai yang melakukan tindak pelanggaran disiplin telah dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, mulai dari hukuman ringan sampai dengan hukuman berat.

**Tabel 3.5.3.7**  
**Pelanggaran Disiplin**

Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Hukuman yg dikenakan selama tahun 2014
Jumlah Pelanggaran	27 Orang	23 Orang	Hukuman berat : 16 Orang Hukuman sedang : 7 Orang Hukuman ringan : <u>0 Orang</u> 23 Orang
Jumlah Pegawai	14.619 Orang	14.608 Orang	-
% Pelanggaran	0,18%	0,15%	-

Proses pemeriksaan pelanggaran disiplin memerlukan proses dan waktu yang lama sehingga penjatuhan sanksi seringkali tidak bisa dilakukan pada tahun yang sama dengan proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dilakukan.

Dengan jumlah pegawai yang banyak dan wilayah yang luas maka pembinaan dilaksanakan secara langsung oleh atasan langsung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Walaupun demikian kami tetap melakukan pembinaan dan upaya guna



meningkatkan disiplin pegawai dan untuk menekan tingkat pelanggaran disiplin, antara lain:

- a) Meningkatkan pengawasan melekat oleh atasan langsung,
- b) Melakukan inspeksi mendadak secara periodik,
- c) Melakukan tindak preventif/pencegahan apabila terjadi indikasi pelanggaran disiplin.

### **5.3.8 Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

#### **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah telah menetapkan 15 SPM untuk menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

SPM pada penerapannya diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangandaerah serta kelembagaan dan personil. Dalam melaksanakan SPM diperlukan pemetaan kondisi awal SPM pada SKPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan rencana pencapaian SPM adalah menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian target pelayanan dasar, yang menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan



yang lebih adil, transparan, dan dijadikan dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja.

15 Bidang Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.5.3.8**  
**Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

NO.	SPM YANG SUDAH DILAKSANAKAN / DITINDAKLANJUTI	KETERANGAN
1	2	5
1.	SPM Bidang Perumahan Rakyat	15 bidang tersebut telah dilaksanakan dan dilaporkan capaiannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai surat tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 065/134/404.1.3.1/2015 perihal Penyampaian SPM Tahun 2014
2.	SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	
3.	SPM Bidang Sosial	
4.	SPM Bidang Kesehatan	
5.	SPM bidang Pemberdayaan Perempuan	
6.	SPM Bidang Lingkungan Hidup	
7.	SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
8.	SPM Bidang Pendidikan Dasar	
9.	SPM Bidang Ketenagakerjaan	
10.	SPM Bidang Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
11.	SPM Bidang Ketahanan Pangan	
12.	SPM Bidang Kesenian	
13.	SPM Bidang Komunikasi Dan Informatika	
14.	SPM Bidang Perhubungan	
15.	SPM Bidang Penanaman Modal	

Sumber data : Bagian Organisasi Setda

### 5.3.9 Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2014, dilakukan pengukuran pelayanan bidang pemerintahan, kesehatan, perhubungan, perijinan, pelayanan publik dengan nilai rata-rata 77,75 atau kategori B (baik), dengan rincian pada tabel berikut :



**Tabel 3.5.3.9**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat**

NO.	INSTANSI PELAYANAN PUBLIK	KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN
1	2	3	4
1	Kecamatan Gedangan	83,60	A ( Sangat Baik )
2	Kecamatan Sedati	80,35	B ( Baik )
3	Kecamatan Sukodono	79,33	B ( Baik )
4	Kecamatan Buduran	78,60	B ( Baik )
5	Kecamatan Waru	74,83	B ( Baik )
6	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	65,60	B ( Baik )
7	UPTD Parkir	61,90	C ( Kurang Baik )
8	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	83,81	A ( Sangat Baik )
9	Badan Lingkungan Hidup	73,10	B ( Baik )
10	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	77,83	B ( Baik )
11	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	83,70	A ( Sangat Baik )
12	Puskesmas Porong	78,59	B ( Baik )
13	Puskesmas Krembung	80,75	B ( Baik )
14	Puskesmas Sekardangan	81,88	A ( Sangat Baik )
15	Puskesmas Tulangan	79,37	B ( Baik )
16	Puskesmas Jabon	77,01	B ( Baik )
17	Puskesmas Trosobo	76,88	B ( Baik )
18	Puskesmas Balongbendo	76,01	B ( Baik )
19	Puskesmas Buduran	80,38	B ( Baik )
20	Puskesmas Sukodono	83,84	A ( Sangat Baik )
21	Puskesmas Urangagung	74,68	B ( Baik )
22	Puskesmas Barengkrajan	81,05	B ( Baik )
23	Puskesmas Taman	76,01	B ( Baik )
24	Puskesmas Tanggulangin	78,04	B ( Baik )
25	Puskesmas Sedati	78,67	B ( Baik )
26	Puskesmas Tarik	80,39	B ( Baik )
27	Puskesmas Prambon	80,09	B ( Baik )
28	Puskesmas Gedangan	74,62	B ( Baik )
29	RSUD	73,80	B ( Baik )
	Jumlah =	2.254,71	
	Jumlah rata-rata =	77,75	B ( Baik )

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda



### 5.3.10 Persentase Jabatan Struktural Yang Terisi

Untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, diukur dengan melihat jumlah jabatan struktural yang ada dan jumlah jabatan struktural yang telah terisi. Jumlah jabatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.5.3.10**  
**Jabatan Struktural Yang Terisi**

	Tahun 2013	Tahun 2014
Jumlah jabatan struktural	1067	1057
Jumlah jabatan yang terisi	933	936
% jabatan yang terisi	87,44	88,55

Pengisian pejabat struktural merupakan kebutuhan organisasi dan berdasarkan data tersebut terlihat jumlah jabatan yang ada belum seluruhnya terisi walaupun prosentase jumlah jabatan yang terisi meningkat, hal ini terjadi dikarenakan beberapa penyebab, antara lain masih terbatasnya pegawai yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi terkait dengan pengisian jabatan yang kosong, dan pengisian jabatan yang kosong dimaksud tidak bisa diisi setiap saat (secara langsung).

### 5.3.11 Persentase Pejabat Stuktural Yang Telah Mengikuti Diklatpim Sesuai Jenjangnya

Untuk menilai kompetensi dan kemampuan kepemimpinan maka menurut Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan PNS disebutkan bahwa setiap pejabat struktural harus melaksanakan diklat kepemimpinan untuk mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintahan yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.



**Tabel 3.5.3.11**  
**Pejabat Struktural Yang Telah Mengikuti Diklatpim**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Pejabat	834	847	933	936
2	Telah Diklat PIM	625	685	825	886
3	% Pejabat yg telah mengikuti diklat Pim	74,94	80,87	88,42	94,65

Tahun 2014 pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya sebesar 94,65%. Dari data tersebut diatas terlihat belum seluruhnya pejabat yang mengikuti diklatpim, hal ini disebabkan penyelenggaraan diklatpim tidak bisa dilaksanakan setiap saat sesuai kebutuhan jumlah pejabat yang diharuskan mengikuti diklatpim. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen memberikan prioritas kepada PNS yang telah menduduki jabatan struktural untuk menjadi peserta diklatpim yang dipersyaratkan.

### 5.3.12 Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional

Untuk memberikan bekal ketrampilan kepada PNS dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pelatihan PNS sesuai dengan kebutuhan dalam bidangnya. Berbagai macam diklat teknis dan fungsional yang diselenggarakan selama tahun 2010s. dtahun 2014 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.5.3.12**  
**Diklat Teknis dan Fungsional**

No	Keterangan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah pelaksana diklat teknis dan fungsional	10	7	7	4	6
2	Peserta	1.083	224	515	394	1.230



Terjadi peningkatan jumlah kegiatan diklat pada tahun 2014 dibanding tahun 2013, hal ini disebabkan penyelenggaraan diklat fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk kebutuhan diklat teknis yang diperlukan oleh SKPD, diakomodir dalam kegiatan Unit Training of Competence (UTC).

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk mengoptimalkan kegiatan Diklat yang sangat terkait dengan Pengembangan Manajemen Kepemerintahan antara lain melalui:

- 1) Diklat Calon Pengajar/Instruktur UTC;
- 2) Pembekalan CPNS Formasi tahun 2013;
- 3) Pembekalan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 beserta Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 4) Ujian Kompetensi Guru Tingkat I;
- 5) Penerapan UTC (“ *Unit Training of Competence*”);
- 6) serta Pengiriman Diklat Teknis dan fungsional.

#### **5.3.13 Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan.**

Untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa maka perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan dan pengelolaan keuangan kepada pemerintah desa. Pelimpahan kewenangan itu merupakan bagian dari pemberdayaan terhadap aparat yang ada di desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah kabupaten menyalurkan alokasi dana desa (ADD) setiap tahunnya sebagai bagian dari pelimpahan tersebut.

**Grafik 3.5.3.13**  
**Alokasi Dana Desa (ADD)**



Sumber data : DPPKA

Jumlah Pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 353 desa, 1.786 rukun warga (RW). Tahun 2014 tiap desa rata – rata mendapatkan alokasi sebesar Rp.204.252.101,09 Sejak tahun 2010 alokasi dana bantuan keuangan kepada desa meningkat, rata-rata peningkatan dana alokasi desa sebesar Rp.145.736.183,37 atau 20% per tahunnya.

Dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Desa, yang memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Rencana Tahun 2015 UU Desa akan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, Diharapkan kenaikan Dana Desa yang bersumber dari APBN dapat menambah sumber pendapatan Desa selain Dana Alokasi Desa yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional desa, dengan semakin meningkatnya sumber pendapatan desa, pemerintah desa dapat lebih baik dalam menjalankan pemerintahannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Besaran ADD dan Bantuan Keuangan untuk kelurahan/desa terinci sebagai berikut :

**Tabel 3.5.3.13**  
**REALISASI ADD**

REALISASI ADD DAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELURAHAN DAN DESA					
NO	Tahun	Alokasi Dana Desa (ADD)	% Peningkatan	Jumlah Bantuan Keuangan ke Desa / Kelurahan	% Peningkatan
1	2010	29.835.432.544,00	-	26.256.040.000,00	-
2	2011	37.831.717.156,00	26,80	39.776.670.550,00	51,50
3	2012	58.234.307.964,00	53,93	43.882.312.500,00	103,28
4	2013	59.221.914.300,00	76,80	78.084.964.000,00	126,26
5	2014	72.100.991.686,00	21,75	76.539.826.878,00	(1,98)

Sumber data : DPPKA

Realisasi bantuan keuangan untuk Desa/Kelurahan pada tahun 2014 terjadi penurunan dibandingkan realisasi bantuan tahun 2013 sebesar 1,98%, hal tersebut di sebabkan sebagai berikut :

- 1) Desa/Kelurahan belum membuat APBDesa
- 2) Keterlambatan Penyusunan APBDesa oleh Desa/Kelurahan
- 3) Pengajuan/penyampaian SPJ dari Desa/Kelurahan terlambat.

Namun jika dibandingkan dengan target kinerja dalam Tapkin 2014 sebesar Rp. 32.942.250.000,00 jumlah dana yang disalurkan kedesa melebihi target yang ditetapkan.

### 5.3.14 Jumlah produk hukum yang ditetapkan

Untuk mengukur efektivitas jalannya pemerintahan salah satunya diukur dengan sampai sejauh mana kelengkapan peraturan perundangan sebagai kelengkapan hukum setiap aktivitas yang dilaksanakan. Kelengkapan hukum tersebut adalah keberadaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang sesuai dengan kebutuhan. Jumlah produk Hukum yang dihasilkan selama tahun 2010 s.d 2014 adalah sebagai berikut :



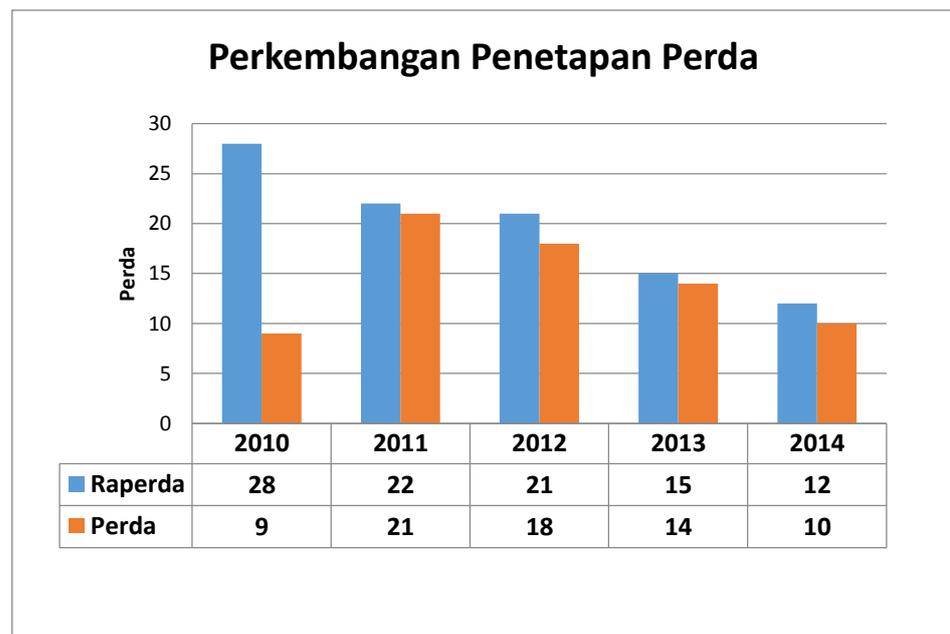
**Tabel 3.5.3.14**  
**Produk Hukum**

No	Produk Hukum	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Peraturan Daerah	9	21	18	14	10
2	Peraturan Bupati	40	64	64	62	62
3	Keputusan Bupati	1.805	1.004	1.141	1.392	1.545

Sumber data : Bagian Hukum

Jumlah Perda yang diusulkan tahun 2014 sebanyak 12 Perda namun yang disetujui/ditetapkan 10 Perda, sisa 2 Perda yang masih pembahasan, yaitu 1 perda dibahas di Dewan Perwakilan Daerah. Dan 1 Perda lainnya dibahas dibagian Hukum Provinsi, Dari Jumlah produk hukum yang tersusun tersebut tidak dapat dibandingkan pada setiap tahunnya namun disesuaikan dengan kebutuhan untuk kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

**Grafik 3.5.3.14**  
**Penetapan Peraturan Daerah**



Sumber data : Bagian Hukum

No	Produk Hukum	Tahun	Jumlah
----	--------------	-------	--------



		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Usulan Perda	28	22	21	15	12	98
2	Penetapan Perda	9	21	18	14	10	72
3	Sisa Perda yg blm dibahas	19	1	3	1	2	24

Sumber data : Bagian Hukum

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah baik dalam rangka peningkatan/pengembangan manajemen tata kelola pemerintahan dan upaya peningkatan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang dituangkan dalam bentuk MOU atau kesepakatan bersama, MOU yang masih berlaku dan berjalan sampai saat ini yaitu sebagai berikut :

N0	Jenis MOU	Jumlah
1	MOU dengan lembaga pemerintah	32 kerjasama
2	MOU dengan Daerah Lain	4 Kerjasama
3	MOU dengan Pihak Luar Negeri	4 Kerjasama
4	MOU dengan lembaga non pemerintah	25 kerjasama
5	MOU dengan universitas	23 kerjasama

Sumber Data : Bagian Kerjasama Setda

### 5.3.15 Jumlah permasalahan yang diselesaikan

Untuk mengukur kepastian hukum dalam menjalankan Pemerintahan maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus tetap berusaha agar setiap permasalahan hukum / sengketa hukum yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat melalui jalur *Litigasi* (persidangan) maupun jalur *Non Litigasi* (di luar persidangan/mediasi).



Jumlah permasalahan hukum / sengketa hukum yang dihadapi selama tahun 2007 s.d tahun 2014 sebanyak 80 permasalahan hukum / sengketa hukum jumlah sengketa hukum yang selesai sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 72 sengketa hukum.

Perkembangan Penyelesaian Kasus							
No	Uraian	s.d 2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	Kasus Baru	48	6	16	3	7	80
2	Selesai	43	7	8	9	5	72
3	<b>Sisa Kasus</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Sumber data : Bagian Hukum

Jumlah sengketa hukum yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 8 sengketa hukum , termasuk didalamnya 1 sengketa hukum yang belum terselesaikan di tahun 2013 yaitu :

Permasalahan Yang Belum Selesai		
1	217 K/pdt/2012	Masih Dalam Peninjauan Kembali, Kasus Puspa Agro Masalah Tanah
2	37/G/2014/PTUN.SBY	Perkara masih tahap banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (PT.TUN Surabaya), kasus Surat Keputusan Bupati Sidoarjo terkait penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa keper Kecamatan Krembung
3	86/Pdt. G/2014/PN.SDA	Perkara masih dalam upaya hukum banding, kasus Kepala Desa yang diberhentikan Kepala Desa terkait habis masa jabatan
4	149/G/2014/PTUN.SBY	Perkara masih dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, kasus surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerjasama
5	161/Pdt.G/2014/PN.Sda	Perkara masih dalam proses di Pengadilan Negeri Sidoarjo, kasus sengketa tanah
6	189/Pdt.G/2014/PN.Sda	Perkara masih dalam proses di Pengadilan negeri sidoarjo, kasus perjanjian kerjasama
7	198/Pdt.G/2014/PN.Sda	Perkara masih dalam proses di Pengadilan Negeri Sidoarjo, kasus parkir berlangganan
8	199/Pdt.G/2014/PN SDA	Perkara masih di Pengadilan Negeri Sidoarjo, kasus perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa Watugolong Kecamatan Krian terkait tata tertib



Sasaran 4. ***Tersedianya dokumen statistik*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung informasi pembangunan, sebagai berikut :

1. Penyusunan buku Sidoarjo Dalam Angka yang berisikan data-data di Kabupaten Sidoarjo. Diantara data-data tersebut terdapat data kependudukan, data tenaga kerja, data industri, dan lain sebagainya yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Penyusunan buku PDRB Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam buku tersebut memuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo.
3. Penyusunan buku Profil Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan harapan dapat menjadi media informasi dan promosi yang baik bagi masyarakat di dalam maupun di luar Kabupaten Sidoarjo.

Diharapkan informasi-informasi yang dihimpun tersebut dapat memberikan manfaat bagi perencanaan untuk peningkatan pembangunan Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang.

Sasaran 5. ***Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sistem yang adil dan merata*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

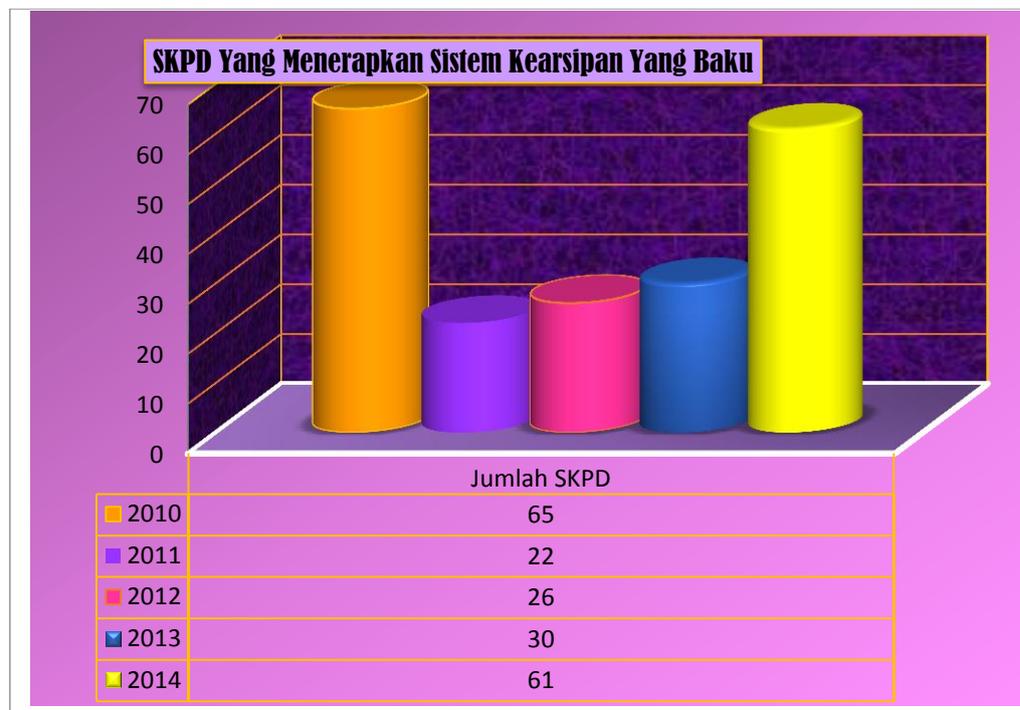
#### **5.5.1 Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku**

Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sampai dengan tahun 2014 yang telah menerapkan sistem kearsipan yang baku sebanyak 61 SKPD atau 100% dari SKPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan tahun 2014 sebesar 11 SKPD, maka capaiannya sebesar 554% dari target RPJMD dan Penetapan Kinerja 2014, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mengalami peningkatan, dimana jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku sebanyak 30 SKPD atau peningkatan sebanyak 31 SKPD atau 103%

Meningkatnya Jumlah SKPD yang menerapkan sistem kearsipan baku karena meningkatnya pembinaan, pendampingan dan monitoring secara berkala mengenai arsip di SKPD.

Perkembangan Jumlah SKPD yang menerapkan sistem kearsipan yang baku selama lima tahun seperti terlihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.5.5.1**  
**Satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku**



*Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip*

### 5.5.2 Jumlah arsip in aktif yang dikelola

Perkembangan jumlah arsip in aktif yang dikelola selama empat tahun seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.5.5.2

## Jumlah arsip in aktif yang dikelola



Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip

Dari grafik terlihat bahwa jumlah arsip in aktif yang dikelola menunjukkan tren meningkat. Realisasi pengelolaan arsip inaktif tahun 2014 tercapai sebanyak 15.954 arsip apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yang sebanyak 12.570 arsip mengalami peningkatan sebesar 3.384 arsip atau 26,92%. Sedangkan dibandingkan dengan target RPJMD dan Penetapan Kinerja 2014 capaiannya sudah melampaui yaitu sebesar 8.000 berkas. Hal ini disebabkan :

1. Timbul kesadaran SKPD untuk mengirim arsip in aktifnya
2. SKPD belum mempunyai tempat penyimpanan (Depo arsip) sehingga melakukan akuisisi arsip ke arsip Daerah/Kabupaten.

Disamping itu upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan arsip, antara lain :

1. Mengadakan bintek/ sosialisasi arsip (Sekdes dan pengelola arsip)
2. Pendampingan langsung ke lembaga (SKPD dan Desa/Kelurahan)
3. Mengadakan Lomba Kearsipan tingkat desa/kelurahan



Sasaran 6. ***Tersusunnya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif, inovative memperhatikan kepentingan masyarakat*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

#### **5.6.1 Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen penelitian yang dihasilkan**

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 46 dokumen. Dari jumlah tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan tercatat sebanyak 1 (satu) dokumen belum ditindaklanjuti. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, kajian tersebut akan ditindaklanjuti pada tahun 2015. Dengan demikian dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditindaklanjuti mencapai 97,83%.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan pada tahun 2014 adalah sebanyak 61 dokumen. Mengingat dokumen tersebut baru selesai pada akhir tahun 2014 dan monitoring serta evaluasi terhadap dokumen tersebut belum teranggarkan pada tahun 2015, maka monitoring dan evaluasi untuk dokumen perencanaan pembangunan tahun 2014 akan dilaksanakan tahun 2016.

<b>NO</b>	<b>JUDUL</b>	<b>NO/TGL BA PENYELESAIAN</b>	<b>PROGRAM PENDUKUNG</b>	<b>RENCANA PEMANFAATAN</b>
<b>I</b>	<b>DOKUMEN PERENCANAAN</b>			
1	Restrukturisasi Program dan Kegiatan SKPD	027/108/404.5.6/2014 28 Nov 2014	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyempurnaan Program dan Kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI sebagai acuan dalam penyusunan program dalam RKPD 2016 dan RPJMD 2015-2020.
2	Pedoman Penyusunan Renstra SKPD	027/29/404.5.6/2014 3 Nov 2014	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD Tahun 2015-2020
3	Evaluasi Renja SKPD berdasarkan sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD) Kab. Sidoarjo	027/102/404.5.6/2014 29-Okt-14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan RPJMD periode berikutnya



4	Penyusunan RKPD Tahun 2015	027/119/404.5.6/2014 26 Mei 2015	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun 2015 dan sudah dimanfaatkan
5	Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2014	027/147/404.5.6/2014	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS Perubahan dan RAPBD Perubahan Tahun 2014 dan sudah dimanfaatkan
6	Penyusunan KUA PPAS TA 2015	027/123/404.5.6/2014	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD Tahun 2015 dan pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2015 dan sudah dilaksanakan
7	Penyusunan KUA PPAS Perubahan TA 2014	027/148/404.5.6/2014	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD Tahun 2015 dan pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2015 dan sudah dilaksanakan
8	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Indikator Makro Daerah	027/211/404.5.6/2014 30-Okt-14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai bahan evaluasi dalam pencapaian target indikator makro pembangunan daerah
8	Penyusunan Dokumen RP3KP ( Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Kab.Sidoarjo	027/249/404.5.4/2014 2 Desember 2014	Program Pengembangan Perumahan	Untuk mengukur tingkat kebutuhan dan ketersediaan hunian di Kab. Sidoarjo dan sebagai serta sebagai pedoman kebijakan pengelolaan kawasan kumuh yang akan menjadi perumahan dan permukiman
9	Penyusunan Dokumen SOP Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan PSU	027/144/404.5.4/2014 11 Juli 2014	Program Pengembangan Perumahan	Sebagai pedoman proses penyerahan PSU bagi Tim Verifikasi dan Pengembang
10	Penyusunan Dokumen Masterplan Transportasi Kabupaten Sidoarjo ( Tahap I )	027/250/404.5.4/2014 2 Desember 2014	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Dokumen rencana induk pengelolaan transportasi perkotaan berisi sinkronisasi sistem transportasi nasional, propinsi dan



				Kabupaten terutama transportasi darat berguna dalam menata pembangunan jalan dan transportasi hingga 20 tahun ke depan
11	Konsistensi Renja SKPD dengan RKPD	027/219/404.5.6/2014 10 Nopember 2014	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai dasar untuk mengevaluasi dan melihat konsistensi antara program/kegiatan yang ada di Renja SKPD dan RKPD
12	Konsistensi RKPD dan KUA PPAS dengan Prioritas Nasional dan Prov. Jatim Tahun 2015	027/244/404.5.6/2014 21 Nopember 2014	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai dasar untuk mengevaluasi dan melihat konsistensi antara program/kegiatan yang ada di RKPD dengan PPAS serta Prioritas Nasional dan Provinsi.
13	Penyusunan I H K		Program Perencanaan pembangunan Ekonomi	Termanfaatkannya data Inflasi sebagai bahan evaluasi kinerja ekonomi dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang ekonomi.
14	Penyusunan ILOR		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Termanfaatkannya data Tenaga Kerja sebagai bahan evaluasi kinerja ekonomi dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang ekonomi.
15	Penyusunan Dokumen RI SPAM Kabupaten Sidoarjo	027/242/404.5.4/2014 4 Nopember 2014	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Sebagai Rencana Induk pengembangan SPAM di Kab. Sidoarjo dan untuk mendukung target universal akses thd air minum
15	Penyusunan Guideline Pengendalian Banjir/Genangan Perkotaan	027/255/404.5.6/2014 3 Nopember 2014	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Sebagai pedoman pengendalian banjir/genangan perkotaan melalui pembagian tugas dan kewenangan



				saluran hingga tingkat drainase tersier
16	Penyusunan dokumen survey kebutuhan Nyata ( Real Demand) air bersih dan air minum di Kab. Sidoarjo	027/214/404.5.4/2014 31 Oktober 2014	Program Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar	Survey untuk mendapatkan data kebutuhan nyata masyarakat sidoarjo terhadap air bersih dan air minum untuk mengetahui potensi pelanggan PDAM.
17	Penyusunan dokumen studi pengembangan jaringan perpipaan PDAM Kab. Sidoarjo	027/256/404.5.4/2014 3 Nopember 2014	Program Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar	Mengetahui eksisting perpipaan dan kemampuan investasi pembangunan jaringan perpipaan.
18	Analisa Data dan Informasi Pembangunan Daerah di Kab. Sidoarjo	027/254/404.5.6/2014 25 Nov 2014	Program Data/Informasi	Sebagai bahan untuk menyusun perencanaan pembangunan di tahun berikutnya
19	Analisis Kemampuan Fiskal terhadap Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 2015-2020 Kab. Sidoarjo	027/212/404.5.6/2014 29-Okt-14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pedoman menyusun RPJMD periode 2015-2020
20	Penyusunan Action Plan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kab. Sidoarjo	027/143/404.5.4/2014 11 Juli 2014	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Sebagai pedoman pengelolaan limbah domestik, siapa berbuat apa. Dan untuk penyusunan program/kegiatan serta penganggaran untuk jangka menengah (5 Th )
21	Penyusunan Dokumen Titik BM ( Bench Mark )	027/141/404.5.6/2014 11 Juli 2014	Program Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar	Menentukan titik referensi elevasi/tinggi permukaan tanah sebagai pedoman keseragaman titik ikat dalam pekerjaan konstruksi dan lainnya
<b>II</b>	<b>DOKUMEN KAJIAN</b>			
22	Kajian Analisa Kebutuhan Anggaran Kecamatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenanga Bupati Kepada Camat diKab. Sidoarjo	027/32/PL/PEM/VII/20 14 24 Juli 2014	Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Sebagai bahan masukan dalam penyusunan pedoman penganggaran di Kecamatan.
23	Analisa Pelaksanaan	027/50/PL/PEM/VII/20	Penyusunan	Sebagai Bahan



	Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) di Kab. Sidoarjo	14 24 Juli 2014	Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Masukan Dalam Merumuskan kebijakan Mengurangi Potensi Timbulnya Tindak Pidana Korupsi
24	Penyusunan Dokumen Monev SKPD Sub Bidang Aparatur pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur	027/66/PL/PEM/IX/20 14 17 September 2014	Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Sebagai bahan Verifikasi Renja SKPD Koordinasi Sub Bidang Aparatur
25	Penyusunan Dokumen Monev SKPD Sub Bidang Aparatur pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur	027/99/PL/PEM/IX/20 14 17 September 2014	Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Sebagai bahan Verifikasi Renja SKPD Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan
26	Analisa Kemampuan Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di kab. Sidoarjo	027/ 148/PL/PEM/IX/2 014 4 September 2014	Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Sebagai bahan masukan bagi kecamatan dalam melakukan evaluasi rancangan APBDes
27	Analisa Kompetensi Aparatur Kecamatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan di Kab. Sidoarjo	027/164/PL/PEM/IX/2 014 2 Desember 2014	Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Sebagai bahan masukan dalam pengisian Formasi pegawai Pada Kecamatan
28	Dokumen Evaluasi Musrenbang Tahun 2014	027/ 278 /404.5/2014 10 Nopember 2014	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penyelenggaraan Musrenbang RKPD dilingkungan Pemkab Sidoarjo
29	Perencanaan Bisnis Kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo	027/241/404.5.1/2014 17 Nopember 2014	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Bahan pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fungsi yang lebih optimal.
30	Penataan dan pengembangan Kawasan PKL di Wilayah Sidoarjo Kota.	027/238/404.5.1/2014 10 Nopember 2014	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terciptanya kawasan PKL di wilayah pusat Kota Sidoarjo yang yaman dan indah Sebagai wadah Kegiatan sektor Informal yang sinergi dengan sektor Formal yang dibina oleh SKPD yang berkepentingan.



31	Perencanaan Bisnis Kawasan Rusunawa Kabupaten Sidoarjo	027/220/404.5.3/2014 28 Nopember 2014	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Menyelesaikan masalah kekumuhan, mengembangkan ekonomi produktif dan sebagai kawasan yang lebih berdaya guna .
32	Penyusunan LP2KD 2014	027/169/404.5.3/2014 29 September 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Sebagai dasar penyusunan program-program Kemiskinan di Kab. Sidoarjo
33	Penyusunan Dokumen Analisa Capaian MDG'S Goals 1	027/114/404.5.3/2014 23 Mei 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Sebagai dasar penyusunan program-program bidang kemiskinan dan kelaparan
34	Penyusunan Dokumen Analisa Capaian MDG'S Goals 2	027/114/404.5.3/2014 30 Mei 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Sebagai dasar penyusunan program-program bidang Pendidikan
35	Penyusunan Dokumen Analisa Capaian MDG'S Goals 3	027/118/404.5.3/2014 26 Juni 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Sebagai dasar penyusunan program-program bidang Gender
36	Penyusunan Dokumen Analisa Capaian MDG'S Goals 4	027/132/404.5.3/2014 16 Juni 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Sebagai dasar penyusunan program-program bidang dalam penurunan Angka kematian anak
37	Penyusunan Dokumen Analisa Capaian MDG'S Goals 5	027/133/404.5.3/2014 18 Juni 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Sebagai dasar penyusunan program-program bidang Kesehatan Ibu
38	Penyusunan Dokumen Analisa Capaian MDG'S Goals 6	027/134/404.5.3/2014 27 Juni 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Sebagai dasar penyusunan program-program bidang dalam memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya
39	Penyusunan Dokumen	027/75/404.5.3/2014	Program	Sebagai dasar



	Analisa Capaian MDG'S Goals 7	30 Juni 2014	Perencanaan Sosial Budaya	penyusunan program-program bidang dalam pelestarian lingkungan hidup
40	Penyusunan Dokumen Analisa Pelaksanaan PNPB Mandiri Perkotaan dan Perdesaan	027/222/404.5.3/2014 27 Nopember 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Termanfaatkannya program PNPB Mandiri perkotaan dan Perdesaan
41	Penyusunan Dokumen Analisa pelaksanaan PKH	027/042/404.5.3/2014 28 Maret 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Sebagai bentuk komitmen dari Pemkab Sidoarjo dalam mendukung pencapaian target-target MDG's ditingkat Nasional dan sebagai bahan perencanaan sistematis dalam mencapai target-target MDG'S baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari tahun 2013 s/d 2015.
42	Penyusunan Dokumen Analisa Anggaran Responsif Gender	027/221/404.5.3/2014 27 Nopember 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Untuk mengetahui seluruh proses dan capaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidoarjo bagi peserta program baik dari akses pendidikan, kesehatan maupun sosial lainnya
43	Analisa Anggaran Responsif Gender Kab. Sidoarjo Tahun 2014	027/170/404.5.3/2014 26 September 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring - evaluasi pada setiap tahapan pembangunan dan memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam implementasi strategi PUG.
44	Penyusunan Dokumen Analisa Kemiskinan	027/223/404.5.3/2014 21 Nopember 2014	Program Perencanaan Sosial	Sebagai bahan informasi dan



	Bidang Infrastruktur Dasar		Budaya	penyediaan data terpilah PPLS 2011 yang memiliki karakteristik tingkat pendidikan masing-masing rumah tangga miskin dan sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menentukan prioritas wilayah dalam rangka intervensi program-program pendidikan bagi rumah tangga miskin.
45	Penyusunan RAD Pangan dan Gizi	027/168/404.5.3/2014 23 September 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Sebagai panduan dan arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain pada tataran Kabupaten Sidoarjo untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan perbaikan gizi dan ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo.
46	Penyusunan Analisa Tenaga Kerja	027/226/404.5.3/2014 25 Nopember 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Gambaran secara ringkas kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 dan capaian indikator makro kinerja RPJMD Kabupaten Sidoarjo pada tingkat pengangguran terbuka (TPT)
47	Penyusunan Dokumen survey Potensi Air Baku yang dimanfaatkan masyarakat secara mandiri di Kab. Sidoarjo	027/215/404.5.4/2014 31 Oktober 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Survey untuk mendapatkan data sumber air baku yang dimanfaatkan masyarakat Sidoarjo serta air baku yang belum termanfaatkan berguna untuk proyeksi potensi



				pengembangan air minum
48	Analisis Efektifitas Belanja Bidang UKM di Kabupaten Sidoarjo	027/22/404.5.6/2014 12-Sep-14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai dasar alokasi anggaran UKM untuk tahun berikutnya
49	Penyusunan dokumen kinerja kelembagaan GHIPPA	027/183/404.5.3/2014 10 Oktober 2014	Program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Pengukuran kinerja kelembagaan GHIPPA untuk masukan dalam pembinaan selanjutnya.
50	Penyusunan Buku Profile Daerah	027/258/404.5.6/2014 28 Nopember 2014	Program Pengembangan Data/Informasi	Sebagai data informasi perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam angka.
51	Penyusunan Dokumen Identifikasi Pengelolaan Limbah Non Domestik dan Penentuan Lokasinya	027/257/404.5.6/2014 3 Nopember 2014	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Inventarisasi sebaran kegiatan yang menghasilkan limbah non domestik (limbah medis) beserta jumlah timbulan yang dihasilkan sebagai pedoman dalam penentuan lokasi pengolahan limbah domestik/B 3 Medis.
<b>III</b>	<b>DOKUMEN PENELITIAN</b>			
52	Peran Koperasi Dalam Mendukung Pengembangan dan Penguatan UMKM di Kabupaten Sidoarjo	027/227/404.5.6/2014 14 Nopember 2014	Program Penelitian dan Pengembangan	Hasil penelitian akan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan peran koperasi dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Sidoarjo
53	Analisa Ketersediaan Lahan Untuk Pengembangan Budi Daya Rumput Laut di Kabupaten Sidoarjo	027/227/404.5.6/2014 11 Nopember 2014	Program Penelitian dan Pengembangan	Hasil penelitian akan digunakan sebagai dasar pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Sidoarjo
54	Kesiapan Kabupaten Sidoarjo Dalam Menghadapi Asean Economi Community (AEC) Tahun 2014	5 DeSember 2014	Program Penelitian dan Pengembangan	Hasil penelitian akan dimanfaatkan sebagai acuan dalam menginventarisasi kebutuhan SKPD dalam rangka persiapan menghadapi implementasi AEC di Kabupaten Sidoarjo



55	City Branding Kabupaten Sidoarjo	14 Nopember 2014	Program Penelitian dan Pengembangan	Hasil penelitian akan dimanfaatkan sebagai acuan dalam menyusun City Branding Kabupaten Sidoarjo
56	Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Sidoarjo	30 Oktober 2014	Program Penelitian dan Pengembangan	Hasil penelitian akan dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pengaturan implementasi ADD di Kabupaten Sidoarjo
<b>IV</b>	<b>DOKUMEN LAINNYA</b>			
57	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan Kab. Sidoarjo TA. 2014	027/247/404.5.6/2014 9 Desember 2014	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai dasar dalam pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuann di lingkungan Pemkab Sidoarjo
58	Penyusunan Look at Sidoarjo	027/209/404.5.1/2014 20 Oktober 2014	Program data/informasi	Sebagai sarana daerah dalam melihat potensi ekonomi di Kab. Sidoarjo
59	IPJ (Indeks Pembangunan Jender) Kab. Sidoarjo Tahun 2014	027/224/404.5.3/2014 25 Nopember 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Sebagai alat bantu perencanaan (planning tool) pembangunan Kabupaten yang lebih mengakomodasikan dimensi pembangunan sosial berwawasan kemitra sejajaran Gender dan sebagai data dasar bagi seluruh instansi terkait dalam menyelenggarakan program pembangunan yang lebih mencerminkan kesetaraan Gender Merupakan tindak lanjut penyusunan neraca kepemilikan tanah kesesuaian lahan Tahun 2013 Lalu.Mengetahui secara detail I tingkat kesesuaian penggunaan lahan sesuai dengan dokumen RTRW
60	Penyusunan Neraca Kesesuaian Penggunaan Lahan Kabupaten Sidoarjo (lanjutan)	027/267/404.5.6/2014 16 Desember 2014	Program Penguasaan, pemilikan, penggunaa n dan pemanfaatan tanah	
61	Penyusunan Dokumen Pendataan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah	027/137/404.5.4/2014 4 Juli 2014	Program Penguasaan, pemilikan, penggunaa n dan pemanfaatan tanah	Untuk mengetahui data kepemilikan tanah yang



	di Kec. Buduran		n dan pemanfaatan tanah	bersertifikat HGB, SHM atau lainnya di Kec. Buduran
62	Penyusunan Dokumen Pendataan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah di Kec. Sedati	027/137/404.5.4/2014 4 Juli 2014	Program Penguasaan, pemilikan, penggunaa n dan pemanfaatan tanah	Untuk mengetahui data kepemilikan tanah yang bersertifikat HGB, SHM atau lainnya di Kec. Sedati
63	Penyusunan Dokumen Pendataan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah di Kec. Wonoayu	027/137/404.5.4/2014 4 Juli 2014	Program Penguasaan, pemilikan, penggunaa n dan pemanfaatan tanah	Untuk mengetahui data kepemilikan tanah yang bersertifikat HGB, SHM atau lainnya di Kec. Wonoayu
64	Penyusunan Standarisasi Peta Dasar dan Land use eksisting di 14 Kecamatan	027/216/404.5.4/2014 14 Nopember 2014	Program Penguasaan, pemilikan, penggunaa n dan pemanfaatan tanah	Sebagai bahan pemuktahiran peta dasar Kab. Sidoarjo dengan Citra Satelit terbaru. Dan memutakhirkan basis data spasial dalam format GIS berupa peta dasar dan peta tata guna lahan terbaru.
65	Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan Kepesertaan JKMM Kab. Sidoarjo Tahun 2014	027/184/404.5.3/2014 6 Oktober 2014	Program Perencanaan Sosial Budaya	Sebagai panduan bagi peserta JKMM ( Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin) di Kab. Sidoarjo
67	Updating Database Profile Daerah	027/150/404.5.6/2014 31-Okt-14	Program Pengembangan Data/Informasi	Sebagai basis data dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan.
68	Pendampingan E-Monev	027/80/404.5.6/2014 14 Nov 2014	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai alat/tools dalam mengevaluasi Renja SKPD

### HASIL PERENCANAAN – KAJIAN – PENELITIAN TAHUN 2014

No.	JUDUL	PROGRAM	TINDAK LANJUT
			OUTCOME- PEMANFAATAN
1	Identifikasi Permainan tradisional di Kabupaten Sidoarjo	<b>Program Penelitian &amp; Pengembangan</b>	Sudah ada Surat Edaran terkait himbauan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional melalui kegiatan dalam perayaan HUT RI
2	Peran Dunia Usaha dalam memanfaatkan lulusan Sekolah Menengah di Kabupaten Sidoarjo		Infrastruktur BLK sudah dibangun di atas lahan seluas ± 10 Ha dengan kapasitas 1.600 peserta. Beberapa ruang yang sudah



			selesai dibangun adalah ruang workshop dan ruang kelas teori; Telah dibuat MoU dengan pemerintah pusat terkait dengan status sebagai BLK Internasional yang harus menampung 40% lulusan SMK di Sidoarjo dan 60% lulusan di Jawa Timur; BLK mempunyai prospek yang bagus dalam rangka memberikan pelatihan yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan; Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sedang menyusun Perda Pelatihan Aneka Kejuruan yang menjadikan BLK sebagai pusat dari semua kegiatan pelatihan kejuruan.
3	Analisa Pelaksanaan standar kompetensi lulusan siswa Sekolah Menengah Atas & Sederajat di Kab. Sidoarjo		Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo melalui SMA dan sederajat sudah mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan bidang keagamaan untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan
4	Analisis Kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Sidoarjo		Hasil dari penelitian ini dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD di Kabupaten Sidoarjo Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sudah membuat terobosan agar guru-guru PAUD aktif dalam forum Asosiasi Profesi PAUD
5	Profil Investasi & Prospek Ekonomi Strategis	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	Sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan ekonomi dan sebagai bahan promosi daerah
6	Penyusunan PDRB		Termanfaatkannya data makro ekonomi sebagai bahan evaluasi kinerja ekonomi dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang ekonomi.
7	Penyusunan IHK		Termanfaatkannya data Inflasi sebagai bahan evaluasi kinerja ekonomi dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang ekonomi.
8	Penyusunan ILOR		Termanfaatkannya data Tenaga Kerja sebagai bahan evaluasi kinerja ekonomi dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang ekonomi.
9	Penyusunan Analisa Investasi Rencana Pengembangan Gedung Balai Diklat		Rencana merevitalisasi Fungsi Gedung Balai Diklat.
10	Penyusunan Rencana		Rencana tindak untuk



	Penataan Kawasan Industri		pengembangan industri
11	Penyusunan Analisa hasil monev		Terpantaunya kegiatan SKPD sebagai dasar kegiatan selanjutnya.
12	Kajian Arahan Pemanfaatan potensi pada wilayah perbatasan Kab. Sidoarjo dan Kab. Pasuruan	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	Sebagai arahan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengendalian kegiatan pembangunan berbagai bidang/sector di wilayah perbatasan Kab. Sidoarjo dan Kab. Pasuruan
13	Kajian Arahan Pemanfaatan potensi pada wilayah perbatasan Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya		Sebagai arahan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengendalian kegiatan pembangunan berbagai bidang/sector di wilayah perbatasan Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya
14	Kajian Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pulau - Pulau Kecil pada wilayah perbatasan Kab. Sidoarjo		Tersusunnya strategi pengembangan pemasaran pariwisata pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan dengan konsep <i>green architecture</i> yang menitik beratkan pendekatan ekosistem.
15	Analisa Kebutuhan Personil Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo (Tambahan)	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	Sebagai rekomendasi pemenuhan jumlah personil kelurahan di Kab. Sidoarjo dan perencanaan kebutuhan pelatihan personil yang ideal
16	Kajian Kemampuan Perangkat Desa dalam menyusun Potensi Desa di Kab. Sidoarjo		Tersusunnya model pengembangan potensi desa dengan basis optimalisasi kemampuan perangkat desa
17	Kajian Pengaruh Motivasi dan Kepemimpinan Pengambil Kebijakan terhadap Semangat Kerja Staf		Adanya konsep/model kepemimpinan yang dapat memacu semangat kerja staf dilingkungan Pemerintah Kab. Sidoarjo
18	Kajian Arahan Penanganan Kelurahan Terdampak Luapan Lumpur di Kecamatan Porong Kab, Sidoarjo	<b>Program Pembangunan Daerah Rawan Bencana</b>	Adanya skema penanggulangan dampak luapan lumpur dan kebijakan pembentukan/penggabungan kelurahan baru
19	Kajian Pengelolaan dan Pengendalian Pembangunan pada Daerah Rawan Bencana		Tersusunnya skema atau konsep pengelolaan dan pengendalian ekonomi, sosial kemasyarakatan dan infrastruktur pada daerah rawan bencana
20	Penyusunan Analisa Ekonomi Kab. Sidoarjo	<b>Program Pengembangan Data/ Informasi</b>	
21	Penyusunan SOP Bappeda (Tahap II)		Sebagai bahan dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku.
22	Pengembangan Data Base Profil Daerah		Sebagai bahan dasar penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah tahun berikutnya
23	Updating SIPD		Sebagai bahan dasar penyusunan



			perencanaan dan pembangunan daerah tahun berikutnya
24	Penyusunan buku profil daerah		Sebagai media expose hasil pembangunan yang dicapai Kabupaten Sidoarjo
25	Evaluasi Konsistensi RKPD dengan Prioritas Nasional		Sebagai dasar evaluasi keselarasan kebijakan program/kegiatan dalam RKPD dengan perencanaan nasional.
26	Evaluasi Efektifitas Anggaran Belanja		Sebagai dasar evaluasi tentang keefektifan anggaran belanja langsung dan dampaknya bagi masyarakat.
28	Rancangan Akhir RPJP	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Sebagai dasar pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang
29	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan Kabupaten Sidoarjo TA 2013		Sebagai dasar monitoring dan evaluasi Dana Tugas Pembantuan dari Pusat
30	Dokumen KUA, PPAS Tahun 2014		Sebagai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2014 dan sudah dilaksanakan.
31	Penyusunan Perubahan KUA - PPAS Tahun 2013		Sebagai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD Tahun 2014 dan sudah dilaksanakan
32	Pemetaan Renja SKPD berdasarkan sasaran pembangunan RPJMD		Sebagai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD Tahun 2013 dan sudah dilaksanakan
33	Evaluasi Konsistensi KUA PPAS 2014 terhadap RKPD Tahun 2014		Sebagai dasar pengendalian perencanaan tahun berikutnya dan untuk mengetahui seberapa besar program/kegiatan RKPD yang diakomodir dalam KUA-PPAS 2014
34	Penyusunan Analisis Teknokratik RPJMD 2015 – 2020		Sebagai dasar penyusunan RPJMD 2015-2020
35	Penyusunan Arahan Rencana Tindak Tahun Terakhir RPJMD 2010 - 2015		Sebagai bahan dasar penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah menghadapi tahun terakhir RPJMD Tahun 2015 dan sebagai dasar evaluasi RPJMD.
36	Review Dokumen MDG'S	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	Sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun arah kebijakan yang akan menjadi dasar bagi perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD-SKPD terkait dalam rangka percepatan pencapaian tujuan 1 sampai dengan 7 dalam MDG's.
37	Penyusunan Analisa ketenagakerjaan Kab. Sidoarjo		Gambaran secara ringkas kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2012 dan capaian indikator makro kinerja



			RPJMD Kabupaten Sidoarjo pada tingkat pengangguran terbuka (TPT)
38	Penyusunan IPJ		Sebagai alat bantu perencanaan (planning tool) pembangunan Kabupaten yang lebih mengakomodasikan dimensi pembangunan sosial berwawasan kemitra sejajar Gender dan sebagai data dasar bagi seluruh instansi terkait dalam menyelenggarakan program pembangunan yang lebih mencerminkan kesetaraan Gender.
39	Penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)		Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring - evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunan dan memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan strategi PUG.
40	Penyusunan LP2KD		Sebagai bahan evaluasi kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo dan Sebagai bahan evaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara khusus mengenai pelaksanaan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur, maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri supaya kedepan dapat lebih optimal lagi.
41	RAD Peningkatan Gizi Masyarakat		Sebagai panduan dan arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain pada tataran Kabupaten Sidoarjo untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan perbaikan gizi dan ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo.
42	Dokumen Evaluasi Outcome Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo (Revisi)		Sebagai alat bantu guna mengevaluasi efektifitas program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo terhadap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.
43	Dokumen Analisa Kemiskinan Bidang Pendidikan		Sebagai bahan informasi dan penyediaan data terpilah PPLS



			2011 yang memiliki karakteristik tingkat pendidikan masing-masing rumah tangga miskin dan sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menentukan prioritas wilayah dalam rangka intervensi program-program pendidikan bagi rumah tangga miskin.
44	Dokumen Analisa Kemiskinan Bidang Kesehatan		Sebagai bahan informasi dan penyediaan data terpilah PPLS 2011 yang memiliki karakteristik permasalahan kesehatan masing-masing rumah tangga miskin dan sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menentukan prioritas wilayah dalam rangka intervensi program-program kesehatan bagi rumah tangga miskin.
45	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan PNPM		Untuk mengetahui seluruh proses dan capaian pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo dan sebagai perencanaan peningkatan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM).
46	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan PKH		Untuk mengetahui seluruh proses dan capaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidoarjo bagi peserta program baik dari akses pendidikan, kesehatan maupun sosial lainnya
47	Profil Anggaran Gender		Identifikasi program dan kegiatan baik dari sisi perencanaan dan anggaran yang responsif gender pada masing-masing SKPD di Kabupaten Sidoarjo dan bahan kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam proses menyusun anggaran yang responsif gender (ARG) sebagai tindak lanjut pengarusutamaan gender dalam prioritas pembangunan.
48	Dokumen Anggaran Kabupaten Layak Anak		Laporan yang berisikan informasi mengenai program dan kegiatan termasuk penganggarnya yang



			dilakukan oleh SKPD dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sidoarjo.
49	Inventarisasi HIPPA/GHIPPA Kab. Sidoarjo	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	Sebagai bahan Inventarisasi kelembagaan GHIPPA dan data GHIPPA yang belum terbentuk
50	Inventarisasi sarana prasarana Utilitas perumahan di Kecamatan Tanggulangin	<b>Program Pengembangan perumahan</b>	Sebagai bahan inventarisasi penyediaan PSU oleh pengembang dan untuk mengetahui jumlah RTH, Jalan, Saluran drainase di Kecamatan Tanggulangin
51	Inventarisasi sarana prasarana dan utilitas perumahan di Kecamatan Prambon		Sebagai bahan inventarisasi penyediaan PSU oleh pengembang dan untuk mengetahui jumlah RTH, Jalan, Saluran drainase di Kecamatan Prambon
52	Penyusunan dokumen inventarisasi penyerahan fasum beserta perubahan pemanfaatan		Sebagai bahan inventarisasi penyerahan dan perubahan pemanfaatan PSU pada Perumahan
53	Survey Klasifikasi Masyarakat berdasar Kemampuan Membayar retribusi Pelayanan Sanitasi & Tk Kesadaran ttg Sanitasi	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	Mengetahui kemampuan membayar pelayanan sanitasi yang berguna untuk penentuan jumlah retribusi pelayanan sanitasi
54	Penyusunan Identifikasi jaringan drainase perkotaan Kab. Sidoarjo (Tahap II )	<b>Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	Identifikasi jaringan drainase jaringan diseluruh Kab. Sidoarjo
55	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan jaringan Irigasi		Sistem Informasi untuk monev perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi
56	Penyusunan rencana infrastruktur dikawasan timur yang dibangun melalui kerjasama pihak III		Identifikasi infrastruktur yang dibutuhkan di kawasan timur yang memungkinkan melalui kerjasama pihak III berguna untuk pemetaan infrastruktur non APBD
57	Updating data base perencanaan jalan dan jembatan Kab. Sidoarjo		Sebagai monev perencanaan jalan dan jembatan perkotaan
58	Penyusunan rencana kebijakan dampak alih fungsi lahan terhadap ekosistem DAS Porong Kanal		Kebijakan pengelolaan Ekosistem di DAS Porong Kanal
59	Penyusunan rencana infrastruktur dikawasan Strategis kawasan tengah sidoarjo yang dibangun melalui pihak III		Identifikasi infrastruktur yang dibutuhkan di kawasan strategis tengah yang memungkinkan melalui kerjasama pihak III berguna untuk pemetaan infrastruktur non APBD
60	Penyusunan Masterplan Pengelolaan Persampahan di Kab. Sidoarjo	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah</b>	Sebagai dokumen Rencana pengelolaan sampah hingga 20 Tahun ke depan
61	Penyusunan Masterplan		Sebagai dokumen Rencana



	Pengelolaan Limbah Rumah Tangga di Kab. Sidoarjo		Pengelolaan Limbah rumah tangga domestik hingga 20 Tahun ke depan
62	Penyusunan Dokumen Masterplan kawasan Industri Jabon	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	Sebagai dasar pemanfaatan dan pengembangan kawasan industri Jabon

### 5.6.2 Pemanfaatan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penelitian

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu diukur tingkat pemanfaatannya oleh SKPD terkait. Realisasi dokumen perencanaan dan dokumen penelitian yang dihasilkan di tahun 2014 sebanyak 61 dokumen yang akan dimanfaatkan baik untuk keperluan jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun) oleh instansi terkait.

Dari aspek pemanfaatan dokumen dapat dipisahkan :

- a. Dokumen yang terkait dengan data maupun indikator kinerja pembangunan sepenuhnya telah dimanfaatkan baik untuk acuan perencanaan maupun untuk mengukur keberhasilan pembangunan.
- b. Untuk dokumen perencanaan pembangunan juga dimanfaatkan sebagai acuan pembangunan bagi seluruh SKPD maupun acuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
- c. Sedangkan dokumen hasil penelitian maupun kajian, sudah didistribusikan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat dimanfaatkan.

### **MISI 6. Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat**

Untuk mencapai misi **mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat** ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dan 6 (enam) sasaran.

Hasil penilaian pencapaian sasaran misi ini pada tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Tujuan – Sasaran	Tingkat keberhasilan
	Tujuan 1 : <i>Meningkatnya Investasi Daerah yang didukung dengan layanan peijinan cepat dan pengembangan</i>	



No	Tujuan – Sasaran	Tingkat keberhasilan
<i>Infrastruktur Daerah secara lebih memadai</i>		
Sasaran :		
1	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas layanan kebutuhan dasar (perumahan) masyarakat	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal	Sangat Berhasil
5.	Meningkatnya keindahan dan kenyamanan kota	Sangat Berhasil
6.	Meningkatnya Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah	Sangat Berhasil

Pencapaian ke 6 (enam) sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) urusan yaitu urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penanaman Modal, Penataan Ruang dan urusan Perhubungan, oleh satuan kerja Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PU Pengairan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perhubungan.

Uraian hasil pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

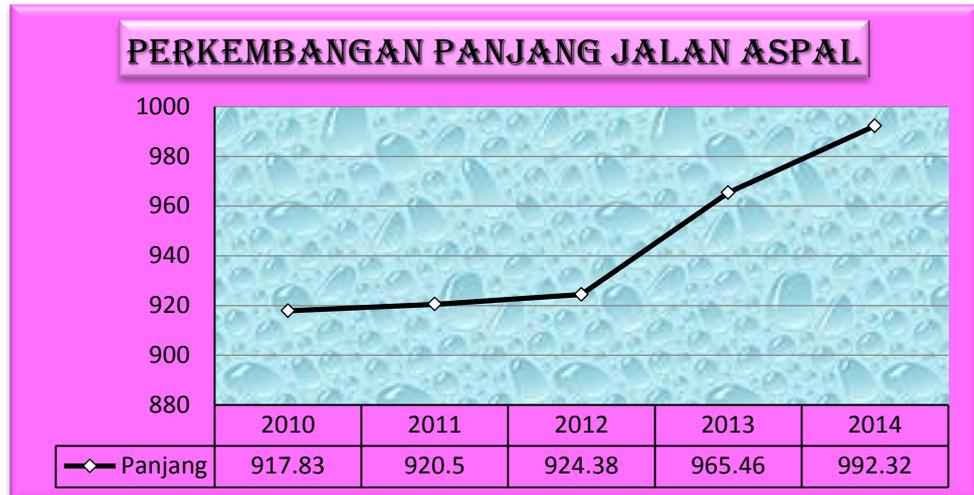
Sasaran 1. ***Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

#### **6.1.1 Kondisi Jalan dan Jembatan**

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyediakan jalan dan jembatan bagi masyarakat.

Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti dalam tabel berikut :

**Grafik 3.6.1.1**  
**Perkembangan panjang jalan aspal**



Sumber data : Dinas PU Bina Marga

Dari seluruh jalan yang ada tersebut kondisinya sebagai berikut :

**Tabel 3.6.1.1**

	KETERANGAN	BASELINE RPJMD TAHUN 2010	REALISASI KINERJA THN 2011	REALISASI KINERJA THN 2012	REALISASI KINERJA THN 2013	REALISASI KINERJA THN 2014	DIBANDING THN 2013	
							NAIK (+) TURUN (-)	%
1	Jalan aspal dengan kondisi baik	481,29	712,8	824,96	788,03	812,68	24,65	3,13%
2	Jalan aspal dengan kondis isedang	301,98	65,5	31,95	111,25	95,41	-15,84	-14,24%
3	Jalan aspal dengan kondisi rusak	134,56	142,2	85,47	66,18	84,23	18,05	27,27%
	<b>Panjang Jalan</b>	<b>917,83</b>	<b>920,5</b>	<b>942,38</b>	<b>965,46</b>	<b>992,32</b>	<b>26,86</b>	<b>2,78%</b>

Sumber data : Dinas PU Bina Marga

Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang jalan dengan kondisi baik tahun 2014 bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 terjadi peningkatan sepanjang 24,65 km atau 3,13%, kondisi jalan sedang terjadi penurunan 15,84 km atau 14,24%, sedangkan jalan dalam kondisi rusak meningkat 18,05 km atau 27,27%. artinya bahwa hal tersebut disebabkan:

- 1) Meningkatnya jumlah kendaraan bertonase berat melintasi jalan Kabupaten yang tidak sesuai kelasnya;



- 2) Genangan air akibat anomaly cuaca mempercepat kerusakan jalan pada ruas jalan yang belum dilengkapi saluran tepi (drainase jalan);
- 3) Kerusakan Jalan pada kondisi sedang yang belum tertangani sesuai tingkat kerusakan di tahun 2014 meningkat menjadi kondisi rusak.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan panjang jalan dalam kondisi baik antara lain:

- 1) Meningkatkan jumlah pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan;
- 2) Mengevaluasi penyebab kerusakan jalan agar masa mendatang faktor penyebab kerusakan jalan dapat diminimalisir, sehingga kerusakan jalan dapat dikurangi;
- 3) Mengajukan usulan penanganan jalan Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat agar bisa diberikan Bantuan Keuangan.

Namun demikian secara keseluruhan panjang jalan beraspal apabila dibandingkan dengan target RPJMD untuk tahun 2014 yaitu panjang yang terbangun/beraspal 933,07 km berarti terjadi pelampauan target sepanjang 26,86 km atau 2,78%.

Pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur di beberapa wilayah, Pembangunan jalan dan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan Jalan, yang pada tahun 2013 hanya bertambah 6,34 km sedangkan yang dilakukan pada tahun 2014 bertambah sepanjang 26,85 Km diantaranya adalah :
  - 1) Pembangunan jalan Desa Pejangkalan – Kecamatan Prambon
  - 2) Pembangunan jalan Bangsri – Kecamatan Sukodono
  - 3) Pembangunan jalan tanggul afvour Desa Durungbanjar - Kecamatan Candi
  - 4) Pembangunan jalan depan PT. Surya Pacific (frontage road)
  - 5) Pembangunan jalan depan perumahan Puri Surya Jaya (frontage road)
  - 6) Pembangunan jalan wonokasian–Sumberrejo Kecamatan Wonoayu



- 7) Pembangunan jalan Desa Suruh Kecamatan Sukodono
  - 8) Pembangunan jalan Jeruklegi Kecamatan Krian
  - 9) Pembangunan jalan Pagerngumbuk–Candinegoro Kecamatan Wonoayu
  - 10) Pembangunan jalan Kedung sukodani–Kecamatan Balongbendo
  - 11) Pembangunan jalan Penambangan–KecamatanBalongbendo
  - 12) Pembangunan jalan Desa Bulang–Desa Cangkring Kecamatan Prambon
  - 13) Pembangunan jalan Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran
- b. Rehabilitasi /pemeliharaan jalan berkala maupun pemeliharaan rutin jalan pada tahun 2013 dilakukan sepanjang 526,64 km, sedangkan pada tahun 2014 dilaksanakan sepanjang 346,45 km, diantaranya pada lokasi sebagai berikut:
- 1) Pemeliharaan jalanTanggulengin – Tulangan Kecamatan Tanggulengin
  - 2) Pemeliharaan jalan Candinegoro – Kemasam Kecamatan Krian
  - 3) Pemeliharaan jalanTulangan – Kedondong Kecamatan Tulangan
  - 4) Pemeliharaan jalan Watutulis – Gagang kepuhsari Kecamatan Tarik
  - 5) Pemeliharaan jalan Keboguyang – Permisam Kecamatan Jabon
  - 6) Pemeliharaan jalan Porong – Krembung Kecamatan Porong
  - 7) Pemeliharaan jalan Buduran – Sarirogo Kecamatan Buduran
  - 8) Pemeliharaan jalan Gelam – Kalipecabean Kecamatan Candi
  - 9) Pemeliharaan jalan Gedangan – Betro Kecamatan Gedangan
  - 10) Pemeliharaan jalan Jedongcangkring – Wonoplintahan Kecamatan Prambon

Penurunan panjang jalan dengan kondisi rusak dan upaya mempertahankan jalan dalam kondisi beraspal sedang dilakukan dengan kegiatan :

- Pembangunan/Peningkatanjalan
- Pemeliharaanberkalajalan



- Pemeliharaan rutin jalan

Dalam hal penanganan jembatan jumlah total bangunan jembatan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 376 Jembatan yang terbangun pada daerah yang secara teknis memerlukan pembangunan jembatan.

Pada tahun 2014 terdapat kegiatan peningkatan jembatan dimana terdapat 4 (empat) jembatan yang dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan dalam 2 (dua) tahun anggaran (tahun 2013 dan tahun 2014):

- a. Jembatan Gisik Cemandi di Kecamatan Sedati
- b. Jembatan Wonocolo di Kecamatan Taman
- c. Jembatan Kedung Cangkring di Kecamatan Jabon
- d. Jembatan Pagerwojo di Kecamatan Buduran

Dalam tahun 2014 terdapat kegiatan pembangunan jembatan baru sebanyak 6 (enam) jembatan yaitu:

- 1) Pembangunan jembatan di desa Balonggabus kecamatan Candi dengan panjang bentangan 12,75 m
- 2) Pembangunan jembatan di desa Tlasi RT.5 RW.1 kecamatan Tulangan dengan panjang bentangan 9 m
- 3) Pembangunan jembatan di desa wonomlati RT.4 RW.2 kecamatan Krembung dengan panjang bentangan 3 m
- 4) Pembangunan jembatan di desa janti RT.2 RW.1 kecamatan Tulangan dengan panjang bentangan 10,50 m
- 5) Pembangunan jembatan di desa jati alun-alun kecamatan Prambon dengan panjang bentangan 11 m
- 6) Pembangunan jembatan di desa suko RT. RW. Kecamatan Sukodono dengan panjang bentangan 8 m

**Grafik 3.6.1.2**



Sumber data : Dinas PU Bina Marga

Dari seluruh jembatan yang ada tersebut kondisi yang ada sebagai berikut:

**Tabel 3.6.1.2**

NO	KONDISI JEMBATAN	THN 2010	THN 2011	THN 2012	THN 2013	THN 2014
1	Jembatan dengan kondisi baik	-	358	355	355	361
2	Jembatan dengan kondisi sedang	-	5	8	10	9
3	Jembatan dengan kondisi rusak	-	3	7	5	6
4	Meningkatnya jumlah jembatan terbangun	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>376</b>

Sumber data : Dinas PU Bina Marga

Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 jumlah jembatan kondisi baik pada tahun 2014 meningkat yaitu menjadi 361 jembatan, jembatan dalam kondisi sedang menurun 1 jembatan menjadi 9 jembatan, dalam kondisi rusak meningkat 1 jembatan dari 5 jembatan menjadi 6 jembatan, hal tersebut dikarenakan banyaknya kendaraan bertonase berat yang melintas pada ruas jalan kabupaten yang tidak sesuai kelasnya sehingga akan mempercepat kerusakan jembatan sebelum umur teknisnya.

Target RPJMD jembatan yang terbangun tahun 2014 ditargetkan sebanyak 372 jembatan, sehingga tahun 2014 jembatan terbangun sudah melampaui dari target RPJMD.



Upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga target dapat tercapai adalah:

- Menetapkan target sesuai alokasi dana yang tersedia
- Mengalokasikan dana khusus untuk mempertahankan kondisi jalan dan jembatan yang sudah baik agar tidak menurun kondisinya ataupun menjadi rusak

Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam hal target tidak tercapai:

- Mengevaluasi penetapan kinerja yang ada apakah telah sesuai dengan alokasi dana yang tersedia
- Mengevaluasi penentuan biaya, apakah sudah sesuai dengan harga pasar, baik material maupun upah kerja dan sewa alat
- Mengevaluasi volume kerusakan jalan, apakah dalam jangka waktu dilaksanakannya survey sampai dengan dimulainya pekerjaan, kerusakan bertambah.
- Mengevaluasi penyebab kerusakan jalan, agar di masa mendatang factor penyebab kerusakan jalan dapat dikurangi.

Selain upaya-upaya tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga melakukan upaya pencegahan kerusakan jalan sebagai berikut :

1. Mendukung kegiatan operasi penertiban kendaraan berat (koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian);
2. Melengkapi badan jalan dengan saluran tepi;
3. Melaksanakan normalisasi saluran tepi;
4. Menggunakan material aspal buton (lebih tahan terhadap air) pada pekerjaan pemeliharaan swakelola;

### **6.1.2 Ketersediaan PJU bagi masyarakat**

Untuk menyediakan kenyamanan pengguna jalan maka perlu dibangun Penerangan Jalan Umum (PJU). PJU dibangun untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengendara kendaraan bermotor. Pembangunan ini dilakukan pada poros jalan Provinsi maupun Kabupaten.

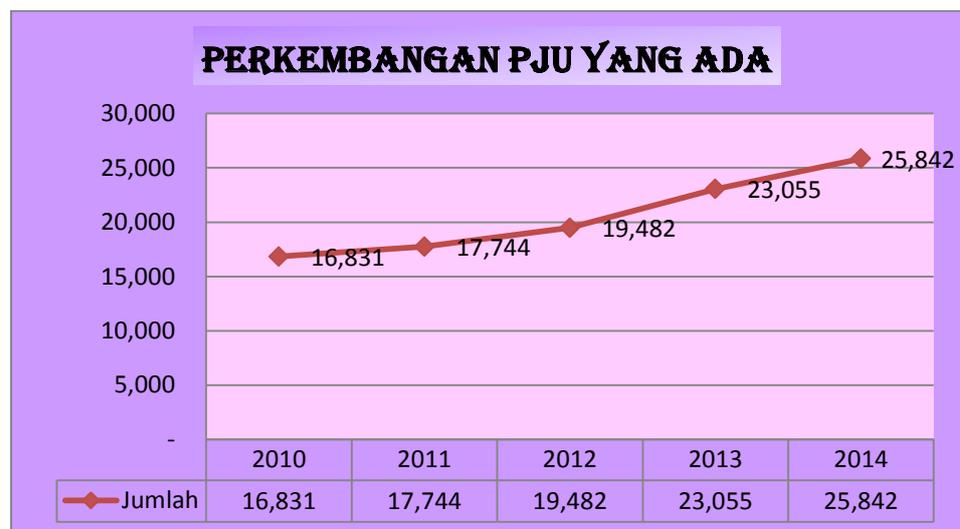
Kebutuhan PJU sampai dengan tahun 2015 yang seharusnya dibangun sebanyak 29.000 titik (jumlah ideal titik PJU seluruh Kabupaten

Sidoarjo). Kebutuhan ini dihitung sesuai dengan panjang poros jalan yang ada yang seharusnya dibangun.

Sampai dengan tahun 2013 jumlah PJU yang telah dibangun sebanyak 23.055 titik atau terpenuhi sebesar 80%. Sedangkan realisasi PJU yang tersedia di tahun 2014 sebanyak 25.842 titik atau terpenuhi sebesar 89% dari target. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah PJU yang dibangun sebanyak 2.787 titik.

Untuk memenuhi target kinerja sampai dengan tahun 2015 yaitu berjumlah 29.000 titik perlu adanya upaya optimal dengan penyediaan dana yang cukup.

**Grafik 3.6.1.2**



Sumber Data : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

**Tabel 3.6.1.2**

JUMLAH PJU TERBANGUN SD THN 2014			
Thn	Jumlah	Peningkatan	%
2010	16.831	870	6.00%
2011	17.744	913	5.42%
2012	19.482	1.738	9.79%
2013	23.055	3.923	20.13%
2014	25.842	2.787	12,09%

Selain menambah PJU Pemerintah kabupaten melakukan pemeliharaan dan perbaikan PJU terhadap titik lampu yang rusak sehingga selalu dalam kondisi baik.

### 6.1.3 Luas daerah genangan pada area pertanian dan permukiman/perumahan

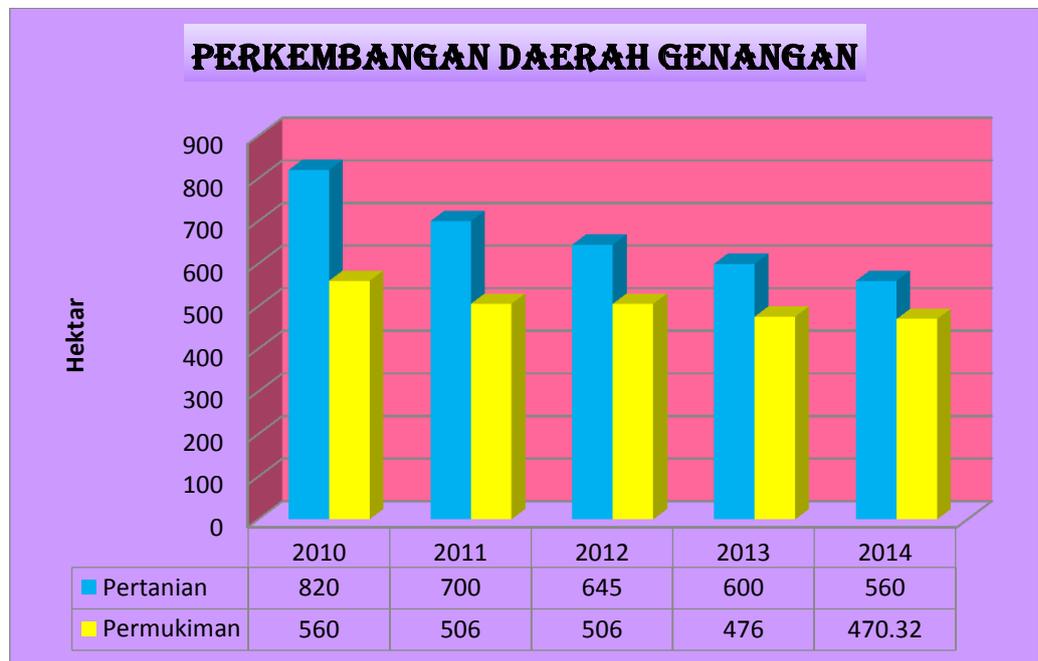
Untuk mengendalikan genangan di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah delta telah dilakukan pengendalian penanganan secara koordinatif antar dinas terkait.

Padatahun2014 Luas daerah genangan di Kabupaten Sidoarjo seluas 1.030,32 Hektar, mengalamipenurunanseluas 45,68 Ha (4,25%) apabiladibandingkandengandaerahgenangantahun 2013 seluas1.076 Hektar.

Penurunan dimaksud secara umum terdapat di areal pertanian seluas 40 hektar dan di wilayah permukiman seluas 5,68 hektar.

**Grafik 3.6.1.3**

#### Perkembangan daerah genangan



Sumber data : Dinas PU Pengairan dan Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang

Rincian lebih lanjut lokasi genangan yang terjadi sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6.1.3**

No	Lokasi	satuan	2010	2011	2012	2013	2014
----	--------	--------	------	------	------	------	------



1	Pertanian	Ha	820	700	645	600	560
2	Permukiman	Ha	560	506	506	476	470,32
	<b>Jumlah</b>	<b>Ha</b>	<b>1.380</b>	<b>1.206</b>	<b>1.151</b>	<b>1.076</b>	<b>1.030,32</b>

Sumber data : Dinas PU Pengairan dan Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang

Kejadian genangan pada areal pertanian mengalami penurunan karena adanya :

- Operasional pintu air yang tepat
- Normalisasi saluran afvoer
- Perbaikan pintu air di afvoer, dan
- Ketepatan dalam manajemen pengelolaan air

Sedangkan luas areal genangan pada wilayah permukiman, menurun karena upaya sebagai berikut :

- Perbaikan saluran drainase di lingkungan permukiman
- Operasional rumah pompa
- Pembangunan saluran drainase lingkungan permukiman

Dibandingkan dengan tahun 2013, luas genangan terjadi penurunan, tetapi lama genangan cenderung berkurang. Untuk mengatasi genangan khususnya di wilayah permukiman dilakukan dengan upaya terpadu dan terkoordinasi dalam hal mengalirkan air dari drainase permukiman menuju drainase (saluran pembuang) utama, selain itu juga perlu adanya optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah bukan pada tempatnya utamanya di sungai/kali atau selokan, sehingga air yang tergenang dapat mengalir pada saluran yang tersedia, dengan melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sistem pintu air dan boezem.

#### 6.1.4 Luas areal dengan irigasi teknis

Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian diukur sampai sejauhmana daerah irigasi teknis yang dapat dipertahankan keberadaannya.

Pada tahun 2014 luas areal yang dapat diairi melalui jaringan irigasi teknis seluas 21.984 Ha, yang terdiri dari:

- Jaringan Irigasi Primer Mangetan Kanal : 11.390 Ha.
- Jaringan Irigasi Primer Porong Kanal : 10.594 Ha.

Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 seluas 22.484 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu seluas 500 Hektar.

Penurunan luas baku sawah di tahun tersebut terjadi karena adanya perubahan tata guna lahan (mutasi baku sawah) dari areal persawahan menjadi kawasan perumahan, industri maupun pergudangan.

**Grafik 3.6.1.4**

**Irigasi teknik**



Sumber Data : Dinas PU Pengairan

**Tabel 3.6.1.4**

**Luasan Daerah Irigasi**

No	Tahun	Target RPJMD	Daerah Irigasi	Penurunan
1	2010	22.806	22.806	



2	2011	22.776	22.776	-30
3	2012	22.688	22.688	-88
4	2013	22.575	22.484	-204
5	2014	22.463	21.984	-500

Angka dasar RPJMD tahun 2010 daerah irigasi teknis dinyatakan 22.806 hektar dan target RPJMD tahun 2014 seluas 22.463 hektar, sudah terealisasi penurunannya menjadi 21.984 hektar, artinya penurunan daerah irigasi teknis cukup tajam, oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan dan penataan ulang untuk wilayah industri dan perumahan sehingga penurunan daerah irigasi teknis dapat lebih terkendali.

Sasaran 2. ***Meningkatnya kualitas layanan kebutuhan dasar (perumahan) masyarakat*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

#### **6.2.1 Jumlah sarana air bersih yang dibangun**

Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap akses air bersih maka pemerintah kabupaten membangun sarana air bersih untuk daerah yang masih belum dapat terjangkau pelayanan air oleh PDAM.

Pembangunan sarana air bersih ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bagi keperluan air minum serta keperluan rumah tangga lainnya. Jumlah yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2014 jumlah sarana air bersih yang dibangun ditargetkan sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 2 unit, yaitu

1. Pembuatan Sumur Bor Dalam Ds Kramattemenggungan - Kec Tarik
2. Pembuatan Sumur Bor Dalam Ds Telasih - Kec Tulangan

Jika dilihat dari jumlah sarana air bersih yang dibangun di tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 sama / tidak terdapat peningkatan, ini di karenakan pada tahun 2014 Dinas PU, Cipta Karya dan Tata Ruang mendahulukan pengembangan / peningkatan Sarana Air Bersih yang telah di bangun pada tahun sebelumnya dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain penyambungan Sambungan Rumah ( SR ),



Rehabilitasi pompa air bersih, dan pembangunan pipa distribusi air bersih serta instalasi jaringan air bersih, pada beberapa lokasi ( tabel A.1.) Perkembangan sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.6.2.1

## Jumlah sarana air bersih yang dibangun



Sumber data : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 3.6.2.1

## KEGIATAN PENINGKATAN SARANA AIR BERSIH TAHUN 2014

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Pemb Pipa Distribusi Ds Kedungbanteng Kec Tanggulangin	
2.	Pemb Pipa Distribusi Ds Banjarpanji Kec Tanggulangin	
3.	Pemb Instalasi AB Ds Kupang Kec Jabon	
4.	Pemb Pipa Distribusi Ds Glagaharum Kec. Porong	
5.	Pemb Pipa Distribusi Ds Tambakkalisogo Kec. Jabon	
6.	Pemb Pipa Distribusi Ds Pangkemiri Kec Tulangan	
7.	Rehab Pompa AB Ds Kendalpecabean	
8.	Pemb Instalasi AB Ds Putat Tanggulangin	
9.	Rehab Pompa AB Ds Penatarsewu Tanggulangin	
10.	Rehab Pompa AB Ds Balongdowo Candi	
11.	Pemasangan SR Ds Sawohan Buduran	
12.	Pemb Pipa Distribusi Ds Kedungpandan Kec Jabon	
13.	Pembangunan Pipa Distribusi Ds Jenggot Kec Krembung	
14.	Pemb Pipa Distribusi Ds Banjarasri Kec Tanggulangin	
15.	Pemb Instalasi AB Kalidawir Kec. Tanggulangin	



Sedangkan untuk pengelolaan Air Bersih dan Jaringannya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang telah melakukan pendampingan dengan membentuk kelompok – kelompok Himpunan Pengelola Air Minum ( HIPPAM ) pada masing – masing sarana Air Bersih yang telah dibangun , dimana sampai dengan saat ini telah dibentuk 23 kelompok HIPPAM dengan jumlah sambungan rumah ( SR ) sebanyak 1550 unit sambungan. Dengan demikian sarana air bersih yang telah dibangun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih khususnya pada daerah yang tidak terjangkau pelayanan PDAM, sehingga kesehatan masyarakat dan lingkungan menjadi lebih baik.

### **6.2.2 Jalan lingkungan yang telah terbangun**

Untuk mengatur lingkungan permukiman yang sehat dan rapi perlu dibangun jalan lingkungan. Pembangunan Jalan lingkungan ini dapat berupa meningkatkan jalan yang sudah ada maupun membangun jalan baru.

Jalan lingkungan khususnya pada daerah yang padat penduduk biasanya kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Oleh karena itu pada beberapa wilayah pemerintah kabupaten melakukan penataan jalan lingkungan tersebut sehingga suasana lingkungan dapat lebih rapi dan tertib.

Panjang jalan lingkungan yang dibangun pada tahun 2014 sepanjang 85.331 meter, sehingga sampai dengan tahun 2014 telah dibangun sepanjang 288.041 meter (termasuk didalamnya jalan lingkungan program pengembangan kawasan) Pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran pemerintah.

#### **Grafik 3.6.2.2**

#### **Jalan lingkungan yang telah terbangun**



Sumber data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang

Dengan dibangunnya jalan lingkungan ini diharapkan lingkungan dapat lebih tertata rapi dan masyarakat dapat lebih nyaman menjalankan aktifitas di lingkungannya.

Dibanding tahun 2013, perkembangan jalan lingkungan yang dibangun oleh Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang di tahun 2014 turun 12.755 meter, penurunan ini karena adanya pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah propinsi dengan program Jasmal Propinsi maupun oleh desa sendiri melalui program PNPM mandiri.

### 6.2.3 Tanggap Waktu (Response Time ) kejadian kebakaran

Untuk menjaga lingkungan dari bahaya kebakaran pemerintah kabupaten Sidoarjo menyediakan pelayanan pemadam kebakaran.

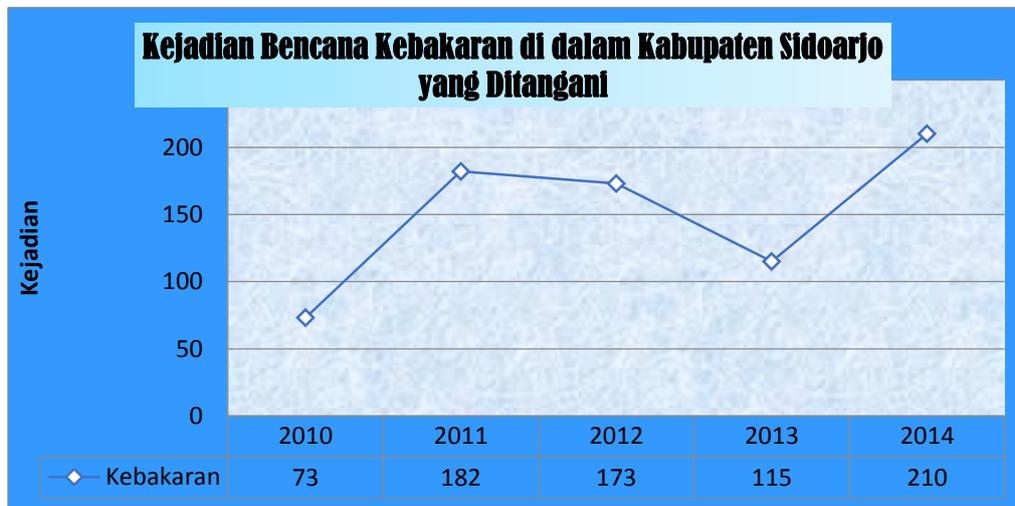
Jumlah kejadian kebakaran tahun 2014 sebanyak 210 kejadian, namun seluruh kejadian kebakaran tersebut telah ditangani dengan baik. Jika dibandingkan dengan jumlah kejadian kebakaran tahun 2013 sebanyak 115 kejadian, terjadi peningkatan kejadian kebakaran yang cukup signifikan yaitu sebanyak 95 kejadian kebakaran.

Alasan banyaknya kejadian kebakaran di tahun 2014 (210 kejadian) :

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan kebakaran

2. Cuaca musim kemarau yang lebih panjang karena banyak kejadian lahan sawah / kosong yang terbakar yang mencapai 116 kejadian (55%)
3. Semakin padatnya hunian penduduk di Sidoarjo yang mengakibatkan sering terjadinya konsleting listrik

Grafik 3.6.2.3



Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Upaya dalam menurunkan kejadian kebakaran Tahun 2014 antara lain :

1. Sosialisasi bahaya kebakaran
2. Pelatihan pemadam kebakaran
3. Penyiapan alat
4. Penanggulangan dan penyelamatan
5. Pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten / kota dan Permen PU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan, respon time ditetapkan selama 15 menit sejak laporan diterima, sedangkan pada tahun 2014 *response time* penanganan kebakaran masih diatas target yaitu sebesar 23 menit sejak laporan diterima.

Belum tercapainya pemenuhan target response time tersebut terdapat kendala – kendala yang dihadapi antara lain :

- 1) Belum terpetakkannya potensi bahaya kebakaran
- 2) Kurangnya jumlah posko pemadam kebakaran dan peralatan pemadam
- 3) Kurangnya jumlah mobil pemadam, personil pemadam kebakaran dan sarana prasarana

Adapun upaya – upaya yang telah / akan dilakukan dalam memenuhi target response time yaitu :

- 1) Melakukan inventarisasi potensi / rawan bahaya kebakaran
- 2) Pembangunan posko-posko pemadam di wilayah rawan kebakaran
- 3) Penambahan mobil pemadam, personil pemadam kebakaran dan sarana pendukung operasional pemadaman kebakaran

Sasaran 3. **Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

### 6.3.1 Jumlah Investasi PMA di Daerah

Perkembangan investasi PMA di Kabupaten Sidoarjo digambarkan sebagai berikut :

**Grafik 3.6.3.1**

#### Investasi PMA



Sumber data : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Realisasi jumlah investasi PMA di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sebesar Rp.707.576.344.654,00. Realisasi pada tahun 2013 sebesar Rp. 580.710.830.821,00. Dengan demikian terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp. 126.865.513.833,00 atau 17,93%.

**Tabel 3.6.3.1**  
**Realisasi Investasi PMA**

TARGET DAN REALISASI INVESTASI PMA (DALAM JUTAAN RP)			
TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
2010	125,787.00	125,787.00	100.00%
2011	126,415.00	27,393.00	21.67%
2012	127,174.00	326,160.00	256.47%
2013	128,064.00	580,710.00	453.45%
2014	129,088.00	707,576.00	548.13%

Tingginya pencapaian target dikarenakan :

1. Adanya kepastian keperuntukan lahan
2. Penyederhanaan persyaratan perizinan
3. Iklim investasi yang kondusif
4. UMK yang memadai bagi pekerja
5. Tersedianya tenaga kerja yang memadai bagi perusahaan
6. Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang lengkap (jalan tol, Gas, PLN, PDAM, dsb)
7. Promosi investasi yang berkelanjutan. Baik melalui pameran ataupun web

### 6.3.2 Jumlah Investasi PMDN Fasilitas di Daerah

Berikut ini adalah grafik jumlah investasi PMDN Fasilitas di Kabupaten Sidoarjo.

**Grafik 3.6.3.2**



Sumber data : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu



Realisasi jumlah investasi PMDN Fasilitas di Rp. 1.804.621.728.411,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 2.612.739.591.000,00 terjadi penurunan mencapai 30,93%.

Meskipun demikian capaian investasi PMDN Fasilitas di tahun 2014 sudah jauh melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp. 640.734.195.710,00 atau sekitar 281,65%.

Penurunan ini disebabkan :

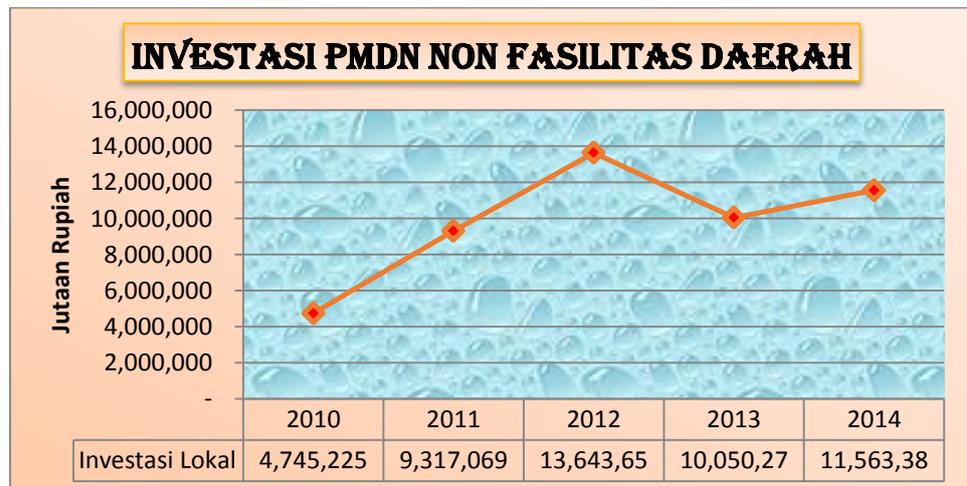
1. Sikap wait and see investor karena adanya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden
2. Pada tahun 2013 banyak terjadi proyek perluasan perusahaan
3. Nilai kurs dollar meningkat sehingga mempengaruhi kegiatan impor (mesin, bahan baku)

### 6.3.3 Jumlah Investasi PMDN Non Fasilitas di Daerah

Berikut ini adalah grafik perkembangan realisasi jumlah investasi PMDN Non Fasilitas dalam beberapa tahun terakhir.

Grafik 3.6.3.3

Investasi PMDN Non Fasilitas



Sumber data : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Realisasi jumlah investasi PMDN Non Fasilitas tahun 2014 sebesar Rp.11.563.388.898.345,00 apabila dibandingkan dengan investasi PMDN Non Fasilitas tahun 2013 sebesar Rp. 10.050.274.260.322,00



terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.513.114.638.023,00 atau 15,06%, nilai investasi tersebut diatas target kinerja tahun 2014 sebesar 225,13%.

Untuk tetap mempertahankan Investasi lokal pada nilai investasi optimal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan tetap melakukan upaya sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1395/404.3.2/2014 Tanggal 15 Desember Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo, dan mendasari Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 520/2810/202.6/2013 Tanggal 25 Maret 2013 perihal tindak lanjut penetapan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 5 Tahun 2012 Tanggal 21 Juni 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Tahun 2011-2031
3. Kemudahan persyaratan perizinan
4. Adanya kegiatan penyisiran wajib izin

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi baik PMA maupun PMDN, antara lain :

1. Menyusun Peraturan Daerah (PERDA) penanaman modal yang mengatur kebijakan, penyelenggaraan dan pelayanan penanaman modal
2. Adanya kepastian peruntukan investasi sesuai dengan bidang industri, perdagangan, perumahan dan jasa
3. Promosi investasi yang berkelanjutan
4. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang memadai (Gas, Jalan, Listrik, dsb)

Sasaran 4. ***Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

#### **6.4.1 Persentase Penerbitan Ijin Tepat Waktu**



Kemudahan yang langsung dapat dirasakan oleh para investor adalah penerbitan perijinan yang tepat waktu apabila dokumen yang disampaikan investor dalam permohonan ijinnya lengkap.

Pada tahun 2014 dari seluruh ijin yang diterbitkan, sebanyak 13.908 atau 99,97% telah tepat waktu, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebanyak 12.191 ijin atau 99,86%. Dengan demikian dari tahun ke tahun ijin yang diterbitkan tidak tepat waktu diharapkan kurang dari 0,50% dan ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan upaya peningkatan investasi dan peningkatan layanan publik.

#### 6.4.2 Persentase Perusahaan yang Memiliki Ijin

Kepemilikan ijin oleh perusahaan bukan saja terkait dengan peningkatan PAD, namun juga memberikan kepastian hukum dan meminimalkan perselisihan yang mungkin terjadi di masyarakat, terutama dengan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut beroperasi, tertib dan tepat kawasan pengembangan investasi.

Pada tahun 2014 perusahaan terpantau telah memiliki ijin sebanyak 33.890 perusahaan dari sebanyak 44.800 perusahaan atau 75,65%, tahun 2013 dari sebanyak 39.766 perusahaan yang terpantau, yang telah memiliki ijin sebanyak 23.139 perusahaan atau 73,28%. Persentase ini memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana dalam ilustrasi tabel berikut :

**Tabel 3.6.4.2**  
**Perusahaan yang Memiliki Ijin**

TAHUN	JMLH PERUSAHAAN	PERUSAHAAN BERIJIN	PROSENTASE	PROSENTASE KENAIKAN
2011	34,404.00	22,335.00	64.92%	0.00%
2012	38,909.00	26,230.00	67.41%	17.44%
2013	39,766.00	29,139.00	73.28%	11.09%
2014	44,800.00	33,890.00	75.65%	16.30%



Sasaran 5. ***Meningkatnya keindahan dan kenyamanan kota*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

#### **6.5.1 Dokumen RTRW, RDTRK dan Peraturan Zonasi**

Kegiatan penataan ruang dilakukan untuk dapat mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat maupun keserasian/keselarasan antara pemanfaatan ruang dengan daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan melalui struktur ruang dan pola ruang yang telah direncanakan di dalam RTRW dan RDTRK serta peraturan zonasinya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kenyamanan dan ketertiban pada wilayah ruang tertata lebih baik sesuai dengan zonasinya.

Sampai dengan Tahun 2014 telah tersusun 18 RDTR sesuai jumlah Kecamatan. Pada tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo telah mengajukan persetujuan substansi Raperda RDTRK dan peraturan zonasi, yaitu :

- 1) RDTRK Sidoarjo
- 2) RDTRK Candi
- 3) RDTRK Tanggulangin
- 4) RDTRK Wonoayu
- 5) RDTRK Krian
- 6) RDTRK Balongbendo
- 7) RDTRK Prambon
- 8) RDTRK Buduran
- 9) RDTRK Tarik.

Dan pada Tahun 2014, telah diterbitkan persetujuan substansi persetujuan 2 persetujuan substansi yaitu RDTR Kecamatan Sidoarjo oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 12 Mei 2014, Nomor : 188/8343/013/2014 dan RDTR Kecamatan Candi, Nomor: 188/8342/013/2014.

Sedangkan untuk tahun 2014 Bappeda menyusun 8 (delapan) dokumen tata ruang yaitu :



<b>NO</b>	<b>JENIS DOKUMEN TATA RUANG</b>	<b>KETERANGAN/RENCANA PEMANFAATAN</b>
1	Dokumen monev pemanfaatan ruang	Sebagai database Pengendalian dan data Pemanfaatan ruang di Kab. Sidoarjo
2	Dokumen pemenuhan SPM bidang penataan ruang sesuai PERMEN PU Nomor 14 Tahun 2010	Sebagai tindak lanjut Permen PU Nomor 14 Tahun 2010 yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/kota dengan dokumen ini akan diidentifikasi bagaimana kondisi pemenuhan SPM tsb di Sidoarjo
3	Dokumen peninjauan kembali RTRW Kabupaten Sidoarjo	Sebagai bahan penyempurnaan terhadap Rencana Peninjauan Kembali RTRW Kab. Sidoarjo dengan mengakomodir regulasi yang baru
4	Dokumen penyusunan standarisasi RDTRK 4 Kecamatan	Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 sebagai persyaratan pengajuan persetujuan substansi RDTR di Provinsi Jatim . RDTRK tersebut adalah Wonoayu, Porong, Tulangan dan Sukodono
5	Dokumen penyusunan dokumen pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemanfaatan ruang	Sebagai bahan referensi terkait dengan upaya dan pengawasan teknis dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6	Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR BWP Prambon	Untuk mendapatkan Persetujuan Substansi dari Gubernur
7	Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR BWP Prambon	Untuk mendapatkan Persetujuan Substansi dari Gubernur
8	Guiden Line Kota Baru	Sebagai panduan dalam pengembangan kota baru

### **6.5.2 Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL/Urban Desain)**

Pelaksanaan program perencanaan tata ruang selain ditujukan untuk pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan kebijakan penataan ruang yang mengarahkan kepada rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang diarahkan sebagai skenario pembangunan Kabupaten Sidoarjo (RTRW, RDTRK dan Peraturan Zonasi), juga ditujukan sebagai acuan dalam pengendalian tata bangunan dan tata lingkungan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo (RTBL) sebagai arahan dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.



RTBL yang telah disusun tahun 2013 ada 3 dokumen yaitu :

1. RTBL Kota Lama Sidoarjo
2. RTBL Arteri Porong Baru Sidoarjo
3. RTBL Jalan Tulangan - Krembung Sidoarjo

Tindak lanjut dari 3 (tiga) dokumen RTBL yang telah disusun tersebut adalah Rekomendasi penyusunan PERBUP setiap RTBL dan indikasi program. Indikasi program yang ada di dokumen RTBL tersebut dapat di dijadikan pedoman / acuan dalam melaksanakan pembangunan oleh SKPD terkait.

Selama tahun 2014 dihasilkan 3 dokumen RTBL yaitu :

1. RTBL Mix Use (Lanjutan) Jalan Lingkar Timur Sidoarjo
2. RTBL Jalan Ahmad Yani – buduran Sidoarjo
3. RTBL Jalan Lingkar Barat Sidoarjo

Tindak lanjut dari 3 (tiga) dokumen RTBL yang telah disusun tersebut adalah Rekomendasi penyusunan PERBUP setiap RTBL dan indikasi program. Indikasi program tersebut dapat dilaksanakan dengan periode pelaksanaan 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua oleh SKPD terkait, antara lain :

1. RTBL Mix Use (Lanjutan) Jalan Lingkar Timur Sidoarjo
  - a. Pengembangan Kawasan Industri Pergudangan
  - b. Pengembangan Fasilitas Perdagangan
  - c. Pengembangan Fasilitas Kesehatan
  - d. Pengembangan Fasilitas Perumahan
  - e. Pemanfaatan dan penghijauan di kawasan lindung yang dikelolamasyarakat
  - f. Penghijauan di kawasan resapan air
  - g. Perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai
  - h. Pembangunan RTH
  - i. Pemeliharaan RTH
  - j. Peningkatan sarana dan prasarana pertamanan
  - k. Pembangunan Sarana dan Prasarana rumah sederhana sehat
  - l. Penyediaan fasilitas parkir



- m. Pengaturan intensitas bangunan
  - n. Penataan Kawasan PKL
  - o. Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor
  - p. Pelebaran jalan kolektor
  - q. Penyediaan marka jalan di jalur sepeda
  - r. Penyediaan Zebra Cross
  - s. Pengembangan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki
  - t. Peningkatan jaringan listrik
  - u. Pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrikan
  - v. Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum
  - w. Pembangunan Kabinet Fiber Optic
  - x. Pengendalian Air tanah
  - y. Pengembangan SPAM
  - z. Pembangunan IPAL komunal (sawerge)
  - aa. Pengembangan TPS di pusat-pusat permukiman baru
  - bb. Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong
  - cc. Peningkatan jaringan drainase tersier di kawasan perumahan
2. RTBL Jalan Ahmad Yani – buduran Sidoarjo
- a. Pembangunan Jalan Lanjutan lingkaran barat menuju museum MPU Tantular
  - b. Peningkatan Street Furniture Jalan Ahmad Yani – Buduran (Lampu Jalan, Median, Jalur Hijau)
  - c. Penyediaan Halte
  - d. Pembangunan Pedestrian dan Penanaman Vegetasi
  - e. Pengembangan Permukiman formal yang harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah komunal (terpusat)
  - f. Pengembangan permukiman dengan pemenuhan infrastruktur dan fasilitas permukiman yang memadai
  - g. Pengembangan koridor perdagangan jasa
  - h. Pengembangan Waralaba
  - i. Pengembangan jalur hijau



- j. Peningkatan sepadan sungai sebagai RTH
  - k. Pengembangan Ruang terbuka hijau
  - l. Pengembangan Jaringan Listrik
  - m. Pengembangan Penerangan Jalan Utama (PJU)
  - n. Pemeliharaan utilitas listrik yang sudah ada
  - o. Pembangunan jaringan telekomunikasi
  - p. Penataan Sistem Jaringan
  - q. Rehabilitasi Daerah Sepadan Sungai
  - r. Pembangunan Drainase jalan
3. RTBL Jalan Lingkar Barat Sidoarjo
- a. Peningkatan Jalan dan Jalur Pedestrian
  - b. Pengadaan Tempat Sampah
  - c. Penataan RTH Publik
  - d. Penataan Sempadan Sungai, Renovasi Dermaga Perahu
  - e. Pembangunan Sentra PKL
  - f. Renovasi PONTI dan STADION DELTA
  - g. Peningkatan Jalur Pedestrian
  - h. Pengadaan Tempat Sampah
  - i. Pengadaan halte angkutan umum
  - j. Penataan PKL
  - k. Penataan RTH Publik dan jalur Sempadan SUTT
  - l. Peningkatan Jalan dan Jalur Pedestrian
  - m. Penataan Reklame
  - n. Penguatan Identitas Kawasan (monumen Adipura)
  - o. Pembangunan Traffic light Simpang Sumokali
  - p. Normalisasi Saluran
  - q. Pengamanan Sempadan Sungai

### **6.5.3 Jumlah Bangunan Ber IMB**

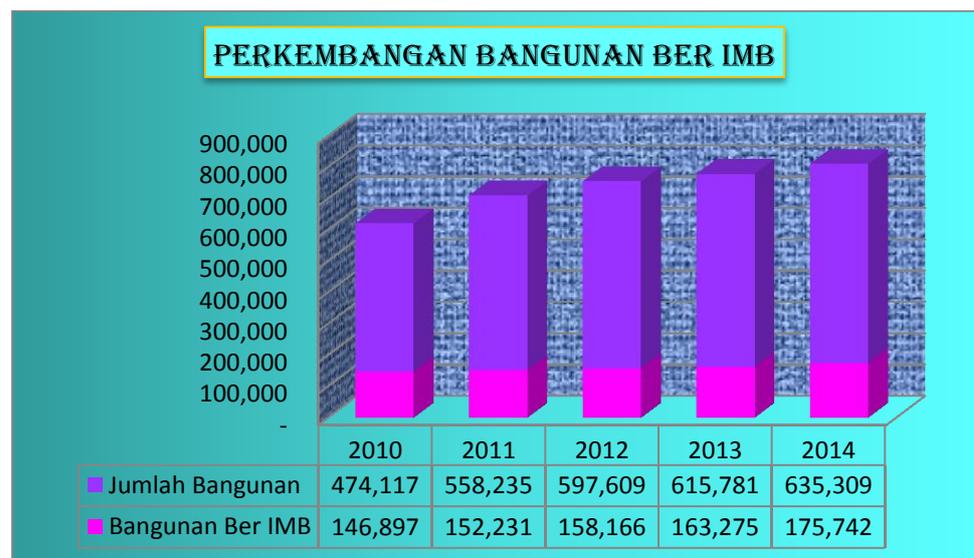
Perkembangan jumlah bangunan ber IMB pada periode tahun 2010 s.d 2014 ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini.

**Tabel 3.6.5.3**  
**Bangunan Ber IMB**

KETERANGAN	PERKEMBANGAN IMB				
	2010	2011	2012	2013	2014
Bangunan Ber IMB	146.897	152.231	158.166	163.275	175.742
Jumlah Bangunan yang harus ber IMB	474.117	558.235	597.609	615.781	635.309

Sumber data : BPPT Kabupaten Sidoarjo

**Grafik 3.6.5.3**  
**Bangunan ber IMB**



Sumber data : BPPT Kabupaten Sidoarjo

Dari grafik terlihat bahwa jumlah bangunan ber IMB dari tahun ke tahun semakin meningkat, Hal ini disebabkan:

- Kemudahan pelayanan perijinan berdasarkan kepada prinsip pelayanan yang prima
- Mengoptimalkan Tim Sisir Wajib Ijin untuk bangunan-bangunan yang belum berijin
- Mengadakan sosialisasi ke wilayah kecamatan-kecamatan tentang arti pentingnya IMB
- Mengoptimalkan paket perijinan dan paket perijinan online



Sasaran 6. **Meningkatnya Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

#### 6.6.1 Peningkatan Jumlah Lulus Uji KIR

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyediakan sarana transportasi yang layak. Pengukurannya dilakukan dengan uji kelayakan terhadap kendaraan wajib uji sebagai syarat beroperasinya kendaraan tersebut.

Perkembangan jumlah kendaraan di Kabupaten Sidoarjo yang lulus uji kelayakan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut:

**Tabel 3.6.6.1**

#### **Uji KIR**

<b>Tahun</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kend. Wajib Uji Berkala</b>	24.214	25.535	27.030	29.048	31.567.
<b>Pengujian Berkala (2 kali)</b>	48.428	51.070	54.060	58.096	63.134
<b>Lulus Uji Berkala</b>	39.334	43.778	49.616	45.198	47.566
<b>% Kend. Lulus Uji</b>	<b>81,22 %</b>	<b>85,72%</b>	<b>91,77%</b>	<b>77,80%</b>	<b>75,34 %</b>

*Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo*

Capaian kinerja tersebut apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam RPJMD dalam tahun 2014 sebanyak yaitu 47.566 unit kendaraan wajib uji yang lulus uji terealisasi sebanyak 35.817 unit atau 75,34 % dari target yang telah ditetapkan.

Dari data tabel tersebut diatas terlihat bahwa jumlah kendaraan yang wajib uji tahun 2014 sebanyak 31.567 unit dibandingkan tahun 2013 sebanyak 29.048 unit dalam posisi naik namun kendaraan yang lulus uji menurun dari 77,80 % menjadi 75,34 % yaitu apabila dibandingkan tahun 2013 .

Menurunnya kendaraan yang lulus uji kir karena pelaksanaan uji kir dilakukan lebih cermat, lebih teliti dan lebih tegas, sehingga kualitas hasil



uji lebih optimal dan diharapkan capaian ini akan mengurangi tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas lainnya di jalan raya.

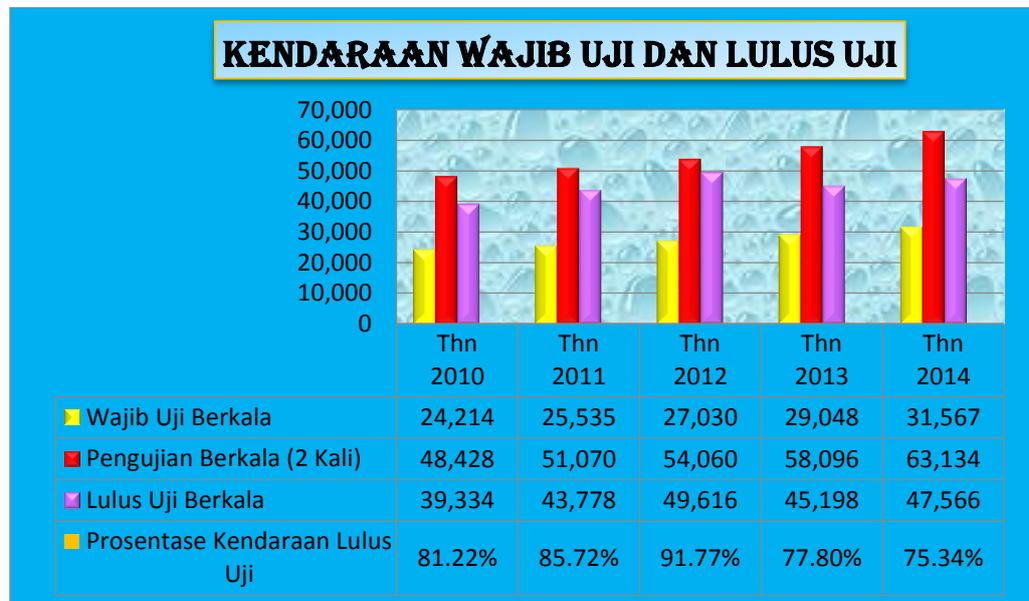
Adapun penyebab penurunan kendaraan yang melakukan uji kir pada Tahun 2014 adalah;

- 1) Adanya kendaraan bermotor yang numpang uji di luar Kabupaten Sidoarjo sebanyak = 2014 kendaraan
- 2) Adanya kendaraan bermotor yang mutasi ke luar daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak = 664 kendaraan
- 3) Adanya kendaraan bermotor yang tidak lulus uji sebanyak = 1624 kendaraan
- 4) Adanya kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melakukan uji/ mati uji sebanyak = 5633 kendaraan . Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan bermotor pada saat habis masa berlakunya uji.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan uji kelayakan kendaraan sebelum habis masa berlaku uji kir adalah :

- 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melakukan uji kendaraan dalam kondisi baik;
- 2) Melakukan uji kendaraan secara berkala;
- 3) Memberikan himbauan kepada masyarakat;
- 4) Memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan wajib uji kir 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku uji kir;
- 5) Memperketat proses pemeriksaan uji kendaraan bermotor;
- 6) Melakukan operasi gabungan kelayakan kendaraan secara rutin di jalan raya;
- 7) Ketersediaan fasilitas bengkel service di area pengujian kendaraan bermotor.

Perkembangan jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji berkala dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.6.6.1****Kendaraan Wajib Uji dari Tahun 2010 s.d Tahun 2014  
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo**

Sumber Data : Dinas Perhubungan

**6.6.2 Jumlah sarana dan prasarana transportasi**

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyediakan prasarana Halte, Traffic Light, terminal dan Dermaga/Pelabuhan.

Tahun 2014 dianggarkan 1 unit Traffic Light namun demikian mengalami kegagalan dalam proses lelang dikarenakan tidak ada penyedia yang daftar, sehingga tidak menambah jumlah traffic light.

Untuk Terminal dan Dermaga tidak terdapat penambahan, namun demikian kegiatan yang dilakukan lebih bersifat pada pemeliharaan rutin

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, pada tahun 2014 terdapat penambahan jumlah untuk prasarana halte walaupun sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Penambahan 4 buah Halte terdapat di:

- 1) Didepan Kantor Dinas Perhubungan Jalan Raya Candi Sidoarjo.;
- 2) Didepan Stasiun Tanggulangin;
- 3) Di depan Kantor Gudang Garam/depan terminal Bungurasih;



4) Di depan Lippo Plaza Kota Sidoarjo.

Untuk halte lokasi didepan Kantor Gudang Garam dan Lippo Plaza dari CSR

Sedangkan untuk Pengurangan di Tahun 2014 jika dibanding Tahun 2013:

1 (satu) unit Traffic Light terdapat di Di Bundaran Taman Pinang Indah karena tidak berfungsi optimal dan ini aset milik provinsi jawa timur. Dimana dari 42 traffic light 31 unit milik Kabupaten Sidoarjo dan 11 unit milik Provinsi Jawa Timur.

Berikut rincian sarana dan prasarana transportasi yang ada adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6.6.2**  
**Sarana dan prasarana transportasi**

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi					
Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Halte	12	14	16	20	24
Traffic Light	36	39	41	43	42
Terminal	7	7	7	7	7
Dermaga/Pelabuhan	11	12	12	12	12

*Sumber Data : Dinas Perhubungan*

### 6.6.3 Jumlah perpanjangan ijin trayek angkutan pedesaan

Perpanjangan Ijin Trayek sesuai dengan RPJMD pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 774 Unit, realisasi atas ijin perpanjangan trayek pada tahun 2014 sebanyak 565 Unit atau hanya 73%. Menurunnya perpanjangan ijin trayek disebabkan:

- 1) makin menurunnya kesadaran para pemilik kendaraan angkutan umum untuk mengurus ijin trayeknya karena jumlah penumpang makin tahun makin menurun;
- 2) masyarakat beralih ke roda dua, dengan pertimbangan lebih efisien, cepat, murah dan kendaraan roda dua dapat dibeli dengan cara mengangsur/kredit.

Upaya agar target tercapai :

1. Revitalisasi angkutan pedesaan
2. Penyediaan angkutan massal
3. Pengaturan trayek
4. Penyediaan Shelter yang lebih nyaman khususnya BRT
5. Dan penyediaan kelengkapan sarana yang memadai

**Grafik 3.6.6.3**

**Perkembangan Ijin Trayek Tahun 2010 sd Tahun 2014**



Sumber Data : Dinas Perhubungan

#### 6.6.4 Terwujudnya Sistem Transportasi yang handal

Untuk mengukur kehandalan sistem transportasi massal yang mendukung mobilitas masyarakat dalam menjalankan perekonomian daerah maka salah satu ukurannya adalah jumlah penumpang umum yang terangkut oleh kendaraan umum.

Jumlah penumpang yang terangkut/terlayani sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:



**Tabel 3.6.6.4**  
**Penumpang yang terangkut (orang)**

<b>Jumlah Penumpang yang terangkut (orang)</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Target RPJMD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase</b>
Tahun 2010	60.821.000	60,821,000	100.00%
Tahun 2011	54.738,000	60,050,000	109.70%
Tahun 2012	49,624,000	60,034,105	120.98%
Tahun 2013	48,772,000	41,046,200	84.16%
Tahun 2014	43.895.000	39.505.500	90,00%

Jumlah penumpang yang terangkut di Terminal wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 menurun yaitu menjadi sebanyak 39.505.500 orang dibanding tahun 2013 sebanyak 41.046,200 orang berarti terjadi penurunan walaupun kecil sebesar 3,89 % dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%.

Sebagai data pendukung atas terjadinya penurunan jumlah penumpang yang terangkut diatas, salah satunya adalah diakibatkan oleh adanya penurunan jumlah armada angkutan umum perdesaan . Dimana pada tahun 2013 jumlah angkutan umum perdesaan yang beroperasi sebanyak: 686 unit , sementara pada tahun 2014 jumlah angkutan umum perdesaan turun menjadi 565 unit .

Penurunan ini diakibatkan :

- 1) Masyarakat pengguna angkutan umum banyak yang beralih ke kendaraan roda 2 (sepeda motor) .
- 2) Kondisi angkutan umum kurang nyaman dan armada yang kurang
- 3) Tidak adanya Kepastian waktu tempuh perjalanan
- 4) Angkutan massal yang kurang memadai

Upayanya :

1. Penyediaan sarana terminal yang memadai
2. Penyediaan angkutan massal yang memadai , aman , nyaman dan tepat waktu
3. Pembinaan awak angkutan umum secara berkala

**Grafik 3.6.6.4****Jumlah Penumpang Terangkut Tahun 2010 s/d Tahun 2014**

Sumber Data : Dinas Perhubungan

Kondisi eforia pemakaian roda dua untuk masyarakat menengah kebawah terjadi diseluruh kota di Indonesia, tentu perlu dicarikan solusi yang tepat agar masyarakat berminat kembali untuk menggunakan kendaraan umum; dengan menyediakan kendaraan angkutan umum yang layak, aman, nyaman dan efisien melalui penyediaan angkutan umum massal, dan diharapkan beban jalan menjadi lebih ringan serta tingkat fatalitas di jalan juga dapat ditekan.

**6.6.5 Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas**

Untuk menilai tingkat ketaatan dalam berlalu lintas di kabupaten Sidoarjo maka tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu ukuran. Secara umum kecelakaan di jalan diawali pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas sehingga tingkat fatalitas ini dapat menggambarkan tingkat ketaatan terhadap Peraturan Perundangan tentang Lalu Lintas.



**Tabel 3.6.6.5**  
**Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2010 s/d Tahun 2014**

Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sidoarjo						
No	Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Meninggal	148	427	229	179	514
2	Luka parah	56	173	48	29	41
3	Luka ringan	102	725	1.405	1.366	2.266

*Sumber data : Polres Sidoarjo*

Fatalitas kecelakaan tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 179,22%

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas disebabkan:

1. Menurunnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini ditunjukkan dengan data penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu 70% karena faktor manusia, 20 % karena sarana dan prasarana jalan 10 % dari faktor teknis kendaraan.
2. Kondisi jalan dan Prasarana jalan yang kurang memadai
3. Banyak pengguna kendaraan yang secara ketentuan belum cukup layak

Upaya untuk mengendalikan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi antara lain:

1. Pengadaan zona selamat di area sekolah
2. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan ( traffic light, pelican crossing, flashing, pengecatan marka jalan, dll)
3. Sosialisasi tentang keselamatan dan tertib lalu lintas bagi awak kendaraan melalui kegiatan pemilihan sopir teladan
4. Sosialisasi tentang keselamatan dan tertib lalu lintas bagi pelajar melalui kegiatan pemilihan pelajar pelopor cinta lalu lintas
5. Melakukan penertiban bagi angkutan barang dan orang yang melanggar ketentuan (operasi gabungan)

**MISI 7. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan**

Untuk mencapai misi **meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan** ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran.

Hasil penilaian pencapaian sasaran misi ini pada tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Tujuan – Sasaran	Tingkat keberhasilan
Tujuan 1 : <i>Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup</i>		
Sasaran :		
1.	<i>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan</i>	Sangat Berhasil
2.	<i>Tersedianya energy alternative yang dimanfaatkan</i>	Sangat Berhasil

Pencapaian ke 2 (dua) sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) urusan yaitu urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan ESDM oleh satuan kerja Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Pasar.

Uraian hasil pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. ***Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

**7.1.1 Pemenuhan kualitas air sungai sesuai baku mutu air badan air (sungai)**

Pemantauan kualitas air sungai bertujuan untuk mengendalikan pencemaran air pada sungai yang melewati wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kualitas air sungai harus memenuhi standar yang telah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dalam peraturan tersebut diatur tentang kualitas mutu air sungai yang dibagi menjadi 4 (empat) kelas berdasarkan peruntukannya yaitu :



- a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kriteria mutu air dari setiap kelas air adalah sebagai berikut

Parameter	Satuan	Kelas			
		I	II	III	IV
TDS	mg/L	1000	1000	1000	2000
DO	mg/L	≥6	≥4	≥3	0
BOD	mg/L	2	3	6	12
COD	mg/L	10	25	50	100
pH	-	6-9	6-9	6-9	6-9
Detergen	200 ug/L	200	200	200	-

Pelaksanaan pemantauan lingkungan terhadap sumber daya air sungai di Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2014 dilakukan dengan pengambilan sample air sungai di 11 (sebelas) Sungai dengan pengujian terhadap 5 (Lima) Parameter yaitu BOD, COD, DO, TDS dan Detergen.

- **Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen / DO)**

Nilai DO yang diukur merupakan jumlah oksigen (O<sub>2</sub>) yang tersedia dalam badan air. Selain itu, Nilai DO yang diukur tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana badan air mampu menampung biota air sungai seperti ikan dan mikroorganisme. Nilai DO yang tidak memenuhi



standar baku mutu merupakan suatu tanda bahwa kondisi air cukup membahayakan bagi biota air sungai.

- **Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (Biochemical Oxygen Demand / BOD)**

Nilai BOD yang diukur merupakan jumlah oksigen (dalam mg) yang dibutuhkan untuk menguraikan zat organik secara biokimiawi dalam 1 L air selama waktu inkubasi (5x24 jam) pada suhu 20°C. Nilai BOD yang tidak memenuhi standar baku mutu menyebabkan menurunnya oksigen terlarut di perairan sehingga berpengaruh terhadap kualitas air sungai (afvour).

- **Kebutuhan Oksigen Kimiawi (Chemical Oxygen Demand/ COD)**

Nilai COD yang diukur merupakan jumlah oksigen (dalam mg) yang dibutuhkan zat organik di dalam 1 L air untuk mengoksidasi bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air melalui reaksi kimia. Nilai COD yang tidak memenuhi standar baku mutu disebabkan adanya polutan yang terdapat pada air.

- **Total Padatan Terlarut (Total Dissolved Solids / TDS)**

**Total Dissolved Solids / TDS** adalah “benda padat yang terlarut” yaitu semua mineral, garam, logam, serta kation-anion yang terlarut di air. Penyebab utama terjadinya TDS adalah bahan anorganik berupa ion-ion yang umum dijumpai di sungai / afvour. Misalnya air buangan yang berasal dari rumah tangga dan industri.

- **Detergen**

Untuk parameter Detergen, nilai kandungan detergen yang tidak memenuhi standar baku mutu disebabkan cukup banyaknya aktivitas yang mengandung detergen yang mengalir ke badan sungai.

Rincian data hasil pemantauan air badan air terhadap 11 (sebelas) sungai tersebut pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :



### 1. Kali Buntung

Parameter	Standar Baku Mutu Air Kelas II	Pos I	Pos II	Pos III
TDS	1.000 mg/L	318	246	232
DO	≥4 mg/L	6,25	5,15	4,85
BOD	3 mg/L	<b>6,52</b>	<b>6,36</b>	<b>4,45</b>
COD	25 mg/L	16,0	15,4	12,5
pH	6 - 9	7,51	7,86	7,66
Detergen	200 ug/L	8,9	41,9	37

Pos I : Jl Sunandar Priyo

Pos II : Jembatan Dsn Kedungboto Kel Taman Kec Taman

Pos III : Jembatan Dsn Tambakrejo Waru kec Waru

### 2. Kali Sumber

Parameter	Standar Baku Mutu Air Kelas III	Pos I	Pos II	Pos III
TDS	1.000 mg/L	204	232	232
DO	≥3 mg/L	6,86	5,79	5,86
BOD	6 mg/L	4,98	4,23	4,88
COD	50 mg/L	11,5	8,32	8,64
pH	6 - 9	7,37	7,35	7,41
Detergen	200 ug/L	18,4	13,8	18,0

Pos I : Jembatan Ds. Karangbong Gedangan

Pos II : Jembatan Sebelah Timur PT Avia Avian

Pos III : Jembatan Dsn Sambongan Ds Wadung Asih Kec. Buduran

### 3. Kali Pelayaran

Parameter	Standar Baku Mutu Air Kelas II	Pos I	Pos II	Pos III
TDS	1.000 mg/L	444	410	396
DO	≥4 mg/L	4,95	6,76	6,16
BOD	3 mg/L	<b>4,18</b>	<b>4,13</b>	2,90
COD	25 mg/L	10,6	10,2	7,04
pH	6 - 9	7,63	4,81	7,85
Detergen	200 ug/L	60,8	50,2	20,5

Pos I : Intake Pengamat Trosobo-Balongsendo

Pos II : Sebelah Jembatan Dsn Badas Ds Barangkajan-Krian

Pos III : Dekat Intel PT Taman Tirta Ds. Tawang Sari Taman Sidoarjo



#### 4. Kali Buduran

Parameter	Standar Baku Mutu Air Kelas III	Pos I	Pos II	Pos III
TDS	1.000 mg/L	402	432	454
DO	≥3 mg/L	3,63	6,05	5,55
BOD	6 mg/L	<b>6,65</b>	<b>6,49</b>	<b>9,85</b>
COD	50 mg/L	13,8	13,1	22,7
pH	6 - 9	7,56	7,61	7,57
Detergen	200 ug/L	49	49,8	45,6

Pos I : Jembatan Kebonagung Kec. Sukodono

Pos II : Sebelah Timur DAM Ental Sewu Kec. Buduran

Pos III : Jembatan Lingkar Timur Ds. Siwalan Panji

#### 5. Kali Kedung Uling

Parameter	Standar Baku Mutu Air Kelas III	Pos I	Pos II	Pos III
TDS	1.000 mg/L	391	327	328
DO	≥3 mg/L	6,34	7,13	5,95
BOD	6 mg/L	4,51	3,44	4,92
COD	50 mg/L	12,94	11,54	4,92
pH	6 - 9	7,33	7,29	7,28
Detergen	200 ug/L	161,8	150,3	159,7

Pos I : Jembatan Ds. Durung Bedug Candi Sidoarjo

Pos II : Rel Kereta Apo Belakang Ds. Bligo PT Ecco Sidoarjo

Pos III : Jembatan Lingkar Timur Ds Klurak Candi Sidoarjo

#### 6. Kali Sidokare

Parameter	Standar Baku Mutu Air Kelas II	Pos I	Pos II	Pos III
TDS	1.000 mg/L	448	452	532
DO	≥4 mg/L	<b>2,83</b>	7,88	<b>3,84</b>
BOD	3 mg/L	<b>8,26</b>	<b>7,05</b>	<b>5,94</b>
COD	25 mg/L	23,7	12,8	10,9
pH	6 - 9	7,64	7,69	7,64
Detergen	200 ug/L	156	112	116

Pos I : Jembatan Ds. Suko (Sebelah SMP 4)

Pos II : Jembatan Buk Legi

Pos III : Jembatan Lingkar Timur Ds Rangkah Kidul Sidoarjo



## 7. Kali Mangetan Kanal

Parameter	Standar Baku Mutu Air Kelas I	Pos I	Pos II	Pos III
TDS	1.000 mg/L	355	364	448
DO	≥6 mg/L	6,66	7,83	<b>1,92</b>
BOD	2 mg/L	<b>3,96</b>	<b>4,18</b>	<b>4,77</b>
COD	10 mg/L	9,44	<b>11,2</b>	<b>10,6</b>
pH	6 - 9	7,50	7,60	7,37
Detergen	200 ug/L	16,9	13,8	109

Pos I : Jembatan dsn dungus

Pos II : Depan Balai Desa Keboananom Gedangan

Pos III : Jembatan Ds Betro Sedati

## 8. Kali Ketintang Pucang

Parameter	Standar Baku Mutu Air Kelas II	Pos I	Pos II	Pos III
TDS	1.000 mg/L	454	452	548
DO	≥4 mg/L	6,76	6,87	4,54
BOD	3 mg/L	1,41	1,76	<b>5,13</b>
COD	25 mg/L	3,36	4,48	14,4
pH	6 - 9	7,16	7,53	7,66
Detergen	200 ug/L	31,2	28,5	101

Pos I : DAM Ds Sumput

Pos II : Jembatan Pagerwojo

Pos III : Jl. Lingkar Timur Ds Bluru Kidul Sidoarjo

## 9. Kali Kemambang

Parameter	Standar Baku Mutu Air Kelas III	Pos I	Pos II	Pos III
TDS	1.000 mg/L	458	458	580
DO	≥3 mg/L	6,45	4,74	3,93
BOD	6 mg/L	<b>15,0</b>	5,27	5,83
COD	50 mg/L	8,47	12,5	14,6
pH	6 - 9	7,61	7,61	7,53
Detergen	200 ug/L	29,2	38,3	58,2

Pos I : Ds Sumput (Sebelah SDN Sumput Sidoarjo)

Pos II : Ds Ental Sewu Kec Buduran

Pos III : Jembatan Lingkar Timur Ds Kemiri Kecamatan Budur

**10. Kali Sekardangan**

Parameter	Standar Baku Mutu Air Kelas II	Pos I	Pos II	Pos III
TDS	1.000 mg/L	590	768	394
DO	≥4 mg/L	21,51	<b>0,00</b>	7,57
BOD	3 mg/L	<b>5,23</b>	<b>5,74</b>	<b>3,32</b>
COD	25 mg/L	13,4	13,6	12,6
pH	6 - 9	7,50	7,44	7,72
Detergen	200 ug/L	<b>1977</b>	<b>2552</b>	22

Pos I : Jembatan Larangan Candi

Pos II : Jembatan Ds. Lemah Putro Sidoarjo

Pos III : Jembatan Lingkar Timur Ds Sekardangan Sidoarjo

**11. Kali Bah Gepuk**

Parameter	Standar Baku Mutu Air Kelas III	Pos I	Pos II	Pos III
TDS	1.000 mg/L	329	521	522
DO	≥3 mg/L	4,3	3,7	3,4
BOD	6 mg/L	<b>6,62</b>	<b>7,03</b>	<b>7,65</b>
COD	50 mg/L	14,75	16,36	19,741
pH	6 - 9	7,27	7,0	7,0
Detergen	200 ug/L	169	178	173

Pos I : Jembatan Pasar Ngaban Tanggulangin

Pos II : Jembatan Ds Klurak Timur Kab Sidoarjo

Pos III : Jembatan Ds Kali Pecabean Candi

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, 2014

Hasil pengujian *sampling* Air Badan Air di 11 (sebelas) lokasi sungai tersebut, menunjukkan Kali Kedung Uling dan Kali Sumber memenuhi Standar Baku Mutu Air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001. Parameter BOD tidak memenuhi Standar Baku Mutu Air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 di 9 (Sembilan) Kali yaitu Kali Pelayaran, Kali Buduran, Kali Sidokare, Kali Buntung, Kali Mangetan Kanal, Kali Ketintang Pucang, Kali Kemambang, Kali Sekardangan dan Kali Bah Gepuk. Parameter DO tidak memenuhi Standar Baku Mutu Air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 di 2 (Dua) Kali yaitu Kali Sidokare dan Kali Sekardangan.



Parameter Detergen tidak memenuhi Standar Baku Mutu Air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 di 1 (Satu) Kali yaitu Kali Sekardangan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas air sungai (afvour) adalah

1. Mendata usaha/kegiatan yang berada di sekitar Sungai
2. Membuat Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai
3. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Prokasih

#### **7.1.2 Pemenuhan kualitas udara ambien sesuai baku mutu udara**

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan secara *sampling* pada beberapa titik lokasi untuk menggambarkan kualitas udara ambien. Standar baku mutu yang digunakan untuk kualitas udara ambien adalah Peraturan Gubernur Jatim No.10 tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.

Pemantauan kualitas mutu udara ambien tahun 2014 untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo dilakukan di 12 (Dua Belas) titik lokasi sebagai berikut:

- a. Alun-alun air mancur
- b. Alun-Alun masjid agung
- c. Depan Bank Delta Artha
- d. Jl. Yos Sudarso
- e. Depan GOR Sidoarjo
- f. Depan RSUD Sidoarjo
- g. Depan SMAN 1 Sidoarjo
- h. Perempatan By Pass Krian
- i. Persimpangan Exit Tol Waru
- j. Depan Terminal Bungurasih
- k. Perempatan Gedangan
- l. Taman Apkasi Porong



Pemantauan kualitas baku mutu udara ambien di titik lokasi sampling diuji terhadap 3(Tiga) parameter yaitu : SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, dan Debu.

- **Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>)**

Sulfur dioksida merupakan gas yang tidak berwarna dan berbau tajam. Sumber utama SO<sub>2</sub> adalah berasal dari industri dan transportasi. Tingginya kadar SO<sub>2</sub> di udara merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman.

- **Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>)**

Nitrogen dioksida merupakan gas berwarna coklat kemerahan berbau tajam menyengat dan sangat beracun. Sumber utama NO<sub>2</sub> pada atmosfer adalah dari kendaraan di jalan lalu lintas. Sumber utama lainnya adalah dari pembangkit tenaga listrik, pabrik pemanas, dan proses industri. Nitrogen dioksida dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanama

- **Debu**

Nilai Debu yang diukur untuk mengetahui jumlah partikel debu yang ada di udara. Debu merupakan campuran yang sangat rumit dari berbagai senyawa organik dan anorganik yang terbesar di udara. Sumber debu berasal dari kendaraan bermotor dan proses industri. Debu dapat menyebabkan iritasi mata maupun gangguan pernapasan.

Rincian hasil pengujian udara ambien tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Parameter	Standar Baku Mutu Udara Pergub Jatim No. 10 tahun 2009		Waktu Pengujian dan Hasil Pengujian		
1	Alun-Alun Air Mancur			28 Sep 2014 Saat Car Free Day Jam 6.10	28 Sep 2014 Setelah Car Free Day Jam 10.20	7 Okt 2014 Saat Hari Kerja Jam 10.10
	- SO <sub>2</sub>	0,1	ppm	0,003	0,003	0,003



	- NO <sub>2</sub>	0,05	ppm	0,0020	0,0080	0,0040
	- Debu	0,26	mg/Nm <sup>3</sup>	0,075	0,096	0,001
2	Alun-Alun Masjid Agung					
				28 Sep 2014 Saat Car Free Day Jam 7.15	28 Sep 2014 Setelah Car Free Day Jam 11.40	7 Okt 2014 Saat Hari Kerja Jam 10.45
	- SO <sub>2</sub>	0,1	ppm	0,003	0,003	0,009
	- NO <sub>2</sub>	0,05	ppm	0,0100	0,0080	0,0090
	- Debu	0,26	mg/Nm <sup>3</sup>	0,162	0,174	0,017
3	Depan Bank Delta Artha					
				28 Sep 2014 Saat Car Free Day Jam 6.50	28 Sep 2014 Setelah Car Free Day Jam 11.00	7 Okt 2014 Saat Hari Kerja Jam 09.30
	- SO <sub>2</sub>	0,1	ppm	0,003	0,003	0,006
	- NO <sub>2</sub>	0,05	ppm	0,0030	0,0050	0,0060
	- Debu	0,26	mg/Nm <sup>3</sup>	0,112	0,154	0,02
4	Jl. Yos Sudarso					
				28 Sep 2014 Saat Car Free Day Jam 08.05	28 Sep 2014 Setelah Car Free Day Jam 12.00	7 Okt 2014 Saat Hari Kerja Jam 12.10
	- SO <sub>2</sub>	0,1	ppm	0,003	0,003	0,003
	- NO <sub>2</sub>	0,05	ppm	0,0040	0,0090	0,0040
	- Debu	0,26	mg/Nm <sup>3</sup>	0,174	0,193	0,011
5	Depan GOR Sidoarjo					
				28 Sep 2014 Saat Car Free Day Jam 08.40	28 Sep 2014 Setelah Car Free Day Jam 09.30	7 Okt 2014 Saat Hari Kerja Jam 12.50
	- SO <sub>2</sub>	0,1	ppm	0,003	0,003	0,007
	- NO <sub>2</sub>	0,05	ppm	0,0160	0,0110	0,0020
	- Debu	0,26	mg/Nm <sup>3</sup>	0,132	0,242	0,031
6	Depan RSUD Sidoarjo					
					7 Okt 2014 Saat Hari Kerja Jam 09.35	
	- SO <sub>2</sub>	0,1	ppm		0,004	
	- NO <sub>2</sub>	0,05	ppm		0,0030	
	- Debu	0,26	mg/Nm <sup>3</sup>		0,008	
7	Depan SMAN 1 Sidoarjo					
					7 Okt 2014 Saat Hari Kerja Jam 11.30	
	- SO <sub>2</sub>	0,1	ppm		0,007	
	- NO <sub>2</sub>	0,05	ppm		0,0020	
	- Debu	0,26	mg/Nm <sup>3</sup>		0,003	
8	Perempatan By Pass Krian					
					8 Okt 2014 Saat Hari Kerja Jam 13.35	
	- SO <sub>2</sub>	0,1	ppm		0,006	
	- NO <sub>2</sub>	0,05	ppm		0,0040	
	- Debu	0,26	mg/Nm <sup>3</sup>		0,006	
9	Persimpangan Exit Tol Waru					
					8 Okt 2014 Saat Hari Kerja Jam 12.10	
	- SO <sub>2</sub>	0,1	ppm		0,003	
	- NO <sub>2</sub>	0,05	ppm		0,0020	



	- Debu	0,26	mg/Nm <sup>3</sup>	0,006
10	Depan Terminal Bungurasih			
				8 Okt 2014 Saat Hari Kerja Jam 11.30
	- SO <sub>2</sub>	0,1	ppm	0,004
	- NO <sub>2</sub>	0,05	ppm	0,0070
	- Debu	0,26	mg/Nm <sup>3</sup>	0,003
11	Perempatan Gedangan			
				8 Okt 2014 Saat Hari Kerja Jam 10.40
	- SO <sub>2</sub>	0,1	ppm	0,003
	- NO <sub>2</sub>	0,05	ppm	0,0030
	- Debu	0,26	mg/Nm <sup>3</sup>	0,001
12	Taman Apkasi Porong			
				8 Okt 2014 Saat Hari Kerja Jam 08.30
	- SO <sub>2</sub>	0,1	ppm	0,003
	- NO <sub>2</sub>	0,05	ppm	0,0040
	- Debu	0,26	mg/Nm <sup>3</sup>	0,004

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, 2014

Hasil pengujian udara ambien pada di 12 (Dua Belas) titik lokasi tersebut menunjukkan bahwa semua parameter memenuhi standar baku mutu sesuai Pergub. Jatim No. 10 tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi udara di Kabupaten Sidoarjo masih berada dalam kondisi baik.

Upaya - upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas udara ambien antara lain yaitu

1. Melakukan pemantauan terhadap kualitas udara yaitu menguji kualitas udara ambien di beberapa lokasi di Sidoarjo
2. Melaksanakan *Car Free Day*
3. Melaksanakan Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklam)

### 7.1.3 Usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah

Banyaknya usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo menimbulkan dampak terhadap lingkungan, diantaranya buangan air limbah. Sebagai salah satu upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup, maka usaha/kegiatan yang menghasilkan air limbah diwajibkan untuk melakukan pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke perairan umum. Syarat tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun



2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 20 ayat (3) bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :

- (1) Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- (2) Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada tahun 2014 hasil pemantauan kualitas air limbah terhadap 37 (Tiga Puluh Tujuh) usaha/kegiatan menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Usaha/ Kegiatan (Baku Mutu yang digunakan)	Parameter	Baku Mutu	Hasil Pemantauan
1	PT Hair Star Indonesia (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD	50	29,9
		COD	100	70,1
		TSS	200	50
		Detergen	5	0,246
		Fenol	0,5	0,0582
		pH	6,0 - 9,0	8
2	PT Paboxin Buduran (Pergub 72/2013 (mg/L) )	TSS	200	29,0
		Detergen	5	0,493
		Fenol	0,5	0,110
		pH	6,0 - 9,0	8
3	PT Central Proteina Prima (Pergub 72/2013 (mg/L) )	TSS	200	94
		Detergen	5	0,135
		Fenol	0,5	0,0826
		pH	6,0 - 9,0	7
4	PT Omya Indonesia (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD	50	11,7
		COD	100	27,2
		TSS	200	14
		Detergen	5	0,0984
		Fenol	0,5	0,0251
		pH	6,0 - 9,0	7
5	CV Subur Jaya Abadi (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD	100	48,5
		COD	250	120
		TSS	100	28,0
		pH	6,0-9,0	7
6	PT Tri Teguh M Sejati (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD	30	10,8
		COD	90	25,9
		TSS	30	3,60
		pH	6,0-9,0	7
7	PT Alter Trade Indonesia (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD	100	14,7
		COD	200	30,4
		TSS	100	9
		pH	6,0-9,0	7



No	Usaha/ Kegiatan (Baku Mutu yang digunakan)	Parameter	Baku Mutu	Hasil Pemantauan
8	PT. Panca Triadi Wonoayu (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD TSS pH	85 80 6,0-9,0	79,4 11,0 7
9	Industri Elektroplating PT Yamamori Indonesia (Pergub 72/2013 (mg/L) )	pH Zn Cr-total Cr <sup>6+</sup> Ni Pb Cd CN TSS	6-9 1 0,5 0,1 1 0,1 0,05 0,2 20	8,92 0,493 <0,0269 0,0256 0,0269 <0,0547 <0,0067 0,0310 19,2
10	Industri Baterai PT Selatan Jadi Jaya (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD <sub>5</sub> COD TDS TSS Detergent Cu Fe Zn Mn	50 100 2000 200 5 2 5 5 2	7,67 19,2 368 0,800 0,0270 0,0387 <0,0413 0,0918 0,0711
11	Industri Biskuit PT United Waru Biscuit Manufactory (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD <sub>5</sub> COD TSS pH Minyak dan Lemak	85 150 80 6-9 10	11,8 32,0 10,0 8,38 <1,05
12	Industri Biskuit PT Aneka Indo Makmur (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD <sub>5</sub> COD pH Minyak dan Lemak	85 150 6-9 10	37,0 90,2 7,87 <1,05
13	Industri Sepeda PT Inera Sena (Pergub 72/2013 (mg/L) )	TSS	200	42,0



No	Usaha/ Kegiatan (Baku Mutu yang digunakan)	Parameter	Baku Mutu	Hasil Pemantauan
		pH	6-9	7,05
		TDS	2000	848,0
		Detergent	5	0,407
		Besi (Fe)	5	0,885
		Mangan (Mn)	2	0,173
		Tembaga (Cu)	2	<0,0169
		Seng (Zn)	5	0,0294
14	Hotel Hotel Utami (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD <sub>5</sub>	30	18,6
		COD	50	41,6
		TSS	50	4,00
		pH	6-9	7,18
		Minyak dan Lemak	10	<1,05
15	Makanan Ringan PT Siantar Top (Pergub 72/2013 (mg/L) )	TSS	200	80,0
		pH	6-9	7,10
		Minyak dan Lemak	-	<1,05
16	Penyamakan Kulit PT Rajawali Tanjung Sari (Pergub 72/2013 (mg/L) )	TSS	200	30,0
		pH	6-9	7,61
		Detergent	5	0,0489
		Besi (Fe)	5	<0,0413
		Mangan (Mn)	2	0,691
		Tembaga (Cu)	2	<0,0169
		Seng (Zn)	5	0,0244
17	PT Santos Premium Krimer (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD <sub>5</sub>	50	10,2
		COD	100	27,2
		TSS	200	4,80
		pH	6-9	8,60
		TDS	2000	1620



No	Usaha/ Kegiatan (Baku Mutu yang digunakan)	Parameter	Baku Mutu	Hasil Pemantauan
		Detergent	5	<0,008
		Besi (Fe)	5	<0,0413
		Mangan (Mn)	2	0,0465
		Tembaga (Cu)	2	<0,0169
		Seng (Zn)	5	<0,0157
18	PT Eloda Mitra Sinar Buduran II (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD <sub>5</sub>	50	20,2
		COD	100	43,5
		TSS	200	20,0
		pH	6-9	7,08
		TDS	2000	212
		Detergent	5	0,0716
		Besi (Fe)	5	0,0924
		Mangan (Mn)	2	0,0686
		Tembaga (Cu)	2	<0,0169
		Seng (Zn)	5	0,115
19	PT Indo Lautan Makmur (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD <sub>5</sub>	100	14,4
		COD	150	36,8
		pH	6-9	8,00
		Minyak dan Lemak	15	<1,05
20	PT So Good Food (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD <sub>5</sub>	50	22,3
		COD	100	59,2
		TSS	200	17,2
		pH	6-9	8,00
		TDS	2000	794,0
		Detergent	5	0,152
		Besi (Fe)	5	0,0873
		Mangan (Mn)	2	0,114
		Tembaga (Cu)	2	<0,0169
		Seng (Zn)	5	0,0294



No	Usaha/ Kegiatan (Baku Mutu yang digunakan)	Parameter	Baku Mutu	Hasil Pemantauan
21	PT Putra Mataram (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD <sub>5</sub> TSS Zn pH Minyak dan Lemak Cu	80 50 1,0 6-9 10 0,80	13,9 13,2 0,0202 8,00 <1,05 <0,0169
22	PT Bernofarm (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD <sub>5</sub> COD TSS pH	100 300 100 6-9	74,8 183,4 4,40 7,00
23	PT Selatan Jadi Jaya (Pergub 72/2013 (mg/L) )	pH Besi (Fe) Seng (Zn) Tembaga (Cu) Timbal (Pb) Minyak dan Lemak	6-9 1 0,4 0,6 0,14 4	7,80 <0,0413 0,0754 <0,0169 <0,0547 <1,05
24	PT Santos Jaya Abadi (Pergub 72/2013 (mg/L) )	BOD <sub>5</sub> COD TSS pH Minyak dan Lemak TDS	50 100 200 6-9 - 2000	42,6 94,4 8,40 7,98 <1,05 1,108
25	PT Jaykay Files Indonesia (Permenkes RI No 416/MENKES/PER/IX/1990)	pH Besi (Fe) Mangan (Mn) Seng (Zn)	7-9 1 0,5 15	7,39 <0,0413 0,390 0,0370



No	Usaha/ Kegiatan (Baku Mutu yang digunakan)	Parameter	Baku Mutu	Hasil Pemantauan
		Timbal (Pb)	0,05	<0,0547
26	CV / UD Sais Jaya (Pergub 72/2013 (mg/L) )	pH Seng (Zn) Timbal (Pb)	6-9 1 0,1	7,82 0,768 <0,0547
		Tembaga (Cu)	0,6	<0,0169
27	RS Siti Hajar (Pergub 72/2013 (mg/L) )	TSS pH BOD <sub>5</sub> COD	30 6-9 30 80	7,20 7,70 11,3 31,7
28	PT Pakarti Riken Indonesia (Kep Gub 45 Tahun 2002)	pH Besi (Fe) Seng (Zn) Timbal (Pb) Tembaga (Cu) TSS	6-9 5 5 0,1 1 20	7,59 <0,0413 0,160 <0,0547 <0,0169 3,20
29	PT Candi Jaya Amerta (Pergub 72/2013 (mg/L) )	pH BOD <sub>5</sub> COD TSS Minyak dan Lemak	6-9 50 120 50 20	7,56 18,5 40,5 6,80 <1,05
30	CV Sais Jaya Elektroplating Tidak ada Baku Mutu	pH Seng (Zn) Timbal (Pb) Tembaga (Cu) TSS	- - - - -	7,70 3,64 <0,0547 0,237 88,0
31	PT Coronet Crown			



No	Usaha/ Kegiatan (Baku Mutu yang digunakan)	Parameter	Baku Mutu	Hasil Pemantauan
	(Pergub 72/2013 (mg/L) )	pH BOD <sub>5</sub> COD TSS	6-9 100 300 100	7,39 18,0 41,6 3,60
32	PT Tjiwi Kimia (Pergub 72/2013 (mg/L) )	pH BOD <sub>5</sub> COD TSS Timbal (Pb)	6-9 70 150 70 0,1	7,67 12,9 32,0 24,0 <0,0547
33	RSUD Sidoarjo (Pergub 72/2013 (mg/L) )	pH BOD <sub>5</sub> COD TSS	6-9 30 80 30	7,56 21,4 54,7 10,0
34	PT Jaykay Files Indonesia (Pergub 72/2013 (mg/L) )	TSS pH Besi (Fe) Tembaga (Cu) Seng (Zn) Timbal (Pb)	400 6-9 10 3 10 1	17,2 6,82 <0,0413 <0,0169 <0,0157 <0,0547
35	Jasa Reparasi Perhiasan Logam Mulia (Pergub 72/2013 (mg/L) )	pH Seng (Zn) Timbal (Pb) Tembaga (Cu) TSS	6-9 1 0,1 0,6 20	8,33 0,0737 <0,0547 <0,0169 0,800
36	CV Harmonis (Pergub 72/2013 (mg/L) )	pH BOD <sub>5</sub> COD TSS Minyak dan Lemak	6-9 50 110 60 5,0	6,89 29,8 65,9 18,0 <1,05
37	PT Santos Jaya Abadi (Pergub 72/2013 (mg/L) )	pH BOD <sub>5</sub>	6-9 75	7,65 36,3



No	Usaha/ Kegiatan (Baku Mutu yang digunakan)	Parameter	Baku Mutu	Hasil Pemantauan
		COD	200	98,6
		TSS	100	12,0
		Minyak dan Lemak	20	<1,05

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, 2014

Berdasarkan tabel di atas, hasil pemantauan kualitas air limbah terhadap usaha/ kegiatan yang diuji memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas air limbah, antara lain :

1. Melakukan pemantauan dengan cara menguji sampel limbah cair dari pelaku usaha / kegiatan
2. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha / kegiatan seperti dalam kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan (SKPL) dan Bimbingan Teknis (Bintek) Pengelolaan Limbah Cair
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha / kegiatan yang kurang taat terhadap peraturan yang berlaku (baku mutu air limbah yang telah ditetapkan)

#### 7.1.4 Usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan udara emisi

Industri umumnya dikaitkan dengan sumber pencemar udara, karena industri merupakan kegiatan yang sangat tampak dalam pembebasan berbagai senyawa kimia kedalam lingkungan alam. Pengujian pemenuhan baku mutu udara (emisi) dilakukan di 14 Industri terhadap 4(Empat) parameter yaitu : Partikulat, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> dan Opasitas.

- **Partikulat**

Partikulat adalah substansi yang berada dalam atmosfer pada kondisi normal berukuran lebih besar daripada molekul (2 Angstrom) tetapi lebih kecil daripada 500 um (1 u = 1 mikron = 10<sup>-4</sup> cm). Sumber partikulat ada 2 (Dua) yaitu sumber alami dan sumber antropogenik. Sumber alami berasal dari debu vulkanik, kebakaran hutan, dll sedangkan sumber antropogenik berasal dari proses dan kegiatan industri seperti asap dari



cerobong, penanganan limbah padat (insinerasi), dll. Keberadaan partikulat di udara secara potensial menyebabkan kerugian seperti pada kesehatan paru-paru.

Pada tahun 2014 hasil pemantauan kualitas udara terhadap 14 (Empat Belas) Industri menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Industri / Baku Mutu yang digunakan	Sumber Emisi	Parameter		Baku Mutu	Hasil Pemantauan
1	Karet PT Supranusa Indogita (Pergub Jatim 10 / 2009)	Boiler	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	230	153
			SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	600	89,84
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	800	20,81
			Opasitas	%	30	5
2	Sosis PT So Good Food di Wonoayu (Pergub Jatim 10 / 2009)	Boiler Cangkang	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	250	13
			SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	600	20,19
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	800	232,27
			Opasitas	%	30	2
3	Industri Gula PT. PG. Toelangan (Pergub Jatim 10 / 2009)	Boiler	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	230	<1
			SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	600	75,66
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	800	132,57
			Opasitas	%	30	1,1
4	Industri Gula PT. PG Watoe Toelis (Pergub Jatim 10 / 2009)	Boiler	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	230	5
			SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	600	0,94
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	800	5,06
			Opasitas	%	30	1,1
5	Industri Gula PT PG Kremboong (Pergub Jatim 10 / 2009)	Boiler Chengchen	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	230	<1
			SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	600	39,60
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	800	116,07
			Opasitas	%	30	1,1
6	PT Gudang Garam Tbk (Pergub Jatim 10 / 2009)	Boiler Corrugating	SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	150	0,97
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	650	115,16
		Boiler Thermal Oil	SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	150	9,68
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	650	65,85
		Boiler Thermal Oil Rutogravure	SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	150	0,96
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	650	3,09
7	PT PG Candi Baru (Pergub Jatim 10 / 2009)	Cerobong Boiler KCC	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	250	141
			SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	600	305,71



No	Jenis Industri / Baku Mutu yang digunakan	Sumber Emisi	Parameter		Baku Mutu	Hasil Pemantauan
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	700	86,95
8	PT Sekar Laut (Pergub Jatim 10 / 2009)	Boiler Alstom	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	230	95
			SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,97
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	825	366,45
			Opasitas	%	20	10
9	PT Rachbini Leather (Pergub Jatim 10 / 2009)	Boiler Batubara	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	230	150
			SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	750	64,02
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	825	54,99
			Opasitas	%	20	10
10	PT Tunggal Jaya Steel (Pergub Jatim 10/2009)	Cerobong Dust Collector	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	350	11
			SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	800	<0,03
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	1000	<0,01
			Opasitas	%	35	0
11	PT Tunas Baru Lampung (Pergub Jatim 10 / 2009)	Cerobong Omnical 10 T	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	230	106
			SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	750	30,81
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	825	40,40
			Opasitas	%	20	15
12	PT Unichem (Pergub Jatim 10 / 2009)	Cerobong Furnace 1	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	230	92
			SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	750	<0,03
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	825	14,48
			Opasitas	%	20	0
		Cerobong Furnace 2	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	230	89
			SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	750	5,75
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	825	66,13
			Opasitas	%	20	0
		Cerobong Furnace 3	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	230	64
SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>		750	1,72		
NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>		825	64,49		
Opasitas	%		20	0		
13	PT Karya Karang Asem Indah (Pergub Jatim 10 / 2009)	Cerobong Scrubber 1	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>	350	<1
			SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	800	<0,03
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	1000	<0,01
14	PT Eloda Mitra (Pergub Jatim 10 / 2009)	Boiler Gas	SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	150	0,20
			NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	650	80,16

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2014

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kadar yang terukur di perusahaan-perusahaan tersebut telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.



Upaya-upaya peningkatan baku mutu udara (emisi) di usaha/kegiatan yang berpotensi pencemaran antara lain yaitu :

- 1) Melakukan pemantauan dengan cara menguji udara (emisi) Industri
- 2) Melakukan pembinaan terhadap Industri seperti dalam Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan (SKPL)
- 3) Melakukan pengawasan terhadap Industri yang kurang taat terhadap peraturan yang berlaku (baku mutu udara

#### 7.1.5 Jumlah sampah yang terangkut ke TPA

Indikator ini menggambarkan jumlah sampah yang berhasil ditangani Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait. Dengan semakin banyaknya jumlah sampah yang tertangani berarti polusi yang diakibatkan oleh sampah semakin berkurang yaitu sampah yang dibuang ke sembarang tempat oleh masyarakat semakin berkurang sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya banjir khususnya di wilayah padat penduduk.

Perkembangan sampah yang tertangani hingga tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.7.1.5**

**Perbandingan Jumlah Sampah Yang Terangkut  
dengan Jumlah Produksi Sampah Tahun 2010s.d 2014**

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah sampah yang terangkut	M3/hari	802	810	820	802	924
Jumlah produksi sampah	M3/hari	4.043	4.421	4.517	4.517	4.517
Prosentase jumlah sampah terangkut	%	19,84	18,32	18,15	17,76	20,46

*Sumber Data: Dinas Kebersihan dan Pertamanan*

Realisasi jumlah sampah yang terangkut ke TPA tahun 2014 sebanyak 924m<sup>3</sup>/hari. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah sampah yang terangkut sebanyak 122m<sup>3</sup>/hari atau 15,21%. Dibandingkan target RPJMD sebesar 850 m<sup>3</sup>/hari telah



melampaui. Realisasi ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah / armada angkutan sampah dan sarana prasarana pengelolaan sampah dapat menambah jumlah sampah yang tertangani.

Upaya yang dilakukan untuk penanganan sampah yang tidak terangkut dan mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

1. Menambah jumlah angkutan sampah
2. Menambah sarana prasarana pengelolaan sampah
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah mulai dari rumah tangga sampai tingkat komunal melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan
4. Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu). Di TPST ini kelompok masyarakat yang peduli akan sampah dapat melakukan pemilahan sampah sehingga sampah organik / basah dapat dijadikan kompos, sampah organik yang mempunyai nilai jual dapat dijual ke bank sampah atau didaur ulang menjadi barang yang mempunyai nilai jual, sedangkan sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dapat dibuang ke TPA, dengan demikian sampah yang dibuang ke TPA akan berkurang jumlahnya. Sampai dengan saat ini terdapat 25 lokasi TPST yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

- 1) Desa Janti, Kecamatan Waru
- 2) Desa Ngingas, Kecamatan Waru
- 3) Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan
- 4) Desa Siwalananji, Kecamatan Buduran
- 5) Desa Prasung, Kecamatan Buduran
- 6) Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin
- 7) Desa Kenongo, Kecamatan Tulangan
- 8) Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan
- 9) Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan
- 10) Desa Jimbarankulon, Kecamatan Wonoayu
- 11) Desa Cemengbakalan, Kecamatan Sidoarjo



- 12) Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo
- 13) Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran
- 14) Desa Dukuhtengan, Kecamatan Buduran
- 15) Desa Damarsi, Kecamatan Buduran
- 16) Desa Sawohan, Kecamatan Buduran
- 17) Desa Kragan, Kecamatan Gedangan
- 18) Desa Tebel, Kecamatan Gedangan
- 19) Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru
- 20) Desa Buncitan, Kecamatan Sedati
- 21) Desa Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo
- 22) Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin
- 23) Desa Kraton, Kecamatan Krian
- 24) Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo
- 25) Desa Simpang, Kecamatan Prambon

#### **7.1.6 Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Ruang terbuka yang bermanfaat dan bias diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya.

Adapun manfaat RTH diwilayah perkotaan antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan sebagai paru-paru kota;
2. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota;
3. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah;
4. Sebagai tempat hidup satwa dan plasma nutfah;
5. Sebagai resapan air guna menjaga keseimbangan tata air dalam tanah, mengurangi aliran air permukaan, menangkap dan menyimpan air, menjaga keseimbangan tanah agar kesuburan tanah tetap terjaga;
6. Sirkulasi udara dalam kota;



7. Sebagai tempat sarana dan prasarana kegiatan rekreasi.

Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengelola Ruang Terbuka Hijau seluas 15,95 hektar. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 27 hektar, dengan capaian sebesar 59,07%. Dibandingkan dengan realisasi capaian RTH tahun 2013 seluas 12,78 hektar maka realisasi capaian RTH tahun 2014 meningkat sebesar 18,15%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan fungsi lahan ex TPA menjadi lahan Taman seperti lahan ex TPA di desa Bluru Kecamatan Sidoarjo, Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon, serta alih fungsi lahan ex kantor Kawedanan Porong menjadi taman Dwarakerta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau melalui beberapa hal, antara lain :

1. Mendata luasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk RTH seperti lahan tidur, lahan sempadan sungai, lahan dibawah tegangan tinggi, dll
2. Menambah sarana prasarana pengelolaan RTH
3. Sosialisasi / penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pekarangan menjadi RTH
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan RTH
5. Meningkatkan fungsi RTH menjadi taman wisata, taman pendidikan, dll.

### 7.2.1 Ketersediaan energy alternative (watt)

Dalam rangka mengembangkan energi alternatif, pada tahun 2014 telah dapat direalisasikan sebesar 6.000 watt dari target yang ditetapkan sebesar 1.000 watt dengan rincian sebagai berikut :

LOKASI	BESARAN (Watt)
Kecamatan Tanggulangin	2.000 Watt
Kecamatan Porong	2.000 Watt
Kecamatan Jabon	2.000 Watt

**MISI 8. Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat**

Untuk mencapai misi **menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat** ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran.

Hasil penilaian pencapaian sasaran misi ini pada tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Tujuan – Sasaran	Tingkat keberhasilan
	Tujuan 1 : <i>Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang kondusif dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam berpolitik</i>	
	Sasaran :	
1.	<i>Meningkatnya kualitas norma maupun etika dalam masyarakat</i>	Cukup

Pencapaian ke 1 (satu) sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) urusan yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri oleh satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Uraian hasil pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. ***Meningkatnya kualitas norma maupun etika dalam masyarakat*** dengan indikator kinerja dan penjelasan capaian serta analisisnya sebagai berikut:

**8.1.1 Jumlah Pelanggaran masyarakat terhadap Perda**

Untuk menilai ketentraman dan ketertiban masyarakat diukur tingkat pelanggaran masyarakat terhadap perda ketentraman dan ketertiban. Kondisi pelanggaran yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 2.713 pelanggaran atau naik 5,4 % dari tahun 2013 yang sebanyak 2.573 pelanggaran. Sedangkan Target RPJMD sebanyak 563 pelanggaran masih belum bisa terpenuhi.

Adapun faktor – faktor yang mendukung pencegahan pelanggaran perda ketentraman dan ketertiban adalah :

1. Strategi, arah kebijakan, sasaran, serta program dan kegiatan yang jelas dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan



2. Intensifitas kegiatan penertiban dan pengawasan terhadap pelanggar, sehingga dapat meminimalisir pengulangan pelanggaran yang sama
3. Ketegasan petugas di lapangan dalam menghadapi berbagai pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum agar sesuai dengan peraturan daerah
4. Selain tindakan tegas kepada para pelanggar, upaya - upaya yang lain adalah pengolahan lokasi eks pelanggaran melalui koordinasi yang terintegrasi dengan SKPD yang lainnya. Seperti misalnya DKP pada jalur hijau yang telah dibersihkan dari PKL
5. Pengamanan dan pengawasan di lokasi eks PKL serta patroli rutin mampu menekan jumlah pelanggaran yang terjadi
6. Upaya - upaya pembinaan kepada pelanggar terus dilakukan, dengan melakukan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi dan teguran kepada para pelanggar secara langsung sehingga dengan memberikan hasil yang signifikan dikarenakan masyarakat mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan melanggar ketentuan PERDA.

#### **Grafik 3.8.1.1**

#### **Pelanggaran masyarakat terhadap Perda**



Sumber Data : Satpol PP

**Tabel 3.8.1.1**

**Pelanggaran masyarakat terhadap Perda**

Jenis Pelanggaran PERDA Trantib Tahun 2014

NO	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pelanggaran
1	PKL	105	1254
2	Asusila	4	70
3	Bangunan Liar	59	309
4	Galian C	1	1
5	Gepeng/anjal	3	12
6	RHU (Rumah hiburan umum)	25	29
7	Reklame Insidentil dan tetap	82	788
8	Perijinan	89	204
9	Tipiring	2	46
		370	2713

**8.1.2 Jumlah Personil Satpol PP**



Jumlah personil satpol PP yang ada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sebanyak 127 personil, jumlah ini sedikit menurun dibandingkan jumlah personil tahun 2013 yang sebanyak 130 personil, penurunan jumlah personil tersebut karena adanya yang telah purna tugas tapi tidak ada anggota baru. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 210 personil, masih diperlukan tambahan personil Satpol PP.

Tingkat pelanggaran serta cakupan lingkup penertiban yang harus dilakukan oleh Satpol PP terlalu luas untuk ditangani oleh 127 personil maka pada tahun 2014 dilakukan perekrutan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan sebanyak 107 orang sebagai dukungan tenaga operasional harian Satpol PP Kabupaten Sidoarjo.

### **8.1.3 Jumlah kegiatan pembinaan politik kepada Masyarakat**

Pada tahun 2014 kegiatan pembinaan politik dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta 870 orang. Kegiatan tersebut antara lain :

- 1) Kegiatan Gathering Wartawan, dengan jumlah peserta 70 orang
- 2) Kegiatan Panggung Terbuka, dengan jumlah peserta 600 orang
- 3) Kegiatan Bimtek PNS (Netralitas), dengan jumlah peserta 200 orang

Sedangkan kegiatan pembinaan terhadap LSM dan Ormas dilaksanakan sebanyak 2 kali, antara lain :

- 1) Kegiatan Bimtek Ormas, dengan jumlah peserta 70 orang
- 2) Kegiatan Bimtek LSM, dengan jumlah peserta 54 orang

Kegiatan ini dimaksudkan masyarakat Kabupaten Sidoarjo khususnya para peserta Sosialisasi dan Bintek memahami makna politik yang merupakan pilar demokrasi secara positif dan diharapkan mampu memberikan dukungan dan kontribusi terhadap kondisi Kabupaten Sidoarjo tetap kondusif.



<b>C</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>
----------	---------------------------

<b>1.</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>
-----------	--------------------------

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2014 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	LEBIH / KURANG	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN				
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.003.045.392.951,00	1.115.492.034.740,16	112.446.641.789,16	<b>111,21</b>
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.425.650.988.426,00	1.403.069.829.236,00	(22.581.159.190,00)	<b>98,42</b>
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	699.838.951.340,00	754.977.188.259,00	55.275.336.919,00	<b>107,90</b>
	JUMLAH PENDAPATAN	3.128.535.332.717,00	3.273.539.052.235,16	145.140.819.518,16	<b>104,64</b>

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.273.539.052.235,16 atau 104,64% dari target/anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.3.128.535.332.717,00, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp.2.699.453.827.776,95 meningkat sebesar Rp. 574.085.224.458,21 atau 21,27%.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2014 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2014 sebesar Rp. 1.115.492.034.740,16 atau tercapai sebesar 111,21% dari seluruh target PAD sebesar Rp. 1.003.045.392.951,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 862.617.340.329,95 meningkat sebesar Rp.252.874.694.410,21 atau 29,31%.

Tercapainya target PAD ini dan meningkatnya penerimaan PAD berkat usaha keras dari seluruh instansi di jajaran pemerintah Kabupaten Sidoarjo.



2) Pendapatan Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan tahun 2014 terealisasi sebesar Rp.1.403.069.829.236,00 atau 98,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.425.650.988.426,00. Kontribusi terbesar pencapaian target ini berasal dari Dana Alokasi Umum

3) Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah bersumber dari:

- a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tercapai sebesar Rp.11.567.000.000,00 atau (192,78%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.6.000.000.000,00;
- b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terealisasi sebesar Rp. 346.218.777.259,00 atau 117,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 295.322.857.793,00;
- c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terealisasi sebesar Rp. 354.710.934.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 354.694.923.000,00;
- d) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp. 42.480.477.000,00 atau 100,22% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 42.385.877.000,00;
- e) Sedangkan Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota Surabaya tidak terealisasi.

Dalam upayanya untuk mencapai target pendapatan asli daerah di temukan beberapa permasalahan.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

- a. Perlu adanya beberapa pembenahan sistem pengelolaan pendapatan termasuk peningkatan kualitas layanan.
- b. Adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyetoran pajak.
- c. Ada kecenderungan masyarakat untuk menghindari pajak
- d. Ada sebagian masyarakat yang belum mengerti akan pemanfaatan pajak dalam pembangunan.



- e. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi serta untuk menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Mengadakan koordinasi dan pendekatan dengan sektor terkait serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha akademisi maupun masyarakat.
- b. Memberikan pemahaman pada masyarakat akan pengertian pajak dan memanfaatkannya bagi pembangunan
- c. Mengadakan program terobosan sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak makin meningkat, misalnya Program billing system dan melakukan shock therapy pada WP yang tidak patuh.
- d. Menjaga keakurasian data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan.
- e. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan.

<b>2.</b>	<b>Belanja Daerah</b>
-----------	-----------------------

Target belanja daerah untuk tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.3.577.576.573.478,34, dari target tersebut pada tahun 2014 berhasil direalisasikan sebesar Rp. 3.006.567.451.395,01 atau tercapai sebesar 84,04%, dengan rincian sebagai berikut :

KO DE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	SISA LEBIH	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA DAERAH	3.577.576.573.478,34	3.020.245.632.633,01	(557.330.940.845,33)	<b>84,42</b>
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.781.835.997.465,14	1.576.227.733.090,00	(205.608.264.375,14)	<b>88,46</b>
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.795.740.576.013,20	1.444.017.899.543,01	(351.722.676.470,19)	<b>80,41</b>
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.577.576.573.478,34	3.020.245.632.633,01	(557.330.940.845,33)	<b>84,42</b>

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK



Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah sebagai berikut :

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp.1.576.227.733.090,00 atau 88,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.781.835.997.465,14.

Rincian realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	SISA LEBIH	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.781.835.997.465,14</b>	<b>1.576.227.733.090,00</b>	<b>(205.608.264.375,14)</b>	<b>88,46</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.489.025.409.271,14</b>	<b>1.304.218.353.014,00</b>	<b>(184.807.056.257,14)</b>	<b>87,59</b>
Gaji dan Tunjangan	1.267.050.809.764,14	1.132.671.008.316,00	(134.379.801.448,14)	89,39
Tambahan Penghasilan PNS	168.751.112.500,00	127.612.923.174,00	(41.138.189.326,00)	75,62
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.023.000.000,00	4.965.600.000,00	(57.400.000,00)	98,86
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	4.289.103.722,00	0,00	(4.289.103.722,00)	0,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	39.171.571.170,00	34.850.355.936,00	(4.321.215.234,00)	88,97
Insentif pemungutan Retribusi Daerah	4.739.812.115,00	4.118.465.588,00	(621.346.527,00)	86,89
<b>Belanja Hibah</b>	<b>69.442.360.000,00</b>	<b>67.486.363.850,00</b>	<b>(1.955.996.150,00)</b>	<b>97,18</b>
Belanja Hibah Kepada Pemerintah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Hibah Kepada Masyarakat	48.065.360.000,00	46.681.197.500,00	(1.384.162.500,00)	97,12
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	21.077.000.000,00	20.505.166.350,00	(571.833.650,00)	97,29
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>61.238.340.000,00</b>	<b>48.738.240.000,00</b>	<b>(12.500.100.000,00)</b>	<b>79,59</b>
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat	13.380.240.000,00	9.157.440.000,00	(4.222.800.000,00)	68,44
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan	47.164.500.000,00	39.580.800.000,00	(7.583.700.000,00)	83,92
Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	693.600.000,00	0,00	(693.600.000,00)	0,00
<b>Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>	<b>57.306.308.285,00</b>	<b>54.839.162.759,00</b>	<b>(2.467.145.526,00)</b>	<b>95,69</b>



Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	47.280.000.000,00	46.868.748.832,00	(411.251.168,00)	99,13
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.510.850.160,00	3.462.916.927,00	(47.933.233,00)	98,63
Belanja Bagi Hasil Reribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi	6.515.458.125,00	4.507.497.000,00	(2.007.961.125,00)	69,18
<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik</b>	<b>101.370.537.909,00</b>	<b>99.151.842.523,00</b>	<b>(2.218.695.386,00)</b>	<b>97,81</b>
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	100.442.793.520,00	98.309.152.805,00	(2.133.640.715,00)	97,88
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	927.744.389,00	842.689.718,00	(85.054.671,00)	90,83
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>3.453.042.000,00</b>	<b>1.793.770.944,00</b>	<b>(1.659.271.056,00)</b>	<b>51,95</b>

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

## b. Belanja Langsung

Belanja Langsung tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 1.444.017.899.543,01 atau 80,42% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.795.740.576.013,20. Kontribusi terbesar untuk anggaran yang terserap berasal dari belanja barang dan jasa yaitu terserap sebesar Rp.709.527.966.903,86 atau 89,75% dari anggarannya.

Secara rinci penyerapan belanja langsung sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	SISA LEBIH	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>1.795.740.576.013,20</b>	<b>1.444.017.899.543,01</b>	<b>(351.585.576.470,19)</b>	<b>80,42</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>52.307.632.438,00</b>	<b>43.331.484.939,81</b>	<b>(8.839.047.498,19)</b>	<b>83,06</b>
Honorarium PNS	31.388.059.783,00	25.552.979.187,81	(5.835.080.595,19)	81,41
Honorarium Non PNS	10.963.712.000,00	9.022.487.000,00	(1.804.125.000,00)	83,34
Uang Lembur	3.065.860.655,00	2.159.693.056,00	(906.167.599,00)	70,44
Belanja Pegawai Dana BOS	6.890.000.000,00	6.596.325.696,00	(293.674.304,00)	95,74
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>790.529.445.755,66</b>	<b>709.527.966.903,86</b>	<b>(81.001.478.851,80)</b>	<b>89,75</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	40.631.603.606,00	32.317.798.245,00	(8.313.805.361,00)	79,54
Belanja Bahan/Material	39.942.964.026,00	35.888.159.457,00	(4.054.804.569,00)	89,85
Belanja Jasa Kantor	111.686.945.414,00	102.086.842.330,00	(9.600.103.084,00)	91,40



Belanja Premi Asuransi	1.250.000.000,00	1.215.189.670,00	(34.810.330,00)	97,22
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.575.369.772,00	6.182.671.648,00	(1.392.698.124,00)	81,62
Belanja Cetak dan Penggandaan	19.378.820.656,00	15.994.748.071,00	(3.384.072.585,00)	82,54
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.767.325.100,00	1.389.645.000,00	(377.680.100,00)	78,63
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	933.770.000,00	809.332.500,00	(124.437.500,00)	86,67
Belanja Sewa Alat Berat	275.000.000,00	256.786.000,00	(18.214.000,00)	93,38
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.674.323.000,00	3.356.350.729,00	(317.972.271,00)	91,35
Belanja Makanan Dan Minuman	28.448.165.750,00	22.873.439.220,00	(5.574.726.530,00)	80,40
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.557.470.000,00	1.464.098.844,00	(93.371.156,00)	94,00
Belanja Pakaian Kerja/Perlengkapan Kerja Lapangan	4.440.475.000,00	3.731.262.800,00	(709.212.200,00)	84,03
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.116.884.200,00	1.977.526.200,00	(139.358.000,00)	93,42
Belanja Perjalanan Dinas	73.837.673.967,00	57.666.219.385,00	(16.171.454.582,00)	78,10
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	486.800.000,00	472.150.000,00	(14.650.000,00)	96,99
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	24.452.196.980,00	20.247.639.364,00	(4.204.557.616,00)	82,80
Belanja Pemeliharaan	110.862.506.320,00	102.582.171.675,00	(8.280.334.645,00)	92,53
Belanja Jasa Konsultansi	23.591.670.304,00	19.488.420.850,00	(4.103.249.454,00)	82,61
Belanja Barang Dana Bos	18.609.050.000,00	18.239.645.115,00	(369.404.885,00)	98,01
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.608.047.798,00	5.065.206.300,00	(2.542.841.498,00)	66,58
Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat/Pihak Ketiga	3.460.000.000,00	2.753.352.000,00	(706.648.000,00)	79,58
Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan	154.900.000,00	145.475.752,00	(9.424.248,00)	93,92
Belanja Penyedia Jasa	3.863.288.208,00	3.669.533.375,00	(193.754.833,00)	94,98
Belanja barang dan jasa BLUD	211.825.449.454,66	213.847.246.757,86	2.021.797.303,20	100,95
Belanja Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin	29.704.050.000,00	8.301.144.958,00	(21.402.905.042,00)	27,95
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.464.796.200,00	12.927.679.420,00	(4.537.116.780,00)	74,02
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	929.900.000,00	900.050.000,00	(29.850.000,00)	96,79
<b>Belanja Modal</b>	<b>952.903.497.819,54</b>	<b>691.158.447.699,34</b>	<b>(261.745.050.120,20)</b>	<b>72,53</b>
Belanja Modal Pengadaan Tanah	77.731.386.101,00	21.285.974.582,00	(56.445.411.519,00)	27,38
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	11.938.150.000,00	10.688.777.942,00	(1.249.372.058,00)	89,53
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	49.233.046.463,00	44.204.430.830,00	(5.028.615.633,00)	89,79
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.063.800.000,00	950.489.000,00	(113.311.000,00)	89,35



Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	435.000.000,00	403.200.000,00	(31.800.000,00)	92,69
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	100.000.000,00	97.680.000,00	(2.320.000,00)	97,68
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	855.002.200,00	663.210.000,00	(191.792.200,00)	77,57
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	1.211.287.000,00	208.971.000,00	(1.002.316.000,00)	17,25
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.043.673.825,00	4.710.874.250,00	(1.332.799.575,00)	77,95
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.268.231.059,00	7.276.692.051,00	(991.539.008,00)	88,01
Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.256.852.448,00	12.300.570.293,00	(1.956.282.155,00)	86,28
Belanja Modal Pengadaan Meubeuleur	10.907.267.100,00	9.193.133.924,00	(1.714.133.176,00)	84,28
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	450.799.420,00	321.887.091,00	(128.912.329,00)	71,40
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	367.000.000,00	170.323.000,00	(196.677.000,00)	46,41
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.676.335.290,00	3.308.658.469,00	(367.676.821,00)	90,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	715.775.200,00	663.460.250,00	(52.314.950,00)	92,69
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	904.672.500,00	852.565.500,00	(52.107.000,00)	94,24
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	7.613.231.669,00	4.762.796.215,00	(2.850.435.454,00)	62,56
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	14.616.908.545,00	966.196.500,00	(13.650.712.045,00)	6,61
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	174.063.210.760,00	148.073.023.965,00	(25.990.186.795,00)	85,07
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	40.281.570.479,00	35.750.410.525,34	(4.531.159.953,66)	88,75
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	156.405.727.117,00	145.657.674.150,00	(10.748.052.967,00)	93,13
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	22.004.993.054,00	20.178.028.700,00	(1.826.964.354,00)	91,70
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	38.132.575.425,00	33.057.238.323,00	(5.075.337.102,00)	86,69
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	188.094.509.435,54	133.066.780.863,00	(55.027.728.572,54)	70,74
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	50.158.736.780,00	699.985.400,00	(49.458.751.380,00)	1,40
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	201.325.000,00	185.643.000,00	(15.682.000,00)	92,21
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	987.152.000,00	980.397.550,00	(6.754.450,00)	99,32
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	85.700.000,00	83.330.000,00	(2.370.000,00)	97,23
Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	8.096.975.000,00	4.275.374.000,00	(3.821.601.000,00)	52,80
Belanja Modal Pengadaan Alat-	120.990.000,00	116.175.000,00	(4.815.000,00)	96,02



alat Perindustrian				
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pembangkit Energi	315.850.000,00	310.441.800,00	(5.408.200,00)	98,29
Belanja Modal BLUD	41.139.663.949,00	36.560.808.721,00	(4.578.855.228,00)	88,87
Belanja Modal Dana Bos	8.652.500.000,00	8.314.284.805,00	(338.215.195,00)	96,09
Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembelajaran Sekolah	13.773.600.000,00	818.960.000,00	(12.954.640.000,00)	5,95

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

Sesuai dengan kebijakan umum belanja dan dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan tahun 2014, rincian realisasi Total Belanja Tidak Langsung dan Total Belanja Langsung sebagaimana dalam tabel menurut urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

**Tabel**

**Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014**

Kode	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
<b>URUSAN WAJIB</b>					
<b>01</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>1.053.543.954.164,14</b>	<b>910.088.512.824,00</b>	<b>(143.455.441.340,14)</b>	<b>86,38</b>
0101	Dinas Pendidikan	1.053.543.954.164,14	910.088.512.824,00	(143.455.441.340,14)	86,38
<b>02</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>126.941.516.610,00</b>	<b>123.374.001.803,00</b>	<b>(3.567.514.807,00)</b>	<b>97,19</b>
0101	Dinas Kesehatan	84.901.976.610,00	82.935.103.866,00	(1.966.872.744,00)	97,68
0202	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	42.039.540.000,00	40.438.897.937,00	(1.600.642.063,00)	96,19
<b>03</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>	<b>22.230.184.300,00</b>	<b>17.790.015.504,00</b>	<b>(4.440.168.796,00)</b>	<b>80,03</b>
0101	Dinas PU Bina Marga	4.667.350.000,00	3.936.125.447,00	(731.224.553,00)	84,33
0201	Dinas PU Pengairan	12.777.540.000,00	9.878.433.622,00	(2.899.106.378,00)	77,31
0301	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	4.785.294.300,00	3.975.456.435,00	(809.837.865,00)	83,08
<b>06</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	<b>4.489.760.000,00</b>	<b>4.119.040.959,00</b>	<b>(370.719.041,00)</b>	<b>91,74</b>
0101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.489.760.000,00	4.119.040.959,00	(370.719.041,00)	91,74
<b>07</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>9.538.771.675,00</b>	<b>8.681.058.802,00</b>	<b>(857.712.873,00)</b>	<b>91,01</b>
0101	Dinas Perhubungan	9.538.771.675,00	8.681.058.802,00	(857.712.873,00)	91,01
<b>08</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>21.950.327.000,00</b>	<b>19.432.653.092,00</b>	<b>(2.517.673.908,00)</b>	<b>88,53</b>
0101	Badan Lingkungan Hidup	3.295.160.000,00	2.865.780.793,00	(429.379.207,00)	86,97



0201	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	18.655.167.000,00	16.566.872.299,00	(2.088.294.701,00)	88,81
<b>10</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>3.536.540.000,00</b>	<b>3.219.971.350,00</b>	<b>(316.568.650,00)</b>	<b>91,05</b>
0101	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.536.540.000,00	3.219.971.350,00	(316.568.650,00)	91,05
<b>13</b>	<b>Sosial</b>	<b>6.872.920.000,00</b>	<b>6.267.264.315,00</b>	<b>(605.655.685,00)</b>	<b>91,19</b>
0101	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	6.872.920.000,00	6.267.264.315,00	(605.655.685,00)	91,19
<b>15</b>	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>	<b>5.081.480.000,00</b>	<b>4.561.214.510,00</b>	<b>(520.265.490,00)</b>	<b>89,76</b>
0101	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	5.081.480.000,00	4.561.214.510,00	(520.265.490,00)	89,76
<b>16</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>5.889.940.000,00</b>	<b>5.307.106.394,00</b>	<b>(582.833.606,00)</b>	<b>90,10</b>
0101	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	5.889.940.000,00	5.307.106.394,00	(582.833.606,00)	90,10
<b>18</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>5.179.700.500,00</b>	<b>4.642.708.745,00</b>	<b>(536.991.755,00)</b>	<b>89,63</b>
0101	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	5.179.700.500,00	4.642.708.745,00	(536.991.755,00)	89,63
<b>19</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>	<b>11.539.800.000,00</b>	<b>10.757.415.500,00</b>	<b>(782.384.500,00)</b>	<b>93,22</b>
0101	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.239.040.000,00	3.009.667.016,00	(229.372.984,00)	92,92
0301	Satuan Polisi Pamong Praja	8.300.760.000,00	7.747.748.484,00	(553.011.516,00)	93,34
<b>20</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandi</b>	<b>455.460.611.966,00</b>	<b>413.035.154.147,00</b>	<b>(42.425.457.819,00)</b>	<b>90,69</b>
0101	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.892.833.100,00	12.082.032.974,00	(810.800.126,00)	93,71
0201	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.428.950.000,00	1.393.385.464,00	(35.564.536,00)	97,51
0301	Sekretariat Daerah	16.911.840.000,00	15.199.663.246,00	(1.712.176.754,00)	89,88
0401	Sekretariat DPRD	4.341.620.000,00	3.795.995.633,00	(545.624.367,00)	87,43
0501	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	53.248.914.892,00	42.338.892.362,00	(10.910.022.530,00)	79,51
0502	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKD)	292.810.588.194,00	272.009.380.076,00	(20.801.208.118,00)	92,90
0601	Badan Kepegawaian Daerah	4.382.700.000,00	3.745.544.679,00	(637.155.321,00)	85,46
0701	Inspektorat Kabupaten	4.294.240.000,00	3.947.590.302,00	(346.649.698,00)	91,93



0801	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.420.307.000,00	5.023.307.586,00	(396.999.414,00)	92,68
0901	Kecamatan Sidoarjo	9.147.550.000,00	8.744.760.862,00	(402.789.138,00)	95,60
1001	Kecamatan Candi	3.320.095.000,00	2.987.405.057,00	(332.689.943,00)	89,98
1101	Kecamatan Buduran	2.495.260.000,00	2.198.154.461,00	(297.105.539,00)	88,09
1201	Kecamatan Wonoayu	3.072.312.500,00	2.780.024.901,00	(292.287.599,00)	90,49
1301	Kecamatan Krian	3.791.366.680,00	3.281.786.616,00	(509.580.064,00)	86,56
1401	Kecamatan Porong	4.026.977.500,00	3.624.614.079,00	(402.363.421,00)	90,01
1501	Kecamatan Krembung	2.427.780.000,00	2.145.053.452,00	(282.726.548,00)	88,35
1601	Kecamatan Jabon	2.051.240.000,00	1.716.373.753,00	(334.866.247,00)	83,67
1701	Kecamatan Balongbendo	2.362.760.000,00	2.182.477.824,00	(180.282.176,00)	92,37
1801	Kecamatan Tarik	2.431.007.500,00	1.982.088.485,00	(448.919.015,00)	81,53
1901	Kecamatan Taman	5.864.810.000,00	5.346.275.947,00	(518.534.053,00)	91,16
2001	Kecamatan Waru	2.499.380.000,00	2.223.605.574,00	(275.774.426,00)	88,97
2101	Kecamatan Gedangan	2.281.000.000,00	2.139.327.845,00	(141.672.155,00)	93,79
2201	Kecamatan Sedati	2.566.890.000,00	2.201.248.692,00	(365.641.308,00)	85,76
2301	Kecamatan Tanggulangin	2.299.520.000,00	2.140.949.685,00	(158.570.315,00)	93,10
2401	Kecamatan Tulangan	3.003.330.000,00	2.696.705.839,00	(306.624.161,00)	89,79
2501	Kecamatan Prambon	2.868.434.600,00	2.506.174.128,00	(362.260.472,00)	87,37
2601	Kecamatan Sukodono	2.398.260.000,00	2.073.410.078,00	(324.849.922,00)	86,45
2701	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	820.645.000,00	528.924.547,00	(291.720.453,00)	64,45
<b>21</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>	<b>9.336.160.000,00</b>	<b>8.605.848.023,00</b>	<b>(730.311.977,00)</b>	<b>92,18</b>
0101	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	9.336.160.000,00	8.605.848.023,00	(730.311.977,00)	92,18
<b>22</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>12.722.100.000,00</b>	<b>11.677.336.833,00</b>	<b>(1.044.763.167,00)</b>	<b>91,79</b>
0101	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	12.722.100.000,00	11.677.336.833,00	(1.044.763.167,00)	91,79
<b>26</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>2.108.720.000,00</b>	<b>1.818.201.405,00</b>	<b>(290.518.595,00)</b>	<b>86,22</b>
0101	Kantor Perpustakaan dan Arsip	2.108.720.000,00	1.818.201.405,00	(290.518.595,00)	86,22



URUSAN PILIHAN					
<b>01</b>	<b>Pertanian</b>	<b>7.843.741.250,00</b>	<b>6.858.166.985,00</b>	<b>(985.574.265,00)</b>	<b>87,43</b>
0101	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	7.843.741.250,00	6.858.166.985,00	(985.574.265,00)	87,43
<b>05</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>3.434.510.000,00</b>	<b>3.087.855.928,00</b>	<b>(346.654.072,00)</b>	<b>89,91</b>
0101	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.434.510.000,00	3.087.855.928,00	(346.654.072,00)	89,91
<b>06</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>14.135.260.000,00</b>	<b>12.904.205.971,00</b>	<b>(1.231.054.029,00)</b>	<b>91,29</b>
0201	Dinas Pasar	14.135.260.000,00	12.904.205.971,00	(1.231.054.029,00)	91,29
	<b>J u m l a h</b>	<b>25.413.511.250,00</b>	<b>22.850.228.884,00</b>	<b>(2.563.282.366,00)</b>	<b>89,91</b>

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

**Tabel**

**Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014**

Kode	Urusan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
<b>URUSAN WAJIB</b>					
<b>01</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>233.405.759.174,54</b>	<b>97.068.056.481,00</b>	<b>(136.337.702.693,54)</b>	<b>41,59</b>
0101	Dinas Pendidikan	233.405.759.174,54	97.068.056.481,00	(136.337.702.693,54)	41,59
<b>02</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>428.396.668.406,66</b>	<b>379.790.519.972,67</b>	<b>(48.606.148.433,99)</b>	<b>88,65</b>
0101	Dinas Kesehatan	156.712.083.120,00	114.381.224.256,00	(42.330.858.864,00)	72,99
0202	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	271.684.585.286,66	265.409.295.716,67	(6.275.289.569,99)	97,69
<b>03</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>	<b>516.336.335.824,00</b>	<b>428.229.564.310,34</b>	<b>(88.106.771.513,66)</b>	<b>82,94</b>
0101	Dinas PU Bina Marga	222.379.407.987,00	187.662.823.832,34	(34.716.584.154,66)	84,39
0201	Dinas PU Pengairan	103.424.873.982,00	97.060.944.510,00	(6.363.929.472,00)	93,85
0301	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	190.532.053.855,00	143.505.795.968,00	(47.026.257.887,00)	75,32
<b>06</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	<b>16.382.702.800,00</b>	<b>14.735.355.095,00</b>	<b>(1.647.347.705,00)</b>	<b>89,94</b>
0101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.382.702.800,00	14.735.355.095,00	(1.647.347.705,00)	89,94
<b>07</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>20.664.551.000,00</b>	<b>19.314.464.214,00</b>	<b>(1.350.086.786,00)</b>	<b>93,47</b>
0101	Dinas Perhubungan	20.664.551.000,00	19.314.464.214,00	(1.350.086.786,00)	93,47



<b>08</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>155.884.891.350,00</b>	<b>141.094.582.745,00</b>	<b>(14.790.308.605,00)</b>	<b>90,51</b>
0101	Badan Lingkungan Hidup	5.246.516.000,00	4.269.436.451,00	(977.079.549,00)	81,38
0201	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	150.638.375.350,00	136.825.146.294,00	(13.813.229.056,00)	90,83
<b>10</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>4.735.955.000,00</b>	<b>4.419.762.100,00</b>	<b>(316.192.900,00)</b>	<b>93,32</b>
0101	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.735.955.000,00	4.419.762.100,00	(316.192.900,00)	93,32
<b>13</b>	<b>Sosial</b>	<b>19.250.824.983,00</b>	<b>13.444.716.737,00</b>	<b>(5.806.108.246,00)</b>	<b>69,84</b>
0101	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	19.250.824.983,00	13.444.716.737,00	(5.806.108.246,00)	69,84
<b>15</b>	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>	<b>18.201.652.200,00</b>	<b>16.261.170.661,00</b>	<b>(1.940.481.539,00)</b>	<b>89,34</b>
0101	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	18.201.652.200,00	16.261.170.661,00	(1.940.481.539,00)	89,34
<b>16</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>4.255.918.500,00</b>	<b>3.923.840.994,00</b>	<b>(332.077.506,00)</b>	<b>92,20</b>
0101	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	4.255.918.500,00	3.923.840.994,00	(332.077.506,00)	92,20
<b>18</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>9.282.579.000,00</b>	<b>8.634.880.199,00</b>	<b>(647.698.801,00)</b>	<b>93,02</b>
0101	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	9.282.579.000,00	8.634.880.199,00	(647.698.801,00)	93,02
<b>19</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>	<b>26.291.712.925,00</b>	<b>21.955.213.742,00</b>	<b>(4.336.499.183,00)</b>	<b>83,51</b>
0101	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.241.727.000,00	3.793.190.551,00	(448.536.449,00)	89,43
0301	Satuan Polisi Pamong Praja	22.049.985.925,00	18.162.023.191,00	(3.887.962.734,00)	82,37
<b>20</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandi</b>	<b>182.955.956.741,00</b>	<b>147.424.758.774,00</b>	<b>(35.531.197.967,00)</b>	<b>80,58</b>
0101	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
0201	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
0301	Sekretariat Daerah	46.939.080.658,00	41.868.844.592,00	(5.070.236.066,00)	89,20
0401	Sekretariat DPRD	34.008.071.280,00	25.728.691.096,00	(8.279.380.184,00)	75,65



0501	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	40.178.208.393,00	23.632.292.890,00	(16.545.915.503,00)	58,82
0502	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKD)				
0601	Badan Kepegawaian Daerah	8.411.457.000,00	7.076.215.893,00	(1.335.241.107,00)	84,13
0701	Inspektorat Kabupaten	3.978.470.100,00	3.547.257.111,00	(431.212.989,00)	89,16
0801	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.135.990.122,00	8.325.027.197,00	(810.962.925,00)	91,12
0901	Kecamatan Sidoarjo	5.126.238.500,00	4.669.446.636,00	(456.791.864,00)	91,09
1001	Kecamatan Candi	1.991.341.200,00	1.931.972.695,00	(59.368.505,00)	97,02
1101	Kecamatan Buduran	1.893.302.550,00	1.813.325.533,00	(79.977.017,00)	95,78
1201	Kecamatan Wonoayu	1.668.895.700,00	1.628.120.315,00	(40.775.385,00)	97,56
1301	Kecamatan Krian	2.449.359.800,00	2.243.671.160,00	(205.688.640,00)	91,60
1401	Kecamatan Porong	2.496.793.900,00	1.782.404.016,00	(714.389.884,00)	71,39
1501	Kecamatan Krembung	1.396.537.000,00	1.335.222.585,00	(61.314.415,00)	95,61
1601	Kecamatan Jabon	1.579.928.550,00	1.471.760.945,00	(108.167.605,00)	93,15
1701	Kecamatan Balongbendo	2.011.739.500,00	1.961.721.416,00	(50.018.084,00)	97,51
1801	Kecamatan Tarik	1.818.552.800,00	1.769.664.209,00	(48.888.591,00)	97,31
1901	Kecamatan Taman	3.683.847.200,00	3.486.287.850,00	(197.559.350,00)	94,64
2001	Kecamatan Waru	2.057.906.988,00	1.897.243.272,00	(160.663.716,00)	92,19
2101	Kecamatan Gedangan	1.396.305.500,00	1.312.461.165,00	(83.844.335,00)	94,00
2201	Kecamatan Sedati	1.728.246.550,00	1.682.731.300,00	(45.515.250,00)	97,37
2301	Kecamatan Tanggulangin	1.602.340.300,00	1.445.419.741,00	(156.920.559,00)	90,21
2401	Kecamatan Tulangan	2.571.789.450,00	2.276.292.317,00	(295.497.133,00)	88,51
2501	Kecamatan Prambon	1.936.507.400,00	1.869.142.400,00	(67.365.000,00)	96,52
2601	Kecamatan Sukodono	1.605.824.300,00	1.518.289.246,00	(87.535.054,00)	94,55
2701	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	1.289.222.000,00	1.151.253.194,00	(137.968.806,00)	89,30
<b>21</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>	<b>4.820.765.500,00</b>	<b>4.566.642.810,00</b>	<b>(254.122.690,00)</b>	<b>94,73</b>
0101	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	4.820.765.500,00	4.566.642.810,00	(254.122.690,00)	94,73



<b>22</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>13.242.926.658,00</b>	<b>11.810.105.505,00</b>	<b>(1.432.821.153,00)</b>	<b>89,18</b>
0101	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	13.242.926.658,00	11.810.105.505,00	(1.432.821.153,00)	89,18
<b>26</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>3.423.810.600,00</b>	<b>3.270.193.307,00</b>	<b>(153.617.293,00)</b>	<b>95,51</b>
0101	Kantor Perpustakaan dan Arsip	3.423.810.600,00	3.270.193.307,00	(153.617.293,00)	95,51
<b>URUSAN PILIHAN</b>					
<b>01</b>	<b>Pertanian</b>	<b>29.003.059.660,00</b>	<b>23.104.371.279,00</b>	<b>(5.898.688.381,00)</b>	<b>79,66</b>
0101	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	29.003.059.660,00	23.104.371.279,00	(5.898.688.381,00)	79,66
<b>05</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>99.585.988.191,00</b>	<b>96.735.920.793,00</b>	<b>(2.850.067.398,00)</b>	<b>97,14</b>
0101	Dinas Kelautan dan Perikanan	99.585.988.191,00	96.735.920.793,00	(2.850.067.398,00)	97,14
<b>06</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>9.618.517.500,00</b>	<b>8.233.779.824,00</b>	<b>(1.384.737.676,00)</b>	<b>85,60</b>
0201	Dinas Pasar	9.618.517.500,00	8.233.779.824,00	(1.384.737.676,00)	85,60
	<b>Jumlah</b>	<b>1.795.740.576.013,20</b>	<b>1.444.017.899.543,01</b>	<b>(351.722.676.470,19)</b>	<b>80,41</b>

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

Dalam merealisasikan belanja daerah pada tahun anggaran 2014 ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk belanja pegawai dan belanja tidak langsung non belanja pegawai masih cukup besar; utamanya untuk belanja Bantuan Sosial dan Hibah karena kecukupan dan persyaratan penganggaran dan pencirannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya.
- Pengeluaran yang digunakan untuk belanja program sesuai dengan prioritas kebutuhan masih dirasa belum sepenuhnya memenuhi harapan;
- Capain Indikator kinerja yang dinyatakan dalam RKA – DPA tidak sepenuhnya berkorelasi dengan indikator sasaran pada RPJMD nya;
- Pemilihan/Penetapan Program/Kegiatan oleh SKPD belum sepenuhnya memperhatikan urusan pemerintahan secara tepat.



- e. Pengadaan tanah merupakan masalah yang cukup pelik untuk cepat diselesaikan sehingga berdampak pula pada aktivitas pembangunan gedungnya

Guna mengatasi permasalahan diatas maka upaya yang dilakukan adalah perlunya dilakukan tindak verifikasi terhadap RKT (Rencana Kinerja Tahunan) atau Renja SKPD sehingga pada saat digunakan sebagai dasar penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD sudah terjadi kesejajaran antara urusan yang dipilih, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerjanya, melakukan tindak efisiensi serta penghematan pengeluaran berbagai kegiatan namun dengan tetap memperhatikan bahwa program kegiatan yang sifatnya berkelanjutan tidak terganggu, sedangkan untuk pengadaan tanah dilakukan koordinasi secara intens dengan instansi dan lembaga terkait serta pendekatan secara kondusif kepada masyarakat yang lahannya akan dibebaskan

<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>
-----------	--------------------------

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Struktur pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Total anggaran pembiayaan *Netto* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sebesar Rp. 449.041.240.761,34. Nilai sejumlah itu akan digunakan untuk menutupi rencana *defisit* / anggaran defisit tahun berjalan sebesar Rp. (449.041.240.761,34), namun demikian realisasinya adalah surplus sebesar Rp. 266.971.600.840,15, sehingga menambah Silpa berjalan pada akhir tahun.

Realisasi atas Pembiayaan *Netto* yang semula dianggarkan sebesar Rp. 449.041.240.761,34 realisasinya turun menjadi sebesar Rp. 447.780.358.404,063 atas surplus (defisit) yang semula dianggarkan sebagai defisit sebesar Rp . (449.041.240.761,34).



Struktur Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(449.041.240.761,34)</b>	<b>266.971.600.840,15</b>	<b>716.012.841.601,49</b>	<b>(59,45)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>496.191.240.761,34</b>	<b>492.543.358.404,06</b>	<b>(3.647.882.357,28)</b>	<b>99,26</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	484.291.240.761,34	484.291.240.761,34	0,00	100,00
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	11.900.000.000,00	8.252.117.642,72	(3.647.882.357,28)	69,35
			0,00	
<b>Pengeluaran Pembiayaan daerah</b>	<b>47.150.000.000,00</b>	<b>44.763.000.000,00</b>	<b>(2.387.000.000,00)</b>	<b>94,94</b>
<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	<b>47.150.000.000,00</b>	<b>44.763.000.000,00</b>	<b>(2.387.000.000,00)</b>	<b>94,94</b>
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	35.250.000.000,00	35.250.000.000,00	0,00	100,00
Badan Usaha Swasta	11.900.000.000,00	9.513.000.000,00	(2.387.000.000,00)	79,94
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>449.041.240.761,34</b>	<b>447.780.358.404,06</b>	<b>(1.260.882.357,28)</b>	<b>99,72</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>714.751.959.244,21</b>	<b>714.751.959.244,21</b>	

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

Sisa anggaran lebih tahun 2014 yang berasal/bersumber dari **dana daerah dan DAU dapat digunakan secara bebas baik untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung**, namun demikian proses penganggarannya tetap harus memperhatikan adanya penanguhan kegiatan pada tahun 2014 dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku, sedangkan yang besarsal/bersumber dari dana selain dana daerah dan DAU harus didasarkan pada Petunjuk Teknisnya maupun ketentuan lain yang dipersamakan